



Walikota Pariaman

DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si



Wakil Walikota Pariaman

Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**(RPJMD)**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2008 - 2023**



**BAPPEDA KOTA PARIAMAN**  
**2021**

**KOTA PARIAMAN**



**SABIDUAK SADAYUANG**



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan, dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa terjadinya perubahan kebijakan nasional dan perkembangan kondisi saat ini di Kota Pariaman perlu di sesuaikan dengan kebijakan dan program yang diatur dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan nasional dan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

## WALIKOTA PARIAMAN

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;  
Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;  
Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah  
Bab V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  
Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;  
Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;  
Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
Bab IX : Penutup.

- (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

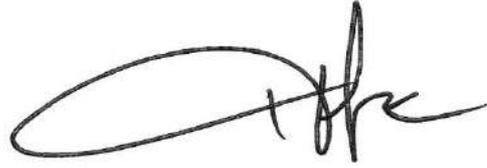
#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 7

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 – 2023

I. Umum

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Pariaman yang sedang dilaksanakan adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD) Tahap IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 tersebut berisikan lima Agenda untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut: Mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain setelah pemekaran, Menyiapkan landasan percepatan pembangunan Kota Pariaman dan pemerataan pembangunan, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah untuk mewujudkan potensi unggulan daerah, Pemantapan Kota Pariaman untuk menuju

*”Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani”*

Terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memuat lima arahan Presiden yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap struktur keuangan daerah dan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan. Terkait kondisi pandemi yang terjadi secara nasional mempengaruhi sektor-sektor ekonomi dan sosial yang berpengaruh kepada capaian indikator pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf b yang berbunyi rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c yang berbunyi perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan Pasal 342 ayat (3), yang berbunyi perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik perubahan kebijakan nasional. Maka Peraturan Daerah Kota Pariaman

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman perlu dilakukan perubahan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 241



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
Nomor : 7 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021

Tentang :

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**  
**(RPJMD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023**

**BAPPEDA KOTA PARIAMAN**  
**2021**



## DAFTAR ISI

<b>Daftar isi</b>	.....	i
<b>Daftar Tabel</b>	.....	iii
<b>Daftar Gambar</b>	.....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1 Latar Belakang.....	2
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
	1.3 Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain.....	9
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	12
	1.5 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	15
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	16
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	35
	2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	57
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	124
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	133
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Tahun 2016-2020.....	144
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	164
	3.3 Kerangka Pendanaan.....	172
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-STRATEGIS</b> .....	187
	4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	188
	4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	236
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	286
	5.1 Visi Pembangunan Daerah.....	287
	5.2 Misi Pembangunan Daerah.....	289





5.3	Tujuan dan Sasaran.....	293
5.4	Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja...	298
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>310</b>
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran .....	311
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	328
6.3	Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan.....	348
6.4	Strategi Dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial.....	357
6.5	Prioritas Pembangunan Daerah .....	358
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>377</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>433</b>
8.1	Indikator Kinerja Utama .....	434
8.2	Indikator Kinerja Daerah .....	439
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>483</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman.....	16
Tabel 2.2	Kondisi Topografi Kota Pariaman.....	18
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman.....	19
Tabel 2.4	Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan.....	20
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2020.....	21
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2010 – 2020.....	27
Tabel 2.7	Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2020.....	28
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk berdasarkan Desa Tahun 2016-2019.....	28
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2020.....	31
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk berdasarkan Luas Lahan Efektif Per Desa.....	32
Tabel 2.11	Penduduk Menurut 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020.....	34
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	36
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	38
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah).....	39
Tabel 2.15	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	40
Tabel 2.16	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	41
Tabel 2.17	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah).....	44
Tabel 2.18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 (Jutaan Rupiah).....	44
Tabel 2.19	Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	45
Tabel 2.20	Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	47
Tabel 2.21	Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	50
Tabel 2.22	Peringkat Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	52
Tabel 2.23	Peringkat Angka Usia Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020..	54
Tabel 2.24	Indikator Urusan Ketenagakerjaan.....	55
Tabel 2.25	Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020.....	56



Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2016-2020...	56
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	58
Tabel 2.28	Data Kondisi PAUD Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	59
Tabel 2.29	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	59
Tabel 2.30	Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	60
Tabel 2.31	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	62
Tabel 2.32	Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017...	62
Tabel 2.33	Angka Putus Sekolah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	63
Tabel 2.34	Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	64
Tabel 2.35	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019 – 2020.....	64
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016 2020.....	66
Tabel 2.37	Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	67
Tabel 2.38	Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	68
Tabel 2.39	Rasio Posyandu dan Balita Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	68
Tabel 2.40	Rasio Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Pariaman Tahun 2020.....	69
Tabel 2.41	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	71
Tabel 2.42	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	72
Tabel 2.43	Angka Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.44	Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.45	Pravelensi Kasus Stunting Balita di Kota Pariaman Tahun 2020.....	74
Tabel 2.46	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....	77
Tabel 2.47	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pariaman Tahun 2016– 2020.....	78
Tabel 2.48	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	79
Tabel 2.49	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Pariaman Tahun 2016– 2020.....	79
Tabel 2.50	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	80
Tabel 2.51	Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020	81
Tabel 2.52	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2016- 2020.....	81
Tabel 2.53	Persentase RT Yang Memenuhi Syarat.....	82
Tabel 2.54	Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat.....	83
Tabel 2.55	Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Pariaman Tahun 2030.....	85
Tabel 2.56	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	85



Tabel 2.57	Kawasan Pemukiman Kumuh Per kecamatan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	86
Tabel 2.58	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	87
Tabel 2.59	Angka kriminalitas di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	88
Tabel 2.60	Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	89
Tabel 2.61	Data Bencana di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	89
Tabel 2.62	Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	90
Tabel 2.63	Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	90
Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	91
Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Urusan Pangan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	92
Tabel 2.66	Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	93
Tabel 2.67	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	94
Tabel 2.68	Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2020.....	95
Tabel 2.69	Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Pariaman Tahun 2020.....	96
Tabel 2.70	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020.....	97
Tabel 2.71	Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020.....	97
Tabel 2.72	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020 Kota Pariaman.....	98
Tabel 2.73	Data Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 Kota Pariaman.....	98
Tabel 2.74	Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	99
Tabel 2.75	Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	99
Tabel 2.76	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	100
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020.....	101
Tabel 2.78	Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Kota Pariaman Tahun 2020.....	101
Tabel 2.79	Jenis koneksi internet yang dimanfaatkan di seluruh Desa di Kota Pariaman Tahun 2020..	103
Tabel 2.80	Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	105
Tabel 2.81	Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Pariaman.....	106
Tabel 2.82	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Pariaman Tahun 2016 dan 2020(koperasi).....	106
Tabel 2.83	Perkembangan Indikator Urusan Urusan Penanaman Modal Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	107
Tabel 2.84	Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	108



Tabel 2.85	Perkembangan Indikator Urusan Statistik Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	109
Tabel 2.86	Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	110
Tabel 2.87	Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	110
Tabel 2.88	Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	111
Tabel 2.89	Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	112
Tabel 2.90	Nama Objek Wisata di Kota Pariaman Menurut Jenisnya dan Kecamatan Tahun 2020.....	113
Tabel 2.91	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020.....	114
Tabel 2.92	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020.....	115
Tabel 2.93	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020.....	116
Tabel 2.94	Perkembangan capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020.....	117
Tabel 2.95	Predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2016 – 2020...	117
Tabel 2.96	Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir.....	118
Tabel 2.97	Perkembangan Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	118
Tabel 2.98	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020....	119
Tabel 2.99	Perkembangan Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	120
Tabel 2.100	Perkembangan Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	121
Tabel 2.101	Jumlah Inovasi berdasarkan Inisiator.....	122
Tabel 2.102	Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah di Kota Pariaman tahun 2021.....	122
Tabel 2.103	Jumlah Auditor di Kota Pariaman Tahun 2018-2020.....	123
Tabel 2.104	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	124
Tabel 2.105	Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita Kota Pariaman Tahun 2015-2019 (Juta/Rupiah).....	126
Tabel 2.106	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	127
Tabel 2.107	Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	127
Tabel 2.108	Perkembangan Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	129
Tabel 2.109	Perkembangan Jumlah Restoran Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	130
Tabel 2.110	Perkembangan Jumlah Hotel Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	130
Tabel 2.111	Perkembangan Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih Kota Pariaman Tahun 2015-2019.....	131
Tabel 2.112	Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	131



Tabel 2.113	Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun 2016-2020.	132
Tabel 2.114	Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia.....	132
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	145
Tabel 3.2	Komposisi APBD Kota Pariaman Tahun 2016 s.d 2020.....	148
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kota Pariaman Tahun 2016 s.d 2020.....	149
Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 s.d 2020.....	149
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 s.d 2020 (Rp.).....	151
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 s.d Tahun 2020 Kota Pariaman.....	152
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Pariaman Tahun 2018 s.d 2020.....	153
Tabel 3.8	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kota Pariaman Tahun 2016 s.d 2020.....	154
Tabel 3.9	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	156
Tabel 3.10	Rasio Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	163
Tabel 3.11	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Pariaman Tahun 2016 - 2020.....	165
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016–2020.....	167
Tabel 3.13	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	168
Tabel 3.14	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016–2020.....	169
Tabel 3.15	Penutup Defisit Rill Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016–2020.....	171
Tabel 3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016– 2020.....	172
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 – 2023.....	178
Tabel 3.18	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021-2023.....	179
Tabel 3.19	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	183
Tabel 3.20	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023.....	184
Tabel 3.21	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019 – 2023.....	186
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota.....	189
Tabel 4.2	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2016-2020) .....	190
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan: Pembangunan Ekonomi Pemerintah Kota Pariaman masih	191



	perlu ditingkatkan.....	
Tabel 4.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	192
Tabel 4.5	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun) .....	193
Tabel 4.6	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun) .....	194
Tabel 4.7	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun) .....	195
Tabel 4.8	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rp/Org/Tahun) .....	196
Tabel 4.9	Rumusan Permasalahan: Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.....	196
Tabel 4.10	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	200
Tabel 4.11	Rumusan Permasalahan: Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.....	201
Tabel 4.12	Rumusan Permasalahan: Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian.....	205
Tabel 4.13	Rumusan Permasalahan: Masih belum optimalnya nilai investasi.....	206
Tabel 4.14	Rumusan Permasalahan: Produktivitas sektor pariwisata masih rendah.....	207
Tabel 4.15	Rumusan Permasalahan: Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.....	209
Tabel 4.16	Rumusan Permasalahan: Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	210
Tabel 4.17	Rumusan Permasalahan: Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah.....	211
Tabel 4.18	Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.....	215
Tabel 4.19	Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang kapabel.....	216
Tabel 4.20	Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.....	216
Tabel 4.21	Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman.....	242
Tabel 4.22	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar.....	243
Tabel 4.23	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori Urusan.....	243
Tabel 4.24	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori SPM.....	244
Tabel 4.25	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman menurut OPD.....	244
Tabel 4.26	Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	253



Tabel 4.27	Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik KLHS Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	269
Tabel 4.28	Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Pengkajian TPB.....	271
Tabel 5.1	Keselarasn Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	289
Tabel 5.2	Keselarasn Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026, RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023.....	291
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 1.....	293
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 2.....	294
Tabel 5.5	Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 3.....	295
Tabel 5.6	Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 4.....	296
Tabel 5.7	Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 5.....	297
Tabel 5.8	Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerjanya sebelum perubahan.....	299
Tabel 5.9	Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerjanya setelah perubahan.....	303
Tabel 6.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada masing Misi Setelah Perubahan.....	312
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	329
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Pariaman .....	331
Tabel 6.4	Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030.....	353
Tabel 6.5	Proporsi Luas RTH Kota Pariaman Tahun 2010-2030.....	354
Tabel 6.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Pariaman.....	362
Tabel 6.7	Hasil evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 Fokus terhadap Program Unggulan.....	366
Tabel 7.1	Perubahan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Pariaman.....	379
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023 Pemerintah Kota Pariaman....	435
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Pariaman.....	440



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	11
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Pariaman (Permendagri 86 Tahun 2017).....	12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Pariaman.....	17
Gambar 2.2	Peta Jumlah Penduduk Menurut Desa Pada Kota Pariaman Tahun 2020.....	30
Gambar 2.3	Kepadatan Penduduk berdasarkan Kepadatan Netto Per Kelurahan/Desa.....	34
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2020.....	35
Gambar 2.5	Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta).....	37
Gambar 2.6	Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta) .....	41
Gambar 2.7	Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB Kota Pariaman Tahun 2016-2020 (%).....	42
Gambar 2.8	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	43
Gambar 2.9	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	45
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	46
Gambar 2.11	Persandingan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	48
Gambar 2.12	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	49
Gambar 2.13	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	50
Gambar 2.14	Angka Rata-rata Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	52
Gambar 2.15	Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	54
Gambar 2.16	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	120
Gambar 3.1	Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.....	173
Gambar 3.2	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.....	174
Gambar 4.1	Mata Rantai Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah Kota Pariaman.....	203
Gambar 4.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	237
Gambar 4.3	TPB berdasarkan 4 Pilar.....	241





Gambar 4.4	Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025.....	246
Gambar 4.5	Nawacita kedua RPJMN 2020-2024.....	248
Gambar 4.6	5 Arahkan Utama Presiden.....	249
Gambar 4.7	Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025.....	260
Gambar 6.1	Konsep Struktur Ruang.....	355
Gambar 6.2	Agenda/Tema Pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023,.....	360





## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dokumen RPJMD ini memuat visi dan misi serta program unggulan kepala daerah terpilih menjwai seluruh muatan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah



sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pariaman dan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kota Pariaman memenuhi poin 3 pada Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar lainnya yang mempengaruhi sustansi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;



2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap Prioritas Nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia umumnya maupun Provinsi Sumatera Barat serta Kota Pariaman menunjukkan perkembangan masih meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Sumatera Barat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020.

Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada Tahun 2020 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pada Tahun 2021 ini *refocusing* dan realokasi anggaran digunakan untuk menyediakan dukungan pendanaan



untuk belanja kesehatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan atau direncanakan. Refocusing dan realokasi anggaran telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID- 19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022 , rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 menjadikan terjadinya penyesuaian prioritas pembangunan di dua tahun sisa perodesasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kota Pariaman akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU pemda), serta indikator IKK tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2021 ini.

Substansi RPJMD Kota Pariaman yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD, Pemerintah Daerah Kota Pariaman menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan



4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Penyusunan perubahan RPJMD Kota Pariaman dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Kota Pariaman menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030;
4. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kota Pariaman;
5. Pedoman penyusunan RPJMDes Desa se-Kota Pariaman;
6. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
7. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
8. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:



- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79)
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);



- 23) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
- 24) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
- 25) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 235);

### **1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN**

Keberadaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, secara skematis terlihat sebagai berikut :

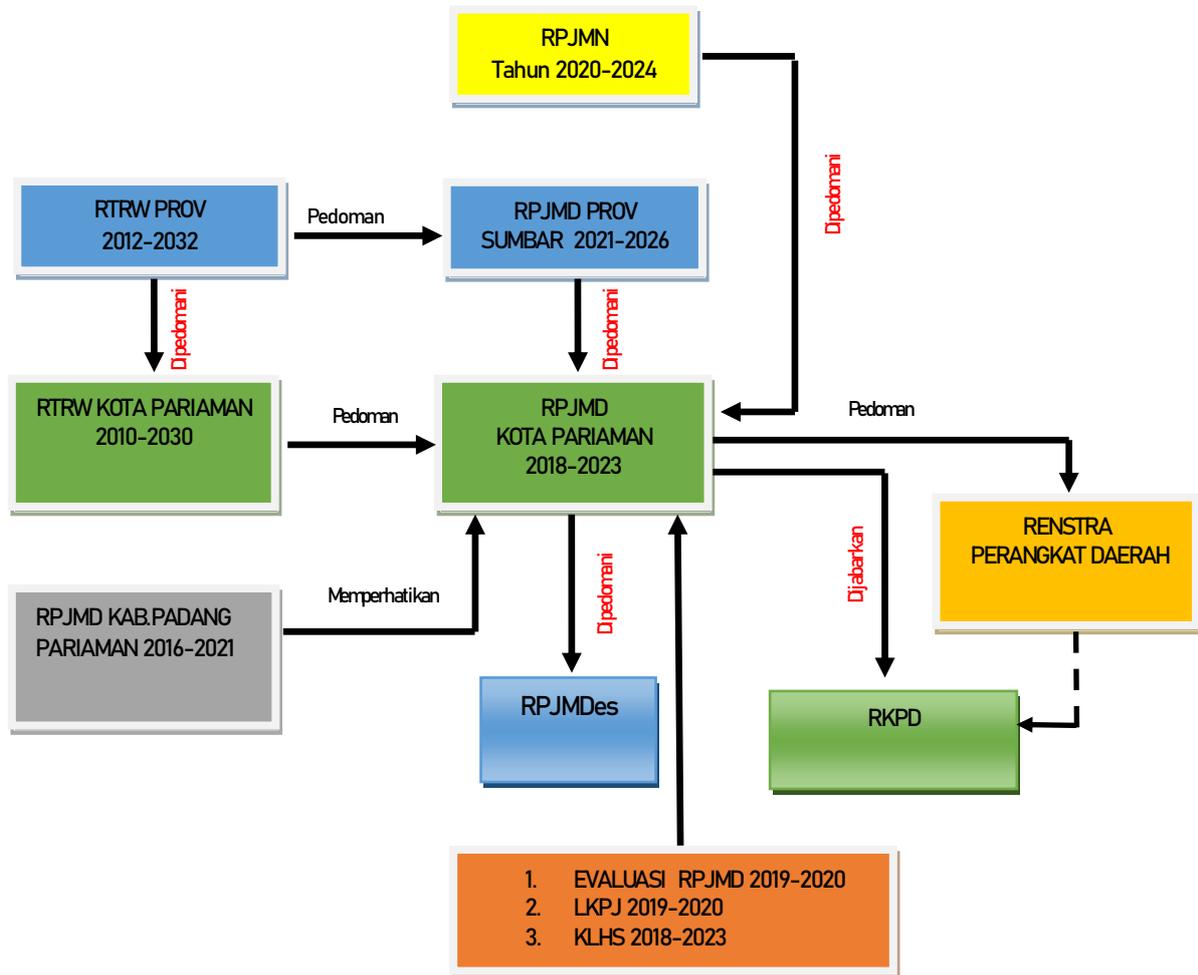
1. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 yang merupakan tahap keempat dalam pelaksanaannya dengan fokus pembangunan diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 3. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka pada RPJMD ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi;



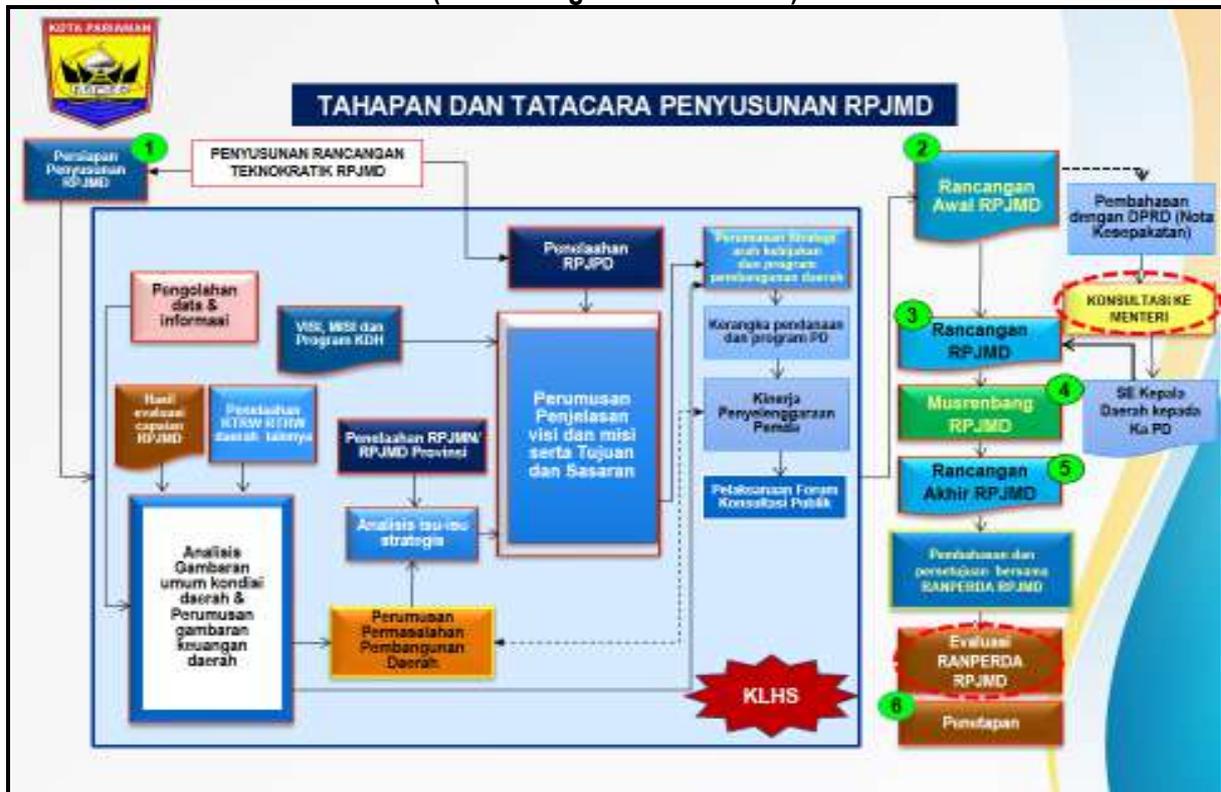
3. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 disinkronkan dengan RPJMN Nasional 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJMD Kab/Kota tetangga sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 159 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
4. RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman tahun 2010-2030 (Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012). Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Pariaman dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang;
5. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 telah memuat juga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Bahwa penyusunan KLHS RPJMD mempedomani Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dengan melakukan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Serta dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1); “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”, dan ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
6. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) selama kurun waktu lima tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Secara operasional RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Pariaman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.



Gambar 1.1  
Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



**Gambar 1.2**  
**Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Pariaman**  
**(Permendagri 86 Tahun 2017)**



#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018- 2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Pariaman 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang adaptif dan responsive terhadap perkembangan kasus Covid 19 dan dampaknya;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMDes Se Kota Pariaman; dan



4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika utama penulisan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:

##### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

##### **BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu.

##### **BAB III    Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

##### **BAB IV    Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Bab ini memuat permasalahan pokok pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah.

##### **BAB V     Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

##### **BAB VI    Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan program pembangunan daerah, kebijakan



pembangunan berdimensi kewilayahan, agenda dan prioritas pembangunan daerah.

## **BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kota Pariaman, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

## **BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

## **BAB IX Penutup**

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

**Lampiran 1** : Penyelarasan target indikator makro yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

**Lampiran 2** : Penyelarasan target program prioritas yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

---





## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



## BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada kota Pariaman.

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pariaman yang resmi terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002, dimana terletak dalam posisi geografis antara  $00^{\circ} 33' 00'' - 00^{\circ} 40' 43''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 04' 46'' - 100^{\circ} 10' 55''$  Bujur Timur. Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Kota Pariaman ini mempunyai luas wilayah darat keseluruhan 73,36 Km<sup>2</sup> dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak dengan panjang garis pantai 12 km. Kota Pariaman ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan dengan 71 kelurahan/desa. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kecamatan dengan Desa/Kelurahan di Kota Pariaman**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )
1	Pariaman Utara	Naras	-	17	23.35
2	Pariaman Tengah	Pariaman	16	6	15.68
3	Pariaman Selatan	Kurai taji	-	16	16.82
4	Pariaman Timur	Sei,Pasak	-	16	17.51
Kota Pariaman			16	55	73.36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

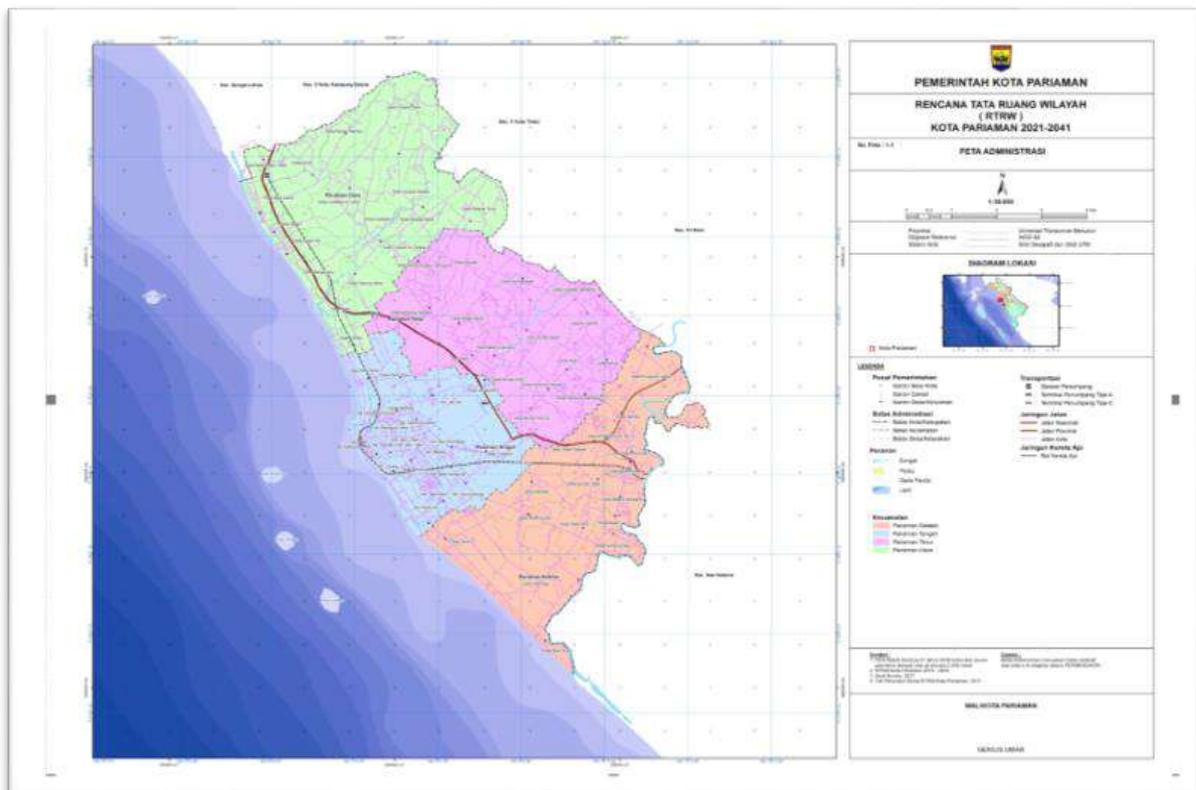
Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman)
- 3) Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman)
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia



Secara lokasi, wilayah Kota Pariaman diapit oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman yang akan datang. Untuk lebih jelasnya peta administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Pariaman**



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

### 2.1.1.2 Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km<sup>2</sup> dan luas lautan 282,69 km<sup>2</sup> dengan 4 buah pulau-pulau kecil : Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km. Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.2**  
**Kondisi Topografi Kota Pariaman**

Kondisi Topografi	Luas (ha)	Persentase (%)
Datar (0-3%)	6.203	95,53%
Agak Landai (3-8%)	23	0,35%
Landai (8-15%)	48	0,74%
Agak Curam (15-25%)	25	0,39%
Curam (25- 40%)	194	2,99%
Jumlah	6.493	100,0%

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

### 2.1.1.3 Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal).

Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Qal : Endapan Aluvial

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tiku, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.

2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal).

Tuf batu apung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batu apung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan pichstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953).

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanau, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasir dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat



pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung pasir terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan.

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Volkan Datar, yang tersebar di ketiga kecamatan Kota Pariaman.

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- 1) Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara.
- 2) Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian mengarah ke utara.
- 3) Satuan tanah Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah.
- 4) Satuan tanah Tropopsamments, Tropaquets dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.

**Tabel 2.3**  
**Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman**

Kondisi Topografi	Luas (ha)
Dystropepts, Paleudults, Tropaquepts	1.713
Tropaquepts, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluents	1.263
Tropaquepts, Tropohemists	1.481
Tropopsamments, Tropaquets, Sulfaquents	2.036
Total Luas	6.493

Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

#### 2.1.1.4 Hidrogeologi

Berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Padang maka terlihat ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah



dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Pariaman termasuk kepada DAS Anai, Mangau, Manggung, Naras dan Pariaman yang berhulu di bagian utara di Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2.1.1.5 Geomorfologi

Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai, Pada daerah sepanjang aliran sungai di bagian selatan terdapat dataran banjir pada sungai meander di bagian hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik.

#### 2.1.1.6 Klimatologi

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

**Tabel 2.4**  
**Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman**  
**Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Panjang Garis Pantai (Km)
Pariaman Selatan	0 – 10	3,30
Pariaman Tengah	0 – 10	4,30
Pariaman Timur	5 – 15	0,00
Pariaman Utara	0 – 10	4,40
<b>Kota Pariaman</b>	<b>0 - 15</b>	<b>12,00</b>

*Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030*

#### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan identifikasi citra satelit Geo-eye 01 tahun 2016 yang telah terkoreksi secara geometris dengan nilai uji akurasi 2,248 meter ditambah dengan survei lapangan pada tahun 2017 dihasilkan peta penggunaan lahan eksisting Kota Pariaman.



Berdasarkan informasi citra satelit dan survei lapangan dapat dipetakan kawasan pertanian, bentang alam pesisir, lahan tidak produktif dan berbagai pemanfaatan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perhotelan, sarana sosial, dan RTH.

**Tabel 2.5**  
**Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2020**

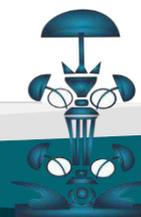
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Pemukiman	1.535	20,93%
2	Sawah	1.912	26,06%
3	Tegalan	25,2	0,34%
4	Kebun Campuran	2.691,87	36,70%
5	Perkebunan Rakyat	663,9	9,05%
6	Hutan	0	0,00%
7	Hutan Sejenis	9,2	0,13%
8	Semak/ Alangalang	89,50	1,22%
9	Kolam	0	0,00%
10	Lain-lain	408,9	5,57%
		<b>7.335,57</b>	<b>100%</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Revisi RTRWN menyebutkan bahwa Kawasan PALAPA sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) menggantikan Kota Padang Dengan pendekatan kewilayahan ini Kota Padang berfungsi sebagai kota inti dan Kota Pariaman serta Lubuk Alung sebagai kota satelit. Kawasan PALAPA dan penjabarannya lebih lanjut dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat menjadi kawasan metropolitan Painan-Solok-Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PASOPALAPA) sebagai kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat.

Dengan perubahan penetapan PKN ini maka konsekuensi pembangunan yaitu penyediaan sarana dan prasarana akan cenderung berskala regional (lintas daerah) perlu diprogramkan di wilayah PASOPALAPA dan arus pergerakan commuter antara Kota Padang dengan Kota Pariaman dengan kereta api maupun moda angkutan mobil penumpang akan semakin tinggi. Oleh karena itu Kota Pariaman perlu menyiapkan kawasan perdagangan dan wisata secara terpadu karena akan menjadi satu kesatuan wilayah pengembangan pesisir pantai yang terbentang dari Kota Pariaman – Kota Padang dan Kawasan Mandeh yang menjadi kawasan strategis wisata provinsi dan nasional.



Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 ayat 2, pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Semua kegiatan penataan ruang kota tersebut pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk :

- a. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah, antar kawasan dan antar sektor pembangunan.
- c. Menciptakan keterpaduan program-program pembangunan wilayah.
- d. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kota Pariaman.

#### A. Kawasan Strategis Kota Pariaman

Kawasan strategis wilayah kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kota;



- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota yang jelas;
- d. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota;
- e. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kota;
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota;
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

Kawasan strategis di Kota Pariaman terdiri dari:

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

#### 1) Kerawanan Gempa

Daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa bumi Indonesia. Berdasarkan asal usul kejadiannya gempa bumi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni gempa bumi yang berasal dari aktifitas tunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia yang berinteraksi dengan Lempeng Benua Asia di sebelah barat Sumatera dan gempa bumi yang berasal dari aktifitas gerak sesar aktif mendatar Sumatera. Jejak rekam gempa bumi merusak yang pernah terjadi akibat interaksi kedua lempeng tersebut di atas diantaranya adalah Gempa bumi Sumatera Barat (1822), Gempa bumi Siri Sori diikuti dengan tsunami (1904), Gempa Bumi Padang (1835, 1981 dan 1991). Gempa bumi tunjaman tersebut terjadi di dasar laut Samudera Hindia dengan kekuatan  $> 6,5$  SR dapat memicu terjadinya gelombang tsunami yang mengancam pantai barat Sumatera. Adapun gempa bumi sesar aktif Sumatera pernah terjadi 1926, 1943, 1977, 2004 dan 2007. Gempa bumi Padang-Pariaman yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,9 R dengan kedalaman 71 Km (BMG) merupakan gempa bumi aktifitas tunjaman pada bidang sentuh Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eropa-Asia (Eurasia) dan disebut sebagai gempa bumi Interface Plate Boundary Earthquake. Gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami disebabkan gempa bumi tersebut tidak mempunyai energi yang cukup untuk mematahkan permukaan dasar laut Samudera Hindia di sebelah barat Sumatera yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia.

Pergerakan blok Mentawai di sebelah barat wilayah Kota Pariaman yang diperkirakan masih belum stabil dan mungkin masih menyisakan energi yang belum terlepas memerlukan perhatian tersendiri sebagai pemicu terjadinya gempa di wilayah Kota Pariaman. Instabilitas blok ini telah dikaji oleh para peneliti dari LIPI dan BPPT dan diperkirakan masih aktif di masa mendatang.



Gempa bumi 30 September 2009 adalah gempa bumi tektonik yang terjadi akibat patahnya lempeng tektonik Hindia-Australia dengan mekanisme mendatar mengiri naik berarah barat daya-timur laut (Strike=  $70^\circ$  Dip=  $50^\circ$  Slip=  $132^\circ$ ) pada zona antara lempeng tektonik (Interface Plate Boundary Fault), Berdasarkan skala kerusakan bangunan Modified Mercally Intesity (MMI), intensitas maksimum Kota Padang mencapai VIII, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman intensitas maksimum mencapai VII dan ke arah perbukitan Barisan turun hingga intensitas V – VI. Berdasarkan perhitungan percepatan gempa untuk periode ulang 100 tahun, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman berkisar antara 0,25 g - 0,5 g.

Kerusakan bangunan umumnya disebabkan oleh struktur bangunannya belum dirancang sesuai tingkat kerawanan gempa di Sumatera Barat, disamping itu akibat timbulnya bahaya likuifaksi telah menyebabkan nilai daya dukung tanah menurun sehingga terjadi keruntuhan pondasi. Berdasarkan tingkat kerusakan ini maka Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan pada intensitas V sampai VIII skala MMI.

## 2) Gerakan Tanah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah ditentukan berdasarkan faktor penyebab kejadian, yakni: geologi, morfologi, curah hujan, tata guna lahan dan kegempaan. Geologi meliputi kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan, tanah pelapukan, dan kedudukan batuan serta struktur geologi; morfologi meliputi kemiringan lereng medan; curah hujan meliputi intensitas dan lama hujan; tata lahan meliputi pengolahan lahan dan vegetasi penutup; dan kegempaan meliputi intensitas gempa. Berdasarkan faktor tersebut, daerah penyelidikan dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu :

### a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang atau tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tebing sungai sepanjang alurnya.

Merupakan daerah datar, kemiringan lereng 0 - 5 % dan lereng tidak dibentuk oleh endapan gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat mengembang. Vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan perkebunan.

### b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai. Kemiringan lereng mulai dari landai (5 – 15%) sampai sangat terjal (50 – 70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah



pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama akibat curah hujan yang tinggi. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15 - 30%) sampai curam (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai material pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15-30 %) sampai curam (>70 %), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan. Kejadian gempa pada hari Kamis 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB berkekuatan 7,9 SR yang berpusat di pantai barat Sumatera Barat telah memicu terjadinya bencana gerakan tanah. Gerakan tanah umumnya terjadi pada daerah yang tersusun oleh batuan yang kurang kompak dan tanah pelapukan yang kurang padat, yaitu antara lain pada daerah yang tersusun oleh satuan Tuf Batu Apung Hornblenda Hipersten (Qhpt) dan Tuf Batu Apung dan Andesit atau Basal (Qpt). Selain itu, gerakan tanah juga terjadi pada tebing jalan dan lokasi-lokasi pemotongan lereng yang berkemiringan lereng curam. Gerakan tanah yang memiliki dimensi cukup besar yang mengakibatkan banyak korban meninggal, antara lain terdapat di: Desa Tandikat, Jorong Pulau Air, Jorong Lubuk Laweh, Jorong Gunungtigo dan Paraman Cumanak. Gerakan tanah juga terjadi pada pada tebing jalur jalan Sicincin - Pariaman (Jorong Air Marange, Desa Sicicin) dan jalur jalan mulai dari Kudu - Cumanak. Umumnya lokasi bencana merupakan daerah labil dan berkemiringan lereng terjal dengan potensi gerakan tanah tinggi, artinya daerah ini mudah terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, baik akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat maupun gempa bumi. Menurut informasi penduduk pada saat terjadi



gerakan tanah, sebelumnya telah turun hujan dengan intensitas kecil. Jenis gerakan tanah umumnya berupa longsor bahan rombakan (debris slide).

### 3) Banjir

Erosi sungai dan air permukaan dapat terjadi karena pengikisan tebing sungai oleh arus air sungai atau air permukaan, sedangkan aliran banjir bandang terjadi setelah atau selama hujan akibat akumulasi dan pembendungan alur oleh endapan lahar atau material gerakan tanah pada alur sungai di bagian hulu dan dipicu oleh erosi yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Erosi ini dapat terjadi pada longsor serta terbukanya tanaman penutup terutama pada tanah/batuan pasir yang bersifat lepas. Berdasarkan kerawanan terhadap kebencanaan, maka dapat diperoleh wilayah rawan bencana di Kota Pariaman. Diketahui luas wilayah yang rawan bencana tinggi sebesar 31,84 km<sup>2</sup> (43,4% dari luas wilayah).

### 4) Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kawasan rawan tsunami menggambarkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk terlanda tsunami. Tingkat kemudahan ini didasarkan pada besarnya intensitas gempa dengan energi yang cukup untuk dapat mematahkan permukaan dasar laut, serta bentuk morfologi pantai. Daerah penyelidikan terdiri dari 3 (tiga) kawasan rawan tsunami yakni; kawasan rawan tsunami tinggi, kawasan rawan tsunami menengah dan kawasan rawan tsunami rendah.

Kawasan rawan bencana tsunami tinggi memiliki resiko kerusakan dan kehancuran aset paling besar apabila terlanda tsunami. Kawasan ini adalah pantai landai berpasir dengan morfologi landai. sebagian berawa bakau dan nipah. Bentuk garis pantai sebagian besar lurus dan sebagian kecil berteluk. Kawasan rawan tsunami tinggi meliputi sepanjang pesisir pantai dengan nilai elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut.

Kawasan rawan bencana tsunami menengah memiliki potensi tsunami dengan kerusakan aset relatif lebih kecil dibandingkan dengan kawasan rawan tinggi. Kawasan rawan bencana tsunami menengah meliputi garis ketinggian elevasi di atas 5 hingga 7 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 2 meter di atas permukaan tanah.

Kawasan rawan bencana tsunami rendah memiliki potensi landaan dan kerusakan paling kecil dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan rawan bencana tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian elevasi hingga 9 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 1 meter di atas permukaan tanah. Kawasan ini meliputi wilayah pesisir dengan morfologi curam dan berbukit.



## 5) Likuifaksi

Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus ( $0,075 > 0,50$  mm), relatif seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat guncangan hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol (Kawamura, M., 1989). Berdasarkan data geologi teknik dan analisis citra satelit di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, lapisan pasir halus yang berpotensi terjadi likuifaksi adalah pada Satuan Pasir yang terbentuk dari endapan pantai, pematang pantai, tematang sungai dan gosong-gosong sungai. Analisis zona potensi likuifaksi ini terbatas hingga kedalaman 6,00 m, karena keterbatasan peralatan. Sehingga hasil analisis yang menggunakan Metoda "Simplified Procedure" (Seed dan Izzard Idris, 1971), lapisan pasir halus (Satuan Pasir) yang berpotensi terjadi likuifaksi berkisar pada kedalaman  $>1,00 - 6,00$  m.

## 6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Umumnya Pantai Pariaman berpotensi mendapatkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana yang terlihat pada profil kawasan pesisir pada sabuk yang berwarna merah, namun abrasi ini dapat dikurangi dengan penanaman mangrove. Untuk lebih jelasnya potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

### 2.1.4 Aspek Demografi

#### 2.1.4.1 Jumlah Penduduk Kota Pariaman per Kecamatan

Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan memiliki jumlah penduduk saat ini (Tahun 2020) 94.224 jiwa. Pada tahun 2010 Kota Pariaman memiliki jumlah penduduk 79.043. Dengan demikian berdasarkan hasil sensus tersebut pertumbuhan penduduk Kota Pariaman sebesar 1,8% per tahun. Distribusi dan pertumbuhan penduduk per kecamatan berdasarkan sensus 2010-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman**  
**Tahun 2010 – 2020**

No.	Kecamatan	Tahun		Laju pert./tahun
		2010	2020	
1.	Pariaman Selatan	16.161	20.006	2,44%
2.	Pariaman Tengah	29.180	31.930	1,40%
3.	Pariaman Utara	19.344	22.591	1,22%
4.	Pariaman Timur	14.968	19.697	8,09%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari tahun 2010 - 2020 terus meningkat, dan terjadi penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

**Tabel 2.7**  
**Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1	Pariaman Selatan	20.006	0,21
2	Pariaman Tengah	31.930	0,34
3	Pariaman Utara	22.591	0,24
4	Pariaman Timur	19.697	0,21
Penduduk kota		<b>94.224</b>	<b>100</b>

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Desa Tahun 2016-2019**

No.	Kecamatan	Desa	Tahun				Laju Pert.
			2016	2017	2018	2019	
1.	Pariaman Selatan	Pasir Sunur	298	308	317	319	2,30%
		Marunggi	3.072	3.122	3.183	3.245	1,84%
		Kampung Apar	738	753	768	782	1,95%
		Sikabu	350	359	369	371	1,96%
		Palak Aneh	1.122	1.144	1.167	1.188	1,92%
		Padang Cakur	416	425	438	440	1,89%
		Taluk	3.128	3.188	3.245	3.308	1,88%
		Marabau	865	882	900	916	1,93%
		Sungai Kasai	465	475	486	492	1,90%
		Batang Tajongkek	813	828	845	860	1,89%
		Balai Kurai Taji	1.390	1.416	1.443	1.470	1,88%
		Pauh Kurai Taji	812	827	844	859	1,89%
		Simpang	836	851	868	885	1,92%
		Toboh Palabah	1.092	1.113	1.135	1.155	1,89%
		Rambai	1.101	1.122	1.144	1.165	1,90%
Punggung Lading	1.764	1.797	1.826	1.866	1,89%		
2.	Pariaman Tengah	Karan Aur	2.316	2.328	2.344	2.354	0,54%
		Jalan Baru	1.530	1.540	1.549	1.556	0,56%
		Ujung Batung	703	708	713	718	0,71%
		Jalan Kereta Api	786	790	795	800	0,59%
		Cimparuh	2.466	2.480	2.495	2.500	0,46%
		Alai Gelombang	1.143	1.149	1.156	1.162	0,55%
		Taratak	1.179	1.185	1.193	1.199	0,56%
		Kampung Baru	3.493	3.512	3.536	3.547	0,51%
		Lohong	1.187	1.194	1.202	1.208	0,59%
		Pasir	1.218	1.225	1.233	1.238	0,54%
		Kampung Perak	809	815	819	824	0,61%
		Pondok II	1.133	1.139	1.146	1.152	0,56%
		Jawi-Jawi I	877	882	888	893	0,60%



No.	Kecamatan	Desa	Tahun				Laju Pert.
			2016	2017	2018	2019	
		Jawi-Jawi II	1.372	1.379	1.388	1.395	0,56%
		Kampung Jawa II	1.085	1.091	1.098	1.104	0,58%
		Kampung Jawa I	1.174	1.181	1.187	1.193	0,54%
		Kampung Pondok	1.586	1.595	1.605	1.613	0,56%
		Pauh Barat	1.916	1.925	1.939	1.947	0,54%
		Pauh Timur	1.446	2.454	1.464	1.471	0,57%
		Rawang	1.308	1.316	1.324	1.331	0,58%
		Jati Hilir	1.031	1.037	1.043	1.050	0,61%
		Jati Mudik	699	703	707	714	0,71%
3.	Pariaman Utara	Ampalu	1.772	1.799	1.829	1.855	1,54%
		Tanjung Sabar	599	608	619	630	1,70%
		Apar	999	1.015	1.031	1.047	1,58%
		Manggung	1.726	1.753	1.782	1.809	1,58%
		Cubadak Air	1.030	1.047	1.064	1.080	1,59%
		Naras Hilir	1.406	1.428	884	1.472	1,54%
		Naras I	2.347	2.384	2.424	2.457	1,54%
		Balai Naras	2.084	2.117	2.153	2.184	1,57%
		Padang Birik-Birik	950	965	1.294	995	1,55%
		Sintuk	753	765	777	789	1,57%
		Sungai Rumbai	970	986	1.002	1.018	1,62%
		Cubadak Air Selatan	855	869	1.451	898	1,65%
		Sikapak Barat	1.500	1.524	1.549	1.572	1,58%
		Sikapak Timur	1.008	1.023	1.041	1.056	1,56%
		Tungkal Selatan	1.254	1.273	980	1.314	1,57%
		Cubadak Air Utara	1.373	1.395	1.418	1.438	1,55%
Tungkal Utara	820	833	847	861	1,64%		
4.	Pariaman Timur	Kampung Gadang	1.313	1.318	1.324	1.329	0,40%
		Talago Sarik	1.246	1.252	1.258	1.263	0,45%
		Bato	871	876	880	884	0,50%
		Batang kabung	1.229	1.235	1.241	1.246	0,46%
		Sungai Sirah	363	365	367	369	0,55%
		Bungo Tanjung	1.205	1.210	1.216	1.219	0,39%
		Kampung Kandang	1.059	1.064	1.069	1.072	0,41%
		Kaluat	661	663	667	669	0,40%
		Kajai	747	751	755	758	0,49%
		Kampung Tengah	376	378	382	384	0,70%
		Sungai Pasak	1.062	1.066	1.072	1.076	0,44%
		Air Santok	1.132	1.137	1.143	1.147	0,44%
		Cubadak Mentawai	615	619	622	624	0,49%
		Koto Marapak	1.389	1.395	1.403	1.407	0,43%
		Pakasai	1.017	1.021	1.027	1.031	0,46%
Kampung Baru Padusunan	1.241	1.246	1.253	1.258	0,45%		

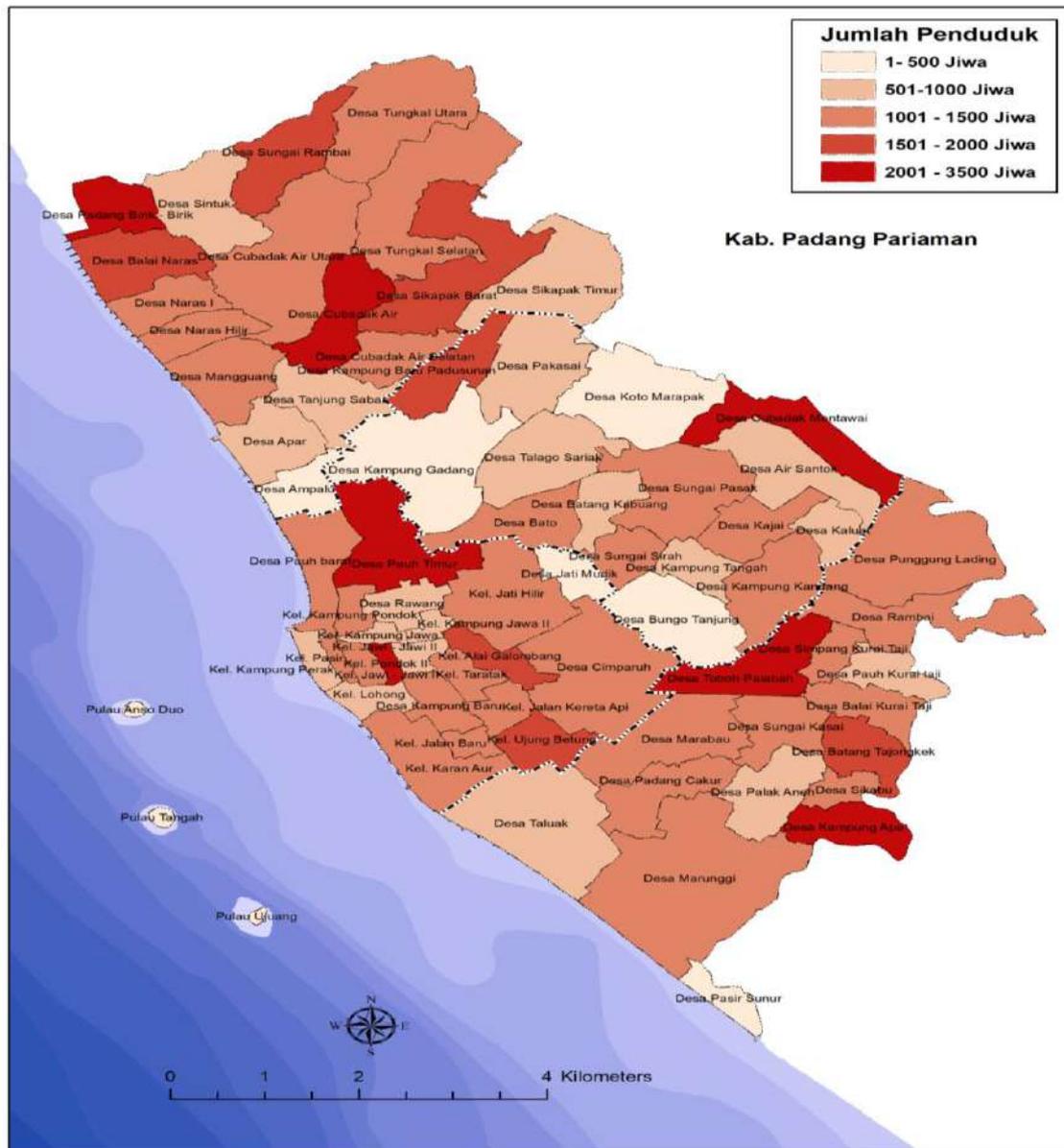
Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang ada di desa pada kota Pariaman dari tahun 2016 – 2019. Pertumbuhan penduduk pada desa di Kota Pariaman



terjadi secara fluktuatif karena ada beberapa desa di kota Pariaman mengalami pertumbuhan dan pengurangan penduduk yang sangat drastis. Jumlah penduduk tertinggi terletak pada Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah di tahun 2019 yaitu sebanyak 3.547 jiwa dan untuk jumlah penduduk terendah terdapat pada desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan di tahun 2019 yaitu sebanyak 319 jiwa. Dari gambar dibawah ini dapat dilihat persebaran pengelompokkan jumlah penduduk kelurahan dan desa yang ada di Kota Pariaman pada tahun 2020.

**Gambar 2.2**  
**Peta Jumlah Penduduk Menurut Desa Pada Kota Pariaman Tahun 2020**



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030



#### 2.1.4.2 Kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk brutto di Kota Pariaman merupakan jumlah penduduk dibagi luas wilayah dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}}$$

Atau

$$\text{Kepadatan Penduduk} \left( \frac{\text{Jiwa}}{\text{Ha}} \right) = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}}$$

Angka kepadatan penduduk tersebut kemudian dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu (SNI 03-1733-2004) :

- 1) Kepadatan Sangat Tinggi : Kepadatan penduduk > 400 jiwa/ha.
- 2) Kepadatan Tinggi : Kepadatan penduduk 201 s/d 400 jiwa/Ha.
- 3) Kepadatan Sedang : Kepadatan penduduk 150 s/d 200 jiwa/Ha
- 4) Kepadatan Rendah : Kepadatan penduduk < 150 jiwa/Ha

Dengan demikian kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dan Desa/Kelurahan Kota Pariaman di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk	
				( jiwa/Ha )	Kategori
1	Pariaman Selatan	20 006	1.805	11	Rendah
2	Pariaman Tengah	31 930	1.162	27	Rendah
3	Pariaman Timur	19 697	1.693	11	Rendah
4	Pariaman Utara	22 591	2.023	12	Rendah
<b>Kota Pariaman</b>		<b>94.224</b>	<b>6.686</b>	<b>61</b>	<b>Rendah</b>

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Berdasarkan tabel diatas, kepadatan penduduk Kota Pariaman paling tinggi pada tahun 2020 terdapat pada Kecamatan Pariaman Tengah, yaitu sebanyak 27 Jiwa/ha, akan tetapi menurut SNI 03-1733-2004 masih dikategorikan kepadatan rendah.

#### 2.1.4.3 Kepadatan Netto Kota Pariaman

Kepadatan netto atau bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk per luas lahan efektif (yaitu lahan yang mungkin atau layak dikembangkan untuk kegiatan budidaya perkotaan dengan asumsi dimana



lahan yang dianggap tidak menjadi daerah terbangun seperti sawah, mangrove, kawasan sepadan pantai dikeluarkan dari perhitungan luas), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Kepadatan Penduduk berdasarkan Luas Lahan Efektif Per Desa Kota Pariaman**

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah Non Efektif (Ha)	Luas Wilayah Efektif (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1.	Pariaman Selatan	Pasir Sunur	319	33,15	11,75	21,4	15
		Marunggi	3.245	332,2	133,95	198,25	16
		Kampung Apar	782	77,73	23,89	53,84	15
		Sikabu	371	30,31	3,66	26,65	14
		Palak Aneh	1.188	106,15	68,79	37,36	32
		Padang Cakur	440	81,68	59,02	22,66	19
		Taluk	3.308	231,1	31,62	199,48	17
		Marabau	916	127,26	89,81	37,45	24
		Sungai Kasai	492	110,15	82,37	27,78	18
		Batang Tajongkek	860	55,77	18,25	37,52	23
		Balai Kurai Taji	1.470	36,7	8,83	27,87	53
		Pauh Kurai Taji	859	58,88	9,86	49,02	18
		Simpang	885	21,78	4,65	17,13	52
		Toboh Palabah	1.155	113,58	48,09	65,49	18
		Rambai	1.165	134,25	27,48	106,77	11
Punggung Lading	1.866	226,48	36,44	190,04	10		
2.	Pariaman Tengah	Karan Aur	2.354	105,52	25,59	79,93	29
		Jalan Baru	1.556	19,63	0,19	19,44	80
		Ujung Batung	718	55,04	0,69	54,35	13
		Jalan Kereta Api	800	37,43	0,48	36,95	22
		Cimparuh	2.500	207,56	70,45	137,11	18
		Alai Gelombang	1.162	40,68	6,15	34,53	34
		Taratak	1.199	29,04	0,51	28,53	42
		Kampung Baru	3.547	43,91	0,42	43,49	82
		Lohong	1.208	33,26	4,91	28,35	43
		Pasir	1.238	24,24	8,06	16,18	77
		Kampung Perak	824	11,94	0,45	11,49	72
		Pondok II	1.152	19,36	0,77	18,59	62
		Jawi-Jawi I	893	11,74	0,12	11,62	77
		Jawi-Jawi II	1.395	19,61	0,28	19,33	72
		Kampung Jawa II	1.104	14,33	0,08	14,25	77
		Kampung Jawa I	1.193	14,12	0,06	14,06	85
		Kampung Pondok	1.613	23,94	1,72	22,22	73
		Pauh Barat	1.947	81,91	14,45	67,46	29
		Pauh Timur	1.471	138,55	64,02	74,53	20
		Rawang	1.331	41,91	7,56	34,35	39
Jati Hilir	1.050	139,41	30,43	108,98	10		
Jati Mudik	714	39,03	13,29	25,74	28		
3.	Pariaman Utara	Ampalu	1.855	57,2	18,18	39,02	48
		Tanjung Sabar	630	93,43	51,64	41,79	15
		Apar	1.047	71,64	30,49	41,15	25
		Manggung	1.809	128,05	73,29	54,76	33
		Cubadak Air	1.080	113,49	64,26	49,23	22
		Naras Hilir	1.472	72,81	39,66	33,15	44
		Naras I	2.457	71,55	10,92	60,63	41
Balai Naras	2.184	120,95	47,53	73,42	30		



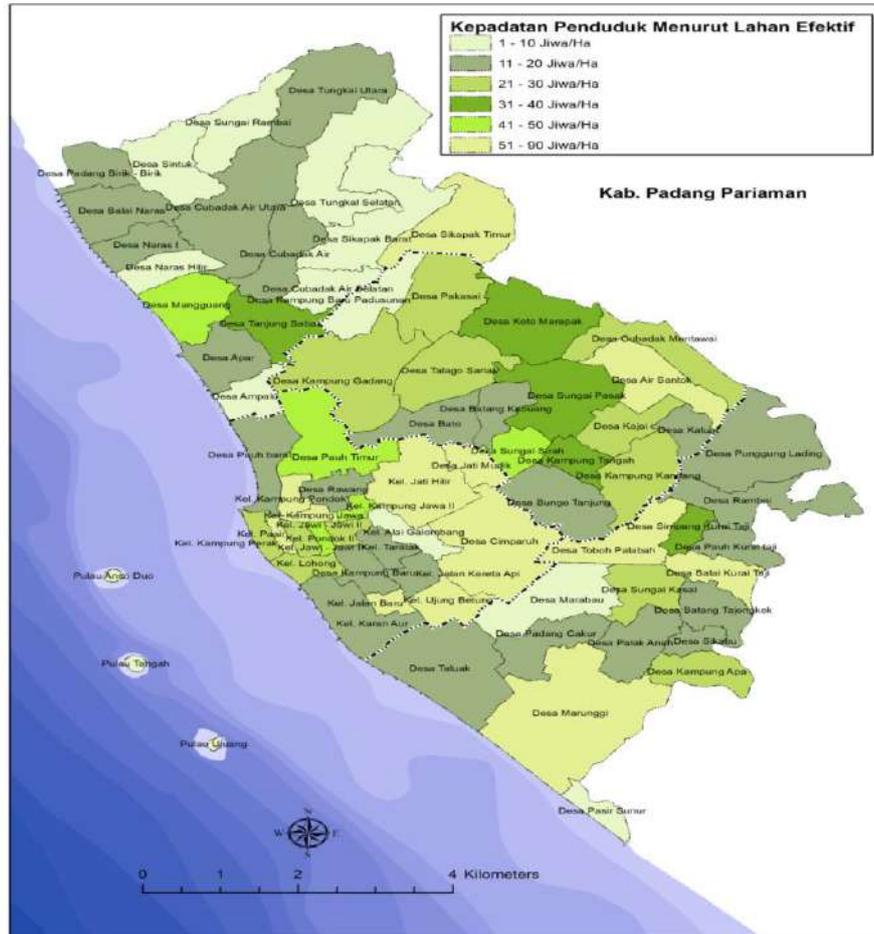
No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah Non Efektif (Ha)	Luas Wilayah Efektif (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Padang Birik-Birik	995	82,22	41,65	40,57	25
		Sintuk	789	100,63	25,88	74,75	11
		Sungai Rumbai	1.018	100,29	5,95	94,34	11
		Cubadak Air Selatan	898	62,44	15,71	46,73	19
		Sikapak Barat	1.572	206,5	47,71	158,79	10
		Sikapak Timur	1.056	159,21	10,89	148,32	7
		Tungkal Selatan	1.314	222,58	59,27	163,31	8
		Cubadak Air Utara	1.438	169,58	34,75	134,83	11
		Tungkal Utara	861	188,87	5,33	183,54	5
4.	Pariaman Timur	Kampung Gadang	1.329	195,43	64,91	130,52	10
		Talago Sarik	1.263	128,74	12,31	116,43	11
		Bato	884	89,44	37,7	51,74	17
		Batang Kabung	1.246	53,94	4,64	49,3	25
		Sungai Sirah	369	48,42	37,47	10,95	34
		Bungo Tanjung	1.219	123,95	70,19	53,76	23
		Kampung Kandang	1.072	106,82	14,81	92,01	12
		Kaluat	669	41,68	2,02	39,66	17
		Kajai	758	70,92	14,1	56,82	13
		Kampung Tangah	384	45,26	13,04	32,22	12
		Sungai Pasak	1.076	146,63	91,47	55,16	20
		Air Santok	1.147	144,69	45,45	99,24	12
		Cubadak Mentawai	624	112,71	18,75	93,96	7
		Koto Marapak	1.407	159,1	8,49	150,61	9
		Pakasai	1.031	136,21	20,96	115,25	9
		Kampung Baru Padusunan	1.258	90,04	9,42	80,62	16

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Dari kepadatan penduduk berdasarkan lahan efektif per Desa/Kelurahan di kota Pariaman dapat diketahui sebaran kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada desa Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah yaitu sebanyak 83 Jiwa/Ha dan sebaran kepadatan penduduk terkecil terdapat pada desa Cubadak Air Utara dan desa Tungkal Utara kecamatan Pariaman Utara yaitu sebanyak 5 Jiwa/Ha.



**Gambar 2.3**  
**Kepadatan Penduduk berdasarkan Kepadatan Netto Per Desa/Kelurahan**  
**Kota Pariaman**



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

#### 2.1.4.4 Struktur Pekerjaan Penduduk

Definisi penduduk yang bekerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja pada berbagai sektor usaha. Jumlah penduduk tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.11**  
**Penduduk Menurut 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Pariaman Tahun 2019-2020**

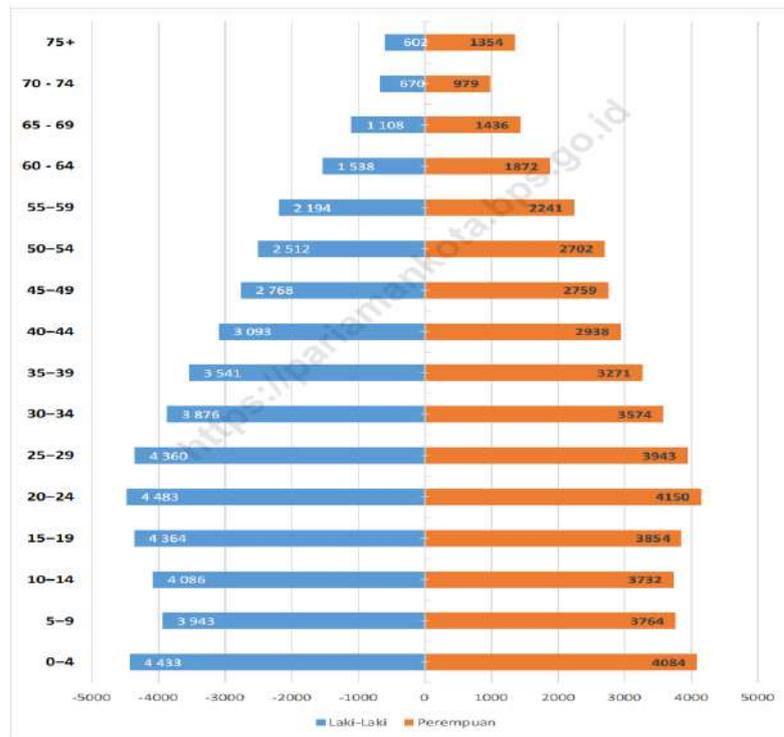
No.	Sektor	Tahun		Proporsi 2020 (%)	Laju pertumbuhan 2019-2020 (%/tahun)
		2019	2020		
1.	Pertanian	5.012	5.059	13	0.94
2.	Manufaktur	7.500	8.830	22	17.73
3.	Jasa	28.479	25.779	65	73.09
<b>Total</b>		<b>40.991</b>	<b>39.668</b>	<b>100,0</b>	<b>44,75</b>

Sumber: Bappeda Kota Pariaman, 2021



Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sektor jasa menjadi tumpuan terbesar penciptaan lapangan kerja (65%) dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 73,09%. Sementara sektor pertanian meskipun berada dalam wilayah perkotaan ternyata menampung tenaga kerja yang cukup besar (13%) dengan laju pertumbuhan angkatan kerja 0,94% /tahun. Artinya lapangan kerja di sektor pertanian di Kota Pariaman bukannya berkurang tetapi malah bertambah. Hal ini memerlukan perhatian karena dengan berkurangnya lahan pertanian sementara lapangan kerja disektor pertanian malah bertambah maka hal ini akan menjadi masalah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dimasa depan.

**Gambar 2.4**  
**Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:



### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

- PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari tahun 2019, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts 2008 (SNA 2008)* atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, dipenghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2019 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

**Tabel 2.12**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman**  
**Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah)**

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	559.190,78	578.670,91	591.639,08	601.884,66	604.981,97
Pertambangan & Penggalian	59.378,73	60.947,97	63.186,74	65.230,68	62.384,19
Industri Pengolahan	260.721,33	268.091,03	277.421,52	279.839,41	273.290,44
Pengadaan Listrik, Gas	1.603,37	1.775,64	1.966,89	2.099,54	1.978,97
Pengadaan Air,	1.201,14	1.250,22	1.279,80	1.280,12	1.313,63



Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang					
Konstruksi	431.156,36	466.150,74	503.507,58	542.554,50	527.585,40
Perdagangan Besar dan Eceran	474.162,12	507.466,07	540.470,22	579.060,05	573.241,65
Transportasi & Pergudangan	367.498,46	377.789,84	390.715,67	399.588,17	361.887,73
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	54.981,96	60.820,89	66.175,97	71.867,80	61.639,91
Informasi & Komonikasi	268.779,17	296.067,75	325.583,05	355.946,94	386.372,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	95.051,80	93.289,19	92.779,15	96.219,90	97.324,13
Real Estate	86.658,48	90.278,01	94.283,30	99.383,00	99.539,37
Jasa Perusahaan	4.438,90	4.703,81	4.901,10	5.188,13	4.962,75
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	167.592,87	175.911,19	187.391,25	200.139,33	198.135,54
Jasa Pendidikan	111.189,05	120.761,35	128.942,62	139.512,00	145.713,95
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	33.948,36	37.198,90	39.808,65	42.760,00	45.785,41
Jasa Lainnya	84.760,83	93.061,09	102.087,67	111.527,00	98.523,18
<b>PDRB</b>	<b>3.062.313,74</b>	<b>3.234.234,59</b>	<b>3.412.140,26</b>	<b>3.594.081,22</b>	<b>3.544.660,44</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

**Gambar 2.5**  
Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



Dari gambar 2.5 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHK di tahun 2016 terhitung sudah sebesar 3.062 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 3.594 triliun rupiah. Ini berarti bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir telah terjadi peningkatan sekitar 532 Milyar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 3.544 triliun rupiah, ini berarti terjadi penurunan sebesar 50 Milyar rupiah.

**Tabel 2.13**  
**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,26	17,89	17,34	16,74	17,07
B	Pertambangan & Penggalian	1,94	1,88	1,85	1,82	1,76
C	Industri Pengolahan	8,51	8,29	8,13	7,79	7,71
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	14,08	14,41	14,76	15,09	14,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran	15,48	15,69	15,84	16,11	16,17
H	Transportasi & Pergudangan	12,00	11,68	11,45	11,11	10,21
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,80	1,88	1,94	2,00	1,74
J	Informasi & Komunikasi	8,78	9,15	9,54	9,90	10,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	2,88	2,72	2,68	2,75
L	Real Estate	2,83	2,79	2,76	2,77	2,81
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	5,47	5,44	5,49	5,57	5,59
P	Jasa Pendidikan	3,63	3,73	3,78	3,88	4,11
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,11	1,15	1,17	1,19	1,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,77	2,88	2,99	3,10	2,78
<b>PDRB/G DRP</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini. PDRB menurut harga berlaku juga digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.



**Tabel 2.14**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah)**

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	795.386,17	829.643,60	861.148,09	914.713,15	917.578,08
Pertambangan & Penggalian	83.906,28	86.617,85	90.738,69	94.570,93	91.153,64
Industri Pengolahan	316.386,41	327.586,30	343.221,94	343.323,57	343.922,88
Pengadaan Listrik, Gas	2.627,14	3.151,05	3.624,51	4.147,14	3.946,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	1.605,21	1.679,87	1.745,16	1.805,83	1.856,31
Konstruksi	586.394,43	640.718,83	705.142,59	778.020,76	776.169,68
Perdagangan Besar dan Eceran	600.534,13	649.593,88	702.769,97	768.757,94	754.414,31
Transportasi & Pergudangan	481.352,99	500.121,38	519.572,36	540.994,01	503.618,49
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	91.638,61	102.772,70	115.545,51	131.521,29	114.663,01
Informasi & Komunikasi	274.175,15	306.515,54	344.114,61	388.496,08	420.058,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	127.808,19	125.865,09	127.415,81	135.440,00	139.028,37
Real Estate	118.398,04	124.758,14	133.887,43	143.419,00	145.171,85
Jasa Perusahaan	5.828,63	6.231,70	6.583,83	7.273,32	6.996,44
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	227.187,29	245.890,64	263.678,47	302.349,55	324.107,30
Jasa Pendidikan	161.280,04	177.550,49	194.247,73	220.700,00	231.796,83
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	44.358,64	49.246,34	54.164,15	60.803,81	66.722,33
Jasa Lainnya	117.874,57	131.066,79	148.234,78	169.096,00	152.898,18
<b>PDRB</b>	<b>4.036.741,93</b>	<b>4.309.010,19</b>	<b>4.615.745,62</b>	<b>5.005.432,39</b>	<b>4.994.102,88</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



**Tabel 2.15**  
**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha**  
**di Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,70	19,25	18,66	18,27	18,37
<b>B</b>	Pertambangan & Penggalian	2,08	2,01	1,97	1,89	1,83
<b>C</b>	Industri Pengolahan	7,84	7,60	7,44	6,86	6,89
<b>D</b>	Pengadaan Listrik, Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>F</b>	Konstruksi	14,53	14,87	15,28	15,54	15,54
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran	14,88	15,08	15,22	15,36	15,11
<b>H</b>	Transportasi & Pergudangan	11,92	11,61	11,26	10,81	10,08
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,27	2,39	2,50	2,63	2,30
<b>J</b>	Informasi & Kemonikasi	6,79	7,11	7,46	7,76	8,41
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	2,92	2,76	2,71	2,78
<b>L</b>	Real Estate	2,93	2,90	2,90	2,87	2,91
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	5,63	5,71	5,71	6,04	6,49
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	4,00	4,12	4,21	4,41	4,64
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,10	1,14	1,17	1,21	1,34
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	2,92	3,04	3,21	3,38	3,06
<b>PDRB/G DRP</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



**Gambar 2.6**  
**Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari gambar 2.6 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHB di tahun 2016 terhitung sudah sebesar 4.036 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 5.005 triliun rupiah. Ini berarti bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir telah terjadi peningkatan sekitar 969 Milyar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 4994 triliun rupiah, ini berarti terjadi penurunan sebesar 11 Milyar rupiah.

**Tabel 2.16**  
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Rumah Tangga	52,36	52,02	52,40	52,88	53,57
2	Konsumsi LNPRT	1,19	1,20	1,16	1,16	1,21
3	Konsumsi Pemerintah	15,48	15,15	14,80	14,59	14,43
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,32	28,21	28,08	28,13	28,16
5	Perubahan Inventori	0,06	2,51	0,12	0,11	-0,03
6	Ekspor	2,58	0,90	3,43	3,15	2,66
	<b>Total PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



**Gambar 2.7**  
**Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Berdasarkan Gambar 2.7 diatas menjelaskan tentang perkembangan kontribusi kategori terbesar dalam PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha jangka waktu 5 tahun terakhir (2016-2020). Dalam periode selama 5 (lima) tahun jika dirata-ratakan kontribusi yang paling besar masih sektor pertanian yaitu sebesar 18.85 %. Walaupun mengalami penurunan sampai tahun 2019, pada tahun 2020 mulai mengalami peningkatan sebesar 0,1 %. Namun sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Dan kontribusi terbesar ke-2 adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 15,15 %. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tidak berbeda jauh dengan sektor konstruksi, kontribusi pada sektor perdagangan sebesar 15,13 %. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai tahun 2019 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Sebagai sebuah Kota (walaupun Kota Kecil) sudah seharusnya kedepan bagaimana sektor perdagangan ini bisa memberikan kontribusi terbesar.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2016 – 2020) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun keadaan dari tahun ketahun cenderung menurun, namun LPE Kota Pariaman selalu diatas LPE Prov Sumatera Barat dan Nasional PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.



**Grafik 2.8**  
**Persandingan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,32 %. Pertumbuhan ekonomi ini yang negatif ini tidak hanya dialami oleh Kota Pariaman saja tetapi juga dialami oleh seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat bahkan sektor pusat. Dari Grafik 2.7 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi negatif Kota Pariaman masih kecil jika dibandingkan pertumbuhan negatif Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda di Kota Pariaman khususnya dan dunia umumnya yang melumpuhkan sebagian besar sektor kegiatan sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman telah mencapai 5,59 %, tahun 2017 mangalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 %. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, turun lagi menjadi masing-masing 5,47 % dan 5,3 %. Dari tahun 2016 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Berdasarkan informasi dari BPS, perlambatan ini jika dilihat sisi pengeluaran disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan modal tetap bruto.

- PDRB Berdasarkan Pengeluaran

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan



sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).

**Tabel 2.17**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.937.157,05	2.100.066,73	2.257.850,58	2.441.343,47	2.683.048,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	44.073,69	48.357,03	49.991,03	53.325,75	60.681,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	572.781,85	611.670,02	637.929,77	673.432,26	722.771,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.047.552,32	1.138.793,91	1.210.087,95	1.298.584,29	1.410.395,24
Perubahan Inventori	2.327,19	101.488,70	5.213,05	4.900,96	-1.608,09
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa	95.551,47	36.365,54	147.937,42	145.271,88	133.094,05
<b>PDRB</b>	<b>3.699.443,57</b>	<b>4.036.741,93</b>	<b>4.309.010,19</b>	<b>4.616.858,62</b>	<b>5.008.382,55</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

**Tabel 2.18**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Pariaman menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2015 – 2019 (Jutaan Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan (Seri 2010) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.464.023,62	1.534.804,36	1.617.031,42	1.701.908,82	1.785.629,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	35.563,76	37.265,45	38.989,07	40.746,03	45.172,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	413.704,03	418.499,97	419.053,60	432.449,43	451.983,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	798.333,13	849.430,67	885.400,34	919.777,39	966.702,46
Perubahan Inventori	2.042,27	81.490,90	3.791,75	3.474,38	-1.051,31
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa	186.661,36	140/822,40	269.968,42	313.784,23	345.644,46
<b>PDRB</b>	<b>2.900.328,17</b>	<b>3.062.313,75</b>	<b>3.234.234,60</b>	<b>3.412.140,28</b>	<b>3.594.081,21</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

a. PDRB/Pendapatan per kapita Kota Pariaman

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah



penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

**Tabel 2.19**  
**Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2016 - 2020**

Uraian	(Dalam Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018*	2019**	2020***
PDRB ADHB (Juta)	4.036.741,93	4.309.010,19	4.616.858,61	5.008.382,53	4.994.102.88
Jumlah Penduduk	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
<b>PDRB/Perkapita (Juta)</b>	<b>47,11</b>	<b>49,75</b>	<b>52,69</b>	<b>56,59</b>	<b>53</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

**Grafik 2.9**  
**Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Perkembangan nilai PDRB/Pendapatan perkapita Kota Pariaman tahun 2016 sampai tahun 2020 tersaji dalam gambar 2.9 di atas. Dari gambar terlihat bahwa besarnya nilai pendapatan rata-rata penduduk Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita setiap tahunnya. Pada tahun 2016, nominal PDRB per kapita Kota Pariaman adalah Rp. 47,11 juta dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp. 56,69 juta. Namun PDRB perkapita Kota Pariaman Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 53 juta seiring dengan menurunnya PDRB Perkapita Kota Pariaman pada Tahun 2020 tersebut.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi



untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 – 1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

No.	Uraian	Ket
a.	Indeks Gini < 0,3	: Ketimpangan Rendah
b.	0,3 =< Indeks Gini <= 0,5	: Ketimpangan Sedang
c.	Indeks Gini > 0,5	: Ketimpangan Tinggi

**Grafik 2.10**  
**Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

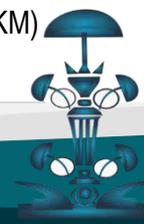


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Grafik 2.10 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman tahun 2016 – 2020. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Pariaman memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2016 – 2019. Indeks gini Kota Pariaman selama rentang waktu 2016 – 2020 secara umum berfluktuasi. Pada tahun 2016 nilai Indeks Gini Kota Pariaman 0,338. Tahun 2017 turun menjadi 0,301. Dan pada tahun 2018 nilai Indeks Gini Kota Pariaman naik menjadi 0,316. Kemudian pada tahun 2019 turun lagi dengan nilai 0,3. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi dengan nilai 0,31. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kategori ketimpangan pendapatan Kota Pariaman masih tergolong dalam kategori sedang (moderat).

c. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM)



dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pariaman yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kota Pariaman setara Rp. 392.970/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2017 setara Rp Rp 412.231/kapita/bulan, pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 431.368/kapita/bulan, pada tahun 2019 meningkat menjadi 446.514/kapita/bulan dan pada tahun 2020 juga terjadi peningkatan menjadi 480.028/kapita/bulan. Sedangkan dari sisi persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kota Pariaman mengalami penurunan selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, penduduk miskin sebesar 5,22 %, tahun 2016 turun lagi menjadi 5,2 % terus berkurang menjadi 5,03 % pada tahun 2018. Serta pada tahun 2019 dan 2020 turun lagi masing-masing menjadi 4,76 % dan 4,10 %. Tabel 2.20 menunjukkan tentang Kondisi kemiskinan (Kemiskinan Makro) Kota Pariaman selama periode 2016-2020.

**Tabel 2.20**  
**Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (000)	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
2.	Jml Penduduk Miskin (000)	4.470	4.488	4.399	4.200	3.658
3.	Jumlah Rumah Tangga	18.384	18.583	18.799	18.977	19.581
4.	Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,22	5,20	5,03	4,76	4,10
5.	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,90	0,59	0,68	0,49	0,49
6.	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,14	0,16	0,07	0,10
7.	Garis kemiskinan	392.970	412.231	431.368	446.514	480.028

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



**Gambar 2.11**  
**Persandingan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

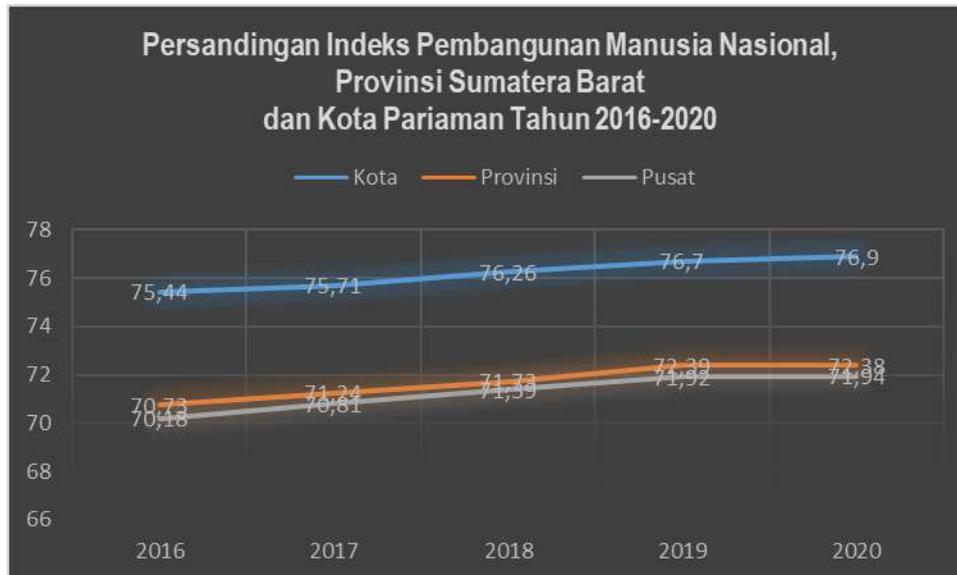
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2020 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2016-2020, pembangunan manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan. Pada gambar 2.12 di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2016, capaian IPM Kota Pariaman adalah sebesar 74,98 dan pada tahun 2016 capaian IPM meningkat menjadi 75,44. Dan capaian IPM ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 75,71 pada tahun 2016 dan di tahun 2018 sebesar 75.44. Serta pada tahun 2020 sebesar 76.90. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi yang sebesar 72,38 tahun 2020 dan IPM Nasional yang sebesar 71,924 ditahun 2020. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 1,72 selama periode tersebut.



**Gambar 2.12**  
**Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (AHH) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni : (1) Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS). (2) Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. (3) Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

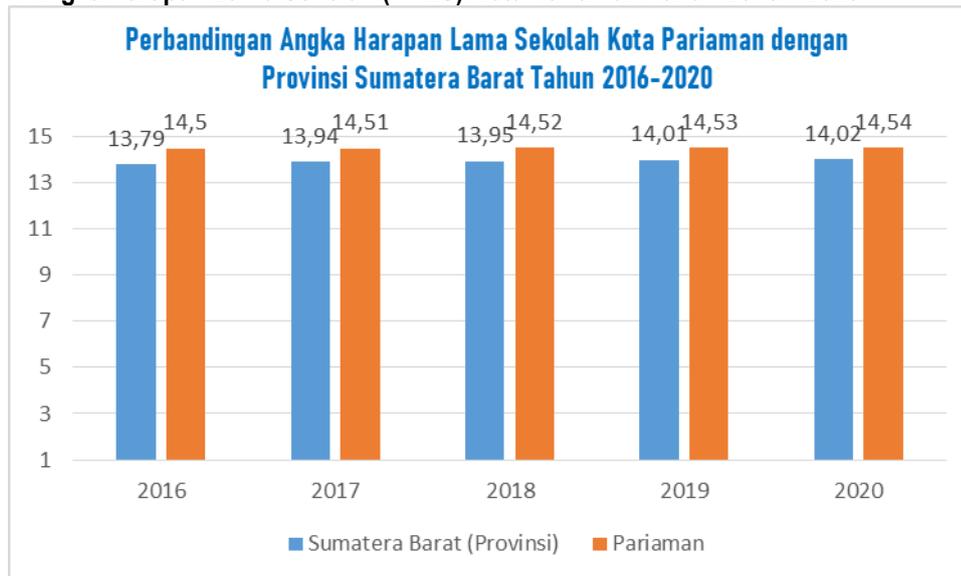
#### 1) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa



peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan AHLS di Kota Pariaman dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Grafik 2.13**  
**Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Berdasarkan grafik 2.13 diatas perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 AHLS Kota Pariaman sudah mencapai pada angka 14,54. Angka ini berada diatas rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 14,02 Tahun 2020. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-4. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.21**  
**Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah
1	Padang	16,52
2	Padang Panjang	15,06
3	Bukittinggi	14,97
4	<b>Pariaman</b>	<b>14,54</b>



5	Tanah Datar	14,33
6	Kota Solok	14,32
7	Payakumbuh	14,26
8	Agam	13,87
9	Padang Pariaman	13,67
10	Pasaman Barat	13,61
11	Pesisir Selatan	13,32
12	Lima Puluh Kota	13,29
13	Sawah Lunto	13,17
14	Kab.Solok	13,04
15	Kepulauan Mentawai	12,82
16	Pasaman	12,80
17	Solok Selatan	12,71
18	Dharmasraya	12,43
19	Sijunjung	12,37
	<b>Sumatera Barat (Provinsi)</b>	<b>14,02</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat

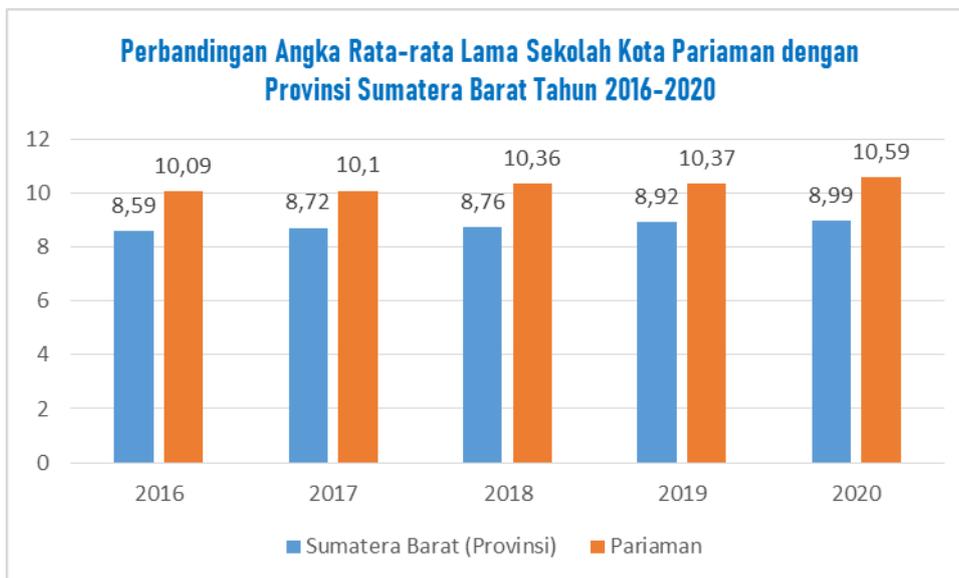
AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan kemampuan ekonomi ini juga yang akan menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

## 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun 2016 sampai 2020 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :



**Grafik 2.14**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Angka Rata Rata Lama Sekolah 10,09 Tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,59 Tahun. Dan berada diatas rata-rata Angka Rata Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 8,99 Tahun 2020. Pencapaian diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Pariaman adalah telah sampai duduk di bangku kelas DI atau memasuki DII, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Pariaman. Dan akan menuju wajib belajar 12 tahun. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Rata Rata Lama Sekolah Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-6. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 22**  
**Peringkat Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
1	Padang Panjang	11,62
2	Padang	11,58
3	Bukittinggi	11,33
4	Kota Solok	11,03
5	Payakumbuh	10,73
<b>6</b>	<b>Pariaman</b>	<b>10,59</b>
7	Sawah Lunto	10,17
8	Agam	8,96
9	Tanah Datar	8,61



10	Dharmasraya	8,47
11	Solok Selatan	8,28
12	Pesisir Selatan	8,26
13	Pasaman Barat	8,19
14	Sijunjung	8,11
15	Pasaman	8,09
16	Lima Puluh Kota	7,99
17	Padang Pariaman	7,87
18	Kab.Solok	7,86
19	Kepulauan Mentawai	7,09
	<b>Sumatera Barat (Provinsi)</b>	<b>8,99</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat

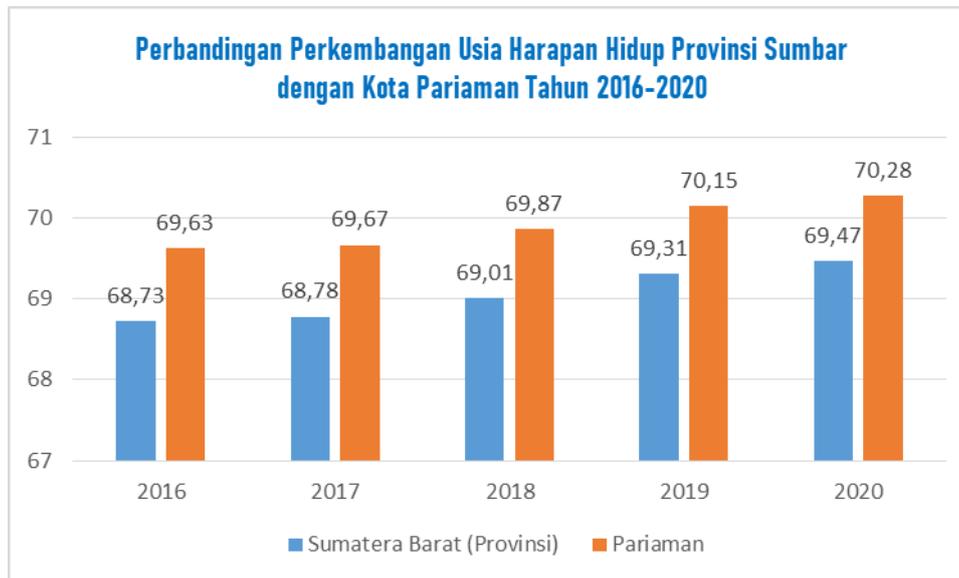
Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

### 3) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui dukungan program kegiatan di OPD terkait.



**Grafik 2.15**  
**Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Pariaman sejak tahun 2016 – 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Pariaman sebesar 69,63. Dan pada Tahun 2020 mencapai pada angka 70,28. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman berada diatas rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 69,47 Tahun 2020. Dari pencapaian angka usia harapan hidup ini menggambarkan telah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-9. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 23**  
**Peringkat Angka Usia Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Usia Harapan Hidup
1	Bukittinggi	74,38
2	Payakumbuh	73,74
3	Padang	73,65
4	Kota Solok	73,61
5	Padang Panjang	72,82
6	Agam	72,37
7	Dharmasraya	71,33
8	Pesisir Selatan	70,86
<b>9</b>	<b>Pariaman</b>	<b>70,28</b>



Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Usia Harapan Hidup
10	Sawah Lunto	70,00
11	Tanah Datar	69,94
12	Lima Puluh Kota	69,79
13	Padang Pariaman	68,79
14	Kab.Solok	68,58
15	Pasaman Barat	67,82
16	Solok Selatan	67,81
17	Pasaman	67,40
18	Sijunjung	66,21
19	Kepulauan Mentawai	64,73
	<b>Sumatera Barat (Provinsi)</b>	<b>69,47</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat

#### 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Pariaman, untuk angka TPT Kota Pariaman cukup berkinerja baik yang tergambar dari angka TPT dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Sedangkan nilai TPT mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan nilai 5,63 %. Itu berarti pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,21 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 angka TPT Kota Pariaman mencapai 6,61 %. Kemudian di tahun 2017 menjadi 5,97 %. Serta di tahun 2018 dan 2019 angka TPT turun lagi masing-masing-masingnya 5,72 % dan 5,42 %. Peningkatan nilai TPT pada tahun 2020 ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar sektor kegiatan dan maraknya pemberhentian hubungan kerja. Begitu juga dengan angka TPAK Kota Pariaman dari tahun ketahun juga menggambarkan kinerja yang cukup baik ini terlihat dari angka TPAK yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 hanya baru mencapai 64,95 % hingga menjadi 68,95 % pada tahun 2019. Dan pada Tahun 2020 TPAK Kota Pariaman mengalami penurunan menjadi 64,16 %.

**Tabel 2.24**  
**Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	TPT (%)	TPAK (%)
2016	6,61	64,95
2017	5,97	65,20
2018	5,72	66,65
2019	5,42	68,95
2020	5,73	64,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



**Tabel 2.25**  
**Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bekerja	36.113	37.573	39.00	40.991	39.668
2	Pengangguran Terbuka	2.554	2.385	2.368	2.348	2.411
3	Bukan Angkatan Kerja	20.861	21.329	20.704	43.339	42.079

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dari fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olah raga, dimana kegiatan tersebut memberikan nilai tambah terhadap pelestarian nilai nilai budaya, seni tradisional asli Kota Pariaman, yang akan memberikan nilai tambah dalam sektor pariwisata di kota pariaman.

Kegiatan olah raga yang digandrungi pemuda akan membawa Kota Pariaman menuju event-event pertandingan olah raga daerah, nasional, maupun internasional. Ditahun 2015 terdapat 33 group kesenian dan selalu mengalami pertumbuhan sebanyak 40 group pada tahun 2019. Akan tetapi untuk jumlah gedung kesenian Kota Pariaman masih mengandalkan 2 unit gedung kesenian dari tahun 2015-2019, sedangkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami penambahan dalam kurun 5 tahun terakhir. Untuk kegiatan olah raga Kota Pariaman memiliki 41 group olah raga di tahun 2015 dan 61 group olah raga pada tahun 2019, jumlah kegiatan olah raga dari tahun 2015-2019 sebanyak 9 kegiatan, dan lapangan olah raga mengalami pertumbuhan sebanyak 54 lapangan selama 5 tahun. Perkembangan seni budaya dan olah raga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.26**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Seni dan Budaya</b>					
1	Jumlah Group Kesenian	33	40	40	40	40
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	2	2
3	Penyelenggaraan Festival Budaya	7	7	9	9	0
4	Jumlah Kawasan cagar budaya	52	52	52	52	52
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	4	4	4	4
6	Jumlah Sanggar Kesenian	23	40	40	40	40
	<b>Olahraga</b>					



NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Jumlah Klub Olah Raga	41	61	61	61	61
8	Jumlah Organisasi Olah Raga	12	12	12	35	35
9	Jumlah Kegiatan Olah Raga	9	9	9	9	0
10	Lapangan Olah Raga	40	40	54	54	54

Sumber : Dinas Parbud Kota Pariaman, 2021

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Pariaman.

#### 2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Perkembangan indikator pendidikan dari tahun 2016-2020 di Kota Pariaman antara lain diukur berdasarkan indikator Angka Partisipasi kasar (PUD/TK), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B, SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi, Kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2016- 2020 adalah sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.



## 1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Konsep APS yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Tujuan menghitung APS adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Tabel berikut memuat perkembangan nilai APS Kota Pariaman berdasarkan kelompok umur dari tahun 2016-2020:

**Tabel 2.27**  
**Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016–2020**

NO	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	2016	120.04	73.54	91.27
2	2017	120.92	84.08	91.84
3	2018	122.68	83.25	92.69
4	2019	113.71	77.89	113.52
5	2020	112.08	80.84	113.54

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

Nilai APS dicari dengan membandingkan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah dengan jumlah seluruh penduduk penduduk pada kelompok tertentu kemudian dikali 100%. Data diatas pada tahun 2020 kelompok umur 7-12 tahun menunjukkan nilai APS sebesar 112,08. Sementara kelompok umur 13-15 tahun nilai APS nya sebesar 80,84 dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 113,54. Selama lima tahun terakhir nilai APS kelompok umur 7-12 tahun Kota Pariaman pada umumnya terjadi penurunan, sedangkan kelompok umur 13-15 tahun nilai APS berfluktuasi setiap tahunnya dan kelompok umur 16-18 tahun nilai APS terjadi peningkatan setiap tahunnya dimana secara berurut yaitu 91,27; 91,84; 92,69; 113,52; dan 113,54.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam



tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Berikut kondisi PAUD di Kota Pariaman dari Tahun 2016-2020:

**Tabel 2.28**  
**Data Kondisi PAUD Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APK Nasional	34,62	33,84	37,92	36,93	37,52
2	APK Propinsi	26,58	26,38	30,22	30,39	29,87
3	APK Kota Pariaman	84,83	86,81	39,21	40,76	35,79
4	Jumlah penduduk Umur 3-6 tahun kota Pariaman	6.100	6.288	6.450	6.253	6.328
5	Jumlah Siswa PAUD	360	1.404	1.529	1.619	1.624

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia 3-6 tahun di Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk ini selaras dengan bertambahnya jumlah siswa PAUD.

## 2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Berikut rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.29**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Pariaman**  
**Tahun 2016 – 2020**

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	TK					
a	Jumlah Sekolah	93	93	102	96	99
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	4.626	4.842	5.070	4.946	4.972
c	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	1 : 50	1 : 52	1 : 49	1 : 51	1 : 50



NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>II</b>	<b>SD/MI/SDLB</b>					
a	Jumlah Sekolah	75	75	77	78	79
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	9.446	9.630	9.962	10.058	10.317
c	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1 : 125	1 : 128	1 : 129	1 : 128	1 : 130
<b>III</b>	<b>SMP/MTs/SMPLB</b>					
a	Jumlah Sekolah	11	11	12	12	12
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	5.189	5.199	5.246	5.086	5.096
c	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1 : 471	1 : 472	1 : 437	1 : 423	1 : 424

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2016-2020 rasio ketersediaan sekolah pada tingkat pendidikan TK berfluktuatif. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan pertumbuhan penduduk pada kelompok usia 5-7 juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sementara pada tingkat pendidikan SD rasio ketersediaan sekolah mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Begitu juga pada tingkat pendidikan SMP rasio ketersediaan sekolah mengalami kenaikan. Walaupun pertumbuhan jumlah penduduk yang berfluktuatif setiap tahunnya, namun penambahan jumlah sekolah tetap dilakukan pada tahun 2018. Secara data ketersediaan sekolah untuk penduduk di Kota Pariaman telah memenuhi kebutuhan.

### 3. Rasio Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu proses belajar mengajar. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di Kota Pariaman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.30**  
**Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>TK</b>					
a	Jumlah Guru	67	117,	91	122	150
	Jumlah Guru Negeri	5	5,00	4	7	10
	Jumlah Guru Swasta	62	112	87	115	140



b	Jumlah Murid	1.277	1.233	1.286	1.269	1.044
	Jumlah Murid Negeri	128	114	70	77	64
	Jumlah Murid Swasta	1.149	1.119	1.329	1.192	980
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	<b>0,052</b>	<b>0,095</b>	<b>0,070</b>	<b>0,096</b>	<b>0,144</b>
<b>II</b>	<b>SD/MI/SDLB</b>					
a	Jumlah Guru	831	753	853	872	818
b	Jumlah Murid	10.889	10.515	10.965	10.911	10.248
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	0,076	0,072	0,078	0,080	0,080
<b>III</b>	<b>SMP/MTs/SMPLB</b>					
a	Jumlah Guru	413	373	573	565	537
b	Jumlah Murid	4.594	4.673	6.925	6.767	6.596
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	0,090	0,080	0,081	0,083	0,081

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di Kota Pariaman bervariasi di setiap tingkatan pendidikan. Seperti halnya pada tingkat pendidikan TK rasio jumlah guru terhadap jumlah murid bervariasi dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat data jumlah guru tidak selaras dengan jumlah murid. Misalnya pada tahun 2019 jumlah guru adalah 122 sedangkan jumlah murid adalah 1.269 sementara itu jumlah guru dan murid pada tahun 2020 secara berurutan adalah 150 dan 1.044. Hal ini jika disandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah guru dari tahun sebelumnya namun jumlah murid mengalami penurunan. Namun demikian untuk jenjang pendidikan TK tetap memenuhi kondisi idealnya.

Sementara untuk tingkatan pendidikan SD/setara dan SMP/setara, rasio jumlah guru dan jumlah murid mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang selalu berkurang namun jumlah guru cenderung bertambah. Sehingga untuk rasio jenjang pendidikan SD/setara dan SMP/setara memenuhi kondisi idealnya.

Rasio antara murid dan rombongan belajar menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan kecukupan antara ruang kelas dan rombongan yang tersedia dengan jumlah murid. Berikut rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel dibawah ini:



**Tabel 2.31**  
**Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>TK</b>					
a	Jumlah Murid	1.277	1.233	1.399	1.269	1.044
b	Jumlah Kelas	76,00	75,00	77	77	76
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	16,802	16,440	18,169	16,481	13,737
<b>II</b>	<b>SD/MI/SDLB</b>					
a	Jumlah Murid	10.889	10.515	10.359	10.252	10.248
b	Jumlah Kelas	507,00	518,00	532	530	522
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	21,477	20,299	19,472	19,343	19,632
<b>III</b>	<b>SMP/MTs/SMPLB</b>					
a	Jumlah Murid	4.594	4.673	6.925	6.767	6.596
b	Jumlah Kelas	240	232	230	224	222
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	19,142	20,142	30,109	30,210	29,711

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

Data diatas menunjukkan rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas pada tingkat pendidikan TK dan SD/setara selama lima tahun terakhir meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan jumlah murid TK yang selalu berkurang dari tahun ke tahun sementara untuk jumlah kelas selalu mengalami penambahan. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMP/setara rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas berfluktuatif. Dari tahun 2016-2018 rasio jumlah murid terhadap jumlah guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan. Pada dasarnya pada tahun 2016-2020 jumlah murid berkurang dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah kelas bertambah pada tahun 2016-2018 dan berkurang pada tahun 2019 dan 2020. Berikut rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017:

**Tabel 2.32**  
**Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid/ Kelas
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32
3	SMA	1 : 20 – 36
4	SMK	1 : 15 – 36

Sumber : Dikpora, 2021



#### 4. Angka Putus Sekolah

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Angka putus sekolah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Berikut persentase anak putus sekolah di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.33**  
**Angka Putus Sekolah Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
	Angka Putus sekolah (%)	0,06	0,12	0,16	0,05	0,01
2	SMP/MI					
	Angka Putus sekolah (%)	0,04	0,17	0,07	0,25	0,09

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

Angka putus sekolah SD dan SMP cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD adalah 0,01 % sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP adalah 0,09 %. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal maupun dari lingkungan. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

#### 5. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta



kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Pariaman pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.34**  
**Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016 – 2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
	Persentase (%)	100	100	100	99,89	100
2	MI					
	Persentase (%)	100	100	100	99,89	100
3	SMP					
	Persentase (%)	99,50	99,93	99,47	98,90	99,79
4	MTs					
	Persentase (%)	99,65	99,87	99,63	99,20	99,88

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan SD, MI, SMP dan MTs di Kota Pariaman rata-rata 100 %. Untuk jenjang pendidikan SMP angka kelulusan tidak sampai 100 % tetapi di atas 99 %, ini kemungkinan ada siswa yang pindah sebelum ujian kelulusan dilaksanakan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan MI rata-rata 100 % hanya pada tahun 2019 dengan presentase 99,89 % dan MTs selalu angka kelulusannya juga di atas 99 %. Ini kemungkinan ada siswa yang pindah sekolah sehingga mengikuti ujian di sekolah yang baru.

## 6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.35**  
**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan**  
**Tahun 2019 – 2020**

NO	Uraian	Indikator	Capaian Tahun	
			2019	2020
A	Pendidikan	1 : 18 – 28		
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	1.633	1.761
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	15.719	15.845
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau	375	100



		menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kota Pariaman yaitu bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan secara berurutan yaitu 1.633 dan 1.761. Hal ini dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD untuk kepentingan tumbuh kembang anak.

Sementara itu, jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 15845 dari tahun sebelumnya yakni 15719 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya anak dalam mendapatkan pendidikan dasar. Namun dari bidang Pendidikan Kesetaraan Pencapaian SPM mengalami penurunan dari tahun 2019 (375) dibanding tahun 2020 (100) yang disebabkan masih kurangnya kemauan anak-anak yang putus sekolah ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga disebabkan kondisi Pandemi Covid 19 sulit untuk menemui anak-anak yang putus sekolah dan keterbatasan untuk melakukan tatap muka dalam belajar. Pandemi Covid 19 juga mengakibatkan surutnya perekonomian masyarakat, sehingga anak – anak putus sekolah enggan untuk menyambung sekolah lagi karena terkendala biaya.

## 7) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kegunaan APM ini untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu



wilayah. APM dan APK Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.36**  
**Angka Partispasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Tahun 2016 – 2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Urusan Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD / MI	99,87	100	99,72	99,55	99,61
	SMP / MTs	70,34	72,11	69,36	70,64	73,18
2	angka pertisipasi kasar (APK)					
	SD / MI	110,73	111,23	122,68	113,74	112,08
	SMP / MTs	85,43	86,24	83,25	77,64	80,49

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021

APM dan APK Kota Pariaman untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berfluktuatif. Hanya pada tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI dengan nilai APM 100, sedangkan tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 nilai APM berkisar di atas 99 %. Sementara itu, nilai APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga berfluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara berurut yaitu 70,34; 72,11; 69,36; 70,64 dan 73,18. Begitu juga dengan nilai APK pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pariaman cenderung berfluktuatif tetapi tidak terlalu jauh perbedaan nilainya. Pada tahun 2020 nilai APK jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 112,08 dan 80,49 sedangkan pada tahun 2019 nilai APK yaitu 113,74 dan 77,64

### 2.3.1.2 Urusan Kesehatan

#### 1) Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi hal yang penting dalam mendukung bidang kesehatan Kota Pariaman.

Sarana pelayanan kesehatan merupakan faktor utama dalam dalam terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan



kesehatan yang baik tanpa terkendala oleh kurangnya fasilitas kesehatan. Adapun sarana pelayanan kesehatan di Kota Pariaman seperti tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 2.37**  
**Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit Umum	3	4	4	5	5
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Poliklinik	9	9	7	6	6
4	Pustu	13	13	12	10	10
5	Puskesmas	7	7	7	7	7
6	Poskesdes	33	33	33	51	54
7	Posyandu	137	137	71	71	71
8	Apotek	30	30	13	13	13
9	Polindes	26	26	26	0	0

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021*

Dari data pada tabel diatas bahwa pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan menambah sarana kesehatan. Disamping menyediakan tujuh puskesmas, pemerintah daerah juga menyediakan sepuluh puskesmas pembantu guna menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas. Selain itu pemerintah daerah juga menyediakan 54 poskesdes dan 71 posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kota Pariaman untuk masyarakat desa sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat karena jangkauan pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat.

Selain sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang merupakan sumber daya manusia yang harus terpenuhi baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang dibutuhkan. Seluruh tenaga kesehatan harus tersebar merata dan sebanding dengan kepadatan dan penyebaran penduduk sehingga pelayanan kesehatan yang optimal akan tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.38**  
**Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter Spesialis	3	3	3	3	3
2	Dokter	21	21	21	30	30
3	Dokter gigi	6	6	6	9	10
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	31	30	30	52	52
5	Farmasi/ Apoteker	18	18	18	15	31
6	Sarjana Kesehatan (S2)	8	8	8	7	7
7	Sarjana Non Kesehatan	13	13	13	0	2
8	Dokter (PTT)	0	0	0	0	0
9	Bidan (PNS)	74	121	121	116	129
10	Bidan (PTT)	58	7	7	0	0
11	Ahli Gizi	0	0	0	21	17
12	Perawat	76	77	77	21	82
Total						

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Dalam usaha untuk pemenuhan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga melakukan pengangkatan tenaga honor/kontrak untuk menunjang pelayanan kesehatan. Disamping itu juga mengajukan kebutuhan tenaga kesehatan dalam pengangkatan CPNS maupun PPPK dengan menghitung formasi yang dibutuhkan. Dengan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## 2) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Berikut rasio jumlah posyandu dan Balita di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.39**  
**Rasio Posyandu dan Balita Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	Unit	71	71	71	71	71
2.	Jumlah Balita	Anak	8.137	8.086	8.042	7.986	8.517
3.	Rasio Posyandu/Jml Balita	Per 1.000 balita	8,73	8,78	8,83	8,89	8,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

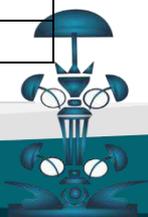


Dari tahun 2016-2020 jumlah posyandu di Kota Pariaman adalah 71 posyandu. Pemerintah daerah menyediakan minimal satu posyandu aktif setiap desa agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dari nilai rasio posyandu per jumlah balita diatas dari tahun ke tahun sebenarnya tidak mengalami masalah yang berarti. Setiap posyandu pada tahun 2020 rata-rata melayani kurang lebih 120 balita setiap tahunnya dan masih mampu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.

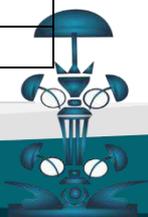
Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KB mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Berikut rasio jumlah kunjungan balita ke posyandu di Kota Pariaman tahun 2020.

**Tabel 2.40**  
**Rasio Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Pariaman**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Cakupan Kehadiran Di Posyandu (Rasio Yang Datang Terhadap Total Sasaran)
1	Pariaman Selatan	Marunggi	Padang Cakur	5
2	Pariaman Tengah	Pauh	Taratak	5
3	Pariaman Selatan	Marunggi	Pasir Sunur	5
4	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Pauh Kurai Taji	1
5	Pariaman Selatan	Marunggi	Palak Aneh	1
6	Pariaman Timur	Santok	Cubadak Mentawai	0
7	Pariaman Utara	Sikapak	Tungkal Utara	5
8	Pariaman Tengah	Pauh	Jawi - Jawi li	5
9	Pariaman Utara	Sikapak	Tungkal Selatan	5
10	Pariaman Timur	Santok	Bungo Tanjung	1
11	Pariaman Utara	Naras	Manggung	1
12	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Jawa I	1
13	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air	5
14	Pariaman Utara	Naras	Ampalu	5
15	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Perak	5
16	Pariaman Selatan	Marunggi	Sikabu	5
17	Pariaman Timur	Santok	Kaluat	0
18	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Punggung Lading	1
19	Pariaman Tengah	Pauh	Pauh Timur	5
20	Pariaman Tengah	Pauh	Pauh Barat	5
21	Pariaman Timur	Santok	Sungai Pasak	5
22	Pariaman Timur	Padusunan	Kp. Baru Padusunan	5
23	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Marabau	5



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Cakupan Kehadiran Di Posyandu (Rasio Yang Datang Terhadap Total Sasaran)
24	Pariaman Tengah	Pauh	Cimparuh	5
25	Pariaman Utara	Naras	Padang Birik-Birik	5
26	Pariaman Selatan	Marunggi	Marunggi	5
27	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Simpang	1
28	Pariaman Timur	Santok	Kajai	1
29	Pariaman Timur	Padusunan	Koto Marapak	0
30	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Baru	1
31	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Sungai Kasai	5
32	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air Selatan	5
33	Pariaman Selatan	Marunggi	Taluk	5
34	Pariaman Tengah	Pauh	Lohong	5
35	Pariaman Utara	Naras	Naras Hilir	5
36	Pariaman Utara	Naras	Sintuk	5
37	Pariaman Utara	Naras	Balai Naras	5
38	Pariaman Timur	Santok	Kampung Tengah	5
39	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Balai Kurai Taji	5
40	Pariaman Timur	Padusunan	Talago Sarik	5
41	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air Utara	1
42	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Batang Tajongkek	5
43	Pariaman Tengah	Pauh	Rawang	5
44	Pariaman Tengah	Pauh	Jati Mudik	5
45	Pariaman Tengah	Pauh	Jawi - Jawi I	5
46	Pariaman Utara	Sikapak	Sikapak Timur	5
47	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Toboh Palabah	1
48	Pariaman Utara	Naras	Naras I	5
49	Pariaman Timur	Padusunan	Sungai Sirah	5
50	Pariaman Selatan	Marunggi	Kampung Apar	5
51	Pariaman Utara	Naras	Sungai Rambai	0
52	Pariaman Tengah	Pauh	Jalan Kereta Api	5
53	Pariaman Timur	Padusunan	Pakasai	5
54	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Pondok	5
55	Pariaman Tengah	Pauh	Karan Aur	5
56	Pariaman Utara	Sikapak	Sikapak Barat	5
57	Pariaman Tengah	Pauh	Jati Hilir	1
58	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Rambai	5
59	Pariaman Tengah	Pauh	Jalan Baru	1
60	Pariaman Timur	Padusunan	Bato	5
61	Pariaman Utara	Naras	Tanjung Sabar	5
62	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Jawa li	0
63	Pariaman Tengah	Pauh	Alai Gelombang	5



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Cakupan Kehadiran Di Posyandu (Rasio Yang Datang Terhadap Total Sasaran)
64	Pariaman Timur	Santok	Air Santok	5
65	Pariaman Timur	Padusunan	Kampung Gadang	5
66	Pariaman Utara	Naras	Apar	5
67	Pariaman Tengah	Pauh	Pondok li	5
68	Pariaman Tengah	Pauh	Pasir	1
69	Pariaman Tengah	Pauh	Ujung Batung	5
70	Pariaman Timur	Santok	Kampung Kandang	5
71	Pariaman Timur	Padusunan	Batang Kabung	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Data di atas menampilkan rasio kunjungan balita ke posyandu di setiap desa. Jumlah balita di setiap desa berbeda-beda sehingga rasio kunjungan di setiap posyandu pun tidak sama. Secara umum pelayanan posyandu di setiap desa masih memadai. Ada beberapa desa yang jumlah kunjungan balita ke posyandu masih nol, ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat di desa akan pentingnya pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang balita sejak dini di posyandu guna meningkatkan status gizi balita. Untuk itu masih dibutuhkannya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat desa sehingga masyarakat memperoleh edukasi terkait kesehatan dan tumbuh kembang balita.

### 3) Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis di tengah masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio jumlah puskesmas, praktek dokter dan puskesmas pembantu tercantum di dalam tabel berikut:

**Tabel 2.41**  
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Pariaman  
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	7	7	7	7	7
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	24	24	24	24	24
3	Jumlah Pustu	Unit	12	12	12	10	10
4	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	Unit	43	43	43	41	41
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224



6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,50	0,50	0,49	0,46	0,44
---	--	------------	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio jumlah puskesmas, praktek dokter dan puskesmas pembantu per satuan penduduk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Pariaman yang mengalami peningkatan sementara jumlah sarana kesehatan yang tidak terjadi penambahan.

#### 4) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah Sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Berikut ditampilkan rasio jumlah rumah sakit yang ada di Kota Pariaman:

**Tabel 2.42**  
**Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	4	4	4	5	5
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,047	0,046	0,046	0,057	0,053

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Kota Pariaman memiliki 5 rumah sakit, yaitu RSUD Kota Pariaman, RSUD Dr. Sadikin, RS Aisyiyah Pariaman, RS Tamar Medical Centre dan RSIA Citra Aguswar. Pada tahun 2019 ada penambahan satu rumah sakit, hal ini untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat karena pasien yang datang untuk berobat tidak hanya dari dalam Kota Pariaman saja tetapi dari daerah tetangga.

#### 5) Angka Kematian dan Kelahiran Bayi

Jumlah kematian dan kelahiran hidup bayi di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.43**  
**Angka Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	35	21	25	21	14
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (bayi)	1.664	1.619	1.628	1.612	1.560

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meminimalisir terjadinya kematian bayi. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi sebanyak 14 bayi, ini merupakan jumlah terkecil dalam lima tahun terakhir.

Angka kelahiran hidup bayi selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah kelahiran bayi sebanyak 1.560 nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.612 pada tahun 2019. Penurunan angka kelahiran hidup bayi ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam memberikan jarak kelahiran dan membentuk keluarga yang berkualitas dengan melaksanakan program keluarga berencana.

Jumlah kematian ibu di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.44**  
**Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Puskesmas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Puskesmas Naras	0	0	0	1	0
2.	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0	0	0	0	0
3.	Puskesmas Pauh	0	0	0	1	0
4.	Puskesmas Kurai Taji	0	0	0	1	0
5.	Puskesmas Marunggi	0	0	0	0	0
6.	Puskesmas Air Santok	0	0	0	1	0
7.	Puskesmas Sikapak Barat	0	0	0	0	0
		0	0	0	4	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Secara umum semua puskesmas yang ada di Kota Pariaman jumlah kematian ibu nihil. Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu sebanyak 4 orang yang tersebar di beberapa puskesmas. Pada tahun 2019 ini menjadi bahan evaluasi bagi puskesmas dan setiap pihak terkait di bidang kesehatan khususnya untuk menekan angka kematian ibu di tahun berikutnya. Hal tersebut diupayakan dengan serius dan terbukti pada tahun 2020 dimana angka kematian ibu nol (nihil)



## 6) Prosentase Kasus Stunting Balita

Stunting adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Persentase kasus stunting balita di Kota Pariaman pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.45**  
**Pravelensi Kasus Stunting Balita di Kota Pariaman Tahun 2020**

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PADANG CAKUR	14	36,84
2	PARIAMAN TENGAH	PAUH	TARATAK	19	31,67
3	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PASIR SUNUR	4	30,77
4	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	PAUH KURAI TAJI	14	28,57
5	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PALAK ANEH	7	24,14
6	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	CUBADAK MENTAWAI	17	23,29
7	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	TUNGKAL UTARA	14	22,95
8	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JAWI - JAWI II	12	20,69
9	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	TUNGKAL SELATAN	16	17,98
10	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	BUNGO TANJUNG	17	17,17
11	PARIAMAN UTARA	NARAS	MANGGUNG	17	17,17
12	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG JAWA I	11	16,67
13	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR	10	16,39
14	PARIAMAN UTARA	NARAS	AMPALU	27	15,88
15	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG PERAK	7	14,89
16	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	SIKABU	5	14,29
17	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KALUAT	6	13,95
18	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	PUNGGUNG LADING	15	13,64
19	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PAUH TIMUR	17	13,18
20	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PAUH BARAT	20	13,07
21	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	SUNGAI PASAK	9	12,86
22	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KP. BARU PADUSUNAN	9	12,86
23	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	MARABAU	12	12,24
24	PARIAMAN TENGAH	PAUH	CIMPARUH	22	11,83
25	PARIAMAN UTARA	NARAS	PADANG BIRIK-BIRIK	10	11,36
26	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	MARUNGGI	21	11,29
27	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	SIMPANG	6	11,11
28	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAJAI	5	11,11
29	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KOTO MARAPAK	9	11,11
30	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG BARU	16	11,03



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
31	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	SUNGAI KASAI	3	10,71
32	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR SELATAN	6	10,71
33	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	TALUK	25	10,59
34	PARIAMAN TENGAH	PAUH	LOHONG	6	10,53
35	PARIAMAN UTARA	NARAS	NARAS HILIR	13	10,48
36	PARIAMAN UTARA	NARAS	SINTUK	6	10,17
37	PARIAMAN UTARA	NARAS	BALAI NARAS	14	9,93
38	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAMPUNG TANGAH	4	9,76
39	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	BALAI KURAI TAJI	7	9,72
40	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	TALAGO SARIK	10	9,62
41	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR UTARA	10	9,26
42	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	BATANG TAJONGKEK	4	8,70
43	PARIAMAN TENGAH	PAUH	RAWANG	9	8,11
44	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JATI MUDIK	3	7,89
45	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JAWI - JAWI I	4	7,84
46	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	SIKAPAK TIMUR	5	7,58
47	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	TOBOH PALABAH	9	7,50
48	PARIAMAN UTARA	NARAS	NARAS I	15	7,43
49	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	SUNGAI SIRAH	2	7,14
50	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	KAMPUNG APAR	3	6,98
51	PARIAMAN UTARA	NARAS	SUNGAI RAMBAI	5	6,94
52	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JALAN KERETA API	4	6,78
53	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	PAKASAI	5	6,67
54	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG PONDOK	5	5,62
55	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KARAN AUR	6	5,56
56	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	SIKAPAK BARAT	7	5,30
57	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JATI HILIR	4	5,06
58	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	RAMBAI	3	4,76
59	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JALAN BARU	5	4,35
60	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	BATO	3	4,35
61	PARIAMAN UTARA	NARAS	TANJUNG SABAR	2	4,17
62	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG JAWA II	2	4,08
63	PARIAMAN TENGAH	PAUH	ALAI GELOMBANG	3	3,75
64	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	AIR SANTOK	3	3,23
65	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KAMPUNG GADANG	2	2,08
66	PARIAMAN UTARA	NARAS	APAR	1	1,56
67	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PONDOK II	1	1,49
68	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PASIR	0	0,00
69	PARIAMAN TENGAH	PAUH	UJUNG BATUNG	0	0,00



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
70	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAMPUNG KANDANG	0	0,00
71	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	BATANG KABUNG	0	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase anak stunting di setiap desa bervariasi. Untuk persentase stunting pada anak yang paling rendah yaitu terdapat di empat desa yaitu Desa Pasir, Ujung Batung, Kampung Kandang dan Batang Kabung dimana keempat desa tersebut persentase stuntingnya adalah 0 %. Sedangkan yang paling tinggi yaitu Desa Padang Cakur yaitu sebesar 36,84 %. Tidak meratanya jumlah kasus stunting yang ada di setiap desa ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkait di bidang kesehatan untuk lebih serius lagi dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Upaya konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting akan dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan.

Upaya Konvergensi Stunting yang akan dilakukan melalui 8 Aksi yaitu : melakukan Analisis Situasi , Melakukan Pemetaan, Melaksanakan Rencan Stunting, Membuat Perwako Tentang Peran Desa, Melakukan Pembinaan KPM, Membuat Sistem Manajemen Data, Melakukan Pengukuran dan Publikasi Stunting, Melakukan Evaluasi Stunting untuk memastikan :

- Perencanaan kegiatan Pencegahan stunting dengan berbasis Data
- Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh Daerah yang sudah dimasukkan pada perencanaan dan penganggaran
- Melakukan pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam program
- Melakukan Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan  
Menjadikan hasil evaluasi Kinerja digunakan dasar perencanaan dan Penganggaran

## 7) Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Pariaman dari tahun 2019 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.46**  
**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**

NO	Uraian	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	89,3 %	90,3 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	94,8 %	92,3 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	98,2 %	92,63 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	90,14 %	59,42 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	98,8 %	99 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21,9 %	37 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	80,7 %	68,61 %
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27,3 %	15,62 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	42,2 %	62 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	37,85 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100 %	55,3 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021



Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 indikator pencapaian SPM bidang kesehatan, namun pada tahun 2020 dari 12 indikator pencapaian SPM tersebut hanya dua indikator saja yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Indikator tersebut yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar. Sementara 10 indikator lainnya mengalami penurunan. Penyebab dari penurunan capaian SPM ini adalah karena adanya pandemi Covid 19 yang membuat masyarakat khususnya ibu hamil khawatir pergi tempat pelayanan kesehatan begitu juga dengan masyarakat yang enggan membawa anaknya ke posyandu.

### 2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1) Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan kota merupakan bagian dari jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil (perumahan atau perkebunan), antar persil, dan antar pusat pemukiman di kota. Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6\%$ ), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.47**  
**Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pariaman**  
**Tahun 2016– 2020**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Jalan Baik (Km)	Km-	185.821	100.205	112.403	126.158	133.835
2	Panjang Jalan Kota (Km)	Km-	398.726	399.528	410.325	411.896	412.844
3	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	46,60	25,08	27,39	30,63	32,42

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel di atas menunjukkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Pariaman dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu meningkat seiring juga dengan bertambahnya panjang jalan kota. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah kota pariaman serius dalam mendukung pembangunan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Konsistensi ini akan tetap di pertahankan dan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini adalah dengan menambah pembuatan bahu jalan dan drainase yang berfungsi dengan baik. Selain itu juga melakukan kegiatan perbaikan jalan



rusak yang belum terlaksana di tahun sebelumnya. Hal ini harus diimbangi dengan anggaran yang ada karena anggaran yang dimiliki oleh daerah terbatas karena adanya pandemi Covid 19.

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Berikut persentase jalan yang memiliki trotoar di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu:

**Tabel 2.48**  
**Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Pariaman**  
**Tahun 2016 – 2020**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	Km	161.842	166.163	171.307	171.307	171.701
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	Km	398.726	399.528	410.325	411.896	412.844
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar	KM/ Org	40,59	41,59	41,59	41,59	41,59

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel diatas penambahan trotoar jalan hanya dilakukan pada tahun 2017, dimana pada tahun 2016 persentase jalan yang memiliki trotoar sebesar 40,59% sementara pada tahun 2017 naik menjadi 41,59 %. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak ada penambahan trotoar sehingga sampai tahun 2020 persentase jalan yang memiliki trotoar masih tetap 41,59 %.

## 2) Proporsi Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.49**  
**Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016– 2020**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	175,27	194,38	218,94	234,65	245,84
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	Km	113,93	116,63	153,26	187,72	208,97
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.	%	65	60	70	80	85

*Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2021*

Dari data pada tabel di atas persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2017 terjadi penurunan yaitu pada tahun 2016 dengan kondisi baik 65 % sedangkan pada tahun 2017 dalam kondisi baik 60 %. Hal terjadi karena pada tahun 2017 adanya penambahan panjang drainase namun tidak diiringi dengan perbaikan drainase yang rusak. Sementara itu pada tahun 2018 jumlah drainase yang dibuat bertambah menjadi 218,94 Km dengan persentase dalam kondisi baik 70%. Peningkatan jumlah drainase dalam kondisi baik ini terus ditingkatkan pada tahun 2019 dan 2020 walaupun tidak ada penambahan drainase baru.

### 3) Proporsi Irigasi Dalam Kondisi Baik

Irigasi atau pengairan menjadi hal penting dalam pertanian. Tanpa adanya pengairan yang baik maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen nantinya. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.50**  
**Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	4.478	4.493	2.732	2.732	2.732
2	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	3.134	3.370	2.131	2.240	2.322
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	70	75	78	82	85

*Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2021*



#### 4) Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya di kali 100 persen. Status irigasi di Kota Pariaman adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Persentase luas lahan pertanian yang terairi irigasi di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingatahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.51**  
**Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	Ha	1.846	1.923	1.383	1.383	1.321
2	Luas Lahan Budi Daya (Ha)	Ha	2.502	2.493	1.785	1.785	1.785
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	%	73,78	77,14	77,48	77,48	77,48

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 persentase luas lahan pertanian yang teairi irigasi di Kota Pariaman sebanyak 73,78 %, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 77,14 %, selanjutnya pada tahun 2018 maish terjadi peningkatan luas lahan yang terairi irigasi yaitu sebesar 77,48 %. Namun pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, persentase luas lahan yang terairi irigasi tetap yaitu sebesar 77,48 %.

#### 5) Sanitasi dan Air Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.52**  
**Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum**  
**Tahun 2016- 2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	18.384	18.583	18.799	18.977	19.581
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	3.997	4.397	4.952	5.270	5.482

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2021



Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang ada di Kota Pariaman terus meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir ini. Begitu juga dengan rumah tangga dengan akses air bersih juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga. Hal ini berdampak pada persentase proporsi rumah tangga dengan akses air minum yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kebutuhan air bersih akan selalu meningkat dengan selarasnya peningkatan jumlah penduduk dan rumah tangga serta kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses air bersih harus selalu ditingkatkan, hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih juga melindungi masyarakat dari penyakit diare.

Menurut Depkes RI, 2004 jamban keluarga sehat adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. 2) Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijangkau serangga maupun tikus 3) Mudah dibersihkan dan aman penggunaanya 4) Cukup penerangan 5) Lantai kedap air 6) Ventilasi cukup baik 7) Tersedia air dan tersedia alat pembersih 8) Dilengkapi dinding dan atap penutup. Persentase RT Yang Memenuhi Syarat di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.53**  
**Persentase RT Yang Memenuhi Syarat**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	18.374	18.583	18.799	18.977	19.146
2	Jumlah rumah yang diperiksa	18.374	18.583	18.799	18.977	19.146
3	Jumlah rumah dengan jamban	16.321	16.976	17.690	18.350	18.350
4	Persentase rumah dengan jamban	88,83	91,35	94,10	96,70	95,84
	Kota					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2021

Persentase rumah dengan jamban selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan adanya Covid 19 dimana sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan Covid 19 di Kota Pariaman. Pada tahun 2016 jumlah rumah dengan jamban adalah 88,83 % terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 91,35 % dan tahun 2018 sebesar 94,10 %. Pada tahun 2019 masih meningkat yaitu 96,70 %, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 95,84 %. Buruknya sanitasi di lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit di lingkungan tersebut. Selain itu perilaku masyarakat juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Salah satu perilaku masyarakat tersebut yaitu perilaku BABS. Bertambahnya jumlah penduduk yang berperilaku BABS maka alam semakin tidak mampu dalam mendaur



ulang limbah manusia tersebut, sehingga dibutuhkan jamban yang memenuhi syarat di setiap rumah tangga agar dapat merubah pola perilaku BABS masyarakat yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesehatan dan taraf hidup masyarakat.

Saluran pembuangan air limbah atau yang sering disingkat dengan SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah berupa saluran perpipaan maupun yang lainnya yang dapat dipergunakan untuk membuang air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau tempat buangan air limbah. Prilaku masyarakat yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap ekosistem dan timbulnya berbagai masalah sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan yaitu pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja, air limbah, tempat pembuangan sampah, pembawa penyakit dan kondisi lingkungan perumahan. Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.54**  
**Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	16.704	17.045	17.393	17.748	17.888
2	Jumlah rumah yang diperiksa	16.704	17.045	17.393	17.748	17.888
3	Jumlah rumah dengan SPAL	10.398	10.610	10.827	11.048	11.188
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat	7.673	7.937	8.205	8.577	8.814
5	Persentase yang memenuhi syarat	73,79	74,81	75,78	77,63	78,78
Kota						

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase SPAL yang memenuhi syarat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan hidup di Kota Pariaman. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah rumah tetapi juga diiringi dengan peningkatan jumlah rumah yang memiliki SPAL dan memenuhi syarat. Hingga tahun 2020 sudah mencapai 78,78 % rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat hal ini menunjukkan masih ada sekitar 21 % lagi rumah yang belum memiliki SPAL sesuai syarat yang berlaku. Pencapaian jumlah rumah yang memiliki SPAL harus terus ditingkatkan demi menunjang taraf hidup yang lebih baik lagi. Untuk mencapai jumlah rumah yang memiliki SPAL, pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya SPAL di rumah tangga.



#### 2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kasawan Permukiman

Kualitas lingkungan permukiman menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, Penataan dan pembangunan perumahan permukiman dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rasio rumah layak huni dihitung dari perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.

Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 m<sup>3</sup> perkapita pertahun masih di atas rata-rata dunia yang hanya 8.000 m<sup>3</sup> perkapita pertahun. Sumber daya air di Kota Pariaman berupa air tanah dan sungai yang mengalir dari wilayah timur laut ke barat daya Pariaman. Potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kota Pariaman pada umumnya relatif besar karena dangkalnya air tanah di wilayah ini sehingga memudahkan penduduk dalam penggunaannya. Pola pengaliran sungai yang relatif paralel menunjukkan perubahan morfologi yang konsisten. Pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Kota Pariaman dilalui oleh 3 buah sungai yaitu Batang Manggung (11,50 km) yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Pariaman (12,00 km) dan Batang Manggau (11,80 km) yang berhulu di Kecamatan Pariaman Selatan dan melewati Kecamatan Pariaman Tengah. Kebutuhan air minum di Kota Pariaman sangat mendesak. Kapasitas yang ada saat ini tidak berimbang dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani karena masih banyak rumah tangga yang memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidupnya selain itu penyediaan sistem air minum juga diarahkan untuk menunjang fungsi pengembangan kota.

Rencana pengembangan utilitas air minum diarahkan pada:

- a. Pencarian sumber air minum alternatif, misalnya dengan membuat DAM, membuat reservoir, atau memanfaatkan sungai kecil.
- b. Peningkatan sistem jaringan distribusi
- c. Penambahan dan perbaikan sistem pelayanan sambungan ke rumah-rumah sehingga persebaran pelayanan air minum dapat meliputi seluruh masyarakat.

Sistem penyediaan air minum dikonsentrasikan di pusat kota yang merupakan pusat kegiatan lokal yaitu di seluruh Kecamatan Pariaman Tengah dan pada pusat-pusat unit lingkungan. Sistem tersebut diakomodasi oleh sarana pengangkutan air bersih berupa truk tangki. Sedangkan untuk daerah lainnya di Kota Pariaman dibangun penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Perkiraan kebutuhan air minum di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.55**  
**Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Pariaman Tahun 2030**

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga 2030	Jumlah kebutuhan air untuk sambungan rumah @230 L/RT/hari	Kebutuhan sambungan rumah (RT)	Jumlah kebutuhan air untuk kran umum @30 L/hari	Kebutuhan sambungan kran umum
Pariaman Utara	4.991	1.147.930	549.036	748.686	6.487
Pariaman Tengah	5.123	1.178.290	705.132	788.499	7.747
Pariaman Selatan	3.928	903.440	432.075	589.193	5.892
Pariaman Timur	2.139	491.970	209.978	201.678	3.155
<b>Jumlah</b>	<b>15.520</b>	<b>3.721.630</b>	<b>1.707.241</b>	<b>2.328.056</b>	<b>23.281</b>

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2021

Perkembangan kebutuhan air minum di Kota Pariaman untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Namun dari data yang ada terlihat bahwa persentase penduduk Kota Pariaman yang dapat akses air bersih mengalami fluktuatif tiap tahunnya, hal ini bergantung kepada kemampuan PDAM sebagai unit pengelolaan dan penyediaan air minum di Kota Pariaman. Permasalahan lain yang sering terjadi pada masyarakat perkotaan salah satunya sanitasi, Pemerintah Kota Pariaman memberikan fasilitas dan akses sanitasi pada setiap pemukiman masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Pariaman pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.56**  
**Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah tangga pengguna air bersih	220	420	830	1,270.00	1,345.00
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	1.25	2.31	4.51	7.13	7.59
3	Rumah tangga pengguna listrik	99,66	98,85	99,75	99,72	99,80
4	Rumah tangga bersanitasi	88.83	91.35	94.10	96.70	95.84
5	Lingkungan pemukiman kumuh	6,55	6,20	6,20	6,20	6,20
6	Rumah tinggal berakses sanitasi	32.934	32.934	19.800	20.900	20.900

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2021

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat. Pemerintah daerah konsisten untuk terus meningkatkan jumlah pengguna air bersih oleh rumah tangga untuk meningkatkan kesehatan dan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada



tahun 2016 jumlah pengguna air bersih sebanyak 220 rumah tangga kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 420 rumah tangga terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 830 rumah tangga hingga pada tahun 2019 dan tahun 2020 secara berturut-turut berjumlah 1.270 dan 1.345 rumah tangga. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik di Kota Pariaman pada tahun 2020 sudah mencapai 99,80%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 0,2% lagi yang belum memiliki akses listrik. Lingkungan pemukiman kumuh di Kota Pariaman dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Pemerintah daerah akan terus gencar dalam menurunkan persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Pariaman. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di Kota Pariaman adalah program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Kegiatan Kotaku ini selain untuk meningkatkan kualitas pemukiman kumuh juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Program pemerintah daerah ini merupakan bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan, guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

**Tabel 2.57**  
**Kawasan Pemukiman Kumuh Per kecamatan Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Jumlah kawasan pemukiman kumuh</b>					
	Pariaman Tengah	7	7	7	7	7
	Pariaman Utara	3	3	3	3	3
	Pariaman Selatan	3	3	3	3	3
	Pariaman Timur	0	1	1	1	1
<b>2</b>	<b>Luas Kawasan Pemukiman Kumuh</b>					
	Pariaman Tengah	50,53	50,63	50,63	50,63	50,63
	Pariaman Utara	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
	Pariaman Selatan	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99
	Pariaman Timur	0	5,42	5,42	5,42	5,42
<b>3</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal Dikawasan Pemukiman Kumuh</b>					
	Pariaman Tengah	485	485	485	485	485
	Pariaman Utara	311	311	311	311	311
	Pariaman Selatan	149	149	149	149	149
	Pariaman Timur	0	69	69	69	69

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2021

### 2.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Linmas. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Pariaman.



### 1) Cakupan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Rasio jumlah polisi pamong praja mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara dan menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah.

**Tabel 2. 58**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Petugas Pol PP	150	175	189	283	285
Jumlah Penduduk	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
Rasio Jumlah Petugas Pol PP/10.000 Penduduk	-	1 : 23	1 : 21	1 : 31	1 : 20

*Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah personil Satpol PP. Begitu juga jumlah penduduk Kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat, rasio petugas satpol PP dengan jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pertambahan penduduk dengan petugas satpol PP.

Petugas Satpol PP bertugas menjalankan patroli dalam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan SPM tersebut. Target capaian kinerja SPM Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan. Apabila telah tercipta kondisi ini maka kinerja minimal pelaksanaan patrol tersebut telah dianggap terpenuhi.

Selain itu, Satpol PP juga rutin melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap ketertiban dan berkerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya penegakkan Perda di Pariaman. Petugas Linmas juga menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas di Kota Pariaman. Berikut data kriminalitas di Kota Pariaman :



**Tabel 2.59**  
**Angka kriminalitas di Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Curat (pencurian dan pemberatan)	51	75	75	62	7
Penggelapan	51	22	29	40	22
KDRT	-	-	-	-	-
Penipuan	42	44	29	29	30
Pengrusakan	21	23	16	7	10
Perkosaan	-	-	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	2
Jumlah criminal	377	347	338	308	228
Jumlah penduduk	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
Angka kriminalitas (%)	0,444	0,401	0,386	0,348	0,242

*Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2021*

Dilihat dari tabel di atas jumlah angka kriminalitas Kota Pariaman dari tahun 2016-2020 secara umum mengalami penurunan dari 377 Tahun 2016 menjadi 228 Tahun 2020. Yang secara presentase jika dibandingkan dengan jumlah penduduk juga mengalami penurunan dari Tahun 2016 sebesar 0,444 % di Tahun 2020 turun menjadi 0,242 %. Penurunan angka kriminalitas bisa dikatakan secara umum bahwa Kota Pariaman adalah kota kecil yang aman dari tindakan kejahatan.

Permasalahan tindak kriminalitas di Kota Pariaman dan dalam rangka sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Pariaman. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Pariaman yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas. Tindak kriminalitas menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk mengatasinya, baik itu untuk menekan jumlahnya dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

## 2) Penanggulangan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran juga selalu terjadi di Kota Pariaman. Setiap peristiwa bencana kebakaran yang terjadi menimbulkan kerugian baik materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Berikut data kebakaran yang terjadi dari tahun 2016-2020 di Kota Pariaman.



**Tabel 2.60**  
**Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kebakaran	49	40	23	2	2

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2021

### 3) Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Pariaman merupakan kota yang relatif rawan longsor dan rawan bencana. Hal ini disebabkan karena tekstur wilayahnya berada di perbukitan dan pemukimannya banyak yang berada di lereng bukit. Sehingga beberapa kawasan di Kota Pariaman menjadi daerah rawan bencana. Berikut data bencana yang terjadi di Kota Pariaman.

**Tabel 2.61**  
**Data Bencana di Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	1	1	3	8	1
2	Gunung Meletus	-	-	-	-	-
3	Longsor	-	-	-	-	-
4	Gempa	-	-	-	1	-
5	Angin puting beliung	-	-	-	-	-

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2021

#### 2.3.1.6 Urusan Sosial

Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Indikator kegiatan dinas sosial dilihat dari Jumlah PPKS, Penanganan PPKS, PPKS yang memperoleh bantuan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.62**  
**Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	5	4	4	4
2.	PPKS yang memperoleh bantuan	20	2.975	3.341	2.755	3.369
3.	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS	20	2.975	3.341	2.755	3.369
4.	Jumlah PPKS	5.879	5.878	5.879	5.879	11.135

Sumber : Dinas Sosial Kota Pariaman, 2021

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, pembangunan di Kota Pariaman menggambarkan kinerja yang cukup baik. Berikut perkembangan angkatan kerja di Kota Pariaman periode 2016-2020.

**Tabel 2.63**  
**Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,95	65,20	66,65	68,95	64,16
2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	30,00	41,19	52,35	52,35	64,39
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,61	5,97	5,72	5,42	5,73
4.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	79,84	65,49	66,70	36,32	64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang potensial untuk memproduksi barang dan jasa, dan jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, mereka mampu untuk



berpartisipasi didalamnya. Batasan usia > 15 tahun ini sesuai dengan ketentuan batasan penduduk usia kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Batasan ini diberlakukan mengingat juga ada pekerja anak dengan kategori rentang umur antara 10-14 tahun.

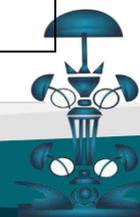
Selain tingkat tenaga kerja, di dalam demografi penduduk juga perlu diperhatikan aspek kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

### 2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam urusan pemberdayaan perempuan pemerintah Kota Pariaman sangat serius terhadap permasalahan rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani penurunannya sangat signifikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Untuk kesetaraan gender menunjukkan peningkatan perbaikan dengan dengan partisipasi perempuan dalam lembaga seperti lembaga hukum, politik, ekonomi, dan social dan jumlah perangkat daerah yang sudah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) dibandingkan dengan tahun lau sudah mengalami peningkatan. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.64**  
**Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,96	98,95	98,61	98,19	98,49
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	50,10	50,60	51,34	52,24	53,15
3.	Rasio KDRT		100	100	100	100	100
4.	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	%	64.13	65.06	64.60	65.33	66.20
5.	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga	%	64,13	65,06	64,60	65,33	66.20
6.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Sudah Menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perangkat Daerah	6	6	6	10	10
7.	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus	Orang	98	98	98	99	100
8.	Jumlah lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	Lembaga	3	4	4	4	4



No	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	Rumah	1	1	1	1	1
10.	Jumlah Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Orang	42	63	78	78	78
11.	Jumlah Pemberdayaan Perempuan						
-	Bidang Politik	Orang	1	1	1	1	1
-	Bidang Hukum	Orang	38	42	42	43	43
-	Bidang Sosial	Orang	76	76	81	88	88
-	<i>Bidang Ekonomi</i>	Orang	1.214	1.286	1.359	1.426	1.510

Sumber : Dinas P3AKB Kota Pariaman, 2021

### 2.3.2.3 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam suatu wilayah, diharapkan tercapai ketahanan pangan, yang juga menjadi kebutuhan dasar penduduk. Dengan demikian, diharapkan penduduk Kota Pariaman mendapatkan akses pangan yang baik, dari jumlah maupun mutu pangan.

Secara umum, berdasarkan Tabel 2.39 ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.

**Tabel 2.65**  
Perkembangan Indikator Urusan Pangan Kota Pariaman  
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Daerah	Kinerja	Satuan	Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Skor PPH Kota Pariaman		Nilai	85	86,00	86,00	86,00	86
2.	Regulasi ketahanan pangan		-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan pangan utama		Ton	196,40	203,26	237,95	237,95	240,15
4.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati		Ton	26,084,60	30,532,60	62.838,30	7.125,80	45.156,15
5.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani		Ton	1.509,78	11.862,67	8.501,55	9.564,25	9.745,35
6.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		%	85	85	85	85	85



7.	Persentase Keamanan Penanganan Pangan	%	90	90	90	90	90
8.	Ketersediaan Pangan Perkapita/Tingkat konsumsi	Kg/Kapita/Tahun	2.150	2.185	2.023	2.200	2.150
9.	Jumlah Kelembagaan Pangan Masyarakat (Gapoktan)	Lembaga	71	71	71	71	71

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2021

Berdasarkan data tabel diatas secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Kota Pariaman ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalami peningkatan dengan skor 85 tahun 2016 menjadi 86,0 pada tahun 2020. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman pada tahun 2016 – 2020 cenderung fluktuatif. Ketersediaan pangan di Kota Pariaman berasal dari daerah lain di sekitar Kota Pariaman dan juga hasil produksi di wilayah Kota Pariaman. Di samping itu, perhitungan ketersediaan pangan di kota Pariaman didapat dari akumulasi cadangan pangan ketika bencana terjadi. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

#### 2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Pada Urusan Pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi banyaknya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan, dan peralihan peralihan hak tanah atas sebabnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.66**  
**Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banyaknya Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan	40,68	41,90	42,80	45,68	-
-	Hak Milik	477	1.023	902	284	787
-	Hak Guna Bangunan	114	155	142	-	94
-	Hak Wakaf	2	3	18	2	2
-	Hak Pakai	60	75	13	9	32
2.	Peralihan Hak Tanah dan sebabnya					
-	Jual Beli	630	508	720	799	738
-	Hibah	2	2	8	10	3
-	Pemisahan	379	410	499	491	419
-	Lainnya	54	41	67	68	21

Sumber : Dinas PU, PR & Pertanahan Kota Pariaman, 2021



### 2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Lampiran 1 Permendagri menyebutkan bahwa terdapat delapan indikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan. Dari 8 indikator itu hanya 4 indikator yang dapat disajikan 1) Persentase penanganan sampah, 2) cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, 3) tempat pembuangan sampah (TPS) dan persentase penanganan sampah per satuan penduduk.

Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Indikator persentase penanganan sampah di Kota Pariaman berdasarkan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan LH Kota Pariaman menggunakan perbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA dengan perkiraan volume sampah. Analisis terkait dengan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan data dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

**Tabel 2.67**  
**Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	44,20	45,15	45,52	47,24	60,29
2.	Persentase Penanganan Sampah	41.51	72.00	73.00	70.40	70,60
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100
4.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.07	0.091	0.096	0.097	0,097
5.	Rata-rata Perkiraan Timbunan Sampah Perhari	21.655	21.892	22.131	22.370	22.570
6.	Indeks Pencemaran Udara	77,03	90,78	90,85	91.25	91.25
-	Abrasi Pantai	16	16	16	16	16
-	Erosi	2	2	2	2	2
7.	Jumlah Lokasi Pencemaran air Sungai	4	4	4	5	4
8.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Bersih	80,92	81	78,42	82,49	82,65

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2021



### 2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data di bawah ini bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Pariaman sudah baik, Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Pada penerapan Nasional KTP berbasis NIK Kota Pariaman sudah melaksanakannya sudah 100%, Jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK dan Kepemilikan KTP terus meningkat, artinya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dalam kependudukan sudah baik.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 97,85% dari 67.032 orang penduduk wajib ber-e KTP. Sementara itu untuk Kepala Keluarga di Kota Pariaman sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebesar 98,35 % di Pariaman. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Pariaman terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (e-KTP dan KK) sangat tinggi dan usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan seluruh Desa dan Kelurahan membuahkan hasil.

Namun, dari keberhasilan diatas masih perlu upaya maksimal bersama seluruh pihak terkait guna meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran yang baru mencapai 52,89 %. Dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang pencapaiannya masih sebesar 31,90 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68  
Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala keluarga			Jumlah penduduk memiliki kartu keluarga		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	4.906	1.593	6.499	4.845	1.537	6.382
2	Kecamatan Pariaman Tengah	7.014	1.976	8.990	6.919	1.936	8.855
3	Kecamatan Pariaman Selatan	4.194	1.442	5.636	4.113	1.388	5.501
4	Kecamatan Pariaman Timur	4.074	1.237	5.311	4.045	1.219	5.264
<b>Total</b>		<b>20.188</b>	<b>6.248</b>	<b>26.436</b>	<b>19.922</b>	<b>6.080</b>	<b>26.002</b>

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2021



**Tabel 2.69**  
**Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Pariaman Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Penduduk Memiliki KTP – EI			% Kepemilikan KTP-EI		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	8.251	8.247	16.498	7.995	8.111	16.106	96,90	98,35	97,62
2	Kecamatan Pariaman Tengah	11.455	11.513	22.968	11.146	11.336	22.482	97,30	98,46	97,88
3	Kecamatan Pariaman Selatan	6.984	7.110	14.094	6.789	7.011	13.800	97,21	98,61	97,91
4	Kecamatan Pariaman Timur	6.681	6.791	13.472	6.494	6.710	13.204	97,20	98,81	98,01
<b>Total</b>		<b>33.371</b>	<b>33.661</b>	<b>67.032</b>	<b>32.424</b>	<b>33.168</b>	<b>65.592</b>	<b>97,16</b>	<b>98,54</b>	<b>97,85</b>

*Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2021*

Sementara itu dilihat dari komposisi penduduk berdasar jenis pekerjaan di Kota Pariaman pada tahun 2020 didominasi oleh belum/tidak bekerja (24,99%) Pelajar/ Mahasiswa (24,52%), Wiraswasta (20,41%), dan pekerjaan lainnya (19,42%). Dan komposisi penduduk berdasar tingkat pendidikan di dominasi oleh penduduk setingkat SLTA/ sederajat (24,44 %). penduduk tidak/ belum sekolah (21,86 %) dan penduduk tamat SD/Sederajat (14,54%) serta penduduk tamat SLTP/Sederajat (14,52%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.70  
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020

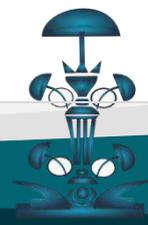
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran			% Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	11.764	11.516	23.280	6.102	6.168	12.270	51,87	53,56	52,71
2	Kecamatan Pariaman Tengah	16.205	15.742	31.947	8.029	7.922	15.951	49,55	50,32	49,93
3	Kecamatan Pariaman Selatan	10.081	9.911	19.992	5.286	5.416	10.702	52,44	54,65	53,53
4	Kecamatan Pariaman Timur	9.647	9.493	19.140	5.457	5.523	10.980	56,57	58,18	57,37
<b>Total</b>		<b>47.697</b>	<b>46.662</b>	<b>94.359</b>	<b>24.874</b>	<b>25.029</b>	<b>49.903</b>	<b>52,15</b>	<b>53,64</b>	<b>52,89</b>

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2021

Tabel 2.71  
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020

No	Kecamatan	Wajib KIA			Kepemilikan KIA			% Kepemilikan KIA		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	3.513	3.269	6.782	874	859	1.733	24,88	26,28	25,55
2	Kecamatan Pariaman Tengah	4.751	4.229	8.980	1.431	1.411	2.842	30,12	33,36	31,65
3	Kecamatan Pariaman Selatan	3.097	2.801	5.898	925	887	1.812	29,87	31,67	30,72
4	Kecamatan Pariaman Timur	2.967	2.702	5.669	1.157	1.175	2.332	39,00	43,49	41,14
<b>Total</b>		<b>14.328</b>	<b>13.001</b>	<b>27.329</b>	<b>4.387</b>	<b>4.332</b>	<b>8.719</b>	<b>30,62</b>	<b>33,32</b>	<b>31,90</b>

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2021



**Tabel 2.72**  
**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kota Pariaman Tahun 2020**

No	Pekerjaan	JENIS KELAMIN			%
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Belum/Tidak Bekerja	12.626	10.959	23.585	24,99
2	Aparatur/Pejabat Negara	2.343	2.574	4.917	5,21
3	Tenaga Pengajar	176	524	700	0,74
4	Wiraswasta	16.453	2.806	19.259	20,41
5	Pertanian/Peternakan	1.952	91	2.043	2,17
6	Nelayan	1.189	4	1.193	1,26
7	Agama Dan Kepercayaan	50	0	50	0,05
8	Pelajar/Mahasiswa	12.378	10.757	23.135	24,52
9	Tenaga Kesehatan	36	272	308	0,33
10	Pensiunan	481	367	848	0,90
11	Lainnya	13	18.308	18.321	19,42
<b>Total</b>		<b>47.697</b>	<b>46.662</b>	<b>94.359</b>	<b>100</b>

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2021

**Tabel 2.73**  
**Data Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman Tahun 2020**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN			%
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tidak/Blm Sekolah	10.787	9.842	20.629	21,86
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	6.545	6.126	12.671	13,43
3	Tamat Sd/Sederajat	6.738	6.978	13.716	14,54
4	SLTP/Sederajat	7.385	6.318	13.703	14,52
5	SLTA/Sederajat	12.210	10.856	23.066	24,44
6	Diploma I/II	178	642	820	0,87
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	680	1.466	2.146	2,27
8	Diploma IV/Strata I	2.922	4.226	7.148	7,58
9	Strata-II	241	202	443	0,47
10	Strata-III	11	6	17	0,02
<b>Total</b>		<b>47.697</b>	<b>46.662</b>	<b>94.359</b>	<b>100</b>

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2021

### 2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak, yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2019 telah dapat dicapai angka 100% untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berbasis NIK, PKK aktif, POsyandu aktif, dan jumlah LPM yang sudah ada per desa/kelurahan



**Tabel 2.74**  
**Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berbasis NIK	100	100	100	100	100
2.	PKK Aktif	100	100	100	100	100
3.	Kelompok Binaan PKK	75	76	76	76	76
4.	Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
5.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	55	55	55	55	55
6.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	10	10	12	11	11
7.	Jumlah LPM	71	71	71	71	71

Sumber : DPMD Kota Pariaman, 2021

### 2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/ kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Rasio akseptor KB, cakupan KB, jumlah balai KB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.75**  
**Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	4	4	3	3
2.	Rasio Akseptor KB	63,67	63,89	65,85	66,75	64,69
3.	Cakupan Peserta KB Aktif	63,67	63,89	65,85	66,75	64,69
4.	Jumlah Petugas KB	13	13	13	13	13
5.	Jumlah Balai KB	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas P3AKB, 2021

### 2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Kinerja Pemerintah pada urusan perhubungan tidak terlepas dari transportasi. Pelayanan transportasi di Kota Pariaman belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan



pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light dan warning light tahun 2016-2020, jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.76**  
**Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	147.523	160.601	184.182	119.130	513.246
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	1.600	841	180	111	126
3.	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis	2	2	1	1	1
4.	Kepemilikan KIR angkutan umum	13,75	13,90	14,25	27,91	30,25
5.	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	64	34	592	823	823
6.	Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	122	155	179	160	117

Sumber : Dishub Kota Pariaman, 2021

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan di bidang perhubungan ini, jumlah kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Semakin sedikit jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi, maka pembangunan di bidang perhubungan sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Pariaman meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018, secara berturut-turut terdapat 122, 155 dan 179 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Pariaman. Dibanding tahun sebelumnya angka kecelakaan lalu lintas ini naik. Dengan kondisi seperti perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Pariaman untuk melakukan evaluasi kelayakan jalan dan kendaraan. Selain itu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pengguna jalan oleh aparat kepolisian juga diperlukan, agar warga masyarakat lebih tertib dalam berkendara di jalan raya.

### 2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain



untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan pemerintahan harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.77**  
**Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Hotspot	-	-	-	-	15
2	Jumlah Aplikasi yang dikelola	1	1	9	17	25
3	Persentase OPD yang memiliki akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	100	100	100	100
4	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	2,61	2,87	-
5	Jumlah ASN Pengelola TIK	6	6	8	18	18

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pariaman, 2021

**Tabel 2.78**  
**Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Kota Pariaman Tahun 2020**

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
1	Kecamatan Pariaman Utara	Desa Tungkal Utara	√	√	√		
		Desa Tanjung Sabar	√	√	√		
		Desa Cubadak Air Selatan	√	√	√		
		Desa Tungkal Selatan	√	√	√		
		Desa Apar	√	√	√		
		Desa Sikapak Barat	√	√	√		
		Desa Manggung	√	√	√		
		Desa Ampalu	√	√	√		
		Desa Balai Naras	√	√	√		
		Desa Naras I	√	√	√		
		Desa Sintuk	√	√	√		
		Desa Naras Hilir	√	√	√		
		Desa Sikapak Timur	√	√	√		
		Desa Cubadak Air Utara	√	√	√		
		Desa Sei Rambai	√	√	√		
		Desa Cubadak Air	√	√	√		
Desa Padang Birik-Birik	√	√	√				



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
2	Kecamatan Pariaman Tengah	Kelurahan Jalan Baru	√	√	√		
		Kelurahan Pasir	√	√	√		
		Kelurahan Pondok II	√	√	√		
		Kelurahan Karan Aur	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Pondok	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Perak	√	√	√		
		Kelurahan Jawi-Jawi I	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Jawa I	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Jawa II	√	√	√		
		Kelurahan Taratak	√	√	√		
		Kelurahan Ujung Batung	√	√	√		
		Kelurahan Alai Gelombang	√	√	√		
		Kelurahan Jati Hilir	√	√	√		
		Kelurahan Jawi-Jawi II	√	√	√		
		Kelurahan Jalan Karet Api	√	√	√		
		Kelurahan Lohong	√	√	√		
		Desa Pauh Timur	√	√	√		
		Desa Rawang	√	√	√		
		Desa Jati Mudik	√	√	√		
		Desa Cimparuh	√	√	√		
Desa Kampung Baru	√	√	√				
Desa Pauh Barat	√	√	√				
3	Kecamatan Pariaman Timur	Desa Kaluat	√	√	√		
		Desa Sungai Pasak	√	√	√		
		Desa Batang Kabung	√	√	√		
		Desa Cubadak Mentawai	√	√	√		
		Desa Bato	√	√	√		
		Desa Sungai Sirah	√	√	√		
		Desa Kp.Baru Padusunan	√	√	√		
		Desa Kampung Tengah	√	√	√		
		Desa Bungo Tanjung	√	√	√		
		Desa Air Santok	√	√	√		
		Desa Kajai	√	√	√		
		Desa Kampung Kandang	√	√	√		
		Desa Talago Sarik	√	√	√		
		Desa Koto Marapak	√	√	√		
		Desa Pakasai	√	√	√		
Desa Kampung Gadang	√	√	√				
4	Kecamatan Pariaman Selatan	Desa Sikabu	√	√	√		
		Desa Pasir Sunur	√	√	√		
		Desa Batang Tajongkek	√	√	√		



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
		Desa Kampung Apar	√	√	√		
		Desa Padang Cakur	√	√	√		
		Desa Palak Aneh	√	√	√		
		Desa Punggung Lading	√	√	√		
		Desa Marunggi	√	√	√		
		Desa Pauh Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Balai Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Marabau	√	√	√		
		Desa Toboh Palabah	√	√	√		
		Desa Simpang Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Rambai	√	√	√		
		Desa Sungai Kasai	√	√	√		
		Desa Taluk	√	√	√		

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pariaman, 2021

Tabel 2.79  
Jenis koneksi internet yang dimanfaatkan di seluruh Desa di  
Kota Pariaman Tahun 2020

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
1	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	Desa Tungkal Utara	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Tanjung Sabar	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Cubadak Air Selatan	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Tungkal Selatan	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Apar	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sikapak Barat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Manggung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Ampalu	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Balai Naras	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Naras I	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Sintuk	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Naras Hilir	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sikapak Timur	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Air Utara	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sei Rambai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Air	Icon net (PLN)	10 Mbps
Desa Padang Birik-Birik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps		
2	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	Kelurahan Jalan Baru	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Pasir	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Pondok II	Indihome (TELKOM)	20 Mbps



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
		Kelurahan Karan Aur	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Pondok	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Perak	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Jawi-Jawi I	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Jawa I	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Jawa II	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Taratak	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Ujung Batung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Alai Gelombang	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Jati Hilir	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Jawi-Jawi II	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Jalan Karet Api	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Lohong	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Pauh Timur	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Rawang	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Jati Mudik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cimparuh	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Baru	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Pauh Barat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
3	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	Desa Kaluat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sungai Pasak	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Batang Kabung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Mentawai	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Bato	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Sungai Sirah	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Kp.Baru Padusunan	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Tengah	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Bungo Tanjung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Air Santok	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kajai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Kandang	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Talago Sarik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Koto Marapak	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Pakasai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
Desa Kampung Gadang	Icon net (PLN)	10 Mbps		
4	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	Desa Sikabu	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Pasir Sunur	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Batang Tajongkek	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Apar	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Padang Cakur	Icon net (PLN)	10 Mbps



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
		Desa Palak Aneh	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Punggung Lading	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Marunggi	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Pauh Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Balai Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Marabau	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Toboh Palabah	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Simpang Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Rambai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sungai Kasai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Taluk	Indihome (TELKOM)	20 Mbps

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pariaman, 2021

**Tabel 2.80**  
**Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	8	5	5	5	5
2	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal	31	35	28	27	16
4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	4	3	3	4	4

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pariaman, 2021

### 2.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pada tahun 2020 produktivitas UKM di Kota Pariaman mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid 19. Pemerintah Kota Pariaman berusaha untuk menumbuhkan kembali gairah para pelaku UKM dengan program-program yang mendukung salah satunya dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku UKM. Hal ini dilakukan agar setiap pelaku UKM dapat lebih bersemangat dan gita lagi guna



meningkatkan perekonomian keluarga serta usaha yang dijalankan bisa semakin maju. Dari Tahun 2016-2020 persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terakhir di tahun 2020 sebesar 77,9 persen. Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 karena terkait masa pandemic yang baru dimulai sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap koperasi sangat terbatas untuk dilaksanakan. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dilihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.81**  
**Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Pariaman**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi (unit)	82	72	79	84	88
2	Jumlah Koperasi Aktif	62	61	68	73	77
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	20	11	11	11	11
4	Jumlah Koperasi RAT	43	39	36	37	39
5	Jumlah Anggota orang	9.016	8.591	8.543	9.066	9.039
6	Jumlah Karyawan	58	28	53	27	27
7	Volume Usaha (Rp))	44.775.451.000	51.755.342.000	51.755.342.000	54.796.945.000	55.571.503.000
8	Modal Sendiri (Rp)	39.852.276.000	43.989.870.000	48.989.870.000	54.172.499.000	56.769.440.000
9	Modal Luar (Rp)	16.848.396.000	17.213.813.000	17.213.813.000	16.870.484.000	17.381.599.000
10	Asset (Rp)	56.700.672.000	61.203.683.000	61.203.683.000	65.241.987.000	74.151.039.000
11	SHU (Rp)	3.244.660.000	3.873.031.000	3.873.031.000	4.021.421.000	4.089.921.000

Sumber : Dinas Koperindag & KUKM Kota Pariaman, 2021

**Tabel 2.82**  
**Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Pariaman Tahun 2016 dan 2020**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	sehat	8	9	7	4	2
2	Cukup sehat	16	19	18	28	11
3	Kurang sehat	1	2	0	0	1
4	Belum dinilai	18	9	11	5	25

Sumber : Dinas Koperindag & KUKM Kota Pariaman, 2021



### 2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Kota Pariaman sudah mulai menunjukkan *'trend positif'* sejak tiga setahun terakhir. Walaupun perkembangan kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun ini tetap menjadi komitmen daerah Kota Pariaman bagaimana menumbuhkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Pariaman. Bila dilihat dari sumber daya alam Kota Pariaman mempunyai potensi untuk investor menanamkan investasinya. Yang perlu disediakan oleh Kota Pariaman adalah bagaimana bisa memberikan kemudahan dan daya minat yang tinggi bagi investor tersebut. Dan sebagai kota yang potensial untuk pengembangan investasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar Kota Pariaman untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Kemudahan berinvestasi di Kota Pariaman tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Pariaman untuk menyederhanakan pelayanan perijinan serta mengedepankan pelayanan yang bersih dan bebas pungli. Berikut ini dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 2.83**  
**Perkembangan Indikator Urusan Urusan Penanaman Modal**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2	6	6	6	-
2	Jumlah Perusahaan PMDN yang berinvestasi	NA	NA	13	167	295
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.000)	109.600.000	75.500.000	80.400.000	36.000.000	42.000.000-
4	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.000)	53.640.000	63.750.000	5.352.000	45.600.000	25.600.000
5	Kenaikan/Penurunan Realisasi PMDN	45,78	-28,54	-17,09	-55,22	-85,05
6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7,78	7,90	6,38	3,78	-
7	Jumlah Perizinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui	198	6	6	6	-

Sumber : DPM, PTSP & Naker Kota Pariaman, 2021

### 2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis



identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi di urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.84**  
**Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	22	22	22
2	Jumlah organisasi olahraga	12	12	35	35	35
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	3	3	3
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	9
5.	Gelandang/Balai Remaja	13	13	0	0	0
6.	Lapangan Olahraga	40	40	54	54	54

*Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2021*

Berdasarkan data di atas, perkembangan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meningkat signifikan, pada tahun 2019 jumlah organisas pemuda sebanyak 22 organisasi. untuk perkembangan jumlah organisasi olahraga yang naik pada tahun 2020 hanya berjumlah 35 Organisasi.

#### **2.3.2.14 Urusan Statistik**

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date.



Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2016 hingga 2020 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi

**Tabel 2.85**  
**Perkembangan Indikator Urusan Statistik Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Dinas Kominfo Kota Pariaman, 2021*

Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Pariaman telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya penyebutan jumlah eksemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.

### 2.3.2.15 Urusan Persandian

Target dari pengamanan informasi pada urusan persandian berupa Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala OPD. Pada saat ini Tanda Tangan Elektronik (TTE) baru tersedia bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja. Untuk OPD lainnya di Kota Pariaman saat ini proses penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen masih dalam tahap pembentukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerjasama ini diharapkan dapat segera terbentuk sehingga kedepannya seluruh Kepala OPD dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam setiap penandatanganan dokumen.

### 2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Kebudayaan Kota Pariaman cukup beranekaragam terutama kebudayaan minang yang masih terjaga samapai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung kebudayaan di Kota Pariaman adalah Pesta Budaya Tabuik Kota Pariaman mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2019, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya loka ditandai dengan



banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Namun pada tahun 2020 pegelaran festival seni budaya di Kota Pariaman tidak dilaksanakan. Hal ini karena pandemi Covid-19 sehingga seluruh masyarakat kota harus mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.86**  
**Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7	7	7	7	10
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	2	2	2
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	52	52	52	52	52
4.	Jumlah Sanggar Kesenian	33	40	40	41	41
5.	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	2	3
6.	Jumlah Group Kesenian	23	40	40	40	42

*Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2021*

### 2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi buku, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Tabel 2.87 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah.

**Tabel 2.87**  
**Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan**  
**Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator Kinerja daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	104	104	104	165	165
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	1.851	2.607	3.715	1.180	985
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	7.624	8.277	11.995	1.202	1.302
4.	Jumlah Perpustakaan Keliling	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TMB)	-	-	-	3	3

*Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Pariaman, 2021*



### 2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, diantaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai dengan tahun 2019, sudah 30 SKPD yang diberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.88**  
**Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	-	-			
2	Jumlah OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	-	-	2	3	4
3	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	27	27	27	27	27

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Pariaman, 2021

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Pariaman

#### 2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan oleh Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Pariaman yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Potensi subsektor perikanan Darat dan Laut merupakan lapangan usaha yang mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

Pada urusan Kelautan dan Perikanan, secara rinci perkembangan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 2.89**  
**Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.372,72	6.524,99	6.327,09	3.210,53	3.310,53
2	Capaian Produksi Perikanan	Ton	64,43	68,16	91,62	46,29	47,29
3	Perikanan Darat	Ton	158	180	192	254	258
4	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	27,8	38,89	38,89	38,89	38,89
5	Capaian Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	79,43	121,53	121,53	115,60	105,60
7	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	192,8	254,91	315,44	318,81	322,42
8	Jumlah Kasus Pencurian Ikan	Kasus	1	0	0	0	0

*Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2021*

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu dari 46,29 ton naik menjadi 47,29 ton. Hal ini juga terjadi pada indikator yang lain seperti capaian produksi perikanan pada tahun 2019 sebanyak 46,29 ton sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 47,29 ton, perikanan darat sebanyak 254 ton pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 258 ton, dan produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebanyak 318,81 ton pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 322,42 ton. Namun untuk indikator capaian konsumsi ikan mengalami penurunan pada tahun 2020. Dapat dilihat capaian konsumsi ikan pada tahun 2019 sebanyak 115,60 ton sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 105,60 ton.

### 2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukanperorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Selain itu pengertian pariwisata yang lainnya adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri



**Tabel 2.90**  
**Nama Objek Wisata di Kota Pariaman Menurut Jenisnya dan Kecamatan Tahun 2020**

No.	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
<b>Pariaman Tengah</b>			
1	Pantai Gandorih	Kel. Pasir	Wisata Alam
2	Pantai Cermin	Kel. Karan Aur	Wisata Alam
3	Pulau Angso Duo	Pulau Angso Duo	Wisata Alam
4	Pulau Tengah	Pulau Tengah	Wisata Alam
5	Talao Pauh	Desa Pauh Pariaman	Wisata Alam
6	Kuburan Panjang	Pulau Angso Duo	Wisata Sejarah
7	Pesta Budaya Tabuik	Kel. Pasir	Wisata Budaya
8	Mariam Kuno	Kampung Pondok	Wisata Sejarah
9	Mesjid Tua	Kampung. Perak	Wisata Sejarah
10	Rumah Gadang Moh. Sholeh	Kampung Perak	Wisata Budaya
<b>Pariaman Selatan</b>			
1	Pantai Sunur	Desa Sunur	Wisata Alam
2	Pantai Kata	Desa Taluak	Wisata Alam
3	Pulau Ujung	Pulau Ujung	Wisata Alam
4	Surfing	Desa Taluak	Wisata Alam
5	Mesjid Tua Kuraitaji	Desa Balai Kuraitaji	Wisata Sejarah
<b>Pariaman Timur</b>			
1	Benteng Jepang Santok	Air Santok	Wisata Sejarah
2	Benteng Santok II	Air Santok I	Wisata Sejarah
3	Guci Badano	Bungo Tanjung	Wisata Sejarah
<b>Pariaman Utara</b>			
1	Pantai Teluk Belibis	Desa Padang Birik-Birik	Wisata Alam
2	Talao Manggung	Desa Manggung	Wisata Alam
3	Pulau Kasiak	Pulau Kasiak	Wisata Alam
4	Penangkaran Penyu	Desa Apar	Wisata Minat khusus
5	STIB	Apar	Wisata Alam
6	Balon Udara/ Sepeda gunung	Tungkal Selatan	Wisata Alam

*Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2021*

Objek wisata yang ada di Kota Pariaman cukup beragam jenis dan lokasinya. Dari beberapa potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun asing. Berikut dapat kita lihat perkembangan wisatawan yang datang ke Kota Pariaman dari tahun 2016-2020.



**Tabel 2.91**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Objek Wisata	Objek	23	22	22	23	25
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.907.194	3.099.310	3.320.825	3.925.086	112.278
3	Jumlah destinasi Wisata Alam Yang Di Kembangkan	Destinasi	12	12	12	12	15
4	Jumlah Kawasan Wisata Laut	Kawasan	4	4	4	4	4
5	Jumlah Restoran	Restoran	69	89	103	90	91
6	Jumlah Hotel	Hotel	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2021

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman dalam periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan domestik adalah sebanyak 2.907.194 orang dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.925.086 orang. Namun, pada tahun 2020 dengan terjadinya musibah pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020. Musibah pandemi ini melumpuhkan sebagian besar sektor kegiatan tidak hanya di Kota Pariaman tetapi juga melanda ke seluruh belahan dunia. Dengan adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti *social distancing* yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan serta larangan untuk mengunjungi tempat wisata. Hal ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata yang dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman. Dapat dilihat jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman selama tahun 2020 hanya 112.278 orang.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata di Kota Pariaman. Banyaknya event-event pariwisata oleh Pemerintah Kota Pariaman seperti Festival Tabuik, Lomba Triathlon, Pariaman Fashion Parade, Pariaman Expo, Tour de Singkarak, Pariaman Batagak Gala dan lain-lain yang biasanya rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Tetapi untuk tahun 2020 tidak semua event tersebut dapat dilaksanakan dengan semestinya. Namun demikian, ada beberapa event yang dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke suatu daerah maka diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung seperti hotel dan penginapan. Pada tahun 2020 jumlah hotel, penginapan dan homestay yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebanyak 42 buah dengan rincian 10 unit hotel dan 32 unit homestay dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.



### 2.3.3.3 Urusan Pertanian

Pertanian sebagai salah satu kategori dalam pembentukan PDRB Kota Pariaman mempunyai peranan yang sangat penting. Kontribusi pertanian merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam kategori pertanian ini adalah produksi padi yang dihasilkan dari lahan sawah. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata. Perkembangan indikator kinerja urusan pertanian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.92**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	78,99	80,35	86	87	89
2	Jumlah Ketersediaan Alat Pertanian	Unit	658	772	333	333	340
3	Jumlah Ketersediaan Alat Mesin Pertanian	Unit	615	552	669	669	705
4	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Ha	Ton	5,31	5,89	5,24	5,5	5,62
5	Luas Sawah	Ha	2.502	2.493	1.785	1.785	1.785
6	Luas Panen Padi sawah	Ha	5.851	7.099	6.708	4.710	4.769
7	Produksi Padi Sawah	Ton/Ha	5,31	5,89	5,83	6,18	5,62
9	Jumlah pemotongan sapi potong	Ekor	1.113	2.817	1.708	1.913	1.888

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2021

Luas lahan sawah pada tahun 2020 adalah seluas 1.785 hektar atau sekitar 24,33% dari 7.336 hektar total dan terus mengalami penurunan di wilayah Kota Pariaman. Dimana pada tahun 2017 luas lahan sawah Kota Pariaman adalah 2.493 Ha. Penurunan luas lahan sawah ini dikarenakan adanya pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah. Begitupun dengan jumlah bina kelompok tani dan ketersediaan alat pertanian juga berkurang karena jumlah lahan sawah yang akan digarap juga berkurang. Produktivitas padi di Kota Pariaman dari tahun ke tahun berfluktuatif. Hal ini seiring dengan berkurangnya lahan sawah, namun Pemerintah Kota Pariaman tetap berupaya untuk meningkatkan produktivitas padi. Dapat dilihat pada tahun 2018 produktivitas padi Kota Pariaman adalah 5,24 Ton/Ha dimana terjadi penurunan dari 5,89 tom/Ha pada tahun 2017. Kemudian jumlah produktivitas padi meningkat lagi pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 5,5 ton/Ha dan 5,62 ton/Ha.



### 2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Pariaman. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir data yang ada memperlihatkan jumlah pedagang yang mengurus izin usaha perdagangan (SIUP) di Kota Pariaman mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun di 5 tahun terakhir. Pedagang yang mengurus SIUP terdiri dari klasifikasi pedagang kecil, pedagang menengah, dan tidak ada klasifikasi pedagang besar di Kota Pariaman.

Masih di bidang perdagangan, dalam meningkatkan pelayanannya, dilakukan peningkatan sarana perdagangan yang representatif, sehingga perekonomian rakyat tetap berkembang seiring dengan maraknya pasar modern seperti minimarket. Pada Tahun 2020 jumlah minimarket meningkat menjadi 30 unit, dan jenis perizinan yang dikeluarkan menjadi sebanyak 132 izin.

**Tabel 2.93**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin	-	-	-	-	-
-	Perdagangan Kecil dan Mikro	Izin	186	137	108	137	132
-	Pedagang Menengah	Izin	11	16	30	16	25
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	50	50	55	57	60
3.	Jumlah Pasar tradisional	Buah	7	7	7	7	8
4.	Sistem Pelayanan Perizinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Jenis Perizinan	Buah	NA	28	115	135	192

Sumber : Dinas Perindagkop & KUKM Kota Pariaman, 2021

Jumlah izin perdagangan kecil dan mikro serta izin pedagang menengah Kota Pariaman dari tahun ke tahun berfluktuatif. Sedangkan jumlah cakupan bina pedagang/usaha informal di Kota Pariaman cenderung meningkat dimana pada tahun 2017 berjumlah 50% kemudian terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 55%, begitu juga pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 57% dan 60%. Pada tahun 2020 terjadi penambahan satu pasar tradisional di Kota Pariaman, sehingga yang awalnya jumlah pasar tradisional sebanyak 7 pasar, pada tahun 2020 menjadi 8 pasar tradisional. Seiring berkembangnya jenis usaha dan perdagangan di Kota Pariaman, jenis perizinan juga selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 hanya ada 28 jenis perizinan kemudian bertambah lagi pada tahun 2018 menjadi 115 jenis perizinan, tahun 2019 dan 2020 secara berurutan ada 135 dan 192 jenis perizinan.



### 2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan perekonomian, sektor ini memegang peranan yang penting dalam setiap aktivitas sektor lainnya. Jika sektor industri berkembang dengan pesat maka sektor lainnya seperti investasi, perdagangan dan jasa juga akan ikut berkembang. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dan dinilai dari perkembangan sektor industrinya, jika semakin baik laju pertumbuhan sektor industrinya maka daerah tersebut juga akan semakin cepat maju dan berkembang. Hal ini nantinya akan memberikan peluang terhadap pembukaan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat dan pada akhirnya akan mampu mengurangi nilai pengangguran dan kemiskinan.

Industri yang berkembang di Kota Pariaman masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangannya industri dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.94**  
**Perkembangan capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perindustrian**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Industri	1,60	1,60	1,70	1,60	0,20
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,80	7,64	7,40	7,44	6,86
3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Termasuk Pembinaan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindagkop & KUKM Kota Pariaman, 2021

### 2.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

#### 2.4.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

**Tabel 2. 95**  
**Predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)**  
**Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Predikat LPPD	Sangat Tinggi				

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako, 2021



#### 2.4.4.2 Urusan Sekretariat Dewan

Pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan yang diukur adalah PERDA APBD dan APBD Perubahan. Untuk penetapan APBD dilakukan tepat waktu, sedangkan APBD Perubahan penetapannya hanya tepat waktu pada tahun 2020.

**Tabel 2.96**  
Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Perda APBD Perubahan	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Bagian Hukum Setdako, 2021

#### 2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 2.4.5.1 Unsur Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka 20 (dua puluh) tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.97**  
Perkembangan Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021



### 2.4.5.2 Unsur Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Pariaman, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.98**  
**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Opini Publik
1.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat*

### 2.4.5.3 Unsur Kepegawaian

Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020, jumlah PNS berfluktuasi. Tapi mulai tahun 2016 dan tahun 2018 jumlah PNS Kota Pariaman mulai menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat serta dengan ditariknya pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi akibatnya guru SMA/SMK menjadi pegawai provinsi. Pada tahun 2019-2020 jumlah PNS Kota Pariaman mulai meningkat dengan adanya penerimaan PNS untuk pemerintah daerah Kota Pariaman. Data urusan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

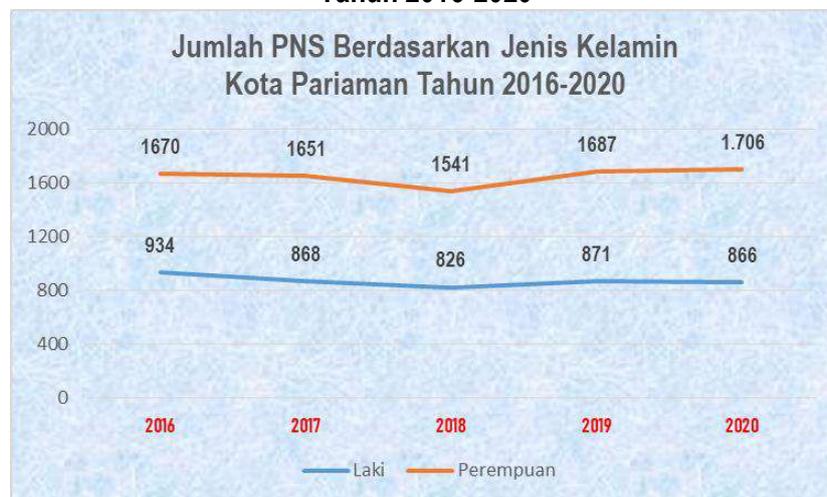


**Tabel 2.99**  
**Perkembangan Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laki	934	868	826	871	866
2.	Perempuan	1.670	1.651	1.541	1.687	1.706
<b>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>						
1.	SD	12	12	10	7	7
2.	SMP	10	17	13	10	19
3.	SMA	312	360	291	271	228
4.	D-I dan D-II	147	213	109	91	49
5.	D-III	335	319	314	368	403
6.	D-IV/S-1	1.571	2.133	1.480	1.623	1.718
7.	S-2	131	200	150	188	148
8.	S-3	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

**Gambar 2.16**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

#### 2.4.5.4 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, maka dilaksanakanlah pendidikan dan pelatihan. Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PNS kepada masyarakat.



**Tabel 2.100**  
**Perkembangan Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	15,0	17,5	20,5	23,5	25,0

Sumber : BKPSDM Kota Pariaman, 2021

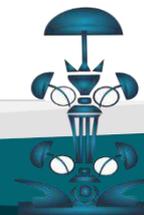
#### 2.4.5.5 Unsur Penelitian Dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan diharapkan tersedianya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan daya saing daerah, Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan, disamping itu perlu dilakukan menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun fokus dari Inovasi Daerah Kota Pariaman antara lain :

1. Penciptaan manajemen administrasi Inovasi Daerah yang berkelanjutan di Kota Pariaman.
2. Pembangunan kerangka dasar kebijakan Inovasi Daerah Kota Pariaman.
3. Penguatan Kelembagaan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKININ) atau penelitian, pengembangan dan perekayasa (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Penciptaan budaya inovasi di Kota Pariaman.
5. Penciptaan keselarasan dengan perkembangan global dan wadah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul secara efektif dan efisien.



## a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah

**Tabel 2.101**  
Jumlah Inovasi berdasarkan Inisiator

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepala Daerah	0	0	0	0	0
2	Anggota DPRD	0	0	0	0	0
3	ASN	0	0	0	0	0
4	Perangkat Daerah	87	87	87	87	87
5	Masyarakat	0	0	0	0	0

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

## b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Pariaman

**Tabel 2.102**  
Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah di Kota Pariaman tahun 2021

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dikpora	11	12.6
2	Dinkes	5	5.75
3	DPUPR & Pertanahan	2	2.30
4	DisperkimLH	1	1.15
5	Satpol PP & Damkar	3	3.45
6	BPBD	2	2.30
7	Dinsos	4	4.60
8	DP3AKB	5	5.75
9	Disdukcapil	7	8.04
10	DPMDes	3	3.45
11	Dishub	2	2.30
12	Diskominfo	8	9.20
13	Disperindagkop	2	2.30
14	DPMPTSP & Naker	6	6.70
15	DPPP	4	4.60
16	Disparbud	5	5.75
17	BPKPD	2	2.30
18	BKPSDM	2	2.30
19	Bappeda	3	3.45
20	Inspektorat	1	1.15
21	Kantor Kesbangpol	2	2.30
22	Kecamatan Pariaman Utara	3	3.45
23	Kecamatan Pariaman Tengah	2	2.30
24	Kecamatan Pariaman Selatan	1	1.15



No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
25	Kecamatan Pariaman Timur	1	1.15
<b>Total</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

#### 2.4.5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Kota Pariaman dimana unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kota Pariaman menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Dalam penerapan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal. Untuk internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dan untuk eksternal dilaksanakan oleh BPKP.

**Tabel 2.103**  
**Jumlah Auditor di Kota Pariaman Tahun 2018-2020**

No	Uraian Jabatan Fungsional	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Auditor</b>					
	Utama	0	0	0	0	0
	Madya	0	0	1	3	2
	Muda	2	3	4	11	11
	Pertama	4	4	0	1	1
	Pelaksana	0	0	0	0	0
	Pelaksana Lanjutan	1	1	1	0	0
	Penyelia	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)</b>					
	Madya	5	5	5	6	6
	Muda	0	0	0	4	4
	Utama	0	0	0	0	0
	Pertama	0	0	0	3	3
<b>3</b>	<b>Auditor Kepegawaian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Inspektorat Kota Pariaman, 2021



**Tabel 2.104**  
**Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No.	Urain	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Nilai Sakip	50,44 (CC)	52,35 (CC)	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	
2.	Indeks RB	-	-	49,25 (C)	51,62 (CC)	53,42 (CC)	

*Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia*

#### 2.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di Kota Pariaman urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.



#### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

##### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran (*demand side*). Komponen lainnya adalah Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan. Konsumsi Rumah Tangga mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Makanan, Minuman, dan Rokok; 2) Pakaian dan Alas Kaki; 3) Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4) Kesehatan dan Pendidikan; 5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6) Hotel dan Restoran, dan 7) Lainnya.

PDRB ADHB Kota Pariaman Menurut Pengeluaran selama tahun 2016-2020 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Pariaman sebesar 2.070,24 miliar rupiah atau sebesar 56,62 persen dari total pengeluaran. Proporsi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB ADHB sebesar 55,35 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 55,48 persen. Pada tahun 2018 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga meningkat lagi menjadi 55,76 persen, dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 56,59 dan meningkatlagi tahun 2020 menjadi 56,62 persen.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Berikut ini tabel perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2016-2020.



**Tabel 2.105**  
**Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita**  
**Kota Pariaman Tahun 2015-2019 (Juta/Rupiah)**

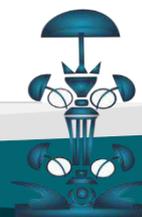
No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	1.937.157,05	2.100.066,73	2.257.850,58	2.441.343,47	2.683.048,58
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan	1.464.032,62	1.534.804,36	1.617.031,42	1.701.908,82	1.785.629,60
3	Pengeluaran Konsumsi LPNRT	44.073,69	48.357,03	49.991,43	53.325,75	60.681,75
4	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	572.781,85	611.670,02	637.929,77	673.432,26	727.771,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

## 2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, dan hal ini mengindikasikan perkembangan ekonomi yang positif.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dikelompokkan dalam : Pengeluaran Konsumsi untuk Makanan dan Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini. Selama rentang waktu tahun 2016-2020, kelompok pengeluaran konsumsi makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Pariaman, kecuali tahun 2020, kelompok pengeluaran konsumsi non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi makanan.



**Tabel 2.106**  
**Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas**  
**di Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No.	Kelompok Komoditas	Tahun										Ket
		2016		2017		2018		2019		2020		
		(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	
1.	Makanan	-	-	675.596	55.45	676.113	52.80	660.802.44	50.41	764.497.58	51.04	
2.	Non Makanan	-	-	542.766	44.55	604.385	47.20	650.023.16	49.59	733.254.95	48.90	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

### 3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan indikator daya saing daerah yang dihitung dengan cara membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan total tenaga kerja. Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.107**  
**Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.900.328,17	3.062.313,75	3.234.234,60	3.412.140,28	3.594.081,21
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	22.248	36.113	39.000	43.339	42.079
3.	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa/ tahun)	130	85	83	79	85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja Kota Pariaman tahun 2016-2020 mengalami cenderung fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 nilainya produktivitas daerah pada angka 130 juta/jiwa. Dan pada tahun 2017 turun menjadi 85 juta rupiah/jiwa. pada tahun 2018 turun lagi menjadi 83 juta rupiah/jiwa. Hingga pada tahun 2019 turun lagi menjadi 79 juta rupiah/jiwa. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi menjadi 85 juta rupiah/jiwa. Produktivitas total daerah juga dapat dihitung menurut lapangan usaha dengan tujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total daerah menurut lapangan usaha diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha utama tersebut. Pada tahun 2016-2020, kelompok lapangan usaha di Kota



Pariaman terdiri dari lima sektor besar, yaitu : Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan Lainnya. Sektor *lainnya* terdiri dari Pertambangan dan Penggalan; Listrik, Gas dan Air; Kontruksi; Angkutan; Pergudangan; Komunikasi; Keuangan; Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

### 3. Niai Tukar Petani

*Nilai tukar petani (NTP)* adalah *rasio antara* indeks harga yang diterima petani (*IT*) dengan indeks harga yang dibayar petani (*IB*) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hanya menghitung Nilai Tukar Petani sampai tingkat Provinsi. Dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Pariaman merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat. *Indeks harga yang diterima petani (IT)* adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya). *Indeks harga yang dibayar petani (IB)* adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1.  $NTP > 100$  atau  $IT > IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *surplus*.

2.  $NTP = 100$  atau  $IT = IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *sama besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *titik impas*.



### 3. $NTP < 100$ atau $IT < IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *defisit*.

#### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakni indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yang sama di Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan Kota Pariaman tidak memiliki terminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni Terminal Jati Tipe A.

Sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur pada dasarnya adalah elemen pendukung bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah, salah satunya adalah infrastruktur bidang perhubungan. Tabel 2.108 menggambarkan perkembangan bidang perhubungan selama kurun waktu 2016 – 2020:

**Tabel 2.108**  
**Perkembangan Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	147,523	160,601	184,182	119,130	25,000
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Bis	2	2	1	1	1

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pariaman, 2021*

#### 1. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Dari tahun 2019-2020, jumlah restoran di Kota Pariaman cenderung meningkat. Berikut ini tabel perkembangan jumlah restoran di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.



**Tabel 2.109**  
**Perkembangan Jumlah Restoran Di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Restoran	69	89	103	90	91

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman*

2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Pariaman. Kota Pariaman yang terkenal dengan wisata alam dan bahari banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di Kota Pariaman menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Pariaman. Memang di Kota Pariaman belum ada hotel yang berbintang semuanya masih kategori hotel melati. Namun untuk tahun berikutnya Kota Pariaman sedang berusaha menarik investor untuk bisa berinvestasi untuk membangun hotel yang berbintang. Berikut ini tabel perkembangan jumlah hotel di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.110**  
**Perkembangan Jumlah Hotel Di Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penginapan/Hotel/Home Stay	9	43	43	42	42

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman*

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, air sumur dalam. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2.111**  
**Perkembangan Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih**  
**Kota Pariaman Tahun 2015-2019**

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih	85.44	80.92	81.00	78.42	82.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Tinggi rendahnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi tergantung di antaranya kepada tingkat keamanan dan ketertiban, kemudahan pengurusan perizinan, tersedianya infrastruktur pendukung, jumlah dan macam pajak yang harus dipenuhi, dan regulasi yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.112 menggambarkan indikator yang terkait dengan iklim investasi di Kota Pariaman.

**Tabel 2.112**  
**Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lama Proses Perizinan (Rata-rata proses perizinan)	5	5	5	5	5
2.	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah	2	26	26	26	26
3.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Perizinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Detujui	196	6	6	6	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

### 2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

#### 1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.



Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman. Pemaparan data dapat dilihat pada tabel di bawah yang besumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman selama tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2016 dan 2017 rasio lulusan S1, S2, dan S3 yaitu sebesar 10,63 %. Dan pada tahun 2018 rasio lulusan S1, S2, dan S3 naik menjadi 19,11 %. Begitu juga untuk tahun 2019 dan tahun 2020 rasio lulusan S1, S2, dan S3 selalu naik yaitu sebesar 19,11 % dan 22,22 %. Berikut ini tabel perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 Kota Pariaman Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.113**  
**Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lulusan S1/S2/S3 yang bekerja	10,63	10,63	19,11	19,11	22,22

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman*

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15 - 65 tahun dan usia tidak produktif (0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Pariaman pada tahun 2020 adalah 56,21 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2016 hingga 2020, rasio ketergantungan ini cukup mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Pariaman semakin kecil setiap tahunnya.

**Tabel 2.114**  
**Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketergantungan	56,50	56,31	56,21	56,21	56,21

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman*





## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**



**BAB III****GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Penyusunan gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Perubahan RPJMD pada aspek keuangan daerah dilakukan akibat perubahan terhadap regulasi keuangan daerah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi daerah keuangan daerah Kota Pariaman.

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Pariaman pada tahun awal periode RPJMD 2018-2023 yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, telah ditegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Namun untuk mengakomodir konsistensi kewenangan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diterbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Dengan adanya regulasi ini, untuk tahun 2021 dan 2022 serta 2023 program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, tidak lagi digunakan. Hal ini sejalan dengan keluarnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a) Informasi Pembangunan Daerah; dan b) Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah tersebut dikelola dalam SIPD.

Kemudian untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman untuk sisa waktu RPJMD periode Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/ pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan



rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

#### **b. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi



fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

### **c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari Penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan Kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

#### **1) Transparansi dan Akuntabel**



Setiap pengeluaran belanja langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan secara terbuka berarti pihak ketiga/swasta dan warga masyarakat mudah mendapatkan informasinya serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.

2) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.

3) Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja Langsung mendukung tujuan pembangunan secara efisien dan efektif yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga masyarakat. Optimalisasi Belanja Langsung untuk membangun infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja guna mendukung ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

5) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program disertai dengan tolok ukur dan target kinerja yang meliputi masukan (*input*), output (*keluaran*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah;
3. Pembiayaan daerah



Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Dana Perimbangan
      - a) Dana Transfer Umum
        - (1) DBH; dan
        - (2) DAU
      - b) Dana Transfer Khusus
        - (1) DAK Fisik
        - (2) DAK Non Fisik
    - 2) Dana Insentif Daerah;
    - 3) Dana Otonomi Khusus;
    - 4) Dana Keistimewaan;
    - 5) Dana Desa.
  - b. Transfer Antar-Daerah
    - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - a. Hibah;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Jalan;
  - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
  - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:



1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal di atas maka pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 secara nasional efektif dilaksanakan dimulai pada Tahun Anggaran 2021.

Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah menyadari bahwa upaya pembangunan pada Tahun 2021 tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak. Tantangan tersebut diantaranya adalah ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan, sehingga ke depan membutuhkan reformasi struktural untuk menata kembali alokasi sumber daya ekonomi daerah agar lebih efisien dan efektif. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih



produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*).

Melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, Pemerintah juga mengatur percepatan pelaksanaan *refocusing*, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Intensitas pandemi yang terus tereskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Dalam kondisi tidak normal, peran belanja daerah menjadi sangat krusial dalam merespons dampak pandemi COVID-19 baik dari untuk mendukung upaya pemulihan dan reformasi pada berbagai bidang antara lain kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan serta dukungan pada dunia usaha. Langkah-langkah *extraordinary* perlu ditempuh agar rambatan pandemi dapat dimitigasi melalui bauran kebijakan baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan belanja daerah secara umum yang ditempuh Pemerintah Kota Pariaman antara lain melakukan efisiensi, realokasi, dan *refocusing* untuk penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi.

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Kota Pariaman dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan skenario ***the new normal*** dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID-19;
2. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi;
3. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga;
4. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Prioritas;



- a. Penanganan kesehatan; antara lain berupa penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat, penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid-19, dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan penanganan.
  - b. Penanganan dampak ekonomi; antara lain berupa pelaksanaan program padat karya dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak ekonomi lainnya.
  - c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*; antara lain berupa melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan.
5. Menggalakkan kampanye penggunaan masker dalam rangka pencegahan dan menekan penyebarluasan pandemi Covid-19.

Pandemi global COVID-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas *baseline* dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan signifikan yang tentu juga akan berdampak pada APBD Kota Pariaman. Dampak paling signifikan dari COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi *baseline* pendapatan daerah baik dari sisi Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang tentunya akan berdampak besar pada belanja daerah, sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang



Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Tahun 2016-2020**

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Azas umum pengelolaan keuangan daerah telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Pariaman. Pengelolaan keuangan daerah seoptimal mungkin dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Tabel 3.1 di bawah ini dapat dilihat gambaran komposisi realisasi APBD Kota Pariaman sekaligus menggambarkan kondisi kemampuan keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya.



**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>621.535.178.052</b>	<b>639.032.751.955</b>	<b>627.169.121.764</b>	<b>673.533.272.845</b>	<b>632.222.867.999</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>29.680.784.158</b>	<b>30.881.846.112</b>	<b>32.213.303.037</b>	<b>36.665.174.233</b>	<b>32.961.765.489</b>	<b>3</b>
a	Pendapatan Pajak Daerah	6.646.520.377	8.304.791.195	9.982.897.861	10.064.592.854	10.043.594.333	11
b	Hasil Retribusi Daerah	3.371.154.780	3.369.770.163	4.184.671.257	4.390.195.539	6.635.664.791	20
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.846.776.943	6.290.774.658	4.752.048.233	6.673.276.954	7.242.632.803	14
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.816.332.058	12.916.510.096	13.293.685.686	15.537.108.887	9.039.873.562	9
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfers</b>	<b>581.299.486.591</b>	<b>542.885.073.161</b>	<b>582.874.314.778</b>	<b>624.536.538.612</b>	<b>586.837.360.678</b>	<b>0</b>
a	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>533.629.510.758</b>	<b>515.176.988.201</b>	<b>509.927.165.546</b>	<b>526.296.352.131</b>	<b>487.428.440.555</b>	<b>-2</b>
-	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	14.224.900.804	14.355.010.047	11.588.903.939	9.686.847.678	11.888.237.053	3
-	Dana Alokasi Umum (DAU)	422.666.213.000	415.241.327.000	415.241.327.000	428.104.412.000	389.252.498.000	-2
-	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.738.396.954	85.580.651.154	83.096.934.607	88.505.092.453	86.287.705.502	-3
b	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>33.376.164.954</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>49.770.376.154</b>	<b>70.671.299.995</b>	<b>75.614.489.000</b>	<b>134</b>
-	Dana Penyesuaian	33.376.164.954	7.500.000.000	-	-	-	44
-	Dana Desa	-	-	41.270.376.154	48.050.233.995	48.819.423.000	5
-	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	8.500.000.000	22.621.066.000	26.795.066.000	46
c	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>14.293.810.879</b>	<b>20.208.084.960</b>	<b>23.176.773.078</b>	<b>27.568.886.486</b>	<b>23.794.431.123</b>	<b>15</b>
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.293.810.879	20.208.084.960	23.176.773.078	27.568.886.486	23.794.431.123	15
<b>3</b>	<b>Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>10.554.907.303</b>	<b>65.265.832.682</b>	<b>12.081.503.949</b>	<b>12.331.560.000</b>	<b>12.423.741.832</b>	<b>110</b>
-	Pendapatan Lainnya	10.554.907.303	52.626.848.971	-	-	-	75
-	Pendapatan Hibah	-	12.638.983.711	12.081.503.949	12.331.560.000	12.423.741.832	0
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>664.690.733.675</b>	<b>641.311.902.997</b>	<b>634.781.641.164</b>	<b>703.463.292.079</b>	<b>645.135.093.145</b>	<b>-1</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>410.053.284.436</b>	<b>397.325.557.074</b>	<b>410.294.876.308</b>	<b>451.926.497.933</b>	<b>427.282.303.089</b>	<b>1</b>
-	Belanja Pegawai	281.275.971.188	218.793.751.449	235.434.442.521	269.457.086.395	261.891.125.789	-1
-	Belanja Barang	126.954.702.806	160.089.255.625	164.089.091.767	176.346.311.538	163.630.577.300	7
-	Belanja Hibah	1.822.610.442	13.103.800.000	6.288.113.020	3.550.600.000	1.760.600.000	118
-	Belanja Bantuan Sosial	0	5.338.750.000	4.483.229.000	2.572.500.000	0	40
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>178.374.780.971</b>	<b>153.293.150.204</b>	<b>132.430.598.582</b>	<b>156.394.642.682</b>	<b>94.469.539.443</b>	<b>-12</b>
-	Belanja Tanah	112.615.000	5.138.804.000	-	2.748.500.000	2.633.337.992	1.090
-	Belanja Peralatan dan Mesin	17.221.647.907	22.439.056.446	21.805.344.240	21.527.377.805	40.032.441.637	28
-	Belanja Bangunan dan Gedung	49.764.126.750	38.155.058.945	35.976.109.589	72.079.635.488	20.529.078.105	-0



No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
-	Belanja Jalan ,Irigasi dan Jaringan	110.296.186.089	86.969.753.589	72.539.847.661	58.731.141.889	26.136.217.098	- 28
-	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	980.205.225	590.477.224	2.109.297.092	1.307.987.500	5.138.464.611	118
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>203.428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.043.161.776</b>	- <b>25</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfers</b>	<b>76.059.240.268</b>	<b>90.693.195.720</b>	<b>92.056.166.274</b>	<b>95.142.151.464</b>	<b>95.340.088.837</b>	- <b>6</b>
-	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	521.674.411	763.246.055	1.299.609.679	1.242.668.546	1.467.379.505	33
-	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik	75.537.565.857	89.929.949.665	90.756.556.595	93.899.482.918	93.872.709.332	6
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(43.155.555.623)</b>	<b>(2.279.151.042)</b>	<b>(7.612.519.400)</b>	<b>(29.930.019.234)</b>	<b>(12.912.225.146)</b>	<b>94</b>
<b>III</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>						
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>120.345.549.294</b>	<b>77.189.993.671</b>	<b>63.687.634.271</b>	<b>54.275.114.870</b>	<b>24.345.095.637</b>	- <b>31</b>
<b>a</b>	<b>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>	<b>120.345.549.294</b>	<b>77.189.993.671</b>	<b>63.687.634.271</b>	<b>54.275.114.870</b>	<b>24.345.095.637</b>	- <b>31</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>11.183.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>8.650.000.000</b>	- <b>46</b>
<b>a</b>	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>11.183.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>8.650.000.000</b>	- <b>46</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>120.345.549.294</b>	<b>66.006.993.671</b>	<b>61.887.634.271</b>	<b>54.275.114.870</b>	<b>15.695.095.637</b>	- <b>34</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>77.189.993.671</b>	<b>63.727.842.629</b>	<b>54.275.114.870</b>	<b>24.345.095.636</b>	<b>2.782.870.490</b>	- <b>44</b>

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



### 3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Pariaman. Pendapatan daerah Kota Pariaman disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Pariaman, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Barat serta sumber lain – lain yang sah.

Menurut Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Sistem Pembagian Keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun awal periode RPJMD yaitu mulai tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, pendapatan daerah Kota Pariaman berfluktuasi. Hal ini karena adanya pengurangan pendapatan pada dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah. Namun tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, secara rinci dapat kita lihat pada Tabel 3.7. Hal ini patut disyukuri karena dengan kenaikan pendapatan masyarakat Kota Pariaman dapat mengalami kemajuan dan peningkatan taraf hidup. Terjadinya bencana Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara global dan nasional yang juga berdampak di Kota Pariaman sehingga tahun 2020 pendapat daerah mengalami penurunan, karena berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah.



**Tabel 3.2**  
**Komposisi APBD Kota Pariaman Tahun 2016 d.d 2020**

NO	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pembiayaan (Rp)
1	2016	621.535.178.051,91	664.690.733.675,18	120.345.549.294,27
2	2017	639.032.751.955,42	641.311.902.997,40	66.006.993.671,00
3	2018	627.169.121.763,69	634.781.641.164,23	61.887.634.270,57
4	2019	673.533.272.845,13	703.463.292.078,60	54.275.114.870,03
5	2020	632.222.867.998,86	645.135.093.144,66	15.695.095.636,56

*Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021*

Dari tabel 3.2 diatas terlihat bahwa realisasi komposisi APBD Kota Pariaman dari Tahun 2016-2020 terutama pada sektor pendapatan dan belanja mengalami fluktuasi tiap tahunnya. 1) Untuk realisasi pendapatan pada tahun 2016 realisasi pendapatan Kota Pariaman sebesar Rp. 621.535.178.0951,- Kemudian pada Tahun 2017 naik menjadi Rp. 639.032.751.955,-. Tapi pada Tahun 2018 turun lagi menjadi Rp. 627.169.121.763,- Dan pada Tahun 2019 realisasi pendapatan Kota Pariaman naik lagi menjadi Rp. 673.533.272.845,- . Sedangkan pada Tahun 2020 realisasi pendapatan Kota Pariaman turun cukup besar menjadi Rp. 632.222.867.998,- karena turunnya TKDD yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. 2) Sedangkan untuk belanja daerah dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan, Walaupun pada Tahun 2019 sempat mengalami kenaikan namun pada Tahun 2020 realisasi belanja mengalami penurunan lagi. Ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19, Sementara realisasi pembiayaan daerah dari Tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Dimana pada Tahun 2016 realisasi pembiayaan mencapai Rp, 120.345.549.294,- .Sementara itu pada tahun 2020 ini hanya mencapai Rp. 15.695.095.636,



**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kota Pariaman**  
**Tahun 2016 d.d 2020**

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2016	599.857.784.593,30	621.535.178.051,91	103,61	
2	2017	659.243.224.334,47	639.032.751.955,42	96,93	
3	2018	653.325.805.028,51	627.169.121.763,69	96,00	
4	2019	698.660.608.548,00	673.533.272.845,13	96,40	
5	2020	689.025.589.885,00	632.222.867.998,86	91,76	

*Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021*

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, banyak upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Pariaman baik melalui upaya pendataan sumber-sumber pendapatan baru, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pembinaan aparatur maupun perbaikan-perbaikan berbagai fasilitas pendukung pembangunan ekonomi.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman**  
**Tahun 2016 s.d 2020**

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Kontribusi
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>29.680.784.158</b>	<b>30.881.846.112</b>	<b>32.213.303.037</b>	<b>36.665.174.233</b>	<b>32.961.765.489</b>	<b>5,08</b>
a	Pendapatan Pajak Daerah	6.646.520.377	8.304.791.195	9.982.897.861	10.064.592.854	10.043.594.333	-
b	Hasil Retribusi Daerah	3.371.154.780	3.369.770.163	4.184.671.257	4.390.195.539	6.635.664.791	-
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.846.776.943	6.290.774.658	4.752.048.233	6.673.276.954	7.242.632.803	-
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.816.332.058	12.916.510.096	13.293.685.686	15.537.108.887	9.039.873.562	-
2	<b>Pendapatan Transfers</b>	<b>581.299.486.591</b>	<b>542.885.073.161</b>	<b>582.874.314.778</b>	<b>624.536.538.612</b>	<b>586.837.360.678</b>	<b>86,69</b>
a	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>533.629.510.758</b>	<b>515.176.988.201</b>	<b>509.927.165.546</b>	<b>526.296.352.131</b>	<b>487.428.440.555</b>	-
-	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	14.224.900.804	14.355.010.047	11.588.903.939	9.686.847.678	11.888.237.053	-
-	Dana Alokasi Umum (DAU)	422.666.213.000	415.241.327.000	415.241.327.000	428.104.412.000	389.252.498.000	-
-	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.738.396.954	85.580.651.154	83.096.934.607	88.505.092.453	86.287.705.502	-
b	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>33.376.164.954</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>49.770.376.154</b>	<b>70.671.299.995</b>	<b>75.614.489.000</b>	-
-	Dana Penyesuaian	33.376.164.954	7.500.000.000	-	-	-	-



No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Kontribusi
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
-	Dana Desa	-	-	41.270.376.154	48.050.233.995	48.819.423.000	-
-	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	8.500.000.000	22.621.066.000	26.795.066.000	-
<b>c</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b><u>14.293.810.879</u></b>	<b><u>20.208.084.960</u></b>	<b><u>23.176.773.078</u></b>	<b><u>27.568.886.486</u></b>	<b><u>23.794.431.123</u></b>	-
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.293.810.879	20.208.084.960	23.176.773.078	27.568.886.486	23.794.431.123	-
<b>3</b>	<b>Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>10.554.907.303</b>	<b>65.265.832.682</b>	<b>12.081.503.949</b>	<b>12.331.560.000</b>	<b>12.423.741.832</b>	<b>8,23</b>
-	Pendapatan Lainnya	10.554.907.303	52.626.848.971	-	-	-	-
-	Pendapatan Hibah	-	12.638.983.711	12.081.503.949	12.331.560.000	12.423.741.832	-
	<b>Jumlah</b>	<b>621.535.178.052</b>	<b>639.032.751.955</b>	<b>627.169.121.764</b>	<b>673.533.272.845</b>	<b>632.222.867.999</b>	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021

### 3.1.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, pengukuran kinerja juga dilakukan pada sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Pariaman bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kedua jenis belanja ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Belanja yang dilakukan Kota Pariaman dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Namun pembagian jenis belanja sebagaimana hal tersebut hanya digunakan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, seiring keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berikut tabel 3.9 yang menunjukkan target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota tahun 2016-2020.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Pariaman**  
**Tahun 2016 s.d 2020 (Rp.)**

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tk. Pertumbuhan
1	2016	720.203.333.888	664.690.733.675	92,29	-
2	2017	725.250.218.005	641.311.902.997	88,43	-3,52
3	2018	715.253.647.657	634.781.641.164	88,75	-1,02
4	2019	752.935.723.418	703.463.292.078	93,43	10,82
5	2020	704.720.685.521	645.135.093.144	91,54	-8,29
				<b>90,89</b>	<b>-0,50</b>

*Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021*

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah Kota Pariaman cenderung fluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 mencapai 91,24 %. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 93,43 %.



**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 s.d 2020**

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>664.690.733.675</b>	<b>641.311.902.997</b>	<b>634.781.641.164</b>	<b>703.463.292.079</b>	<b>645.135.093.145</b>	- 1
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>410.053.284.436</b>	<b>397.325.557.074</b>	<b>410.294.876.308</b>	<b>451.926.497.933</b>	<b>427.282.303.089</b>	1
-	Belanja Pegawai	281.275.971.188	218.793.751.449	235.434.442.521	269.457.086.395	261.891.125.789	- 1
-	Belanja Barang	126.954.702.806	160.089.255.625	164.089.091.767	176.346.311.538	163.630.577.300	7
-	Belanja Hibah	1.822.610.442	13.103.800.000	6.288.113.020	3.550.600.000	1.760.600.000	118
-	Belanja Bantuan Sosial	0	5.338.750.000	4.483.229.000	2.572.500.000	0	- 40
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>178.374.780.971</b>	<b>153.293.150.204</b>	<b>132.430.598.582</b>	<b>156.394.642.682</b>	<b>94.469.539.443</b>	- 12
-	Belanja Tanah	112.615.000	5.138.804.000	-	2.748.500.000	2.633.337.992	1.090
-	Belanja Peralatan dan Mesin	17.221.647.907	22.439.056.446	21.805.344.240	21.527.377.805	40.032.441.637	28
-	Belanja Bangunan dan Gedung	49.764.126.750	38.155.058.945	35.976.109.589	72.079.635.488	20.529.078.105	- 0
-	Belanja Jalan ,Irigasi dan Jaringan	110.296.186.089	86.969.753.589	72.539.847.661	58.731.141.889	26.136.217.098	- 28
-	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	980.205.225	590.477.224	2.109.297.092	1.307.987.500	5.138.464.611	118
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>203.428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.043.161.776</b>	- 25
<b>4</b>	<b>Belanja Transfers</b>	<b>76.059.240.268</b>	<b>90.693.195.720</b>	<b>92.056.166.274</b>	<b>95.142.151.464</b>	<b>95.340.088.837</b>	6
-	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	521.674.411	763.246.055	1.299.609.679	1.242.668.546	1.467.379.505	33
-	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik	75.537.565.857	89.929.949.665	90.756.556.595	93.899.482.918	93.872.709.332	6

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



### 3.1.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi deficit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pos pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja dimana dimungkinkan adanya surplus atau defisit dalam penganggaran daerah. Berikut tabel 3.7 yang menunjukkan target dan Realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Pariaman dari tahun tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari Dana Cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Pariaman Tahun 2016 s.d 2020**

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tk. Pertumbuhan
1	2016	120.345.549.295	120.345.549.295	100	-
2	2017	63.727.842.629	63.727.842.629	100	-47,05
3	2018	61.927.842.629	61.887.634.270	99,94	-2,89
4	2019	54.275.114.870	54.275.114.870	100	-12,30
5	2020	15.695.095.636	15.695.095.636	100	-71,08
	<b>Rata-rata</b>	<b>43.966.017.712</b>	<b>43.952.614.925</b>	<b>99,98</b>	<b>-33,33</b>

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kota Pariaman Tahun 2016 s.d 2020**

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
III	<b>Pembiayaan Daerah</b>						
1	Penerimaan Pembiayaan	120.345.549.294	77.189.993.671	63.687.634.271	54.275.114.870	24.345.095.637	- 31
a	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	120.345.549.294	77.189.993.671	63.687.634.271	54.275.114.870	24.345.095.637	- 31
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	11.183.000.000	1.800.000.000	-	8.650.000.000	- 46
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	11.183.000.000	1.800.000.000	-	8.650.000.000	- 46
3	Pembiayaan Netto	120.345.549.294	66.006.993.671	61.887.634.271	54.275.114.870	15.695.095.637	- 34

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pariaman sepanjang tahun 2016- 2020, sumber pembiayaan penerimaan yang digunakan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan pembentuk terbesar dari nominal realisasi penerimaan pembiayaan. Tingkat realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami penurunan ini terlihat pada tahun 2016 realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA APBD Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 61.887.634.270. Kemudian tahun 2019 realisasi penerimaan pembiayaan turun menjadi Rp. 54.275.114.870. Hingga pada tahun 2020 realisasi penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp. 15.695.095.636. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Pariaman selama 3 tahun ini cukup efektif dalam penyerapan anggaran dalam arti lain pemerintah Kota Pariaman dalam merencanakan anggaran belanja setiap kegiatan tersebut efektif dan tepat sasaran.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dari tahun ke tahun.

### 3.1.2 Neraca

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/ pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub – sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan





Neraca Pemerintahan Kota Pariaman dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

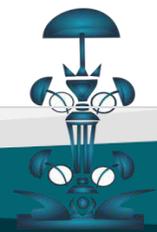


**Tabel 3.9**  
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Ket
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
	Kas di kas daerah	77,014,390,124.00	63,718,091,419.02	54.012.937.331,03	23.376.723.044,56	2.042.360.936,76	
	Kas di Bendahara Penerimaan	(1,457,000.00)	9,618,662.00	74.219.064,00	0,00	0,00	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	176,231,273.00	50,927,337.45	0,00	6.386.952,00	363.827.953,50	
	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0.00	0.00	0,00	0,00	363.827.953,50	
	Kas Lainnya - Setara Kas	132,547.00	20,887,319.55	132.547,00	132.547,00	0,00	
	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Pajak	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Retribusi	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Lain-lain	2,093,909,778.00	2,093,909,778.00	154.439.789,17	790.782.641,17	755.797.665,83	
	Persediaan	5,338,200.00	5,338,200.00	3.768.432.379,00	4.747.094.195,48	6.614.159.321,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.00	0.00	(4.501.900.625,65)	(1.016.441.554,42)	(1.637.461.910,96)	
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>79,288,544,922.00</b>	<b>65,898,772,716.02</b>	<b>61.200.754.538,55</b>	<b>35.065.698.215,79</b>	<b>16.569.339.723,13</b>	
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
	<b>Investasi Non Permanen</b>						
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



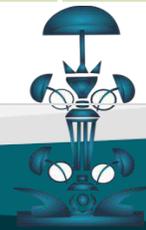
NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Ket
	Investasi dalam Surat Utang Negara						
	Investasi Non Permanen Lainnya	698,161,875.00	698,161,875.00	734.504.500,00	738.003.500,00	739.239.500,00	
	<b>JUMLAH Investasi Non Permanen</b>	<b>698,161,875.00</b>	<b>698,161,875.00</b>	<b>734.504.500,00</b>	<b>738.003.500,00</b>	<b>739.239.500,00</b>	
	<b>Investasi Permanen</b>						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	48.022.899.000,00	48.022.899.000,00	56.672.899.000,00	
	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Invertasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>JUMLAH Investasi Permanen</b>	<b>27,524,899,000.00</b>	<b>27,524,899,000.00</b>	<b>48.022.899.000,00</b>	<b>48.022.899.000,00</b>	<b>56.672.899.000,00</b>	
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>28,223,060,875.00</b>	<b>28,223,060,875.00</b>	<b>48.757.403.500,00</b>	<b>48.760.902.500,00</b>	<b>57.412.138.500,00</b>	
	<b>ASET TETAP</b>						
	Tanah	97,837,458,912.20	102,976,262,912.20	92.965.452.772,25	95.844.576.346,25	99.290.291.029,25	
	Peralatan dan Mesin	197,010,440,956.07	217,238,873,986.07	180.912.469.515,54	191.925.465.370,99	228.433.239.367,24	
	Gedung dan Bangunan	446,402,452,980.67	484,571,161,925.39	446.078.981.729,57	476.208.876.766,60	497.738.203.155,60	
	Jalan, Jaringan dan Instalasi	711,215,335,394.01	798,198,818,983.01	716.787.591.894,91	774.184.926.369,91	809.014.409.820,40	
	Aset Tetap Lainnya	16,026,964,688.67	18,800,685,328.67	65.911.718.597,70	70.948.012.296,25	77.608.877.352,56	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	25,442,283,862.00	25,442,283,862.00	31.557.146.899,00	65.983.872.809,31	59.298.079.691,00	
	Akumulasi Penyusutan	(239,733,000,720.03)	(239,733,000,720.03)	(815.394.431.859,69)	(910.358.994.625,68)	(1.019.274.671.467,06)	
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,254,201,936,073.59</b>	<b>1,407,495,086,277.31</b>	<b>718.818.929.549,28</b>	<b>764.736.735.333,63</b>	<b>752.108.428.948,99</b>	
	<b>DANA CADANGAN</b>						
	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Ket
	<b>ASET LAINNYA</b>						
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Aset Tidak Berwujud	341,900,000.00	341,900,000.00	687.162.000,00	687.162.000,00	687.162.000,00	
	Kas yang dibatasi penggunaannya	3,877,899,658.32	3,877,899,658.32	0.00	0.00	0.00	
	Aset Lain-lain	219,420,877.00	219,420,877.00	4.438.556.876,67	18.348.919.776,76	20.956.506.630,71	
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>4,439,220,535.32</b>	<b>4,439,220,535.32</b>	<b>4.622.969.293,34</b>	<b>18.233.978.166,76</b>	<b>3.933.803.975,77</b>	
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,366,152,762,405.91</b>	<b>1,506,056,140,403.65</b>	<b>833.400.056.881,17</b>	<b>866.797.314.216,18</b>	<b>830.023.711.147,89</b>	
	<b>KEWAJIBAN</b>						
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,777,273.00	71,814,656.00	669.200,00	2.624.524,00	175.830.629,00	
	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Ket
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	75.366.702,32	37.619.029,46	19.305.450,00	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00	102.835.428,00	4.672.366.240,50	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,777,273.00</b>	<b>71,814,656.00</b>	<b>76.035.902,32</b>	<b>157.103.981,46</b>	<b>7.775.094.627,50</b>	
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utang Dalam Negeri-Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pemerintah Pusat	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>7,620,442,702.35</b>	<b>7,620,442,702.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>7,622,219,975.35</b>	<b>7,692,257,358.35</b>	<b>76.035.902,32</b>	<b>157.103.981,46</b>	<b>7.775.094.627,50</b>	
	<b>EKUITAS DANA</b>						
	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>						
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	77,189,617,430.00	(473,436,975,209.05)	0.00	0.00	0.00	
	Cadangan untuk Piutang	2,093,909,778.00	2,093,909,778.00	0.00	0.00	0.00	
	Cadangan untuk Persediaan	5,338,200.00	5,338,200.00	0.00	0.00	0.00	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



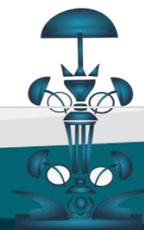
NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Ket
	Pendek						
	Pendapatan yang Ditangguhkan	(2,474,000.00)	(2,474,000.00)	0.00	0.00	0.00	
	Bukan SILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>79,286,391,408.00</b>	<b>(471,340,201,231.05)</b>	0.00	0.00	0.00	
	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	0.00	0.00	0.00	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,254,201,936,073.59	1,412,249,025,359.26	0.00	0.00	0.00	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	4,439,220,535.32	4,439,220,535.32	0.00	0.00	0.00	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	(7,620,442,702.35)	(7,620,442,702.35)	0.00	0.00	0.00	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>1,279,243,774,781.56</b>	<b>1,437,290,864,067.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>						
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>KOREKSI EKUITAS</b>						
	Koreksi Ekuitas	(528,530,962,631.13)	(528,529,945,631.13)	0.00	0.00	0.00	
	<b>JUMLAH KOREKSI EKUITAS</b>	<b>(528,530,962,631.13)</b>	<b>(528,529,945,631.13)</b>	0.00	0.00	0.00	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>829,999,203,558.43</b>	<b>437,420,717,205.05</b>	<b>833.324.020.978,85</b>	<b>866.640.210.234,72</b>	<b>822.248.616.520,39</b>	





NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Ket
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,067,779,179,647.96	1,075,464,439,668.28	833.400.056.881,17	866.797.314.216,18	830.023.711.147,89	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



Secara umum kondisi neraca daerah Kota Pariaman tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio *quick* yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban - kewajiban jangka panjangnya. Hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.10  
Rasio Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>					
1	Rasio Lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek	44.612	917,6	804,89	223,20	2,13
2	Rasio Quick = (Aktiva Lancar – Persediaan) : Kewajiban Jangka Pendek	44.609	918	755	193	1,28
<b>II</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>					
1	Rasio Hutang Terhadap Aset = Total Hutang : Total Aset	0,000002	0,00048	0,00	0,00	0,00
2	Rasio Hutang Terhadap Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0,00	0,00016	0,00	0,00012	0,0058

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



## **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Pariaman pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

#### **a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Kota Pariaman.



**Tabel 3.11**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**  
**Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Penyerapan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)									
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>720.203.333.888</b>	<b>664.690.733.675</b>	<b>725.250.218.005</b>	<b>641.311.902.997</b>	<b>715.253.647.658</b>	<b>634.781.641.164</b>	<b>752.935.723.418</b>	<b>703.463.292.079</b>	<b>704.720.685.522</b>	<b>645.135.093.145</b>	<b>91</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>448.891.472.354</b>	<b>410.053.284.436</b>	<b>459.161.633.620</b>	<b>397.325.557.074</b>	<b>445.138.680.803</b>	<b>410.294.876.308</b>	<b>484.802.521.539</b>	<b>451.926.497.933</b>	<b>453.214.258.088</b>	<b>427.282.303.089</b>	<b>92</b>
-	Belanja Pegawai	299.876.407.928	281.275.971.188	249.691.170.527	218.793.751.449	245.998.663.371	235.434.442.521	277.253.459.703	269.457.086.395	258.770.057.830	261.891.125.789	95
-	Belanja Barang	147.181.064.426	126.954.702.806	190.816.663.093	160.089.255.625	186.486.679.281	164.089.091.767	184.204.808.438	176.346.311.538	192.274.200.258	163.630.577.300	88
-	Belanja Hibah	1.834.000.000	1.822.610.442	13.103.800.000	13.103.800.000	7.990.973.650	6.288.113.020	20.719.253.398	3.550.600.000	2.170.000.000	1.760.600.000	75
-	Belanja Bantuan Sosial	0	0	5.550.000.000	5.338.750.000	4.662.364.500	4.483.229.000	2.625.000.000	2.572.500.000	0	0	73
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>192.648.705.199</b>	<b>178.374.780.971</b>	<b>173.056.542.378</b>	<b>153.293.150.204</b>	<b>176.974.701.133</b>	<b>132.430.598.582</b>	<b>171.955.619.758</b>	<b>156.394.642.682</b>	<b>123.785.351.815</b>	<b>94.469.539.443</b>	<b>85</b>
-	Belanja Tanah	962.292.500	112.615.000	8.617.500.000	5.138.804.000	1.609.300.000	-	5.759.800.000	2.748.500.000	3.561.843.460	2.633.337.992	39
-	Belanja Peralatan dan Mesin	18.350.677.356	17.221.647.907	24.451.987.539	22.439.056.446	23.447.483.009	21.805.344.240	23.856.750.332	21.527.377.805	44.905.614.870	40.032.441.637	92
-	Belanja Bangunan dan Gedung	52.556.752.257	49.764.126.750	45.333.032.773	38.155.058.945	59.695.293.939	35.976.109.589	80.131.160.676	72.079.635.488	24.690.042.027	20.529.078.105	82
-	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.652.877.286	110.296.186.089	93.953.177.066	86.969.753.589	89.851.174.185	72.539.847.661	60.709.311.750	58.731.141.889	45.195.853.679	26.136.217.098	84
-	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	1.126.105.800	980.205.225	700.875.000	590.477.224	2.371.450.000	2.109.297.092	1.498.597.000	1.307.987.500	5.431.997.779	5.138.464.611	88
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>203.428.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>30.325.902.755</b>	<b>28.043.161.776</b>	<b>23</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfers</b>	<b>77.663.156.335</b>	<b>76.059.240.268</b>	<b>92.032.042.007</b>	<b>90.693.195.720</b>	<b>92.740.265.722</b>	<b>92.056.166.274</b>	<b>95.977.582.121</b>	<b>95.142.151.484</b>	<b>97.395.172.863</b>	<b>95.340.088.837</b>	<b>99</b>
-	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	880.836.318	521.674.411	1.307.119.220	763.246.055	1.618.163.875	1.299.609.679	2.060.302.100	1.242.668.546	3.074.866.127	1.467.379.505	61
-	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik	76.782.320.017	75.537.565.857	90.724.922.787	89.929.949.665	91.122.101.847	90.756.556.595	93.917.280.021	93.899.482.918	94.320.306.736	93.872.709.332	99

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



**b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Pariaman ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berfluktuatif tapi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 3.12**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Tahun 2016–2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>					
-	Belanja Gaji dan Tunjangan	237.478.522.864	177.343.080.717	174.187.835.386	185.335.442.097	182.868.708.897
-	Belanja Tambahan Penghasilan	14.984.103	12.966.010.658	43.268.753.471	58.818.362.872	48.458.882.269
-	Biaya Pemungutan Pajak	45.541.695	33.738.630	64.849.130	42.658.605	82.712.280
-	Insentif Pemungutan Pajak	211.253.087	51.642.338	416.797.351	463.163.370	388.832.848
-	Insentif Pemungutan Retribusi	96.861.386	15.199.880	141.051.747	153.815.788	147.531.000
-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	201.600.000	1.027.500.000	2.373.660.000	2.237.340.000	2.306.400.000
-	Belanja Honorarium	29.842.922.838	31.030.452.367	15.315.946.500	22.771.861.554	22.538.729.277
-	Belanja Uang Lembur	1.274.036.900	1.290.046.000	596.150.000	1.449.802.500	1.588.977.500
-	Belanja Premi Asuransi	2.860.554.778	3.812.949.337	2.999.916.056	6.954.076.139	8.181.427.151
-	Belanja Pakaian	3.646.747.030	4.003.369.737	4.936.944.650	3.074.292.652	2.272.188.300
-	Belanja Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS	28.444.685.283	37.032.963.598	40.638.201.728	37.963.428.400	32.129.221.438
-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	900.000.000	142.750.000	113.500.000	39.900.000	121.250.000
-	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	263.035.000	247.250.000	542.041.800	460.305.000	391.125.000
<b>B.</b>	<b>Belanja Modal</b>					
-	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)	178.374.780.971	153.293.150.203	132.430.598.581	156.394.642.681	94.469.539.442
	<b>Total</b>	<b>497.823.645.764</b>	<b>422.290.103.465</b>	<b>415.026.330.344</b>	<b>476.159.091.658</b>	<b>395.945.525.402</b>

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	%	Ket
		A	b	(a/b) x 100 %	
1	2016	497.823.645.764	664.690.733.674	75	
2	2017	422.290.103.465	652.494.902.996	65	
3	2018	415.026.330.344	636.581.641.163	65	
4	2019	476.159.091.658	703.463.292.078	68	
5	2020	395.945.525.402	653.945.525.402	61	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah berfluktuatif dan cenderung turun dari tahun ke tahun pada periode Tahun 2016–2020.

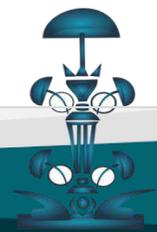
### c. Analisis Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.14**  
**Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
<b>A</b>	<b>Belanja Wajib</b>	<b>337.397.815.248</b>	<b>305.834.754.419</b>	<b>328.508.835.966</b>	<b>359.510.653.761</b>	<b>369.210.832.475</b>	
-	Belanja Gaji dan Tunjangan	194.023.213.738	150.848.669.273	174.187.835.386	185.335.442.097	162.548.492.695	
-	Tambahan Penghasilan PNS	63.273.717.327	43.850.645.208	43.268.753.471	58.818.362.872	78.553.868.989	
-	Biaya Pemungutan Pajak	0	0	64.849.130	42.658.605	0	
-	Insentif Pemungutan Pajak	211.253.087	51.642.338	416.797.351	463.163.370	388.832.848	
-	Insentif Pemungutan Retribusi	96.861.386	15.199.880	141.051.747	153.815.788	147.531.000	
-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta	1.299.600.000	1.499.100.000	2.373.660.000	2.237.340.000	1.885.333.000	
-	Belanja Hibah	1.822.610.442	13.103.800.000	14.640.293.271	16.503.272.667	1760.600.000	
-	Belanja Bantuan Sosial	0	5.338.750.000	448.322.900	2.572.500.000	0	
-	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	521.674.411	763.246.055	883.286.050	923.400.050	1.467.379.505	
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	75.537.565.857	89.929.949.665	91.650.234.660	92.460.264.560	93.872.709.332	
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	407.891.000	433.752.000	433.752.000	433.752	542.923.330	
-	Belanja Tidak Terduga	203.428.000	0	0	433.752	28.043.161.776	
<b>B</b>	<b>Belanja Mengikat</b>	<b>69.401.281</b>	<b>579.890.389</b>	<b>2.999.916.056</b>	<b>6.954.076.139</b>	<b>647.517.201</b>	
-	Belanja Premi Asuransi	69.401.281	579.890.389	2.999.916.056	6.954.076.139	647.517.201	
<b>C</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>11.183.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>8.650.000.000</b>	
-	Penyertaan Modal pada Bank	0	11.183.000.000	0	1.850.000.000	8.650.000.000	
	<b>Total (A + B + C)</b>	<b>337.467.216.529</b>	<b>317.597.644.808</b>	<b>331.508.752.022</b>	<b>366.464.729.000</b>	<b>378.508.349.676</b>	



### **3.2.2 Pembiayaan Daerah**

#### **3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2016 sampai 2020.



**Tabel 3.15**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	621.535.178.051	639.032.751.955	627.169.121.763	673.533.272.845	632.222.867.998
2	Belanja Daerah	664.690.733.675	641.311.902.997	634.781.641.164	703.463.292.078	645.135.093.144
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	11.183.000.000	1.800.000.000	0	8.650.000.000
A	Defisit Riil	(43.155.555.624)	(13.462.151.042)	(9.412.519.401)	(29.930.019.233)	(21.562.225.146)
	<b>Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :</b>					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	120.345.549.294	77.189.993.671	63.687.634.270	54.275.114.870	24.345.095.636
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
3	Koreksi	0	0	0	0	0
B	Total Realisasi Penerimaan	120.345.549.294	77.189.993.671	63.687.634.270	54.275.114.870	24.345.095.636
	<b>Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (A+ B)</b>	<b>77.189.993.670</b>	<b>63.727.842.629</b>	<b>54.275.114.869</b>	<b>24.345.095.637</b>	<b>2.782.870.490</b>

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2021



Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada Tahun 2017 yaitu Rp 77.189.993.670,- Posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.782.870.490,- Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016–2020**

NO	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	77.189.993.670	63.727.842.629	54.275.114.869	24.345.095.637	2.782.870.490
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		77.189.993.670	63.727.842.629	54.275.114.869	24.345.095.637	2.782.870.490

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir Tahun 2019 dan awal Tahun 2020, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

**Gambar 3.1**  
**Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**



Sumber : Bappeda, 2021

Pemerintah Kota Pariaman untuk perencanaan Tahun 2021 di dalam penyusunan APBD nya harus sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



**Gambar 3.2**  
**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai**  
**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019**

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
<b>Pendapatan Asli Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pajak Daerah</li> <li>➢ Retribusi Daerah</li> <li>➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan</li> <li>➢ Lain-lain PAD yg Sah</li> </ul>	<b>Belanja Operasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ B. Pegawai</li> <li>➢ B. Barang &amp; Jasa</li> <li>➢ B. Bunga</li> <li>➢ B. Subsidi</li> <li>➢ B. Hibah</li> <li>➢ B. Bantuan Sosial</li> </ul>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ SilPA</li> <li>➢ Pencairan Dana Cadangan</li> <li>➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan</li> <li>➢ Penerimaan Pinjaman Daerah</li> <li>➢ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</li> <li>➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU</li> </ul>
<b>Pendapatan Transfer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Transfer Pemerintah Pusat</li> <li>➢ Transfer Antar Daerah</li> </ul>	<b>Belanja Modal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ B. M. Tanah</li> <li>➢ B. M. Peralatan &amp; Mesin</li> <li>➢ B. M. Gedung &amp; Bangunan</li> <li>➢ B. M. Jalan, Jaringan &amp; Irigasi</li> <li>➢ B. M. Aset Tetap Lainnya</li> </ul>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pembentukan Dana Cadangan</li> <li>➢ Penyertaan Modal Daerah</li> <li>➢ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</li> <li>➢ Pemberian Pinjaman Daerah</li> <li>➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU</li> </ul>
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Hibah</li> <li>➢ Dana Darurat</li> <li>➢ Lain-Lain Pendapatan</li> </ul>	<b>Belanja Tidak Terbagi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ B. Bagi Hasil</li> <li>➢ B. Bantuan Keuangan</li> </ul>	

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir Tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus berjangkitnya pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman pada Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018- 2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan Pemerintah Kota Pariaman. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemic Covid-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada



dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah penangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2021 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2023, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah**

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan rata-rata periode RPJMD sebelumnya perubahan regulasi dan isu perubahan kebijakan fiskal, di samping samping itu tentu ada usaha Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat;
7. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat;
8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
10. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.



12. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
14. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
15. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
16. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
17. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan.

Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pariaman mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Pariaman merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:

- a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
- b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.



- d. Melaksanakan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
- f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
- b. Dalam rangka meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dengan memperhatikan dan mendukung capaian komponen dalam rumusan perhitungan DAU dan OAK, antara lain dengan: Meningkatkan cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan - untuk perhitungan DAU, dan Meningkatkan akurasi dan kualitas data sektor Pendidikan, Kesehatan, dll - untuk perhitungan DAK Fisik.
- c. Meningkatkan akurasi data potensi pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (untuk diperhatikan kewenangan).
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah yang optimal ditempuh melalui:

- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.



**Tabel 3.17**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 – 2023**

NO	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>673.533.272.845</b>	<b>632.222.867.999</b>	<b>46.451.454.431</b>	<b>50.913.438.431</b>	<b>56.790.956.200</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.665.174.233	32.961.765.489	10.990.000.000	10.990.000.000	13.650.000.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.064.592.854	10.043.594.333	15.144.428.276	20.409.428.276	21.297.456.200
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.390.195.539	6.635.664.791	6.986.510.155	6.986.510.155	8.539.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.673.276.954	7.242.632.803	13.330.516.000	12.527.500.000	13.304.500.000
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfers</b>					
4.2.1	Transfers Pemerintah Pusat	526.506.564.742	586.837.360.678	537.613.090.817	536.740.853.000	540.740.853.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	31.849.909.781	26.779.910.914	30.779.910.914
<b>4.3</b>	<b>Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>					
4.3.1	Pendapatan Hibah	12.331.560.000	12.423.741.832	5.000.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	11.878.706.228	11.878.706.228	11.878.706.228
	<b>Jumlah</b>			<b>632.793.161.257</b>	<b>628.812.908.573</b>	<b>647.690.426.342</b>

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2021

### 3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam dua tahun sisa pelaksanaan RPJMD.

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimis tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa ke depan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi



tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah.

Disamping itu, merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran diarahkan pada program prioritas. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional. Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah seperti pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai Tahun 2021 struktur APBD harus mengacu kepada PP tersebut, sehingga kedua jenis belanja tersebut menjadi belanja operasional. Berikut ini dapat dilihat target belanja daerah tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.18**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021-2023**

NO	Uraian	Target (Rp)	Proyeksi (Rp)	
		2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>Belanja</b>	<b>674.126.031.754</b>	<b>646.934.202.345</b>	<b>666.238.042.863</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b><u>496.736.824.681</u></b>	<b><u>470.873.193.078</u></b>	<b><u>465.296.685.128</u></b>
-	Belanja Pegawai	286.107.123.426	291.054.491.749	298.064.451.289
-	Belanja Barang dan Jasa	202.739.706.315	173.148.703.000	162.149.745.500
-	Belanja Hibah	2.778.794.939	4.382.478.329	5.082.488.339
-	Belanja Bantuan Sosial	5.111.200.000	2.287.520.000	3.987.630.000
<b>b</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b><u>79.441.273.876</u></b>	<b><u>87.787.028.709</u></b>	<b><u>107.667.327.179</u></b>
-	Belanja Tanah	0	2.000.000.000	5.000.000.000
-	Belanja Peralatan dan Mesin	20.121.879.991	11.179.080.349	10.169.080.299
-	Belanja Bangunan dan Gedung	18.732.751.767	30.002.485.117	58.002.465.117
-	Belanja Jalan ,Irigasi dan Jaringan	40.539.342.118	44.257.416.243	34.257.714.263
-	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	47.300.000	348.047.000	248.067.500
<b>c</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>930.625.970</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>d</b>	<b>Belanja Transfers</b>	<b><u>97.017.307.226</u></b>	<b><u>86.773.980.558</u></b>	<b><u>90.764.030.556</u></b>



-	Bagi Hasil	2.613.442.827	3.138.442.830	4.138.442.830
-	Belanja Bantuan Keuangan	94.403.864.399	83.635.537.728	86.625.587.726
	Jumlah	674.126.031.754	646.934.202.345	666.238.042.863

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021

Sementara dari sisi belanja daerah terjadi peningkatan pengeluaran dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah perlu disusun dalam kerangka sistimatis dan terpola. Belanja Daerah diarahkan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun. Pengelolaan Belanja Daerah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan (*input*), keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang



dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Kota Pariaman menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : a) urusan pemerintahan bidang pendidikan, b) urusan pemerintahan bidang kesehatan, c) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, d) urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, 5) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 6) urusan pemerintahan bidang sosial.
2. Pelaksanaan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Pariaman Tahun 2018-2023, meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan serta Daya Saing SDM; (2) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya; (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City; (4) Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (5) Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang terpadu dengan pengembangan Ekonomi Kerakyataan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing; (6) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyataan Dan Daya Dukung Pariwisata; (7) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Dan Optimisasi Pengembangan Water Front City; (8) Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan; (9) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. serta pada Perubahan Tahun 2021 proritas pembangunan ditambah yaitu Percepatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan dan sosial-ekonomi. Serta Pemenuhan sasaran pembangunan serta target dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2023.
3. Mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan tiap tahun dalam bentuk prioritas pembangunan nasional dan program unggulan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
4. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).



5. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan.
6. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dan total belanja APBD diluar gaji secara konsisten dan berkesinambungan.
7. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP serta meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap dan total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Sejak pada Tahun 2020, alokasi belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta *acres*. Selain itu dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komponen belanja untuk tahun 2021 mengalami perombakan yang signifikan. Dalam regulasi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, tidak dikenal lagi istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja terdiri dari : belanja operasi, belanja modal, belanjatidak terduga dan belanja transfer. Seluruh belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan bersama-sama dengan belanja barang dan jasa berada pada belanja operasi.

### 3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah :

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.



2. Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pinjaman ke Bank.
3. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
4. Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Nagari.

**Tabel 3.19**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman**  
**Tahun 2019-2023**

NO	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
I	<b>Pembiayaan</b>	54.275.114.870	15.695.095.636	31.975.415.000	24.491.685.750	26.170.395.038
1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	54.275.114.870	24.345.095.636	31.975.415.000	33.574.185.750	35.252.895.038
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	54.275.114.870	24.345.095.636	31.975.415.000	33.574.185.750	35.252.895.038
-	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
-	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
-	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	0	0	0	0	0
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>					
-	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0
-	Penyertaan modal daerah	0	8.650.000.000	0	9.082.500.000	9.082.500.000
-	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
-	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	<b>Pembiayaan Netto</b>	54.275.114.870	15.695.095.636	31.975.415.000	24.491.685.750	26.170.395.038
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	63.687.634.270,57	54.275.114.870	33.574.185.750	30.252.895.038	20.475.165.600

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021



### 3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah periode RPJMD yang tersisa. Perhitungan kerangka pendanaan meliputi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.22 dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.23.

**Tabel 3.20**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	Tahun				
		Realisasi			Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	673.533.272.845	632.222.867.998	639.480.755.235	643.480.755.235	645.770.783.159
2	Pencairan Dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	63.687.634.270,57	54.275.114.870	33.574.185.750	30.252.895.038	20.475.165.600
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>727.808.387.715</b>	<b>656.567.963.634</b>	<b>673.054.940.985</b>	<b>673.733.650.273</b>	<b>666.245.948.759</b>
	Dikurangi dengan :					
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	366.464.729.000	378.508.349.676	382.293.433.173	386.116.367.505	389.977.531.180
	Kapasitas riil Kemampuan Keuangan	370.756.178.116	307.989.633.192	290.761.507.812	287.617.282.768	276.268.417.579

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

1. **Prioritas I** dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
  - a. **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial).
  - b. **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan



setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

2. **Prioritas II** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. **Prioritas III** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



**Tabel 3.21**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	Tahun				
		Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023
		Juta (Rp)				
1	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	370.756.178.116	307.989.633.192	290.761.507.812	287.617.282.768	276.268.417.579
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I :					
1a	Belanja operasi pencapaian SPM dan pengeluaran pembiayaan	230.958.308.926	170.342.458.108	162.568.400.250	145.458.250.400	150.248.500.200
1b	Pembentukan Dana Cadangan Dikurangi	0	0	0	0	0
1c	Belanja operasi yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
1d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas Utama	0	8.650.000.000	0	0	10.000.000.000
II	<b>Total rencana Pengeluaran Prioritas I (I.a+I.b-I.c-I.d)</b>	<b>230.958.308.926</b>	<b>161.692.458.108</b>	<b>162.568.400.250</b>	<b>145.458.250.400</b>	<b>140.248.500.200</b>
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas	139.797.869.190	146.297.175.084	128.193.107.562	142.159.032.368	136.019.917.379
2a	Belanja pegawai Dikurangi	354.740.513.629	368.667.909.145	340.215.650.148	345.650.856.348	344.458.956.245
2b	Pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	193.475.262.165	178.524.658.532	212.022.542.586	203.491.823.980	208.439.038.866
III	<b>Total rencana pengeluaran prioritas II (II.a-II.b)</b>	139.797.869.190	146.297.175.084	128.193.107.562	142.159.032.368	136.019.917.379
	<b>Surplus Anggaran Riil atau berimbang (I-II-III)</b>	Berimbang	Berimbang	Berimbang	Berimbang	Berimbang

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2021





## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**



**BAB IV****PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS****4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai dengan harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

**4.1.1 Permasalahan Pembangunan Secara Makro**

Kota Pariaman menghadapi permasalahan pembangunan secara makro antara lain sebagai berikut :

**1) Permasalahan Pembangunan Ekonomi**

Permasalahan pembangunan ekonomi Kota Pariaman tergambar dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Walaupun pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,59 % . Dan pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, turun lagi menjadi masing-masing 5,47 % dan 5,30 %, Kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman sebesar -1,32 % akibat pandemi covid-19. Dan pertumbuhan yang minus ini hampir dialami oleh semua daerah di Indonesia. Memang secara data BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman yang cenderung melambat, Hal yang sama juga dialami oleh provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam 5 tahun terakhir tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman berada pada nomor urut ke-7 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dianggap sebagai suatu permasalahan makro daerah Kota Pariaman yang harus secara bertahap bisa diatasi. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	5,03	7,07	5,17	5,02	-2,07
Sumatera Barat (Provinsi)	5,27	5,30	5,16	5,05	-1,60
<b>Kabupaten :</b>					
Kepulauan Mentawai	5,02	5,12	4,91	4,76	-1,85
Pesisir Selatan	5,33	5,41	5,35	4,81	-1,11
Kab.Solok	5,31	5,32	5,22	5,07	1,12
Sijunjung	5,26	5,26	5,09	4,83	-1,10
Tanah Datar	5,03	5,11	5,07	5,01	-1,13
Padang Pariaman	5,52	5,58	5,46	2,51	-10,46
Agam	5,51	5,51	5,26	4,81	-1,38
Lima Puluh Kota	5,32	5,53	5,26	5,10	-1,16
Pasaman	5,07	5,08	5,00	4,84	-0,87
Solok Selatan	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24
Dharmasraya	5,42	5,44	5,31	4,98	-1,39
Pasaman Barat	5,34	5,34	5,24	4,49	-1,34
<b>Kota :</b>					
Padang	6,17	6,23	6,06	5,65	-1,86
Kota Solok	5,76	5,76	5,65	5,49	-1,42
Sawah Lunto	5,72	5,76	5,65	5,49	-1,27
Padang Panjang	5,80	5,80	5,71	5,56	-1,44
Bukittinggi	6,05	6,08	6,00	5,84	-1,74
Payakumbuh	6,08	6,12	6,02	5,89	-1,66
<b>Pariaman</b>	<b>5,59</b>	<b>5,61</b>	<b>5,47</b>	<b>5,30</b>	<b>-1,32</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia*

Disamping itu dari sisi PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Pemerintah Kota Pariaman selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat, yaitu dari Rp. 47,11 juta pada 2016 menjadi Rp. 55,86 juta pada tahun 2020. Namun angka ini masih berada di nomor urut ke-6 jika dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat serta masih berada dibawah Nasional rata-rata Nasional yang sudah mencapai 56,94 pada Tahun 2020. Walaupun sudah berada diatas rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat dengan angka 44,03 pada Tahun 2020. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini



**Tabel 4.2**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa)**  
**Tahun 2016-2020)**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Barat (Provinsi)	37,28	40,19	42,80	45,21	44,03
<b>Kabupaten :</b>					
Kepulauan Mentawai	42,83	45,12	47,06	50,44	49,46
Pesisir Selatan	24,84	26,39	28,32	30,25	29,96
Kab.Solok	30,18	31,96	34,10	36,36	35,96
Sijunjung	32,87	34,45	36,31	38,46	37,87
Tanah Datar	31,05	32,97	35,13	37,58	37,34
Padang Pariaman	42,91	46,32	49,45	51,14	42,95
Agam	34,72	36,83	39,24	41,80	41,19
Lima Puluh Kota	34,03	35,98	38,27	40,79	40,24
Pasaman	26,80	28,30	29,87	31,66	31,32
Solok Selatan	28,26	29,55	30,97	32,57	31,81
Dharmasraya	36,80	38,45	40,14	41,78	40,41
Pasaman Barat	30,55	32,06	33,52	34,69	33,75
<b>Kota :</b>					
Padang	53,98	57,27	61,24	65,65	64,67
Kota Solok	48,16	50,57	53,43	57,00	56,05
Sawah Lunto	48,34	51,55	55,00	58,85	58,02
Padang Panjang	53,64	56,74	60,35	64,72	63,82
Bukittinggi	54,39	58,78	62,21	66,49	65,00
Payakumbuh	40,08	42,78	45,88	50,34	49,63
<b>Pariaman</b>	<b>47,11</b>	<b>49,75</b>	<b>52,68</b>	<b>56,56</b>	<b>55,86</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi masyarakat Kota Pariaman masih perlu ditingkatkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.3**  
**Rumusan Permasalahan: Pembangunan Ekonomi Pemerintah Kota Pariaman**  
**masih perlu ditingkatkan**

NO	Pokok Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan cenderung melambat
		Kontribusi dari sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum sebagai multiplier effect dari sektor pariwisata belum tumbuh secara optimal
		Pengembangan terhadap industri olahan masih rendah
		Distribusi produk belum efektif dan efisien
		Masih kurangnya sentra usaha / produk ekonomi lokal
		Akses permodalan dan pasar Usaha Mikro masih terbatas
		Daya saing produk masih rendah
2	Masih belum optimalnya nilai investasi	Masih terbatasnya regulasi terkait investasi.
		Minat Investor yang masih rendah
		Potensi unggulan daerah belum bisa menjadi daya tarik bagi investor
		Investasi yang belum banyak berkembang di Kota Pariaman
3	Produktivitas sektor pariwisata masih rendah	Belum optimalnya sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak roda perekonomian
		Daya saing destinasi wisata yang masih rendah
		Kesiapan masyarakat Kota Pariaman yang masih rendah terhadap sadar wisata
		Sarana dan prasarana wisata yang masih kurang dan tidak representatif

## 2) Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia Kota Pariaman selama 2016-2020 yang diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia. Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2016-2020, pembangunan manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, capaian IPM Kota Pariaman adalah sebesar 75,44 dan pada tahun 2017 capaian IPM meningkat menjadi 75,71. Dan



capaian IPM ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,26 pada tahun 2018 dan 76,70 pada tahun 2019. Serta pada tahun 2020 sebesar 76,90. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi yang sebesar 72,38 tahun 2020 dan IPM Nasional yang sebesar 71,94 ditahun 2020. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 1,72 selama periode tersebut. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota lain di provinsi Sumatera Barat. Capaian IPM Kota Pariaman berada pada rangking ke-2 paling bawah dari 7 Kota di provinsi Sumatera Barat. Walaupun dari 19 Kabupaten/Kota capaian IPM Kota Pariaman berada pada rangking ke-6. Hal ini menandakan Kota Pariaman masih bermasalah dalam capaian IPM tersebut. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
Sumatera Barat (Provinsi)	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
<b>Kabupaten :</b>					
Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
Kab.Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46
Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
<b>Kota :</b>					
Padang	81,06	81,58	82,52	82,68	82,82
Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
Sawah Lunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93
Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58
Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
<b>Pariaman</b>	<b>75,44</b>	<b>75,71</b>	<b>76,26</b>	<b>76,70</b>	<b>76,90</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia



Permasalahannya akan lebih terlihat pada komponen pembentuk IPM meliputi : 1) Angka Harapan Lama Sekolah, 2) Angka Rata-Rata Lama sekolah, 3) Umur Harapan Hdup (UHH), dan, 4) Daya Beli Masyarakat. Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 capaian Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,50 dan menjadi 14,54 pada tahun 2020. Sementara itu capaian pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 sebesar 10,09 dan menjadi 10,59 pada Tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian Angka Harapan Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman masih kalah dari Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Sedangkan untuk capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan ke-6 dari 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Barat (Provinsi)	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
<b>Kabupaten :</b>					
Kepulauan Mentawai	11,74	12,07	12,39	12,76	12,82
Pesisir Selatan	13,05	13,06	13,30	13,31	13,32
Kab.Solok	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04
Sijunjung	12,27	12,34	12,35	12,36	12,37
Tanah Datar	13,46	13,59	13,88	14,32	14,33
Padang Pariaman	13,55	13,56	13,57	13,62	13,67
Agam	13,73	13,94	13,85	13,86	13,87
Lima Puluh Kota	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29
Pasaman	12,71	12,72	12,78	12,79	12,80
Solok Selatan	12,51	12,68	12,69	12,70	12,71
Dharmasraya	12,39	12,40	12,41	12,42	12,43
Pasaman Barat	12,67	13,06	13,22	13,40	13,61
<b>Kota :</b>					
Padang	15,87	16,15	16,50	16,51	16,52
Kota Solok	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32
Sawah Lunto	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17
Padang Panjang	15,02	15,03	15,04	15,05	15,06
Bukittinggi	14,93	14,94	14,95	14,96	14,97
Payakumbuh	14,22	14,23	14,24	14,25	14,26
Pariaman	14,50	14,51	14,52	14,53	14,54



--	--	--	--	--	--

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 4.6**  
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Barat (Provinsi)	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
<b>Kabupaten :</b>					
Kepulauan Mentawai	6,52	6,69	6,95	7,08	7,09
Pesisir Selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26
Kab.Solok	7,58	7,60	7,84	7,85	7,86
Sijunjung	7,50	7,72	7,77	8,10	8,11
Tanah Datar	8,12	8,14	8,44	8,45	8,61
Padang Pariaman	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87
Agam	8,18	8,39	8,69	8,85	8,96
Lima Puluh Kota	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99
Pasaman	7,64	7,65	7,66	7,86	8,09
Solok Selatan	7,99	8,00	8,15	8,16	8,28
Dharmasraya	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
Pasaman Barat	7,84	7,85	7,86	8,06	8,19
<b>Kota :</b>					
Padang	11,24	11,32	11,33	11,34	11,58
Kota Solok	10,79	10,95	11,01	11,02	11,03
Sawah Lunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17
Padang Panjang	11,42	11,43	11,44	11,45	11,62
Bukittinggi	10,98	11,30	11,31	11,32	11,33
Payakumbuh	10,30	10,45	10,46	10,72	10,73
Pariaman	10,09	10,10	10,36	10,37	10,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu pada Usia Harapan Hidup penduduk yang mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, menunjukkan usia harapan hidup penduduk Pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Usia Harapan Hidup Kota Pariaman sebesar 69,63 menjadi sebesar 70,28 Pada Tahun 2020. Namun kondisi ini capaian usia harapan hidup ini masih berada pada nomor urut ke-6 dari 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan. Komponen pertama dalam pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.7**  
**Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Barat (Provinsi)	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
<b>Kabupaten :</b>					
Kepulauan Mentawai	64,36	64,37	64,49	64,68	64,73
Pesisir Selatan	70,11	70,23	70,45	70,73	70,86
Kab.Solok	67,50	67,65	67,95	68,34	68,58
Sijunjung	65,33	65,44	65,69	66,02	66,21
Tanah Datar	68,93	69,11	69,38	69,73	69,94
Padang Pariaman	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79
Agam	71,44	71,57	71,83	72,17	72,37
Lima Puluh Kota	69,27	69,31	69,47	69,70	69,79
Pasaman	66,40	66,54	66,82	67,18	67,40
Solok Selatan	66,78	66,92	67,21	67,58	67,81
Dharmasraya	70,30	70,44	70,73	71,10	71,33
Pasaman Barat	67,09	67,15	67,37	67,67	67,82
<b>Kota :</b>					
Padang	73,19	73,20	73,55	73,57	73,65
Kota Solok	72,83	72,92	73,14	73,45	73,61
Sawah Lunto	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00
Padang Panjang	72,45	72,46	72,58	72,77	72,82
Bukittinggi	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38
Payakumbuh	73,03	73,13	7,33	73,61	73,74
Pariaman	69,63	69,67	69,87	70,15	70,28

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*

Untuk komponen yang lain dari pembentuk IPM yaitu Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita. Selama dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 12.141,- menjadi pada Tahun 2020 sebesar Rp. 12.796,-. Kondisi ini sedikit lebih baik karena berada karena pada urutan ke-4 diantara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.8**  
**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan**  
**Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rp/Org/Tahun)**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Barat (Provinsi)	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
<b>Kabupaten :</b>					
Kepulauan Mentawai	5.771	6.010	6.211	6.429	6.281
Pesisir Selatan	8.605	8.819	9.089	9.444	9.212
Kab.Solok	9.664	9.743	10.035	10.309	10.171
Sijunjung	9.895	10.093	10.277	10.395	10.361
Tanah Datar	10.296	10.331	10.417	10.709	10.588
Padang Pariaman	10.455	10.579	10.919	11.158	10.998
Agam	9.111	9.388	9.489	9.780	9.651
Lima Puluh Kota	8.936	9.151	9.500	9.842	9.596
Pasaman	7.678	7.882	8.238	8.599	8.425
Solok Selatan	9.802	9.891	10.199	10.505	10.325
Dharmasraya	10.781	10.851	11.189	11.431	11.273
Pasaman Barat	8.393	8.704	8.979	9.180	9.047
<b>Kota :</b>					
Padang	13.721	13.957	14.312	14.728	14.481
Kota Solok	11.519	11.673	11.968	12.337	12.117
Sawah Lunto	9.051	9.343	9.765	10.238	10.182
Padang Panjang	9.804	10.240	10.440	11.013	10.734
Bukittinggi	12.475	12.816	13.035	13.586	13.282
Payakumbuh	12.705	12.858	13.114	13.464	13.281
Pariaman	12.141	12.425	12.611	12.958	12.796

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Rumusan Permasalahan: Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

NO	Pokok Permasalahan	Akar Masalah
1	Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah	Masih rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini
		Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan di Kota Pariaman
		Masih rendahnya aksesibilitas Pendidikan Kota Pariaman
		Kualitas pendidik yang masih rendah
		Penerapan Standar Nasional



		Pendidikan (SNP) yang masih belum optimal
2	Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis
		Masih cukup tingginya kasus penyakit menular
		Belum optimalnya cakupan total coverage
		Masih cukup tingginya kasus stunting di Kota Pariaman
		Kualitas lingkungan yang sehat masih rendah
3	Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah	Tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi
		Produktivitas masyarakat yang masih rendah
		Tingkat pemberayaan masyarakat dari sektor ekonomi yang masih rendah

### 3) Permasalahan penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi belum didukung dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas bagi penyelenggara pemerintahan menjadi kendala dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan merata secara optimal.

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, meliputi:

#### 1. Manajemen Perubahan

Pemerintahan Kota Pariaman merupakan Pemerintah Kota punya visi perubahan yang jelas dalam tatakelola pemerintahan. Beranjak dari kondisi tersebut, pemerintah Kota Pariaman saat



ini memiliki orientasi budaya kerja yang berbeda, tata nilai yang berbeda, serta etika kerja yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keadaan seperti ini akan menjadi problem apabila tidak ditangani dengan benar dan tepat.

## 2. Penguatan Pengawasan

Di sisi lain, pemerintah Kota Pariaman juga menghadapi masalah dalam hal kurangnya kemampuan dan jumlah personil aparatur pengawas. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan penganangan (launching) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan pemerintah Kota Pariaman secara menyeluruh. Masalah lain yang muncul terkait dengan hal di atas adalah masalah sistem dokumentasi dan monitoring yang terintegrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu dapat dilihat pengelolaan dokumentasi dan kearsipan yang masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara elektronik.

## 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB tahun 2020, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dan bersifat implementatif sampai ke level operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

## 4. Penguatan Kelembagaan

Desain organisasi yang dirancang saat ini belum optimal menjawab kebutuhan organisasi yang ideal. Akibatnya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian, serta kurang berimbangannya penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi.

## 5. Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tata laksana masih ditemui beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang tidak baik. Penerapan e-government telah dilaksanakan pada beberapa layanan di



pemerintah Kota Pariaman, namun demikian pemanfaatannya belum efektif efisien, dan terintegasi dalam satu sistem. Selain itu manajemen kearsipan berbasis TIK belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.

#### 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM pemerintah Kota Pariaman, masih belum memenuhi jumlah yang sesuai untuk menjalankan fungsi organisasi. Ditinjau dari aspek lain, jenis pegawai yang ada di pemerintah Kota Pariaman secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu. Sementara itu, pemerintah Kota Pariaman belum ada diklat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan pegawai.

#### 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banyak ditemukan problem kelembagaan dan masyarakat yang menyangkut pelayanan diantaranya: Ditemukan adanya keterlambatan pelayanan, menumpuk urusan pelayanan pada satu OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), pegawai yang mempersulit pelayanan, rantai birokrasi pelayanan yang masih panjang. Untuk itu, maka perubahan yang besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan dirancang serta diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah Kota Pariaman.

Secara umum, masing-masing program area perubahan pemerintahan memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- **Manajemen Perubahan** bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
- **Penguatan Pengawasan** bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
- **Penguatan Akuntabilitas Kinerja** bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya.



- **Penguatan Kelembagaan** bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
- **Penguatan Tata Laksana** bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Pariaman dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
- **Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur** bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
- **Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman** bertujuan terciptanya sistem peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menjalankan agenda reformasi ini, diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Garis besar rencana anggaran reformasi birokrasi di pemerintah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah tersusun bagi terlaksananya reformasi birokrasi pada kedelapan program area perubahan.

**Tabel 4.10**  
**Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020**

No.	Urain	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Nilai Sakip	50,44 (CC)	52,35 (CC)	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	
2.	Indeks RB	-	-	49,25 (C)	51,62 (CC)	53,42 (CC)	

*Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia*

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.11**  
**Rumusan permasalahan: penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal**

NO	Pokok Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
		Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan
		Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran
		Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN
3	Belum optimalnya tata kelola yang kapabel	Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal
		Penataan kelembagaan yang masih belum efektif
		Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan
		Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik

Permasalahan makro pembangunan Kota Pariaman tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) pokok permasalahan sebagai berikut:

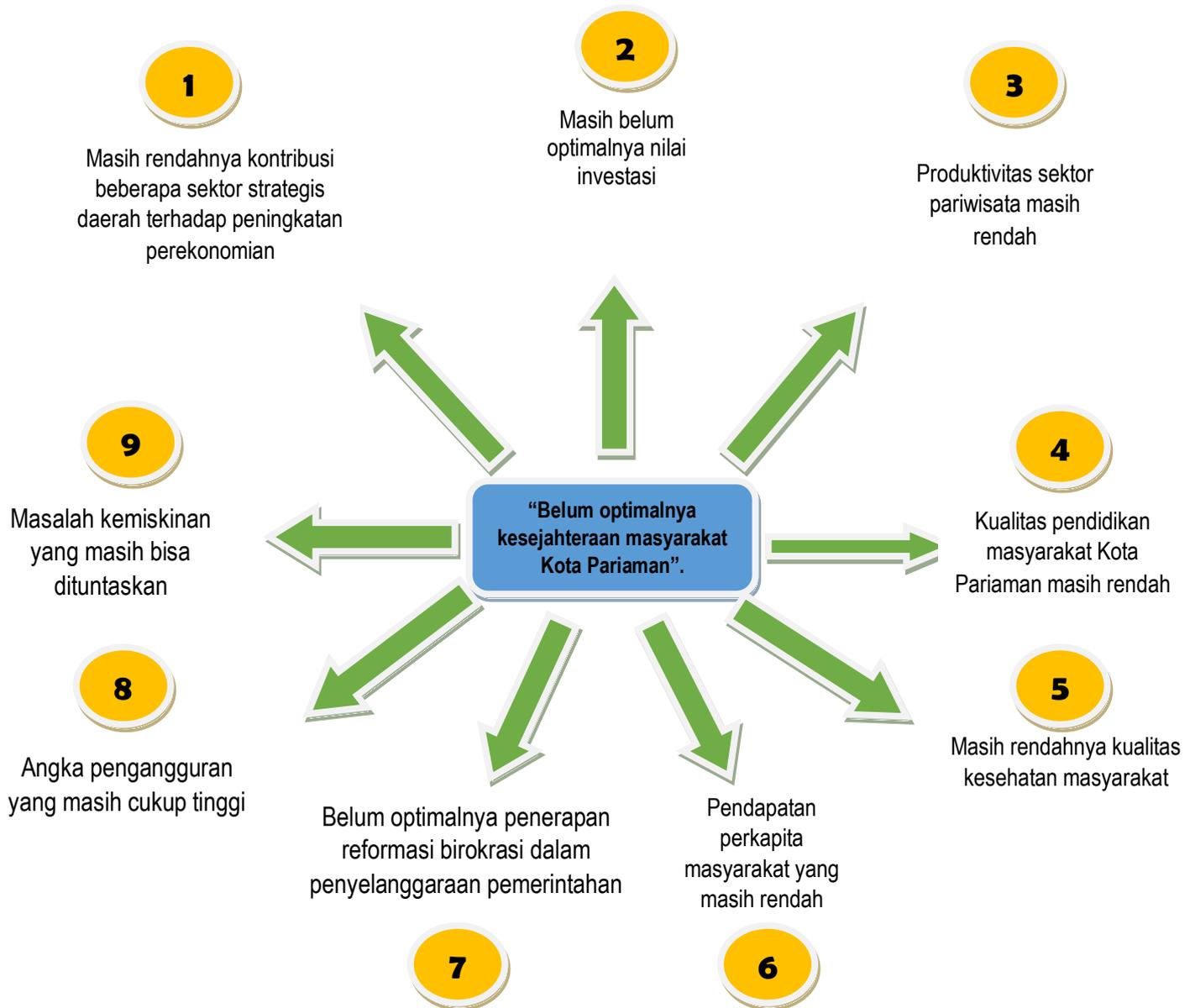
---



1. Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian.
2. Masih belum optimalnya nilai investasi.
3. Produktivitas sektor pariwisata masih rendah.
4. Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah.
5. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
6. Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah
7. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan
8. Angka pengangguran yang masih cukup tinggi
9. Masalah kemiskinan yang masih bisa dituntaskan



**Gambar 4.1**  
**Mata Rantai Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah**  
**Kota Pariaman**



Permasalahan pembangunan daerah Kota Pariaman diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Pariaman berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Pariaman:

#### **1. Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian**

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kota Pariaman adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Pariaman menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian.

Sektor perdagangan dan jasa yang diharapkan sebagai sektor penyumbang kontribusi terbesar pada PDRB dalam 5 tahun ini belum tercapai. Bahkan sampai tahun 2020 Sektor pertanian masih yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB yaitu 18,37 % diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 15,54 % . Sektor perdagangan berada pada urutan nomor 3 dengan nilai 15,11 % . Namun demikian, sebagai sebuah kota yang menuju perdagangan dan jasa, Sektor perdagangan ini masih perlu diakselerasi lagi pertumbuhannya karena akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan permasalahan yang berhubungan masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.12**  
**Rumusan Permasalahan: Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Kurang berkontribusinya sektor sektor lainnya dalam perekonomian daerah	<i>Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor pertanian</i>
		<i>Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor perdagangan</i>
		<i>Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor pariwisata</i>
		<i>Pertumbuhan sektor perdagangan dan industri yang masih rendah</i>
		<i>Produksi olahan dari sektor pertanian masih rendah</i>
		<i>Tingkat produktifitas koperasi dan Usaha mikro belum maksimal</i>

**2. Masih belum optimalnya nilai investasi**

Dalam konteks kelembagaan peran kepala daerah sangat besar dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya. Kewenangan kepala daerah dalam menempatkan aparatur pelayanan, membuat peraturan daerah, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting. Untuk menarik investasi masuk Pemerintahan daerah dituntut untuk berinovasi dan membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya, namun juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga perlu didukung oleh aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing agar pelaksanaan investasi di daerah dapat berjalan lancar. Adanya lembaga perizinan terpadu dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga sangat penting dalam rangka untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk



pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pemerintah.

Adanya pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap daerah termasuk pemerintah Kota Pariaman harus mampu bersaing dalam menarik investasi bagi pembangunan ekonomi masyarakat Kota Pariaman.

**Tabel 4.13**  
**Rumusan Permasalahan: Masih belum optimalnya nilai investasi**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih belum optimalnya nilai investasi	<i>Belum tersedianya peta potensi investasi</i>
		<i>Belum tersedianya dokumen informasi dan dokumen perencanaanaa pendukung investasi (Masterplan, FS, DED, BUSINESS PLAN)</i>
		<i>Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi</i>
		<i>Iklim Investasi yang belum kondusif</i>

### 3. Produktivitas sektor pariwisata masih rendah

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan bagi daerah, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat kondisi Kota Pariaman produktivitas sektor pariwisata ini masih rendah. Memang untuk jumlah kunjungan tinggi mencapai  $\pm$  3 Juta orang/tahun. Tapi jumlah uang yang didapatkan dari sektor ini kecil karena sebagian besar pariwisata Kota Pariaman masih belum berbayar. Penerimaan yang diperoleh baru dari retribusi parkir. Kalaupun awal tahun 2021 ini sudah dimulai retribusi/karcis masuk kawasan wisata tapi belum optimal. Dari wisatawan yang menginap pun belum banyak. Ini tergambar angka rata-rata lama tinggal baru mencapai 0,6 jam/hari. Tapi dari sektor



usaha kecil seperti pedagang kali lima, pedagang souvenir, restoran, café dan pedagan kecil lainnya memang sektor pariwisata sudah memberikan multiplier effect bagi pendapatan mereka.

**Tabel 4.14**  
**Rumusan Permasalahan: Produktivitas sektor pariwisata masih rendah**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Produktivitas sektor pariwisata masih rendah	<i>Daya saing destinasi pariwisata Kota Pariaman masih rendah</i>
		<i>Promosi wisata yang belum optimal</i>
		<i>Kesadaran masyarakat Kota Pariaman sebagai pelaku wisata masih rendah</i>
		<i>Sarana dan prasarana destinasi wisata yang kurang representatif</i>

#### 4. Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah.

Pendekatan baru dalam pembangunan manusia menuju masyarakat Kota Pariaman yang berbudaya dan religius, harus menekankan pada hubungan antara kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan melalui dua hal:

**Pertama**, pembangunan dari kebudayaan itu sendiri (warisan/tabuik, kreatifitas, industri-industri budaya, barang-barang kerajinan, wisata budaya);

**Kedua**, kepastian bahwa kebudayaan bertumpu secara benar di seluruh kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, komunikasi, lingkungan, kepaduan sosial serta kerja sama internasional.

Dunia tidak hanya menghadapi tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kreatifitas, pengetahuan, keanekaragaman, dan keindahan adalah dasar yang tak terhindarkan bagi dialog untuk perdamaian, dan kemajuan dari nilai-nilai tersebut pada hakekatnya terhubung dengan pembangunan manusia dan kebebasan-kebebasannya. Sementara kita mempunyai tugas mempromosikan kelestarian budaya asli, tradisi-tradisi lama bertemu dengan kreatifitas baru setiap harinya di kota-kota dunia, memelihara identitas dan keanekaragaman. Dialog antar budaya adalah salah satu tantangan terbesar umat manusia, dan kreatifitas dikenal sebagai sumber yang tidak pernah berhenti mengilhami masyarakat dan ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

**Pertama**, oralitas remaja; krisis moralitas para remaja ditandai dengan hilangnya karakter religius, budaya dan karakter kebangsaan. Hal ini dipicu oleh pengaruh budaya asing yang begitu mudahnya diadopsi oleh remaja, misalnya westernisasi dalam berpakaian, gaya hidup hedonisme dan perilaku



anti sosial lainnya. Pendidikan keagamaan belum terealisasi sebagai bekal remaja dalam kehidupannya.

**Kedua**, kualitas lingkungan sosial; persoalan sosial budaya yang dihadapi oleh Kota Pariaman disinyalir bersumber dari masalah dalam keluarga dan lingkungan sosial. Munculnya berbagai masalah sosial seperti narkoba, LGBT, seks pranikah, perceraian, KDRT dan adanya tempat yang memicu terjadinya penyimpangan perilaku terutama oleh generasi muda. Selain itu dahsyatnya pengaruh budaya asing melalui media sosial dan mudahnya masyarakat terpancing berita hoaks.

**Ketiga**, kualitas pendidikan di Kota Pariaman, terlihat dari belum optimalnya pencapaian prestasi siswa dan di dunia pendidikan SD dan SLTP atau belum bisanya siswa dan guru di Kota Pariaman dalam kompetisi seperti OSN, OGN dan F2SN baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu kurang terealisasinya pendidikan berbasis agama dan budaya lokal.

**Keempat**, belum optimalnya ‘mengkomersialisasikan’ nilai-nilai budaya masyarakat Kota Pariaman menjadi penyokong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Pariaman, baik secara local, nasional, maupun internasional.

SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan Kota yang kuat dan makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Pariaman, antara lain:

1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh di Kota Pariaman, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air.
2. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian (character building).
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah Kota



memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja.

4. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.
5. Mengoptimalkan potensi budaya menjadi daya jual dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Pariaman.

**Tabel 4.15**

**Rumusan Permasalahan: Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	<i>Masih rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini</i>
		<i>Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan di Kota Pariaman</i>
		<i>Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter</i>
		<i>Rendahnya kualitas sarana fisik</i>
		<i>Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan</i>
		<i>Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan</i>

**5. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat**

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan suatu negara atau daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai modal untuk pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali pembangunan nasional di Indonesia khususnya di Kota Pariaman. Salah satu pembangunan daerah yang terhambat yaitu pembangunan kesehatan yang



juga dimuat dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Pandemi COVID-19 berdampak pada terhambatnya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target dalam pembangunan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

**Tabel 4.16**  
**Rumusan Permasalahan: Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	<i>Kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah</i>
		<i>Budaya hidup sehat yang belum optimal</i>
		<i>Rendah pola perilaku hidup sehat</i>
		<i>Sarana dan Prasarana kesehatan yang belum memadai</i>

## 6. Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah

Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam laporan “World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022”, Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari US\$4.050 di tahun 2019 menjadi US\$3.870 di tahun 2020.

Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia di tahun 2020 serta pemerintah Kota Pariaman juga merasakan dampaknya. Dengan demikian, maka penurunan pendapatan per kapita tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Meskipun demikian melalui respon kebijakan fiskal yang adaptif dan kredibel, Pemerintah mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

Sebelum pandemi, Indonesia tengah berada dalam tren yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh minus 2,1 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif moderat pada tahun lalu didukung oleh kerja keras APBN dan kebijakan fiskal yang akomodatif.

Pandemi masih memberikan ketidakpastian yang tinggi terhadap ekonomi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah akan fokus melakukan berbagai langkah yang responsif agar pandemi dapat semakin terkendali dan langkah pemulihan ekonomi dapat terus berjalan. Percepatan vaksin, penguatan 3T, disiplin protokol kesehatan hingga pemberian perlindungan sosial akan terus dilakukan hingga kasus terkendali.



**Tabel 4.17**  
**Rumusan Permasalahan: Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah	<i>Tingkat kemiskinan masyarakat Kota Pariaman yang masih cukup tinggi</i>
		<i>Tingkat pengangguran masyarakat Kota Pariaman yang masih tinggi</i>
		<i>Produktivitas masyarakat masih rendah</i>
		<i>Daya saing SDM masyarakat Kota Pariaman yang lemah</i>

#### **7. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan**

Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula, masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut di atas, belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Demikian pula, secara khusus dari sisi internal di pemerintah Kota Pariaman birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek KKN; rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Maka dari itu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan



membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;



- b. Birokrasi yang kapabel; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dari sisi pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era-reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian di tandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan public tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti.

Dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan. Namun upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, lamban, tidak merespon kepentingan pelanggan, dan lain-lain adalah sederetan atribut negative yang ditimpakan kepada birokrasi.

Pelayanan publik seringkali menjadi ukuran paling mudah dipahami sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain regulasi, proteksi dan distribusi. Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. Ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari keengganan masyarakat berhubungan dengan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain adanya kesan keinginan sejauh mungkin untuk menghindari dan bersentuhan dengan birokrasi pemerintah apabila menghadapi urusan.

Hal yang membuat birokrasi lemah kinerja adalah mekanismenya yang sangat hirarkis. Ini terlihat dari budaya kerja bahwa setiap pekerjaan/urusan harus menunggu petunjuk, perintah, dan



persetujuan dari atasan. Akibat dari kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian para birokrat kurang berkembang.

Peran-peran dominan dan bersifat monopoli oleh pemerintah di bidang pelayanan publik, ternyata belum banyak mengalami perubahan dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan yang optimal dalam melakukan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan masih dirasakan tidak fleksibel dan kurang responsif dari organisasi pemerintah dalam menawarkan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hal tersebut terkait dengan belum banyaknya kelembagaan pemerintah yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu merespons dinamika masyarakat informasi yang terus berkembang. Artinya, perspektif tata aturan suatu pemerintah yang kaku harus mulai dipikirkan dan dipertimbangkan perubahan kearah organisasi yang tidak terkotak-kotak.

Peran birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Akan tetapi, menguatnya iklim demokratisasi di Indonesia saat ini berimplikasi pada semakin menguatnya tuntutan untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dari birokrasi. Keadaan ini banyak dilatarbelakangi oleh kesadaran terhadap hak-hak sebagai konsumen yang telah melakukan kewajibannya seperti dalam hal membayar pajak. Kesadaran terhadap hak diartikulasikan dalam bentuk tuntutan perbaikan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang diharapkan terdapat pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan lebih baik atau faster, cheaper and better.

Oleh karena itu, orientasi pelayanan birokrasi harus berubah. Dari orientasi pelayanan kepada penguasa, menjadi orientasi pelayanan kepada publik. Aktivitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan yang sesungguhnya adalah pelanggan eksternal dalam hal ini masyarakat luas. Kemampuan memberikan pelayanan yang lebih baik akan dapat dilakukan apabila pemerintah mampu untuk menilai secara saksama, apakah sebenarnya kebutuhan para pelanggannya.

Pada sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, pelayanan keuangan pada sektor jasa perbankan dan lain-lain. Berdasarkan hasil dari Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019 menunjukkan 70,3 % responden masih nyaman untuk mengurus secara langsung dibandingkan dengan mekanisme daring atau memakai jasa perantara.



Kebijakan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dijadikan upaya bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memaksimalkan pelayanan publik dengan beralih ke sistem *online* yang selama ini telah berjalan. Upaya peralihan ini tentunya mesti dibarengi dengan memberi edukasi/pemahaman serta sosialisasi secara masif kepada seluruh elemen masyarakat yang akan mengakses layanan publik untuk memanfaatkan sistem *online* dalam setiap layanan publik yang akan diakses sehingga pelayanan publik di tengah tatanan kehidupan baru "*new normal*" tidak terganggu dan menjadi lebih efektif dan efisien.

**Tabel 4.18**  
**Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	<i>Penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh pada instansi pemerintah daerah Kota Pariaman</i>
		<i>Sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan</i>
		<i>Belum diterapkannya dengan baik sistem manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, sistem pengendalian dan evaluasi</i>
		<i>Masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa</i>
		<i>belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah</i>



**Tabel 4.19**  
**Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang kapabel**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang kapabel	<i>Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip structure follow function.</i>
		<i>penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya.</i>
		<i>Struktur organisasi pemerintah Kota Pariaman yang masih cenderung gemuk serta belum dilandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada</i>
		<i>Masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai</i>
		<i>belum diterapkannya standar kompetensi dan indikator kinerja utama bagi setiap PNS</i>
		<i>sistem remunerasi pegawai belum berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem reward and punishment yang adil</i>
		<i>Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja</i>
		<i>Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan</i>
		<i>Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan</i>

**Tabel 4.20**  
**Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik**

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	<i>Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM</i>
		<i>Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar</i>
		<i>Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik</i>
		<i>Belum optimalnya budaya kerja aparatur</i>
		<i>Belum menjadi inovasi sebagai alat yang efektif dan efisien dalam</i>



		<i>melaksanakan pelayan public</i>
		<i>Pemerintah belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif</i>
		<i>Belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat</i>
		<i>Belum diterapkannya manajemen mutu pada sebagian besar unit pelayanan</i>
		<i>Beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM, dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten</i>
		<i>Belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya</i>

#### 8. Angka pengangguran yang masih cukup tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,61 %. Pada Tahun 2017 s.d Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,97 % dan 5,72 % serta 5,42 %. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 5,73 %. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Pariaman. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang mengurangi aktivitasnya dan bahkan menghentikan semua operasionalnya seperti sektor yang besar terdampak adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi. Peningkatan pengangguran ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar



menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

## 9. Masalah kemiskinan yang masih bisa dituntaskan

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 4,10 % penduduk Kota Pariaman yang terkategori miskin pada tahun 2020 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Pariaman.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas dan Misi V yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Menurunnya Angka Pengangguran. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan penanganan pengangguran dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

### 4.1.2 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

Banyak masalah pembangunan yang ditemui dalam pembangunan daerah di Kota Pariaman, dan akan diidentifikasi di bagian ini berdasarkan kriteria: (a) masalah memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat; (b) masalah cenderung meningkat dan menghambat proses dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; serta (c) merupakan pendorong pembangunan Kota Pariaman secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk itu, permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

1. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan Pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;



6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Urusan pemerintahan umum.

#### 4.1.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Pelayanan Dasar

##### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kota Pariaman tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain :

- a. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah.
- b. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- c. Kesadaran dan kemampuan orang tua dalam pembiayaan pendidikan rendah.
- d. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi.
- e. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran.

##### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pariaman yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain :

- a. Masih tingginya angka kematian bayi.
- b. Masih adanya balita gizi buruk.
- c. Semakin meningkatnya penyakit tidak menular.
- d. Jumlah SDM kurang dan kualitas SDM belum memenuhi standard.
- e. Integrasi aktivitas pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan belum optimal.



- f. Angka stunting Kota Pariaman yang masih cukup tinggi dengan nilai 10,57 % ( *Tahun 2020*)

### 3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan Ruang.
- b. Belum optimalnya Kualitas infrastruktur jalan.
- c. Belum optimalnya Layanan infrastruktur sumber daya air.
- d. Belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi.
- e. Belum optimalnya kesesuaian tata ruang.

### 4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

- a. Belum menyeluruhnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat di Kota Pariaman.
- b. Penyediaan air bersih dan air minum belum optimal.
- c. Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

### 5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

- a. Jumlah Satuan Linmas telah mencapai jumlah ideal sesuai kebutuhan, dan memenuhi target pencapaian SPM. Yang dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas Satuan Linmas agar dapat berperan optimal dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran.
- c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menegakan Perda.



## 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang Sosial di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

- a. Masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Penanganan PPKS yang belum Optimal.
- c. Masih lemahnya penanganan Kemiskinan akibat Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron sehingga menimbulkan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan kepada masyarakat miskin.
- d. Belum optimalnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Belum optimalnya program rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

### 4.1.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kota Pariaman telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*).
- b. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja.
- c. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor.
- d. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi.

#### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak



- b. Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak
- c. Belum optimalnya ketahanan keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial
- d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- e. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen

### 3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini yaitu :

- a. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan.
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan.
- c. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal.
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan.

### 4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan lahan untuk investasi. Terkait hal tersebut permasalahan pertanian yang muncul diantaranya:

- a. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- b. Rendahnya pemanfaatan tanah.
- c. Masih terjadinya intensitas konflik dan sengketa pertanian.

### 5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan hidup mencakup persampahan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi/pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian polusi yang ditimbulkannya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan dan pengelolaan sampah belum optimal, dimana tahun 2019 pengelolaan sampah baru 50% dari target 80%, menyebabkan penumpukan sampah meningkat mengakibatkan daya



tampung sampah di TPA Tungkal Selatan lahan yang melebihi kapasitas karena luasnya baru 1,3 Ha, seharusnya untuk perkotaan kecil minimal 5 Ha.

- b. Indek kualitas Tutupan lahan pada kondisi wasp ada pada tahun 2019 dengan angka 24,06 dari target 26. Pencemaran Air Sungai Kota Pariaman yang meningkat dapat dilihat dari Indek kualitas Air tahun 2019 35,83 dari target 43.

**Kondisi :**

Kota Pariaman dilalui oleh 4 sungai yaitu Batang Manggung, Batang Pariaman, Batang Jirak dan Batang Mangau Hulu dari 4 buah sungai tersebut berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Muaranya di Laut/ Pantai Kota Pariaman Setiap tahunnya dilakukan pemantauan kualitas air sungai dan air laut di Kota Pariaman.

Dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa untuk parameter e-coli air sungai dan air laut di Kota Pariaman tercemar berat, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian yang jauh di atas baku mutu yang ditetapkan.

**Permasalahan :**

Tingginya angka e-coli pada air sungai dan air laut Kota Pariaman diindikasikan oleh buangan domestik, dan buangan domestik tersebut tidak hanya berasal dari Kota Pariaman saja namun buangan domestik dari Kab.Padang Pariaman juga memberikan kontribusi karena sungai yang ada di Kota Pariaman pada bagian hulunya berada di Kab Padang Pariaman.

- c. Permasalahan mengenai Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu :
  - 1) Kurangnya kesadaran dari penghasil limbah tentang pengelolaan limbah B3 (Proses Pengolahan B3 disamakan dengan Limbah Domestik)
  - 2) Masih ditemukan adanya pembuangan limbah B3 Medis ke TPA.
  - 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum mempunyai izin TPS dan TPS Limbah B3.
  - 4) Tidak ada badan usaha yang mempunyai fasilitas pengolahan limbah B3 yang mempunyai izin (izin incenerator dari Kementrian Lingkungan Hidup).
  - 5) Tidak ada Transporter yang memenuhi syarat sesuai aturan terkait pengelolaan Limbah B3.

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.



- b. Rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan.
- c. Belum tertatanya pengarsipan dengan layak dan secara digital.
- d. Belum optimalnya OPD yang memanfaatkan database kependudukan.
- e. Adanya asumsi minoritas masyarakat bahwa pembuatan dokumen kependudukan lama dan berbelit.
- f. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, sosial, pajak dan pendidikan.

#### 7. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkannya sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa dalam rangka peningkatan asli desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### 8. **Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana**

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan.
- b. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.



- c. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
- d. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.
- e. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.

## 9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kota Pariaman. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi.
- b. Belum ditetapkannya angkutan perbatasan, sehingga angkutan pedesaan masih banyak beroperasi di dalam wilayah kota Pariaman.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar institusi lalu lintas angkutan jalan.
- d. Penataan Parkir. Penataan parkir sebagai bagian pelayanan lalu lintas dan pendapatan daerah mengalami beberapa kendala. Antara lain : lokasi parkir liar yang mengambil tempat di jalan umum, retribusi parkir yang dilakukan oleh tenaga kontrak masih belum dilaksanakan secara optimal.
- e. Terjadinya alih fungsi terminal Muaro dari Terminal Tipe C menjadi area parkir wisata, yang mengakibatkan tidak adanya simpul transportasi angkutan kota di Pariaman.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan di Wilayah Kota Pariaman.
- g. Belum berkembangnya transportasi laut yang representatif.
- h. Tingkat kecelakaan cukup tinggi akibat dari tidak disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, minimnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan, *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.

## 10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

---



- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi di Wilayah Kota Pariaman.
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Pariaman yang belum memadai.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan internet sehat.
- d. Belum Optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung pariwisata dan pengembangan UMKM.
- e. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Informasi antar OPD di Kota Pariaman.
- f. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik untuk masyarakat.
- g. Belum optimalnya Layanan Aduan.

#### 11. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.**

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan usaha mikro masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro.
- b. Dalam pembinaan IKM, ada sebagian pengrajin tidak mau merubah kebiasaan yang selama ini dilakukan sehingga sulit menerima inovasi.
- c. Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi dan terbatasnya modal koperasi.
- d. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi, dalam hal manajemen keuangan dan pemasaran dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal.

#### 12. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.**

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu :

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengurus perizinan usaha maupun memperpanjang izin usahanya.
- b. Masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi dikota pariaman karena sulitnya mencari lokasi/lahan yang tepat.



- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengurus perizinan usaha dan PBG.
- d. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
- e. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor.
- f. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah.

### 13. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pariaman masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

- a. Minimnya aktivitas dan prestasi pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, dalam membentuk karakter bangsa yang inovatif, berdaya juang dan kompetitif, sehingga berdampak pada belum optimalnya prestasi generasi muda.
- b. belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan
- c. Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan.
- d. Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
- e. Belum optimalnya penggunaan Gor Rawang sebagai Youth Center disebabkan bangunan penunjang atau fasilitas pendukung belum lengkap.

### 14. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.**

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date*, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain :

- a. Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral.
- b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data olahan spasial



- d. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dari OPD.
- e. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan walikota tentang pengelolaan data dan rencana Induk statistik sektoral statistik sektoral.

#### **15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem, beberapa permasalahan pada urusan persandian adalah :

- a. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
- c. Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi.

#### **16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Nilai-nilai budaya Kota Pariaman merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain :

- a. Belum tersedianya dokumen sejarah destinasi wisata di Kota Pariaman.
- b. Belum adanya penetapan Cagar Budaya di Kota Pariaman.
- c. Belum optimalnya implementasi ABS-SBK pada generasi muda.
- d. Belum tersedianya data base tradisi dan kesenian di Kota Pariaman.
- e. Belum optimalnya penguatan pelestarian tradisi dan budaya di Kota Pariaman.
- f. Belum adanya standar management pembinaan sanggar.

#### **17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kota Pariaman, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah :

---



- a. Pemberdayaan Kegemaran Membaca (PKM) masih rendah.
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung perpustakaan.
- c. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif.
- d. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan.
- e. Belum adanya Tenaga Fungsional Pustakawan.
- f. Masih rendah nya kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### **18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kota Pariaman, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
- b. Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip.
- c. Belum tertatanya Arsip-arsip yang berada di OPD sesuai kaidah kearsipan.
- d. Belum terlaksananya sistem kearsipan yang disetiap OPD.
- e. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan.
- f. Rendahnya kualitas layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Belum optimalnya pembinaan kearsipan di OPD Desa dan Kelurahan.

#### **4.1.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pilihan**

##### **1 Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan**

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutunya terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, serta menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya.



- b. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap.
- c. Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- d. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan.
- e. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
- f. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan.

## 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan bagi pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) periode dari RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini ditandai dengan Visi Kota Pariaman adalah "**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**". Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan dan permasalahan-permasalahan dalam urusan pariwisata yang teridentifikasi selama ini adalah:

- a. Belum optimalnya kerjasama dengan stake holder Lembaga Pariwisata ( ASITA, ASATI, HPI, PHRI, GENPI ).
- b. Masih rendahnya minat wisatawan untuk menginap di Kota Pariaman. Ini terlihat angka rata-rata lama tinggal Kota Pariaman masih di angka 0,5 hari.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi Pariwisata Pariaman.
- d. Belum adanya Road Map pengembangan Investasi Pariwisata.
- e. Sistem pengelolaan terpadu di lokasi wisata (destinasi) belum optimal.
- f. Masih rendahnya "SADAR WISATA" pelaku usaha.
- g. Kurangnya "SADAR WISATA" masyarakat di sekitar obyek wisata.

## 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian yang belum memadai.



- c. Sarana pertanian yang belum memadai.
- d. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada.
- e. Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
- f. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
- g. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas.

#### 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi ( pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Kurangnya daya saing produk usaha mikro
- b. Masih lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro
- c. Masih kurangnya pengembangan permodalan usaha mikro.
- d. Masih lemahnya pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro.
- e. Masih rendahnya pelaku usaha dalam memanfaatkan *e-commerce* dalam memasarkan produk.
- f. Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.

#### 5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Dan memang kondisi existing sektor perindustrian belum begitu baik perkembangannya, sehingga masih banyak permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

---



- a. Masih rendahnya nilai tambah sektor industri dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Peningkatan kualitas produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum diimbangi oleh peningkatan kualitas produksi sehingga daya saing pasar masih rendah.
- c. Sarana dan prasarana yang tersedia pada IKM belum memadai sehingga produk yang dihasilkan masih belum memenuhi standar.
- d. Masih terbatasnya promosi hasil produk baik oleh perorangan maupun pendanaan maupun pendanaan dari pemerintah.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM.
- f. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri.
- g. Rendahnya kemampuan industri mikro dalam mengakses teknologi modern dan inovasi produk.

#### **4.1.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **1. Unsur Sekretariat Daerah**

Adapun permasalahan pada unsur Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Kurang akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan.
- b. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya komitmen OPD akan arti penting bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja bagi masing-masing OPD.
- c. Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian pada Perangkat Daerah terkait.

##### **2. Unsur Sekretariat DPRD**

Adapun permasalahan pada unsur Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kompetensi sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



#### 4.1.2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 1. Unsur Perencanaan

Bappeda Kota Pariaman selaku OPD yang mengkoordinir urusan perencanaan namun dalam hal pada setiap tahapan evaluasi perencanaan pembangunan daerah masih adanya tantangan dan permasalahan dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, diantaranya :

- a. Belum optimalnya Proses tahapan perencanaan.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat Daerah.
- c. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan Dokumen Perencanaan yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.
- e. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up.
- f. Pengelolaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja.
- g. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan daerah.

##### 2. Unsur Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
- b. Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang masih rendah dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah.



- c. Belum terwujudnya keharmonisan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- e. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan.
- f. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.
- g. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah.
- h. Belum adanya database potensi pendapatan daerah.
- i. Database Sismiop tidak valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak PBB dan peta PBB.
- j. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi.

### 3. Unsur Kepegawaian

Dengan telah diterapkannya sistem merit sebagai pendukung Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara. Terdapat beberapa permasalahan yang dirujuk dari aspek sistem merit sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya budaya kerja aparatur.
- b. Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
- c. Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis Merit System.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

### 4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang professional dan handal, hal itu disebabkan :

- a. Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
- b. Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman.



## 5. Unsur Unsur penelitian dan pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan permasalahan:

- a. Masih terbatasnya penyelenggaraan penelitian dan pengkajian.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perumusan kebijakan.
- c. Belum optimalnya perekayasaan dan inovasi teknologi untuk mendukung Daya Saing Produk.
- d. Belum optimalnya uji coba, penerapan rancang bangun dan diseminasi hasil kelitbang.

### 4.1.2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu ditingkatkan serta bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penerapan SPIP ;
- b. Belum optimalnya penanganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Koordinasi antara APIP dan APH untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal ;
- c. Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah
- d. Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel.

### 4.1.2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan (Kecamatan)

Adapun beberapa permasalahan pada unsur kewilayahan urusan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

---



- a. Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang;
- c. Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal;

#### **4.1.2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan bangsa dan politik)**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Pariaman pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi pada urusan pemerintahan umum (Kesatuan bangsa dan politik) adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideology Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- c. Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat;
- d. Belum optimalnya partisipasi aktif kaum perempuan dalam dunia politik;
- e. Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat.

## **4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu–isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis.

### **4.2.1. Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global**

#### **A. *Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)**

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG's merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-



Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**



Berikut penjelasan setiap tujuan dalam SDGs beserta logonya :

	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 1</b></p> <p>Tanpa kemiskinan (<i>No Poverty</i>). Hingga kini, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 2</b></p> <p>Tanpa kelaparan (<i>Zero Hunger</i>). Selain kemiskinan, masalah kelaparan atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Maka dari itu, menggalakkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 3</b></p> <p>Kehidupan sehat dan sejahtera (<i>Good Health and Well-Being</i>). Isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka dari itu, kini tengah digalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 4</b></p> <p>Pendidikan berkualitas (<i>Quality Education</i>). Memastikan agar pendidikan berkualitas bisa di akses oleh semua orang. Hal ini lantaran pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 5</b></p> <p>Kesetaraan gender (<i>Gender Equality</i>). Meski sedang terjadi perkembangan kesetaraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender terutama perempuan masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan.</p>



	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 6</b></p> <p>Air bersih dan sanitasi layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>). Bank Dunia pada tahun 2014 merilis data bahwa masih ada 780 juta orang yang tidak punya akses air bersih di dunia ini dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tak punya akses sanitasi. Hal ini mengakibatkan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia akibat banyak nyawa melayang setiap harinya. Maka dari itu, menjamin akses atas air bersih dan sanitasi untuk semua merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 7</b></p> <p>Energi bersih dan terjangkau (<i>Affordable and Clean Energy</i>). Di dunia ini masih banyak daerah yang terisolasi dan belum memiliki listrik, padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 8</b></p> <p>Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (<i>Decent Work and Economy Growth</i>). Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 9</b></p> <p>Industri, inovasi dan infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>). Di dunia ini, lebih dari 4 miliar orang belum memiliki akses internet dan 90 persen di antaranya berasal dari negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan, hal ini akan segera dituntaskan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 10</b></p> <p>Berkurangnya kesenjangan (<i>Reduce Inequality</i>). Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10 persen orang-orang terkaya menguasai 40 persen dari total pendapatan global. Di lain pihak, 10 persen orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 sampai 7 persen dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11 persen jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan 11</b></p> <p>Kota dan komunitas berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>). Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.</p>



<p><b>12</b> KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</p> 	<p><b>Tujuan 12</b></p> <p>Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>). Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p>
<p><b>13</b> PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p> 	<p><b>Tujuan 13</b></p> <p>Penanganan perubahan iklim (<i>Climate Action</i>). Melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama.</p>
<p><b>14</b> MENJAGA EKOSISTEM LAUT</p> 	<p><b>Tujuan 14</b></p> <p>Ekosistem laut (<i>Life Below Water</i>). Akibat banyak perburuan dan pencemaran terhadap ekosistem laut, maka dalam pembangunan berkelanjutan, kehidupan laut akan dilindungi dengan lebih maksimal.</p>
<p><b>15</b> MENJAGA EKOSISTEM DARAT</p> 	<p><b>Tujuan 15</b></p> <p>Ekosistem darat (<i>Life On Land</i>). Selain berpengaruh terhadap iklim, mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati juga jadi tujuan utama.</p>
<p><b>16</b> PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT</p> 	<p><b>Tujuan 16</b></p> <p>Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institution</i>). Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.</p>
<p><b>17</b> KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</p> 	<p><b>Tujuan 17</b></p> <p>Kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>Partnership for The Goals</i>). Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.</p>



**Gambar 4.3**  
**TPB berdasarkan 4 Pilar**



Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selanjutnya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi acuan Kota Pariaman, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG's. Berikut merupakan capaian KLHS Kota Pariaman yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG's.



**Tabel 4.21**  
**Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman**

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	25	14	9	1	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	3	1	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	29	4	1	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	8	5	0	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	9	4	1	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8	7	1	2
TPB 7	Menjamin akses energi	2	0	0	0	2
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	8	4	0
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	7	2	2	2
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	6	4	1	1	0
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	20	8	4	0	8
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0	0
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	0	2	1
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	13	5	3	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	8	5	2	0
<b>Total</b>		<b>222</b>	<b>126</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>

*Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021*

### Evaluasi Menurut Pilar

Menurut pilar, capaian TPB Kota Pariaman dapat dijelaskan bahwa Pilar yang capaian tertinggi adalah pilar sosial (67 indikator dengan kategori SS), pilar ekonomi (26 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (22 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi adalah pilar sosial (25 indikator) sedangkan kategori NA tertinggi adalah pilar ekonomi (9 indikator). Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.22**  
**Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar**

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Sosial	97	67	25	4	1
2	Ekonomi	55	26	16	9	4
3	Lingkungan	49	20	12	4	13
4	Hukum dan Tata Kelola	21	13	5	3	0
<b>Total</b>		<b>222</b>	<b>126</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

### Evaluasi Menurut Kategori Urusan

Kategori urusan wajib pelayanan dasar mempunyai capaian indikator SS sebanyak 79 indikator, diikuti dengan urusan wajib non pelayanan dasar dengan capaian kategori SS 41 indikator. Kedua jenis urusan ini juga mempunyai capaian indikator SB terbanyak yaitu masing-masing 29 indikator dan 19 indikator. Capaian pelaksanaan TPB Kota Pariaman menurut kategori urusan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.23**  
**Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori Urusan**

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Wajib Pelayanan Dasar	119	79	29	4	7
2	Wajib Non Pelayanan Dasar	79	41	19	10	9
3	Pilihan	12	1	5	4	2
4	Penunjang	11	5	5	1	0
5	Absolut	1	0	0	1	0
<b>Total</b>		<b>222</b>	<b>126</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

### Evaluasi Menurut SPM

Diantara 119 indikator TPB yang termasuk jenis urusan wajib pelayanan dasar terdapat 63 indikator dengan kategori SPM. Dari 63 indikator SPM tersebut, 40 indikator sudah mempunyai



kategori capaian SS (63%) dan 22 indikator dengan kategori SB (35%). SPM Kesehatan mempunyai jumlah indikator SS tertinggi yaitu 20 indikator, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.24**  
**Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori SPM**

No	Nama SPM	Jumlah Indikator	Persentase
1	Kesehatan	26	41 %
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12	19 %
3	Pekerjaan Umum	7	11 %
4	Pendidikan	13	21 %
5	Perumahan Rakyat	1	2 %
6	Sosial	4	6 %
<b>Persentase</b>		<b>63</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021*

### Evaluasi Menurut OPD Penanggung Jawab

Sebaran indikator TPB berdasarkan OPD penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 4.25. Indikator TPB dengan kategori capaian SS terbanyak adalah Dinas kesehatan yaitu 33 indikator, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) masing-masing 12 dan 10 indikator dengan kategori SS

**Tabel 4.25**  
**Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman menurut OPD**

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Bagian administrasi pembangunan	1	0	1	0	0
2	Bagian hukum	2	2	0	0	0
3	Bagian organisasi	3	1	1	1	0
4	Bagian pengadaan barang dan jasa	2	0	2		0
5	Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	7	4	2	1	0
6	Badan keuangan daerah	5	4	1	0	0
7	Badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia	1	0	1	0	0
8	Badan penanggulangan bencana daerah	14	12	1	0	1
9	Badan pusat statistik	5	3	2	0	0
10	Dinas kesehatan	40	33	6	1	0
11	Dinas Pertanian Pangan dan	4	3	1	0	0



	Perikanan					
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	7	1	1	0
13	Dinas Koperindag	5	0	1	4	0
14	Dinas Pariwisata dan Budaya	4	1	2	1	0
15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	17	9	7	0	1
16	Dinas Perhubungan	6	2	1	0	3
17	Dinas Perkim LH	20	6	2	4	8
18	Dinas P3AKB	12	10	1	1	0
19	Dinas PUPR dan Pertanahan	22	7	10	0	5
20	Dinas Sosial	16	7	9	0	0
21	Disdukcapil	5	5	0	0	0
22	DPMPSTP dan Naker	14	5	5	4	0
23	Inspektorat	1	0	0	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>222</b>	<b>126</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

#### B. RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Pariaman pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kota Pariaman mengikuti periode RPJMN III dan IV. maka arah kebijakan RPJMD Kota Kota Pariaman menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) dan IV (2019-2024) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019) dan tahap ke empat (2019-2024).



**Gambar 4.4**  
**Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025**



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan



hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikedukung terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Pariaman harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

1. Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;



2. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
3. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
4. Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

### C. RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

**Gambar 4.5**  
**Nawacita kedua RPJMN 2020-2024**



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

**Gambar 4.6**  
**5 Arahan Utama Presiden**



Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

#### D. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai



gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

### **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

#### **Masyarakat Madani**

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

#### **Sumatera Barat Yang Unggul**

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional,

---



nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

### **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah **Pertumbuhan Ekonomi**, **Keberlanjutan Sosial** dan **Keberlanjutan Lingkungan**. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam pencapaian visi tersebut. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :



1. Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan informasi visi, misi dan prioritas tersebut, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan Memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam rangka menunjang pembangunan berdimensi kewilayahan provinsi Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kota Pariaman juga akan memperhatikan pembangunan berdimensi kewilayahan yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Pariaman meliputi :

1. Pengembangan Sistem Perkotaan yang menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Sebagai Kawasan sepadan pantai.



3. Sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya. Dan Kota Pariaman ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
4. Sebagai Kawasan pengembangan Kawasan Sentra Industri dengan komoditi : 1) Industri Tekstil dan Produksi Tekstil, 2) Industri Makanan dan Ringan, 3) Industri Pengelohan Hasil Laut dan Perikanan.
5. Sebagai Kawasan Pariwisata dengan komoditi : 1) Kawasan yang dikembangkan, 2) Kawasan Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo.

**Tabel 4.26**  
**Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023**

NO	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat RPJMD Tahun 2021-2026	NO	Program Unggulan Kota Pariaman RPJMD Tahun 2018-2023
1	Sumbar Sehat dan Cerdas	1	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
		2	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
		3	Kartu Pariaman Pintar
		4	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
		5	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
		6	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
2	Sumbar Religius dan Berbudaya	1	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
		2	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)
		3	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
		4	Lanjutkan Pembangunan Mesjid Terapung Pariaman
3	Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan	1	Program Pariaman Sejahtera
		2	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
		3	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

**E. Isu Regional Provinsi Sumatera Barat**

- a. Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dan Kabupaten Pasaman Barat.



- b. Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) — Pariaman sebagai jalan alternatif dan Padang menuju Padang Pariaman/Agam/Pasaman/Pasaman Barat.

#### **F. Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 jenis yaitu terdiri atas:

1. SPM Bidang Pendidikan
2. SPM Bidang Kesehatan
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Pelindungan Masyarakat
6. SPM Bidang Sosial

PP Nomor 2 Tahun 2018 ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur lebih rinci dalam penerapan SPM oleh Pemerintah daerah. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini keenam jenis SPM dirinci lagi kepada bentuk-bentuk pelayanan yang diprioritaskan sebagai berikut :

##### **1. SPM Bidang Pendidikan**

Mutu dan pelayanan dasar terkait dengan bidang pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini.

Untuk pendidikan anak usia dini ini pelayanan diberikan pada warga Negara usia 5 - 6 Tahun

- b. Pendidikan dasar.



Untuk warga Negara usia 7 - 15 Tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan Kesetaraan

c. Pendidikan kesetaraan.

Untuk warga Negara usia 7 – 18 tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Pendidikan meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Isu strategis untuk pencapaian SPM di Bidang Pendidikan :

1. Implementasi penerapan SPM bidang pendidikan di Kota Pariaman masih rendah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait termasuk warga sekolah, komite dan pihak swasta serta pembenahan kurikulum yang diberikan di tingkat satuan pendidikan.

## 1. SPM Bidang Kesehatan

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang kesehatan adalah:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; untuk ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; untuk ibu melahirkan
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; untuk bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita; untuk balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; untuk usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; untuk usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; untuk usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; untuk penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; untuk penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; untuk orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; untuk orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); untuk orang beresiko HIV



Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

## 2. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang pekerjaan umum terkait pada :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; untuk seluruh warga negara
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang mampu dan dapat diakses oleh masyarakat; untuk seluruh warga negara

Mutu pelayanan dasar pada SPM PUPR meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## 3. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; untuk Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana
- b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah; untuk Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

## 4. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan minimum dasar yang diberikan terkait dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penerima layanan dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat :



- a. Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana;
- c. Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran  
Mutu pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## 5. SPM Bidang Sosial

Jenis pelayanan minimum bidang sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Penerima layanan dasar SPM Sosial adalah Penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut usia telantar, Gelandangan dan pengemis, Korban bencana di tingkat provinsi, Korban bencana di tingkat kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar pada SPM Sosial meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri ini juga diatur tahapan Penerapan SPM dengan empat tahapan yaitu :

- 1) Tahap pengumpulan data;
- 2) Tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Tahap penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 4) Tahap pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



### G. RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Pariaman. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kota Pariaman tahun 2005-2025 adalah

**“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”.**

Rumusan visi tersebut dapat diterjemahkan adanya cita dan citra Kota Pariaman dimasa mendatang untuk menjadi salah satu Kota Perdagangan Dan Jasa yang terletak dipantai Barat Sumatera. Perwujudan Kota Perdagangan Dan Jasa dimaksud utamanya dibangun dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani.

**Kota Pardagangan** merupakan Kota perdagangan mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, akan berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan baik skala regional, nasional maupun internasional.

**Kota Jasa** Kota Jasa mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang akan berkembang menjadi pusat aktivitas jasa pelayanan antara lain : hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan perbankan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa lainnya.

**Wilayah Pesisir Barat Sumatera** merupakan Suatu wilayah yang batasan cakupannya meliputi di sepanjang pesisir barat pulau sumatera.

**Masyarakat Madani merupakan** Masyarakat Madani mengandung arti bahwa dalam 20 tahun mendatang diharapkan terwujud masyarakat Kota Pariaman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peradaban maju, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, sehat, cerdas, makmur, sejahtera, dalam lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera menuju masyarakat madani maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

---



1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD ke 4 (2018-2023), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 3. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, maka pada RPJM ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.

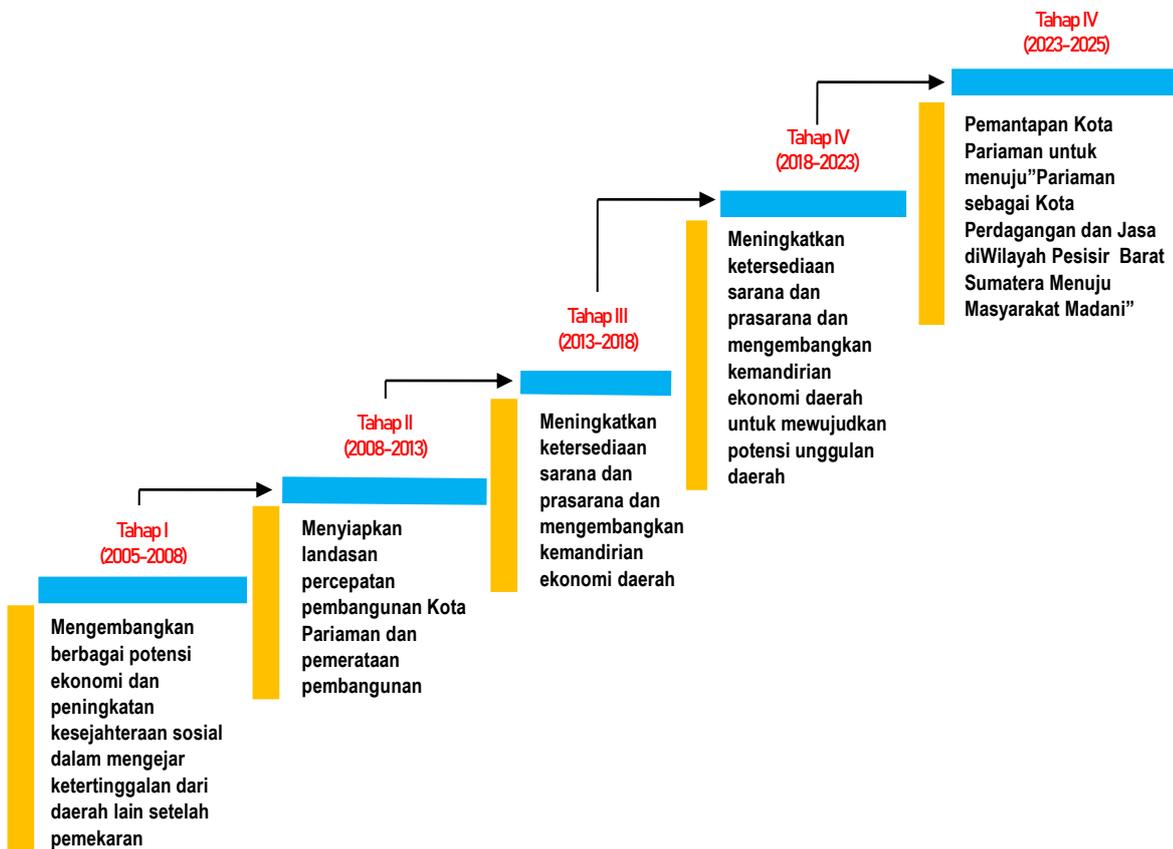
Berbagai tujuan dan target pencapaian SDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan Kota Pariaman untuk jangka panjang yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target :
  - a. Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari.
  - b. Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.
  - c. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target :
  - a. Menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target :
  - a. Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan.
4. Menurunkan angka kematian anak dengan target : menurunkan angka kematian balita, bayi dan neonatal.
5. Meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua.
6. Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target:



- a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.
- b. Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan.
- c. Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar.
- d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh

**Gambar 4.7**  
**Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025**



#### H. RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan



masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Proses perencanaan tata ruang sendiri dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun ke depan untuk masing-masing hirarki tata ruang nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghasilkan output berupa rencana tata ruang yang menyeluruh.

RTRW Nasional merupakan perencanaan makro strategis nasional yang menggambarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional secara ketataruangan yang memuat antara lain infrastruktur nasional seperti jalan nasional, pelabuhan samudera maupun bandara internasional. Sedangkan RTRW Provinsi merupakan perencanaan regional yang menjabarkan RTRWN dalam konteks ruang wilayah provinsi secara lebih rinci termasuk memuat rencana pengembangan infrastruktur jalan provinsi, terminal maupun pelabuhan regional. Sementara itu RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang skala kabupaten/kota dengan muatan utama kelengkapan infrastruktur di tingkat lokal atau regional seperti jalan kabupaten/kota, kebutuhan jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang ada.

Gambaran kondisi tersebut sering kita jumpai di berbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Pariaman. Kota Pariaman yang resmi terbentuk pada tahun 2002 mengalami perkembangan pembangunan yang sangat cepat yang jika tidak diiringi dengan pengaturan pemanfaatan ruang akan mengakibatkan pembangunan tumbuh secara sporadis pada beberapa kawasan tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman merupakan dasar/arahannya bagi pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pariaman. Arahannya ini harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholders pembangunan (pemerintah, private / swasta serta masyarakat) dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Penjabaran aktivitas tersebut tercermin dari pola pemanfaatan ruang (tata guna lahan) yang ada. Selain itu RTRW juga harus mempunyai visi dan misi ke depan yang jelas terutama dalam penataan ruang dan pembangunan Kota Pariaman. Aktivitas masyarakat kota (fisik, ekonomi, sosial dan politik) yang sangat dinamis secara langsung maupun tidak langsung turut memiliki andil dalam perkembangan Kota Pariaman.



Perubahan secara fisik berupa adanya perkembangan dan perubahan pemanfaatan ruang, perubahan dalam bidang ekonomi terutama terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Perubahan dalam bidang sosial politik adalah adanya perubahan besar sejak era reformasi yang ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat top down menjadi bottom up. Kondisi tersebut secara tidak langsung juga berakibat pada perubahan karakteristik masyarakat yang berkembang ke arah demokrasi, yang salah satunya diwujudkan dalam proses pembangunan yang transparan dalam arti pemerintah harus terbuka pada seluruh masyarakat (terutama untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat).

Kota Pariaman telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui bantuan teknis Dirjen Penataan Ruang pada tahun 2004 dan telah di Perdakan pada tahun 2005. Dalam perjalanannya RTRW Kota Pariaman tersebut sudah dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam pengembangan wilayah Kota Pariaman. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 maka semua produk RTRW baik di tingkat provinsi maupun kota harus disesuaikan karena terdapat beberapa perbedaan dengan materi yang terdapat pada RTRW yang sebelumnya antara lain tentang jangka waktu rencana di mana pada RTRW yang lama jangka waktu untuk RTRW Kota adalah selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan menurut undang-undang yang baru adalah selama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian juga menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 ini produk RTRW harus lebih menekankan kepada sanksi dan adanya penetapan kawasan strategis di setiap tingkatan RTRW baik provinsi maupun kota. Selain itu dengan keluarnya perubahan undang-undang penataan ruang dari undang-undang nomor 24 tahun 1992 menjadi undang-undang nomor 26 tahun 2007 di mana pada Bab XIII pasal 78 menyatakan bahwa RTRW Provinsi dan Kota harus sudah disesuaikan dan diperdakan sesuai materi Undang-undang nomor 26 tahun 2007 paling lambat dua tahun bagi provinsi dan tiga tahun bagi kota sejak undang-undang tersebut diundangkan.

#### A. Tujuan Penataan Ruang Kota Pariaman

Berdasarkan Visi dan Misi yang terdapat pada dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dari RTRW Kota Pariaman, yaitu:

**“Mewujudkan Kota Pariaman Sebagai Kota Wisata Pesisir Yang Madani Untuk Mendukung Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”**



Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penataan ruang Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Wisata pesisir; sektor pariwisata sangat diharapkan dapat menjadi lokomotif pengembangan kegiatan ekonomi Kota Pariaman di masa mendatang, hal ini terutama berdasarkan pertimbangan atas potensi SDA kelautan dan potensi kekayaan budaya yang dimiliki serta posisi geografis Kota Pariaman yang sangat strategis. Selain itu juga dipertimbangkan keterbatasan pengembangan sektor lain seperti pertanian dan perkebunan yang terkendala oleh minimnya lahan yang dapat dikembangkan serta adanya persaingan di sektor perdagangan & jasa dengan kota lainnya. Kegiatan sektor pariwisata ditekankan pada pemanfaatan potensi bahari yang mencakup kawasan pantai, laut dan pulau-pulau kecil serta pengembangan dan peningkatan kegiatan festival Tabuik yang sudah menjadi kalender acara nasional. Puncak kegiatan pariwisata setiap tahunnya dilaksanakan pada setiap pelaksanaan Festival Tabuik. Sebagai maskot pariwisata Kota Pariaman, sudah selayaknya kegiatan Festival Tabuik ini dapat diagendakan dan disiapkan dengan lebih matang serta mendapatkan dukungan dari berbagai sektor kegiatan lainnya. Dari sisi aspek infrastruktur kota, diperlukan penataan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur khusus untuk pelaksanaan kegiatan ini. Misalnya seperti rumah tabuik yang permanen dan lebih representatif, jalur jalan yang lebar dan dipersiapkan khusus untuk mengarak tabuik, areal pertemuan 2 tabuik dan lokasi pengarungan tabuik di pantai Gondorih. Lokasi-lokasi tersebut harus disiapkan dan dipersiapkan dengan baik, terencana dan terukur sehingga dapat menampung membludaknya penonton yang bisa mencapai ratusan ribu orang dari berbagai kalangan dan berbagai tempat. Madani; sesuai dengan karakter masyarakat Pariaman yang agamais maka pengembangan kegiatan pariwisata maupun perdagangan dan jasa yang akan mendukung pengembangan wilayah akan membawa dampak positif terhadap masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata yang dikembangkan harus yang bercirikan islami.
- 2) Perdagangan dan Jasa; untuk menunjang pencapaian visi Kota Pariaman yakni memantapkan kerangka pemerintahan yang optimal menuju kota perdagangan dan jasa, dengan membenahi sarana dan infrastruktur pasar yang masih bersifat tradisional di Kota Pariaman. Di bidang industri produksi industri kecil dan rumah tangga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan telah memberikan dampak positif. Beberapa jenis produk hasil kerajinan industri kecil sudah memasuki pasar luar negeri, seperti produk



sulaman, mukena, pakaian muslim. Produk makanan olahan tradisional seperti kipang kacang dan emping melinjo juga sudah memasuki pasar regional seperti Pekanbaru, Medan dan Jakarta namun masih terbatas dalam skala kecil. Terdapat sebanyak sekitar 200 lebih unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 2.000 orang lebih.

- 3) Berwawasan lingkungan; merupakan upaya pengembangan kegiatan kota yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana serta memperhatikan ruang terbuka hijau kota.

#### B. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota;
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kota;
- 3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota;
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

- 1) Tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Karakteristik wilayah kota; dan
- 3) Kata-kata kunci dari isu-isu strategis Kota Pariaman.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan;
- 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
- 3) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### C. Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi :

- 1) Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rtrw kota; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan :

- 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota;
- 2) Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- 2) Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi;
- 3) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan secara efisien dan efektif;
- 4) Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### D. Strategi Dasar Pengembangan Kota Pariaman

Strategi dasar pengembangan Kota Pariaman ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan pengembangan kawasan kota sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan yang telah digariskan. Jadi pada dasarnya strategi ini, sebagai media dalam menentukan rencana pengembangan kota lebih lanjut agar sesuai dengan apa yang dimiliki atau keadaan potensi dan masalah di wilayah perencanaan.

Adapun strategi pengembangan fungsi dan peran Kota Pariaman dalam pengembangan sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi tempat pasar (marketplace function), dimana barang, jasa konsumsi dan investasi dijual kepada masyarakat di sekitar Kota Pariaman .
- 2) Masih merupakan fungsi tempat pasar, tetapi merupakan arus balik dari fungsi tempat pasar yang pertama, yaitu sebagai tempat pemasaran hasil pengolahan pertanian dan industri. Fungsi ini merupakan kegiatan yang potensial berkembang di Kota Pariaman, mengingat Pasar di



Pariaman masih menjadi orientasi pasar bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Pariaman yang dulunya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu pola perdagangan yang melayani ke wilayah belakangnya, selain tempat pemasaran juga sebagai tempat distribusi dan koleksi barang-barang dari luar maupun dari dalam wilayah Kota Pariaman.

- 3) Merupakan terminal jasa distribusi, yang meliputi sektor angkutan perdagangan yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai pusat pemasaran secara lebih tegas yaitu menghubungkan pusat produksi dan pusat pemasaran.
- 4) Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit pertanian dari pemerintah, hal ini biasanya dibarengi oleh arus baliknya, berupa tabungan pedesaan yang disalurkan oleh bank-bank yang hirarkinya lebih tinggi.
- 5) Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan kegiatan pertanian dan industri.
- 6) Fungsi pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, peribadatan, rekreasi, pemerintahan dan lainnya yang mencerminkan fungsi Kota Pariaman sebagai pusat pelayanan kota.
- 7) Fungsi pelayanan dan koordinasi pertahanan dan keamanan.

#### E. Rumusan Strategi Penataan Ruang

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman, maka strategi penataan ruang adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi pengembangan kawasan perumahan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana meliputi:
  - a) mengembangkan kawasan perumahan di Kota Pariaman dengan kepadatan tinggi di pusat kota, kepadatan sedang dan kepadatan rendah dipinggir kota dan pada kawasan rawan bencana;
  - b) mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan intensitas ruang dan menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa;
  - c) mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata;



- d) mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan kegiatan industri.
- 2) Strategi peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa meliputi :
  - a) menetapkan sentra industri sesuai dengan potensi yang dimiliki;
  - b) mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil/ rumah tangga;
  - c) mengarahkan kegiatan industri ke arah bagian barat (hilir) wilayah Kota Pariaman dan sepanjang koridor jalan regional guna menghindari kemungkinan pencemaran air di arah hulu sungai yang akan difungsikan sebagai sumber air baku kota dan kemudahan akses transportasi.
- 3) Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan meliputi:
  - a) mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;
  - b) mengembangkan pasar wisata di “Pasar Lama Kota Pariaman” Kecamatan Pariaman Tengah;
  - c) mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Gandorih yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas yang handal;
  - d) mengembangkan potensi wisata alternatif kota untuk meragamkan objek dan kawasan wisata kota.
- 4) Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan meliputi:
  - a) Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan kota (LP2B) dan pembatasan pembangunan prasarana yang memotong kawasan persawahan untuk mempertahankan fungsinya sebagai aset kota dalam rangka mendukung program strategis ketahanan pangan nasional;
  - b) mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis;



- 5) Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan meliputi;
  - a) meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
  - b) meningkatkan pemasaran hasil industri pada kawasan pasar dan rekreasi untuk mendukung pemasaran hasil-hasil industri di Kota Pariaman.
- 6) Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana meliputi;
  - a) merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam;
  - b) mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana;
  - c) membatasi pembangunan sarana dan prasarana publik yang strategis seperti kesehatan dan pendidikan di kawasan sepanjang pantai; dan
  - d) dalam jangka panjang merelokasi fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemerintahan pada kawasan bebas bencana tsunami.
  - e) menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
  - f) meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.
- 7) Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai bagian PKN PASOPALAPA meliputi;
  - a) mengembangkan jaringan transportasi jalan maupun kereta api yang menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah sekitarnya;
  - b) mengembangkan moda transportasi massal berbasis rel dan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Pariaman dengan kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
- 8) Strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi;
  - a) Mengembangkan pulau untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
  - b) Melakukan konservasi pulau Kasiak dan pesisir pulau untuk perlindungan penyu dan terumbu karang.



- c) Mengembangkan potensi perikanan dan pariwisata pesisir dengan membangun prasarana dan sarana pemasaran perikanan dan pendukung wisata.

**I. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Salah satu hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environment Assessment (SEA). Pada prinsipnya KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah Kota Pariaman telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD periode 2018-2023 yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pembobotan, maka isu strategis KLHS Perubahan RPJMD Kota Pariaman adalah : rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, tingginya intensitas alih fungsi lahan, rendahnya kapasitas penyediaan sumber air baku, rendahnya kapasitas pengelolaan limbah, berkurangnya kawasan hijau, dan minimnya sanitasi perkotaan.

Berikut ini Rekomendasi Perbaikan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Visi-Misi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

**Tabel 4.27**  
**Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik KLHS Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023**

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Indikasi Program
1	Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Sampah	Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis 5R (Reduce, reuse, recovery, reutilization, and recycling).	1 Pengembangan pengelolaan sampah dengan ekoenzim dan maggot.
			2 Pengembangan pembuatan kompos dari sampah organik.
			3 Pemanfaatan sampah untuk energi.
			4 Peningkatan pemilahan sampah / obat bekas dan baterai bekas.
			5 Pengembangan pola hidup minim sampah
		Meningkatkan	1 Pengembangan pembuatan bahan bangunan berbasis sampah



		pengetahuan tentang sampah dan pendayagunaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 Peningkatan informasi tentang nilai ekonomi sampah.</li> <li>2 Pengembangan organisasi lokal pengelola sampah</li> </ol>
		Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan peran ulama, tokoh adat dan pendidik dalam pengelolaan sampah.</li> <li>2 Pengembangan skema pemodaln usaha pemanfaatan sampah untuk pellet energi.</li> </ol>
2	Penurunan Kualitas Air	Meningkatkan Kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten dan daerah tetangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Intensifikasi koordinasi teknis pengendalian pencemaran air sungai.</li> <li>2 Pengembangan kebijakan pemanfaatan sungai antar daerah</li> <li>3 Pengembangan pengelolaan sempadan sungai (taman kota, taman rekreasi)</li> </ol>
		Mengembangkan system pengelolaan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan rencana sewage system</li> <li>2 Pengintegrasian pengelolaan air limbah dengan penyediaan air minum</li> <li>3 Pengembangan infrastruktur pemgendalian air limbah (IPLT, IPAL komunal)</li> <li>4 Peningkatan pendidikan masyarakat tentang pemanfaatan ulang air limbah</li> </ol>
3	Sanitasi Lingkungan yang Tidak Terkelola Baik	Meningkatkan kesadaran publik tentang sanitasi lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan peran generasi muda dalam penyadaran pentingnya sanitasi</li> <li>2 Pengembangan Kerjasama penyediaan infrastruktur sanitasi.</li> <li>3 Peningkatan teknologi sanitasi lingkungan (teknologi jamban, pengelolaan air limbah)</li> </ol>
		Mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan berorientasi ekologis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan kerjasama pendidikan sanitasi dengan perguruan tinggi.</li> <li>2 Pengembangan pusat informasi kesehatan lingkungan</li> </ol>
4	Peningkatan Abrasi	Meningkatkan resiliensi kawasan pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan kelompok relawan pemeliharaan ekosistem mangrove</li> <li>2 Pendayagunaan Kawasan pesisir sebagai objek wisata Pendidikan</li> <li>3 Pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi (groin).</li> </ol>
		Meningkatkan kualitas ekosistem laut dan pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan kapasitas penduduk dalam pemeliharaan terumbu karang pencegah abrasi.</li> <li>2 Peningkatan pengelolaan limbah penyebab penurunan tutupan terumbu karang</li> <li>3 Pengembangan terumbu karang buatan (fish apartment)</li> <li>4 Pemeliharaan kualitas terumbu karang.</li> </ol>



			5 Pengendalian pembangunan perumahan di Kawasan pesisir.
			6 Pengayaan vegetasi pantai (Ketaping, cemara laut, waru)
			7 Peningkatan koordinasi pengelolaan kawasan pesisir (termasuk terumbu karang, mangrove)
5	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Meningkatkan dukungan implementasi LP2B	1 Pengembangan insentif dan disinsentif untuk implementasi LP2B. 2 Pengembangan pemodalana usaha untuk petani remaja. 3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan
		Mengembangkan penataan ruang untuk pengurangan tekanan terhadap lahan pertanian.	1 Pengembangan infrastruktur pengalihan pemukiman dari Kawasan pertanian. 2 Pengetatan perizinan dalam pengendalian alih fungsi lahan.
		Mengembangkan dukungan untuk peningkatan kualitas RTH menuju Pariaman sebagai kota taman	1 Pengembangan kualitas dan jenis destinasi wisata berbasis taman kota 2 Pengembangan Kerjasama berbasis filantropi untuk peningkatan nilai guna taman kota. 3 Peningkatan infrastruktur pemeliharaan taman.

**Tabel 4.28**  
**Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Pengkajian TPB**

No Indikator	Indikator TPB	Arah Kebijakan		Indikasi Program	
<b>SPM Bidang Pendidikan</b>					
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan	1	Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pendidikan
		2	Meningkatkan kualitas pengawasan pada proses pembelajaran	1	Optimalisasi fungsi dan peranan pengawas sekolah
				2	Penyempurnaan sistem pelaporan pengawasan sekolah
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan	1	Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan



					pendidikan
		2	Meningkatkan kualitas pengawasan pada proses pembelajaran	1	Optimalisasi fungsi dan peranan pengawas sekolah
				2	Penyempurnaan sistem pelaporan pengawasan sekolah
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	1	Mempertahankan APK SD/MI/ sederajat yang tinggi	1	Peningkatan kualitas pendidikan untuk menurunkan anak mengulang kelas
				2	Peningkatan layanan khusus bagi anak didik yang potensial mengulang kelas
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	1	Mempertahankan APK SMP/MTs/ sederajat yang tinggi	1	Peningkatan kualitas pendidikan untuk menurunkan anak mengulang kelas
				2	Peningkatan layanan khusus bagi anak didik yang potensial mengulang kelas
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Peningkatan pemahaman orang tua akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
				2	Pengembangan TK Negeri per kecamatan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	1	Meningkatkan koordinasi lanjutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	1	Peningkatan koordinasi lanjutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
<b>SPM Bidang Kesehatan</b>					
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat imunisasi	1	Peningkatan sarana dan prasarana penyebaran informasi tentang imunisasi
		2	Meningkatkan kerjasama dengan tokoh agama	1	Peningkatan kerjasama dengan lembaga-



			dalam memberikan pemahaman tentang halal-haramnya imunisasi		lembaga keagamaan dalam penyampaian informasi tentang halal haramnya imunisasi
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1	Meningkatkan pengetahuan ibu tentang PMBA	1	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat
		2	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	1	Peningkatan keterampilan ibu dan keluarga dalam penyediaan makanan bernilai gizi tinggi
				2	Peningkatan kerjasama lintas sektor
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1	Meningkatkan pengetahuan ibu tentang manfaat ASI eksklusif	1	Menyediakan sarana informasi melalui media cetak maupun media elektronik tentang manfaat ASI eksklusif
		2	Meningkatkan dukungan keluarga melalui dorongan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1	Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam memberikan informasi
		3	Optimalisasi implementasi regulasi bagi penyediaan ruang laktasi ditempat-tempat umum	1	Peningkatan sarana dan prasarana bagi ibu menyusui di lingkungan kerja dan ruang public
				2	Peningkatan pemahaman keagamaan tentang kewajiban memberikan ASI
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kurangnya pengetahuan ibu dalam mengenal tanda-tanda bahaya penyakit pada balita	1	Meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan balita
		2	Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memanfaatkan fasyankes	1	Peningkatan kerjasama Lintas sektor terkait dalam meningkatkan kesadaran orang tua dalam memanfaatkan fasyankes
		3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada anak balita	1	Peningkatan SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan anak balita



				2	Peningkatan sarana dan prasarana fasyankes
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	1	Peningkatan intensitas penyampaian informasi tentang imunisasi lengkap	1	Intensifikasi informasi tentang imunisasi lengkap berbasis media sosial
		2	Meningkatkan peranserta tokoh masyarakat dalam pencapaian imunisasi dasar lengkap di desa/kel	1	Peningkatan kerja sama dengan Kepala pemerintahan di Desa/Kelurahan
<b>SPM Bidang Pekerjaan Umum</b>					
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1	Meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1	Pengembangan sistem pembiayaan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih
				2	Peningkatan infrastruktur sistem penyediaan air minum
				3	Pengembangan pengetahuan kelompok masyarakat penyelenggara SPAM
				4	Pengembangan perencanaan SPAM
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	Mengembangkan sarana dan prasarana sanitasi layak	1	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi layak
				2	Penyusunan Kebijakan tentang pengelolaan air limbah domestik
		2	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak	1	Pengembangan pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak
				2	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola air limbah domestik
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1	Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1	Peningkatan infrastruktur sistem penyediaan air minum
				2	Peningkatan Lingkungan sehat perumahan



				3	Pemberdayaan komunitas perumahan
				4	Pengembangan pengetahuan kelompok masyarakat penyelenggara SPAM
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga.	1	Meningkatkan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1	Program penyediaan dan pengelolaan air baku
				2	Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
				3	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	1	Meningkatkan kapasitas infrastruktur layanan sumber air	1	Peningkatan infrastruktur sistem penyediaan air minum
				2	Peningkatan Lingkungan sehat perumahan
				3	Pemberdayaan komunitas perumahan
				4	Pengembangan pengetahuan kelompok masyarakat penyelenggara SPAM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1	Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	1	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi layak
				2	Pengembangan pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak
				3	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola air limbah domestik
				4	Penyusunan Kebijakan tentang pengelolaan air limbah domestik
<b>SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, &amp; Perlindungan Masyarakat</b>					
11.5.1.(a)	Indeks risiko bencana	1	Meningkatkan kapasitas	1	Pengembangan regulasi



	Indonesia (IRBI)		daerah dalam menghadapi bencana		Rencana Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
<b>SPM Bidang Sosial</b>					
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1	Meningkatkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas		
		2	Mengembangkan infrastruktur yang ramah disabilitas		
		3	Mengembangkan kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas		
		4	Meningkatkan Kerjasama/MOU dengan Pihak ketiga (BAZ, CSR, Donatur, dll) untuk penyediaan sarana dan prasarana		
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1	Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar korban bencana melalui gudang logistik	1	Revitalisasi kearifan lokal dalam penyediaan logistik berbasis kelurahan/desa
		2	Meningkatkan Kerjasama dengan OPD Terkait (Kesbangpol) untuk melakukan pemetaan data Potensi Konflik Sosial	1	Peningkatan kerjasama dengan OPD Terkait untuk penanganan Rehabilitasi Korban Bencana Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1	Mengembangkan kelembagaan trauma healing bagi kelompok siaga bencana, lembaga dan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk trauma healing	1	Peningkatan keterampilan trauma healing bagi kelompok siaga bencana
				2	Peningkatan kerjasama dengan tokoh agama untuk trauma healing

#### H. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Kota Pariaman hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Padang Pariaman tersebut memiliki



keterhubungan sehingga di dalam satu region dapat saling mendukung untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD Padang Pariaman tersebut mempunyai visi dan misi yang sama-sama kuat dan mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, mereka mempunyai misi yang sebagian lingkup besarnya adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, maupun peningkatan kelembagaan pemerintahan.

Pada dokumen RPJMD Padang Pariaman tersebut mempunyai tujuan/sasaran yang melingkupi cakupan permasalahan daerah masing-masing dengan poin penting berupa tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi RPJMD masing-masing daerah.

Adapun Visi dan misi dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

### “PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Unggul **BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- SeJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- BerbudaYA** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

- 1) **Baru** memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) **Religius** memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari–hari.
- 3) **Cerdas** memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.
- 4) **Sejahtera** memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.



Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2021” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah *Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, maka perencanaan pembangunan Kota Pariaman perlu meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD. Adapun penyelarasan pembangunan antar di Kota Pariaman hanya dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Karena Kota Pariaman hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Pada bagian bab ini yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pembangunan yang kolaborasi antara pemerintah Kota Pariaman dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta yang terpenting sekali adalah memperhatikan hal-hal yang telah dikerjasamakan.

Untuk penyediaan infrastruktur skala regional Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan kesepakatan bersama terkait :

1. Penegasan Batas Administrasi di Wilayah Berbatasan
2. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional.
3. Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional
4. Penyediaan Sumber Air Baku/Minum dan Pengelolaan Instalasi Air Minum Regional



5. Pembangunan Infrastruktur di wilayah DAS Berbatasan
6. Pengelolaan sumberdaya di wilayah DAS Berbatasan
7. Pengelolaan Moda Transportasi Darat dan Laut di wilayah Berbatasan
8. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata
9. Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Penanganan Inflasi Daerah

#### 4.2.2 Rumusan Isu Strategis Kota Pariaman

Berdasarkan pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan-kebijakan diatas baik sectoral, regional, nasional maupun internasional, maka isu-isu strategis perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

##### 1. Produktivitas sektor pariwisata yang masih rendah

Potensi permasalahan pembangunan daerah dalam pengembangan wisata di kawasan pesisir yang berkelanjutan di Kota Pariaman, umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Kondisi saat ini yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan pembangunan kawasan pesisir untuk wisata adalah:

- 1) Potensi obyek pariwisata pantai dan pariwisata pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan sarana prasarana pariwisata lainnya. Selain itu juga belum dilakukan promosi yang maksimal terhadap potensi wisata pesisir di Kota Pariaman.
- 2) Belum diprioritaskannya pembangunan wisata pada kawasan pesisir yang berbasis bencana gempa dan tsunami oleh pemerintah kota Pariaman, karena pembangunan kawasan pesisir yang berbasis pada bahaya bencana gempa dan tsunami belum disikapi secara optimal oleh sektor terkait
- 3) Belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya pesisir yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan.

Belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola dengan baik untuk pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir yang terpadu, dan



berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkan.

Dilihat dari isu permasalahan dalam pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir Kota Pariaman yang sedang terjadi saat ini, maka diperlukan smart solution untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

- 1) Kebijakan pengelolaan dan pembangunan kawasan pesisir di Kota Pariaman sebaiknya dilakukan dengan Co-Management dimana pengelolaan ini melibatkan unsur-unsur dari pemerintah (government based management) baik Pemerintah Kota maupun OPD terkait yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat lokal (community based management) serta investor (private sector) yang berwawasan lingkungan sebagai sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan sarana atau fasilitas penunjang kawasan wisata pesisir di Kota Pariaman.
- 2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ini juga seharusnya dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity) wilayah tersebut.

Beberapa permasalahan pada bidang pariwisata yaitu:

1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pariaman masih kecil.
3. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensinya.

Kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

1. Terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan..
2. Belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat.
3. Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi.
4. Belum berkembangnya produk ekonomi kreatif lokal

## **2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan**

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Pendidikan, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Pariaman telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi



adalah terkait akses untuk pendidikan PAUD dan sarana dan prasarana Sekolah SD yang belum memadai serta distribusi tenaga pendidik yang berkualitas belum merata.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak kesekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter di pendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa terutama Sekolah SMP yang berasal dari luar Kota Pariaman, di satu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Pariaman lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan membenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah adalah upaya fasilitasi terhadap perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Pariaman. Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas Bagi masyarakat Pariaman (*multiplier effect*) baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

Kemudian proses penyelenggaraan pendidikan sejak bulan maret 2020 sampai saat ini tidak bisa terlaksana seperti biasa dalam kondisi normal karena pandemi covid-19. Siswa belajar dari rumah dengan sistem online, akan tetapi tidak bisa berjalan optimal karena keterbatasan jaringan dan alat komunikasi serta tenaga pendidik yang belum siap memberikan bahan ajar melalui media online. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sangat mempengaruhi pelaksanaan dunia pendidikan karena terjadi perubahan mendasar dalam proses pendidikan, jadi diperlukan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan, percepatan digitalisasi pendidikan dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru di fasilitas pendidikan.

Isu Optimalisasi kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Propinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu Nasional berupa pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan peningkatan kualitas pembelajaran. Terkait peran pemuda dan olah raga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik sudah tidak



diragukan lagi. Selain bermanfaat jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olahraga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Walaupun bidang olah raga memiliki alat ukur yang jelas dalam pencapaian prestasi dan keberhasilannya, namun tak bisa dipungkiri pembangunan olah raga di Kota Pariaman masih menemui hambatan dan keterbatasan. Persoalan pembinaan terhadap bibit–bibit atlet berprestasi yang masih belum terarah seperti; sistem rekrutmen calon atlet, pembibitan, pembinaan pada cabang olah raga, sampai pada peningkatan prestasi.

### **3. Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat.**

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Peningkatan kualitas kesehatan akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya, dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.

### **4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat akan dilaksanakan melalui Misi V RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang



Berbasis Lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat.

## 5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 5,20 % penduduk Kota Pariaman yang terkategori miskin pada tahun 2017 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Pariaman.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas dan Misi V yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan penanganan pengangguran dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

## 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Prioritas utama Kota Pariaman dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Pariama dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan



dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Pariaman. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas dengan pembangunan Mall Pelayanan Publik.

Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi akan dijawab melalui Misi III RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasiskan Smart City. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

## **7. Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

Isu Strategis Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup akan dijawab melalui Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan, dengan sasaran Terwujudnya Tata Ruang yang Berdaya Guna serta Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

## **8. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh, modern, dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana.**

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan



infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur kota yang baik dengan tetap memerhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

Peningkatan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui Misi I dan Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra dan Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan, dengan sasaran terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

#### **9. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19**

Struktur perekonomian daerah Kota Pariaman yang didominasi oleh sektor pertanian, sektor konstruksi dan industri pengolahan, walaupun disadari sektor pertanian dari tahun sebelumnya mengalami kontribusi yang sedikit menurun yang disebabkan karena mulai naiknya sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Pada satu sisi sektor ini memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.

---





**BAB V**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN  
SASARAN**



**BAB V****VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN****5.1 Visi Pembangunan Daerah**

**VISI** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau Visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Adapun tujuan ditetapkannya visi antara lain untuk memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik dan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kota Pariaman untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

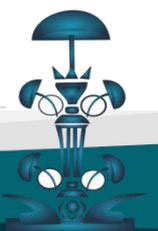
**" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"**

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Pariaman dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Pariaman sebagai kota kecil berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam wisata, perdagangan dan jasa, yang religius dan berbudaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, agama dan budaya.

Untuk memahami Visi Pembangunan Kota Pariaman tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

**Kota Wisata** : Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan yang menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas

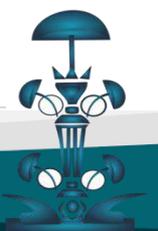


umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Perdagangan dan Jasa** : mengandung arti bahwa Kota Pariaman akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang maju, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang maju dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar

**Religius** : mengandung arti bahwa masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran Agama Islam serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

**Berbudaya** : mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.



**Tabel 5.1**  
**Keselarasan Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023**

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
"Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani "	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan	" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan Berbudaya"

## 5.2. Misi Pembangunan Daerah

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

### 1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra

Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan destinasi wisata dan peningkatan pengelolaan wisata yang maju, religius, tertib dan berbudaya dengan cara meningkatkan daya saing pariwisata adalah bagaimana cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap



akselerasi pembangunan daerah. Kota Pariaman yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam. Semua daya pesona tersebut memberi nilai tambah diiringi dengan usaha minat wisatawan untuk menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif yang ada. Selain itu perlu jaminan wisata yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang tertib.

**2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Pariaman. Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, berbudaya, dan berkualitas melalui penguasaan IPTEK serta memiliki etos kerja yang tinggi ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengembangan dan Peningkatan mutu SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, perkembangan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender sehingga produktivitas tinggi tersebut mampu memanfaatkan peluang, dapat menghadapi tantangan dan siap mengantisipasi kompetisi global.

**3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City.**

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan berbasis Smart City.

**4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;**

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Pesisir Yang Modern yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan water front city, peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan



tetap memperhatikan pembangunan yang dinamis, berwasasan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

**5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.**

Misi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan perdagangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD, misi RPJMN, misi RPJMD Provinsi dengan misi RPJMD Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.2**  
**Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026,**  
**RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023**

RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.	1	Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat	2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya
2	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan	5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal
		5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata				



RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
		4	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil / Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital				.
3	Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan	6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.	5	Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pembangunan Daerah	4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
4	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan						
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>	-	-	2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik	3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga						
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya						
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan						



### 5.3 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencapai kelima misi pembangunan Kota Pariaman dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berangkat dari pada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya (RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan ) sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi I**

	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)		RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sesudah Perubahan)
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian  <u>Indikator :</u> Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian  <u>Indikator :</u> 1. % Kontribusi Sektor Pawisata

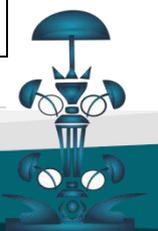


			Terhadap PAD 2. % Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
	<b>Sasaran</b>		<b>Sasaran</b>
1.	Terwujudnya Daya Saing Wisata <b>Indikator :</b> 1. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata 2. % Pertumbuhan Spending Of Money	1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata. <b>Indikator :</b> % Pertumbuhan Spending Of Money

2. Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya (RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan ) sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Misi 2**

	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)		RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sesudah Perubahan)
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatnya Kualitas SDM <b>Indikator :</b> Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat <b>Indikator :</b> Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	<b>Sasaran</b>		<b>Sasaran</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan <b>Indikator :</b> 1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat <b>Indikator :</b> 1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat <b>Indikator :</b> 1. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 2. Indeks Keluarga Sehat	2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat <b>Indikator :</b> 1. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
3	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat <b>Indikator :</b> Indeks Daya Beli Masyarakat	4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat <b>Indikator :</b> Pendapatan/PDRB perkapita
			-



4	Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran <b>Indikator :</b> 1) Angka Kemiskinan 2) Angka Pengangguran	
5	Meningkatnya Kemandirian Desa <b>Indikator :</b> 1) Indeks Desa Membangun	

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya (RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan ) sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 3**

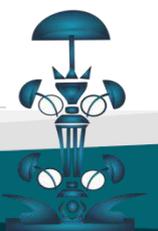
No.	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)	NO	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sesudah Perubahan)
	<b>Tujuan</b>		<b>Tujuan</b>
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi  <b>Indikator :</b> Indeks RB	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih  <b>Indikator :</b> Indeks RB
	<b>Sasaran</b>		<b>Sasaran</b>
1	Meningkatnya Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan <b>Indikator :</b> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Opini WTP BPK Terhadap LKPD 3. Indeks SPBE	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel <b>Indikator :</b> 1. Nilai Sakip 2. Opini WTP BPK Terhadap LKPD
	-	2	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel <b>Indikator :</b> 1. Indeks SPBE 2. Indeks Profesional ASN
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik <b>Indikator :</b> Indeks Pelayanan Publik



4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana; maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya (RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan ) sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 4**

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)		RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sesudah Perubahan)	
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana  <b>Indikator :</b> % Pencapaian Target SDG's	1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni  <b>Indikator :</b> Indeks Kota Layak Huni ( Liveable City)
	<b>Sasaran</b>		<b>Sasaran</b>
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur  <b>Indikator :</b> Indeks Infrastruktur Daerah	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur  <b>Indikator</b> Indeks Infrastruktur Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan  <b>Indikator :</b> Indeks Kualitas Lingkungan	2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup  <b>Indikator :</b> Indeks Kualitas Lingkungan
	-	3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni  <b>Indikator :</b> 1. % Perumahan dan Permukiman Layak Huni 2. % Pengurangan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
3	Meningkatnya Mitigasi Bencana  <b>Indikator :</b> Indeks Resiko Bencana	4	Meningkatnya Mitigasi Bencana  <b>Indikator</b> Indeks Resiko Bencana
4	Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan Masyarakat  <b>Indikator</b> Indeks Ketentraman dan ketertiban	5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat  <b>Indikator</b> Indeks Ketentraman dan ketertiban



5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya (RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan ) sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerjanya pada Misi 5**

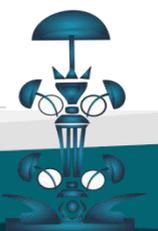
RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)		RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Sesudah Perubahan)	
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman  <b>Indikator :</b> Angka Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat  <b>Indikator :</b> 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Gini Ratio (Indeks Gini)
<b>Sasaran</b>		<b>Sasaran</b>	
1	Menurunnya Ketimpangan pendapatan antar penduduk  <b>Indikator :</b> Indeks Gini (Gini Ratio)	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB  <b>Indikator</b> % Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2	Meningkatnya Nilai Investasi  <b>Indikator :</b> Laju Pertumbuhan Investasi	2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB  <b>Indikator :</b> % Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian  <b>Indikator :</b> 1. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%) 2. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	3	Meningkatnya Investasi  <b>Indikator :</b> Laju Pertumbuhan Investasi (%)
	-	4.	Menurunnya Angka Kemiskinan  <b>Indikator :</b> Angka Kemiskinan
	-	5.	Menurunnya Angka Pengangguran  <b>Indikator :</b> Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa



		<b>Indikator :</b> Indeks Desa Membangun (IDM)
--	--	---

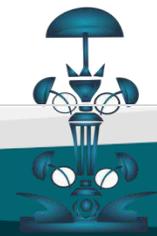
#### 5.4 Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerjanya

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Untuk lebih jelas keterkaitan hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

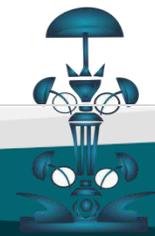


**Tabel: 5.8**  
**Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja sebelum perubahan**

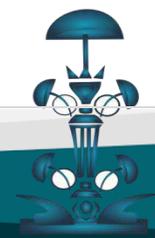
NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"					Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir			
								Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran													
1	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra	1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB (2018 : 12 %) (2023 : 15 %)	1	Terwujudnya Daya Saing Wisata	1	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	%	4,0	5,0	- 35	4	4,5	5	5	
							2	Presentase Pertumbuhan Spending Of Money	%	NA	3,5	4,5	5,00	5,25	5,50	5,50	
2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya	2	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2018 : 76,26) (2023 : 79,01)	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,52	14,56	14,60	14,64	14,68	14,72	14,72	
							4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,36	10,37	10,59	11,24	11,50	11,77	11,77	
						3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,87	70,07	70,30	70,60	71,00	71,50	71,50
							6	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	NA	0,145	0,155	0,165	0,175	0,185	0,185	
						4	Meningkatnya Pendapatan	7	Indeks Daya Beli Masyarakat	(Juta/Rp)	12,4	12,7	13,1	13,6	14,2	14,8	14,8



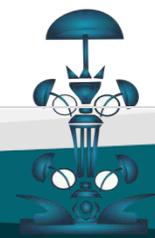
NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"				Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir			
							Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023				
														Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
					Perkapita Masyarakat											
				5	Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran	8	Angka Kemiskinan	%	5,03	4,80	4,50	4,20	3,90	3,50	3,50	
						9	Angka Pengangguran	%	5,72	5,47	5,10	4,80	4,40	3,90	3,90	
				6	Meningkatnya Kemandirian Desa	10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6952	0,7206	0,7253	0,7485	0,7710	0,7920	0,7920	
3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Indeks RB (2018 : 45 %) (2023 : 75 %)	7	Meningkatnya Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	CC	B	BB	BB	A	A	A
							12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,80 (Baik)	80,25 (Baik)	82,40 (Baik)	84,50 (Baik)	86,65 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,35 (Sangat Baik)
							13	Opini WTP BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
							14	Indeks SPBE	Indeks	2,61	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1



NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"					Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir		
								Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran												
4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	4	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	% Pencapaian Target SDG's (2018 : 40 %) (2023 : 70 %)	8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	55,50	60,20	65,45	70,50	75,20	80,15	80,15
					9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	16	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	60,40	64,42	66,00	68,50	69,20	70,10	70,10
					10	Meningkatnya Mitigasi Bencana	17	Indeks Resiko Bencana	Indeks	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)				
					11	Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan Masyarakat	18	Indeks Ketentraman dan ketertiban	Indeks	60,2	62,4	64,6	66,7	68,5	70,4	70,4
5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	5	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman	Angka Pertumbuhan Ekonomi (2018 : 5,51 %) (2023 : 6,20 %)	12	Menurunnya Ketimpangan pendapatan antar penduduk	19	Indeks Gini (Gini Ratio)	%	0,316	0,285	0,265	0,240	0,225	0,200	0,20



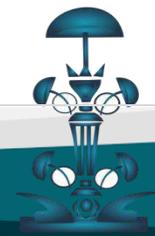
NO	Visi : "Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"				Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir		
							Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023			
								Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran				
				13	Meningkatnya Nilai Investasi	20	Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,5	3,0	3,5	0,62	0,48	0,47	0,47
				14	Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian	21	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	%	1,1	1,15	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
						22	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	%	1,8	2	2	2,2	2,3	2,5	2,5



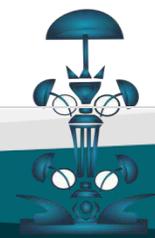
Tabel: 5.9

## Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja setelah perubahan

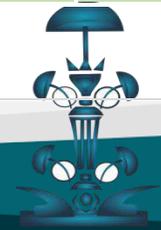
NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir Periode	
	Misi	Tujuan			Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra	1 <b>Tujuan</b> Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	1	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	7,5	8,5	9,5	10,5	12,5	15	15
			2.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	10,5	11,0	4,5	8,5	10,5	12,5	12,5
			1	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	1	Persentase Pertumbuhan Spending Of Money	%	3	3,5	3	3,5	3,8
2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya	2 <b>Tujuan</b> Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat	3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,26	76,70	76,90	77,22	77,54	77,86	77,86



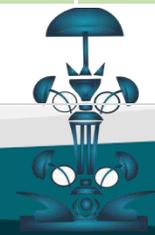
NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target					
	Misi	Tujuan			Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir Periode		
		2	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,52	14,53	14,54	14,55	14,56	14,58	14,58
				3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,36	10,37	10,59	10,84	11,09	11,34	11,34
12		3	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,87	70,15	70,28	70,58	70,88	71,18	71,18
				5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	-	-	-	10,02	9,52	8,9	8,9
		4	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	6	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	(Juta/Rp)	12,61	12,96	12,80	13,15	13,55	14,00	14,00



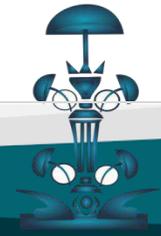
NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir Periode		
	Misi	Tujuan			Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023			
3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	3	<b>Tujuan</b> Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih	4	Indeks RB	Predikat	49,25 (C)	51,52 (CC)	53, 25 (CC)	55,50 (CC)	57,65 (CC)	60,5 (B)	60,5 (B)
		5	<b>Sasaran</b> Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	7	Nilai Sakip	Predikat	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,15 (B)	66,20 (B)	70,05 (BB)	70,05 (BB)
				8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6	<b>Sasaran</b> Meningkatnya tata kelola pemerintah yang kapabel	9	Indeks SPBE	Indeks	2,61	2,87	2,87	3,1	3,2	3,25	3,25
				10	Indeks Profesional ASN	Indeks	-	33,12	41,86	47,10	50,15	55,20	61,50



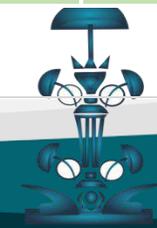
NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target					
	Misi	Tujuan			Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir Periode		
		7	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	78,80 (Baik)	80,25 (Baik)	82,40 (Baik)	84,50 (Baik)	86,65 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,35 (Sangat Baik)
4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	4	<b>Tujuan</b> Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	5	Indeks Kota Layak huni	Indeks	-	-	-	60	61	62	62
		8	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	12	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	61,51	61,95	62,19	64,50	66,27	70,00	70,00
		9	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	45,52	47,24	60,29	63,13	63,60	64,06	64,06
		10	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas	14	% Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	76,25	78,50	79,45	80,24	81,78	83,33	83,33



NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir Periode		
	Misi	Tujuan			Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			Perumahan dan Permukiman Layak Huni										
			15 % Pengurangan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	%	184,36 Ha	16,49	10,35	8,46	7,69	4,64	4,64		
		11	<b>Sasaran</b> Meningkatkan Mitigasi Bencana	Indeks	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	
		12	<b>Sasaran</b> Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Indeks	60,2	62,4	64,6	66,7	68,5	70,4	70,4		
5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	5	<b>Tujuan</b> Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi Masyarakat	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,47	5,30	-1,32	5	5,5	5,7	5,7
			7	Gini Ratio	Nilai	0,316	0,300	0,310	0,300	0,295	0,294	0,294	



NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target					
	Misi	Tujuan			Kondisi Kinerja Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir Periode		
		13	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	15,12	15,36	15,11	15,27	15,43	15,59	15,59
		14	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	19	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	18,66	18,27	18,37	18,47	18,57	18,67	18,67
		15	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Investasi	20	% Pertumbuhan Investasi	%	1,2	1,5	1,6	1,7	1,85	2,0	2,0
		16	<b>Sasaran</b> Menurunnya Angka Kemiskinan	21	Angka Kemiskinan (%)	%	5,3	4,76	4,10	3,90	3,70	3,60	3,60
		17	<b>Sasaran</b> Menurunnya Angka Pengangguran	22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,72	5,42	5,73	5,43	5,10	4,80	4,80
		18	<b>Sasaran</b> Meningkatnya Kemandirian Desa	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6952	0,7206	0,7253	0,7485	0,7710	0,7920	0,7920



Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan, terdapat penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target seperti yang terlihat pada Tabel 5.7 dan 5.8 Penyesuaian tersebut dilakukan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran berdasarkan kewenangan dan lingkup tugas kepala daerah. Untuk sasaran dan indikator yang dipandang terlalu sempit/ mikro, maka sasaran dan indikator tersebut diturunkan ke Perangkat Daerah.
- 2) Penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran berdasarkan hasil rekomendasi Kemenpan & RB terhadap Evaluasi penilaian Sakip Kota Pariaman dari Tahun 2019 dan 2019 yang salah satunya adalah agar Pemerintah Kota Pariaman Mereview dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama. Hasil rewiu tersebut dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dokumen kinerja secara menyeluruh;
- 3) Sementara untuk target disesuaikan berdasarkan evaluasi hasil capaian evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 serta penyelarasan proyeksi target indikator oleh pemerintah propinsi.





## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**



**BAB VI****STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN  
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman Sebagai **"Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"**, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

**6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran**

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dengan dilakukannya perubahan terhadap beberapa tujuan dan sasaran pembangunan, juga dilakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Pariaman ditunjukkan pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1**  
**Hubungangan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Pembangunan Kota Pariaman**

Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"							
Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian	1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	-	Penguatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta kualitas dari SDM Pariwisata	-	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata
						-	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
						-	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional
						-	Penguatan Pelaku Sadar Wisata
				-	Penataan dan pengembangan Daerah Tujuan Wisata	-	Pengembangan destinasi wisata
						-	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
						-	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan
						-	Pengembangan Desa Wisata
						-	Pengembangan investasi wisata
				-	Meningkatkan daya saing pariwisata.	-	<b>Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM</b>
						-	Pengembangan konsep pariwisata



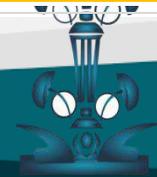
						berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
						- Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
						- Menetapkan satu destinasi unggulan
				- Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif		- Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat
						- Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
				- Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		- Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif
						- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif

Adapun program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas adalah :

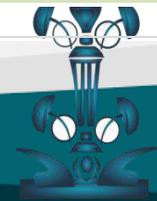
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2	Program pemasaran pariwisata
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
5	Program Penyelenggaraan Jalan

**Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------



1	Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	-	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
						-	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
						-	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah
						-	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
						-	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar
						-	<b>Program Pendidikan Gratis</b>
				-	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	-	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
						-	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa <b>Kartu Pariaman Pintar</b>
				-	Peningkatan Daya Saing Pendidikan	-	Meluncurkan <b>Program Satu Keluarga Satu Sarjana</b>
						-	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata
						-	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan



						- Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini
						- <b>Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)</b>
						- <b>Bus Sekolah Gratis</b>
						- <b>Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)</b>
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	- Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat
						- Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak
						- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
						- <b>Program Kesehatan Gratis</b>
				-	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
						- Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat



						termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
						- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
						- Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat
						- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
				-	Konvergensi penanganan stunting	- Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiapkecamatan
						- Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
						- kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
				-	Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah	- Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Kota
						- Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan
						- Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif



						dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya
		3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	-	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Pariaman dan penguatan sektor strategis Kota Pariaman	- Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
						- Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru
				-	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	- Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat
						- Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
						- Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat
						- <b>Program Pariaman Sejahtera</b>
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas adalah :						
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
2	Program Pengembangan Kurikulum					
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					



5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6	'Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

**Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	-	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan akuntabel	-	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur
						-	Penguatan Pengawasan
						-	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan
						-	Deregulasi Kebijakan
		-	Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran				
		2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang kapabel	-	Meningkatkan kapabilitas baik secara kelembagaan maupun secara Individu ASN	-	Penguatan impelemenatsi manajemen berbasis merit sistem
						-	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
						-	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya
-							



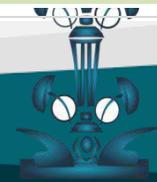
						Kinerja di Lingkungan Organisasi
						- Penyederhanaan Organisasi
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	- Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
						- Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
				-	Meningkatkan sistem pelayanan publik;	- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
						- Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

Adapun program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas adalah :

1	Program perekonomian dan pembangunan
2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
5	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
6	Program pengelolaan keuangan daerah
7	Program pengelolaan barang milik daerah
8	Program pengelolaan pendapatan daerah
9	Program kepegawaian daerah
10	Program penelitian dan pengembangan daerah
11	Program penyelenggaraan pengawasan
12	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi



Misi 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	-	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	-	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
						-	Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian
						-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Destinasi Wisata
						-	Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan
						-	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	-	<b>Pengembangan jalan sisi timur pariaman.</b>
						-	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
						-	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						-	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
						-	<b>Pengembangan water front city</b>
-	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						



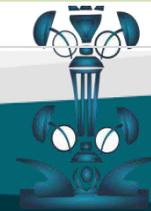
						-	Peningkatan penanganan sampah
						-	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
		3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	-	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	-	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
						-	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						-	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu
				-	Meningkatkan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berbasis masyarakat.	-	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						-	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		4	Meningkatnya Mitigasi Bencana	-	Meningkatkan system ketahanan daerah	-	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
						-	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
						-	Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
						-	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan



				- Meningkatkan pengelolaan kebencanaan	- Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
					- Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana
					- Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
					- Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif
					- Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami
		5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	- Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban	- Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
					- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
				- Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat	- Meningkatkan penegakan perda tentang ketertiban umum
					- Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Adapun program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas adalah :

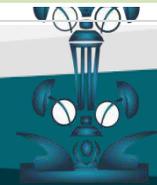
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
4	Program Penyelenggaraan Jalan
5	Program Pengembangan Jasa Kontruksi



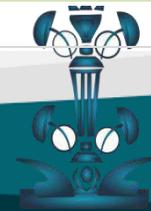
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah
8	Program Pengembangan Permukiman
9	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
10	Program Pengembangan Perumahan
11	Program Kawasan Permukiman
12	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
13	Program Penanggulangan Bencana
14	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
16	Program penanggulangan bencana

**Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal**

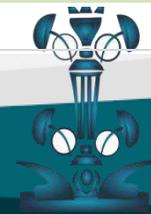
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	-	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	-	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
						-	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;
						-	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.



						- Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif
		2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	-	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	- Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
						- Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
		3	Meningkatnya Investasi	-	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	- Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
						- Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi
				-	Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal	- Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi
						- Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
						- Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
						- Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi



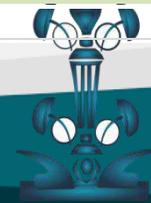
		4	Menurunnya Angka Kemiskinan	-	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	-	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
						-	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
						-	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
						-	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial
						-	<b>Kesempatan Kerja Keluarga Miskin</b>
		5	Menurunnya Angka Pengangguran	-	Perluasan kesempatan kerja dan Peluang Usaha	-	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
						-	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata
				-		-	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
						-	Peningkatan jaringan tenaga kerja
						-	Menumbuhkembangkan wirausaha baru
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa	-	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	-	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan



						-	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
						-	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
				-	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekologi Desa	-	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
						-	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa

Adapun program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas adalah :

1	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
2	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Program standardisasi dan perlindungan konsumen
6	Program perencanaan dan pembangunan industri
7	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
8	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
9	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
10	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
11	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
12	Program penyuluhan pertanian



13	Program perizinan usaha pertanian
14	Program pengelolaan perikanan tangkap
15	Program pengelolaan perikanan budaya
16	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
17	Program pengembangan iklim penanaman modal
18	Program promosi penanaman modal
19	Program Pelayanan penanaman modal
20	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
21	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
22	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
23	Program Penempatan Tenaga Kerja
24	Program Hubungan Industrial
25	'Program Pemberdayaan Sosial
26	Program Rehabilitasi sosial
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakn pembangunan Kota Pariaman 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kota Pariaman yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, pembangunan kota, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada:

### 6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 merupakan kelanjutan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan target capaian pembangunan yang belum tercapai dan terselesaikan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018. Pada tahun ini dilakukan penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan sektor unggulan seperti pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Disamping itu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta titik fokus dari kebijakan pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023 ini adalah Penyiapan Insfratruktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya.

### 6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu Penyiapan Insfratruktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya.



### 6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya dan lebih difokuskan Percepatan Pengembangan Infrastruktur untuk memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM.

### 6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2022 difokuskan Penguatan Sektor Ekonomi Yang Didukung Oleh Peningkatan Sektor Wisata, Potensi Unggulan Lokal, Perdagangan Dan Jasa Yang Religius Berbudaya.

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 disamping tetap melanjutkan program/kegiatan prioritas pembangunan sebelumnya merupakan tahap pemantapan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun ini difokuskan pada prioritas. pengembangan yang perlu ditingkatkan kinerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian program pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

### 6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk menyelesaikan target program yang belum dicapai. Kebijakan pada tahun ini difokuskan pada upaya “Perwujudan Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya”

Pada tahun ini merupakan masa transisi kepemimpinan daerah karena kepala daerah sekarang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober tahun 2023. Dengan demikian arah pelaksanaan pembangunan yang sudah dipersiapkan dalam periode terakhir RPJMD 2018-2023 akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023**

Tahun	Arah Kebijakan
2019	a. Merupakan kelanjutan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan target capaian pembangunan yang belum tercapai dan terselesaikan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018.
	b. Pada tahun ini dilakukan penyusunan dan penetapan perencanaan



	<p>pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan sektor unggulan seperti pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Disamping itu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p>c. Serta titik fokus dari kebijakan pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023 ini adalah Penyiapan Insfratraktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya</p>
2020	<p>Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu Penyiapan Insfratraktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya.</p>
2021	<p>Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya dan lebih difokuskan Percepatan Pengembangan Insfratraktur untuk memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM.</p>
2022	<p>Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2022 difokuskan Penguatan Sektor Ekonomi Yang Didukung Oleh Peningkatan Sektor Wisata, Potensi Unggulan Lokal, Perdagangan Dan Jasa Yang Religius Berbudaya.</p>
2023	<p>Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk menyelesaikan target program yang belum dicapai. Kebijakan pada tahun ini difokuskan pada upaya “Perwujudan Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya”</p>

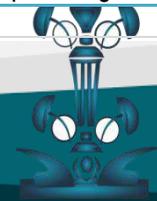


**Tabel 6.3**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pariaman**

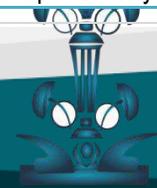
Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"					
	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatera;</b>				
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata
2	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
3	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional
4	Penguatan Pelaku Sadar Wisata	Penguatan Pelaku Sadar Wisata	Penguatan Pelaku Sadar Wisata	Penguatan Pelaku Sadar Wisata	Penguatan Pelaku Sadar Wisata
5	Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi wisata
6	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
7	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan
8	Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Desa Wisata
9	Pengembangan investasi wisata	Pengembangan investasi wisata	Pengembangan investasi wisata	Pengembangan investasi wisata	Pengembangan investasi wisata
10	<b>Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM</b>	<b>Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM</b>	<b>Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM</b>	<b>Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM</b>	<b>Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM</b>
11	Pengembangan konsep	Pengembangan konsep pariwisata	Pengembangan konsep pariwisata	Pengembangan konsep	Pengembangan konsep



	pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata	berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata	berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata	pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata	pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
12	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)				
13	Menetapkan satu destinasi unggulan				
14	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat
15	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
16	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif
17	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Peningkatan tata kelola pembangunan				



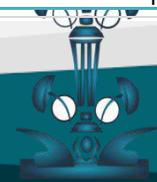
	pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	pendidikan, strategipembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	pendidikan, strategipembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	pendidikan, strategipembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	pendidikan, strategipembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran				
3	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah
4	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
5	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar
6	<b>Program Pendidikan Gratis</b>				
7	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan				
8	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa <b>Kartu</b>	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin



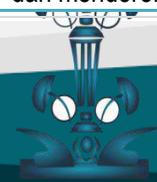
	berupa <b>Kartu Pariaman Pintar</b>	<b>Kartu Pariaman Pintar</b>	<b>Pariaman Pintar</b>	miskin berupa <b>Kartu Pariaman Pintar</b>	berupa <b>Kartu Pariaman Pintar</b>
9	Meluncurkan <b>Program Satu Keluarga Satu Sarjana</b>				
10	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata
11	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan				
12	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini
13	<b>Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)</b>	<b>Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)</b>	<b>Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)</b>	<b>Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)</b>	<b>Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)</b>
14	<b>Bus Sekolah Gratis</b>				
15	<b>Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)</b>				
16	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat				
17	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan



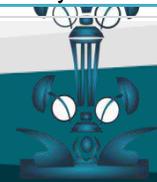
	100 % dan kerjasama para pihak	kerjasama para pihak	kerjasama para pihak	kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak	kerjasama para pihak
18	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
19	<b>Program Kesehatan Gratis</b>				
20	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
21	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
22	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
23	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan



	pengendalian penduduk bagi masyarakat	pengendalian penduduk bagi masyarakat	penduduk bagi masyarakat	dan pengendalian penduduk bagi masyarakat	pengendalian penduduk bagi masyarakat
24	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
25	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiapkecamatan				
26	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui				
27	Kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	Kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	Kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	Kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	Kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
28	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Kota	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahanstunting ditingkat Kota	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahanstunting ditingkat Kota	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahanstunting ditingkat Kota	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahanstunting ditingkat Kota
29	Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan				
30	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif	Mobilisasi sumber daya dan mendorong	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara



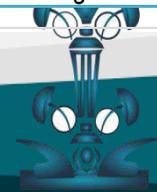
	secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya	aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/a kademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya	dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/a kademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya	partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/a kademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya	aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/a kademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya
31	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
32	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru
33	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat
34	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
35	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat



36	<b>Program Pariaman Sejahtera</b>				
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur
2	Penguatan Pengawasan				
3	Peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan
4	Deregulasi Kebijakan				
5	Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran				
6	Penguatan impelemenatsi manajemen berbasis merit sistem				
7	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur				
8	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan



	Lingkungan Organisasi	Organisasi		Lingkungan Organisasi	Organisasi
9	Penyederhanaan Organisasi				
10	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
11	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik				
12	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
13	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
<b>Misi 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
2	Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian				
3	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas



	Infrastruktur Destinasi Wisata	Infrastruktur Destinasi Wisata	Destinasi Wisata	Infrastruktur Destinasi Wisata	Infrastruktur Destinasi Wisata
4	Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan	Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan	Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan	Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan	Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan
5	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial
6	<b><i>Pengembangan jalan sisi timur pariaman.</i></b>				
7	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
8	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan				
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
10	<b><i>Pengembangan water front city</i></b>				
11	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
12	Peningkatan penanganan	Peningkatan penanganan	Peningkatan penanganan sampah	Peningkatan	Peningkatan penanganan



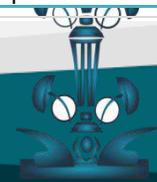
	sampah	sampah		penanganan sampah	sampah
13	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
14	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah				
15	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan				
16	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu				
17	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan				
18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
19	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
20	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam



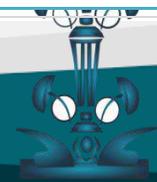
	penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	dan pengurangan resiko bencana	dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
21	Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana				
22	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan				
23	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana				
24	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana				
25	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
26	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif				
27	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami
28	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat				



29	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda				
30	Meningkatkan penegakan perda tentang ketertiban umum				
31	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat				
<b>Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
2	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;
3	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.
4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif				



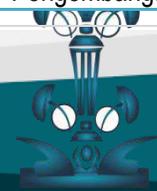
5	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
6	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
7	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
8	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi
9	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
11	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan



	trasparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	trasparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	trasparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	trasparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
12	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi
13	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
14	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
15	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS				
16	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial
17	<b>Kesempatan Kerja Keluarga Miskin</b>				
18	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja				



19	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata
20	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
21	Peningkatan jaringan tenaga kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja
22	Menumbuhkembangkan wirausaha baru	Menumbuhkembangkan wirausaha baru	Menumbuhkembangkan wirausaha baru	Menumbuhkembangkan wirausaha baru	Menumbuhkembangkan wirausaha baru
23	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan
24	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
25	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
26	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk



	Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan KawasanPerdesaan	Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan KawasanPerdesaan	KawasanPerdesaan	Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan KawasanPerdesaan	Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan KawasanPerdesaan
27	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa



### 6.3 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yang berorientasi kepada proses perencanaan itu sendiri dan berorientasi pada substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses terdiri dari pendekatan teknokratik; dengan melibatkan kelompok akademisi diperguruan tinggi, agar mampu menganalisis permasalahan dan isu strategis yang akan menjadi arahan pembangunan daerah ke depannya. Pendekatan partisipatif; yang mengharuskan keterlibatan semua pemangku kepentingan pembangunan mulai dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat. Pendekatan politis lebih melibatkan pengambilan keputusan kebijakan publik termasuk pendanaan pembangunan yang prosesnya itu dilakukan pada Lembaga politik yakni dewan perwakilan daerah (DPRD) Kota Pariaman. Pendekatan bawah-atas dan pendekatan atas-bawah (*Bottom-up dan Top-down*), melibatkan semua pengambil kebijakan (*decision makers*) dan semua Lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini, seperti organisasi Bundo Kandung, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pada sisi lain, pendekatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada substansi terdiri dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

#### a. Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi

##### 1) Kawasan Pasar Wisata

Kawasan strategis Pasar Wisata terdapat pada kawasan perdagangan pusat kota yang dikembangkan agar selain sebagai tempat belanja penduduk kota juga menjadi tempat yang rekreatif. Kawasanya meliputi Kampung Perak, Pasir, Lohong, Kampung Pondok dan Pondok II. Kawasan pasar wisata ini sebagai bagian dari sistem perwilayahan Destinasi Pengembangan Pariwisata II (DPP II) Provinsi SUMBAR yang meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. DPP ini didominasi atraksi dari jenis wisata bahari seperti pantai, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai, dan hutan.

##### 2) Kawasan Strategis Jati

Dalam kebijakan sebelumnya kawasan Jati difungsikan sebagai pusat kegiatan perdagangan & transportasi regional, akan tetapi kebijakan tidak berjalan. Salah satu alasannya karena pemisahan fungsi perdagangan grosir dan harian pasar untuk lingkup kota kecil seringkali tidak efektif karena skala kegiatan ekonomi yang masih kecil sehingga kegiatan perdagangan harian dan grosir masih menyatu dipusat kota. Oleh karena itu kawasan Jati perlu dijadikan tempat kegiatan berfungsi khusus agar menarik pengunjung secara khusus. Alternatif pengembangan



kawasan menjadi pasar khusus seperti pasar wisata dengan mengembangkan fungsi atraksi penarik khusus pengunjung seperti museum atau galeri. Pada Kawasan ini Terminal Jati tidak termasuk menjadi Kawasan Strategis Jati karena Terminal Jati sudah menjadi Terminal Tipe A yang merupakan keweangan pusat .

3) Kawasan Strategis Wisata Pantai Pariaman

Kawasan strategis wisata pantai Pariaman meliputi kawasan sepanjang pesisir pantai mulai dari Gandoriah - Sunur dan ke utara sampai Padang Birik-Birik dan terhubung dengan pulau-pulau kecil didepan pesisirnya.

4) Kawasan Strategis Kegiatan Perikanan dan Wisata

Kawasan strategis kegiatan perikanan dan wisata terdapat di Muara Sunur. Di kawasan ini direncanakan dibangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kawasan ini akan menjadi sentra perikanan bagi Kota Pariaman. Kawasan ini dapat disatukan dengan atraksi wisata pesisir dan menjadi tempat pasar ikan hiegienis.

b. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dalam kaitannya dengan pengembangan atau pelayanan masyarakat.

1) Kawasan Strategis Naras Manggung

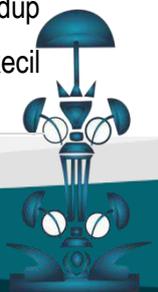
Kawasan Naras Manggung merupakan kawasan permukiman dengan fungsi sentra pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga berupa kain bordir yang meliputi kawasan Naras, Manggung, Pauh Barat, Pauh Timur, Jati Hilir, Jati Mudik, Sungai Sirah.

2) Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan

Kawasan pusat kegiatan olah raga telah direncanakan untuk dibangun pada sisi jalan arteri primer di Kecamatan Pariaman Timur dalam wilayah administrasi desa Kampung Gadang dan Tanjung Sabar dengan luas lebih kurang 28 Ha. Kawasan pusat kegiatan olah raga juga sekaligus menjadi kawasan ruang terbuka hijau kota. Kawasan ini direncanakan dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan dengan fungsi pelayanan kota bagi penduduk yang lebih beragam

c. Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Pariaman yaitu Kawasan Strategis Pulau-Pulau Kecil. Kawasan strategis pulau-pulau kecil



sebagian berfungsi sebagai tempat kegiatan wisata seperti di Pulau Angso, Pulau Tengah, dan Pulau Ujung. Sementara di Pulau Kasiak menjadi tempat konservasi penyu. Meskipun dimanfaatkan sebagai objek wisata akan tetapi tetap perlu dilakukan perlindungan terumbu karang dan biota laut lainnya di perairan. Pulau Kasiak sebagai zona konservasi merupakan satu kesatuan dengan area penangkaran penyu Pantai Pauh. Wisata minat khusus dan edukasi penyu dengan sangat terbatas tanpa mengganggu fungsi ekologi dan ekosistem perkembangan penyu masih mungkin dilakukan di Pulau Kasiak. Pengembangan yang dilakukan pada kawasan strategis pulau-pulau kecil yaitu: 1) Konservasi Pulau Kasiak dan memanfaatkan secara sangat terbatas dan bersyarat untuk wisata minat khusus tentang penyu, 2) Pengembangan wisata pulau di Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung, 3) Membangun prasarana perlindungan pantai dari abrasi, 4) Menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut.

### **Perkembangan Pemanfaatan Ruang**

#### **a. Kawasan Perumahan**

Perencanaan perumahan menurut RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menyatakan bahwa kawasan pusat kota dan sepanjang pantai tidak direkomendasikan untuk pengembangan permukiman dengan kepadatan sangat tinggi (>75%). Berdasarkan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Pariaman, kawasan permukiman akan dikembangkan dengan pola linear mengarah ke selatan dan utara. Tahun 2017 hasil dari pengamatan lapangan dan data perijinan terlihat bahwa kawasan sepanjang pantai yang terdapat permukiman tidak terlalu padat, tapi kawasan pusat kota memiliki kepadatan yang sangat tinggi di dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Pariaman. Tingkat kepadatan Kecamatan Pariaman Tengah 1.942,25 jiwa/km<sup>2</sup>. Ini menunjukkan 1.943 jiwa dalam 1 km<sup>2</sup>.

#### **b. Kawasan Perdagangan dan Jasa**

Kawasan Perdagangan dan Jasa berdasarkan RTRW Kota Pariaman 2010-2030 diarahkan berkembang sepanjang koridor jalan utama Kota Pariaman; di pusat kota di Kecamatan Pariaman Tengah tepatnya daerah Kampung Jawa, Kampung Perak, Kampung Pondok dan Kampung Keling; Pasar Jati sebagai pasar regional dan pasar wisata; dan beberapa pasar lainnya yang menjadi pusat lingkungan yaitu Cubadak Air di Kecamatan Pariaman Utara, Kuritaji di Kecamatan Pariaman Selatan, dan Cubadak Mentawai di Kecamatan Pariaman Timur. Hasil observasi di lapangan, sebaran perdagangan dan jasa berkembang di sepanjang koridor jalan utama kota yang menghubungkan Kabupaten Agam dan Kota Padang. Saat ini dari pengamatan data di lapangan terdapat 7 pasar yang tersebar yaitu terpusat di pusat kota di



Kecamatan Pariaman Tengah, dan menyebar di beberapa pasar bagian wilayah kota di kawasan Timur dan Selatan kota yaitu Pasar rakyat Kurai Taji, Pasar Nagari Desa Cubadak Air, Pasar Balai Nareh, Pasar Cubadak Mentawai, dan Pasar Ikan terdapat di Karan Aur. Sementara Pasar Jati samapi saat ini tidak berkembang sebagai pasar regional.

c. Kawasan Pusat Pemerintahan/Perkantoran

Dalam RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menegaskan bahwa rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta di Kota Pariaman adalah sebagai berikut : 1) Mempertahankan lokasi kawasan pusat pemerintahan pada lokasi yang ada saat ini di Cimparuh, Naras dan Karan Aur, 2) Mengembangkan ruang terbuka hijau kota dan memadukan dengan kegiatan jasa komersial pada Kawasan Jati sebagai kawasan perkantoran swasta yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.

Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota tidak diarahkan pada kawasan khusus atau terkonsentrasi pada satu tempat melainkan berorientasi pada : 1) Relokasi kawasan perkantoran pemerintahan, khususnya bagi dinas-dinas yang belum memiliki bangunan tetap, pengaturan lokasinya dapat disesuaikan berdasarkan intensitas koordinasi antar instansi, 2) Beberapa perkantoran pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berada pada zona kebencanaan, disarankan agar letaknya mendekati lokasi-lokasi yang menjadi daerah/tanggungjawab pembinaannya, 3) Alokasi kawasan perkantoran swasta diarahkan pada Kawasan Jati.

d. Kawasan Industri

RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menjabarkan kategori industri di Kota Pariaman yaitu light industries (industri dengan tingkat polusi yang relatif rendah). Industri Kerajinan tangan tersebut dialokasikan ke arah jalan luar kota (arah utara Pariaman). Hal ini dengan mempertimbangkan pula lokasi pengembangan "Home Industry" yang diarahkan di Kecamatan Pariaman Utara tepatnya Kawasan Naras yang ditetapkan sebagai kawasan Sentra Bordir. Perkembangan Kota Pariaman dari tahun 2010-2017 untuk industri masih berada di Naras sangat signifikan. Sepanjang jalan utama sudah bermunculan toko, workshop industri, sentra bordir. Usaha bordir pariaman ini sudah sampai keluar negeri dan pameran di negara-negara eropa.

e. Kawasan Pariwisata

Objek wisata pantai dan bahari yang terdapat di Kota Pariaman tercakup : 1) Kawasan Pantai, 2) Gugus Pulau-Pulau, 3) Kawasan Bawah Laut, 4) Pesta Budaya Tabuik.

a. Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Non Hijau



Kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam RTRW Kota Pariaman 2010-2030 di jabarkan dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. Kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Pariaman letaknya menyebar di seluruh kota berupa lapangan olah raga (tennis, volley dan bulutangkis), lahan penjemuran padi maupun permukaan sungai. Pengamatan di lapangan saat ini Kota Pariaman telah memiliki taman bermain dan ruang hijau dalam jumlah kawasan yang belum memenuhi standar. Luas RTH yang ada saat ini 0,45 % dari Luas Kota Pariaman. Angka yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan instruksi pemerintah untuk pengembangan RTH sebesar 20 %.

b. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Penjabaran dari RTRW Kota Pariaman 2010-2030 terdapat 5 (lima) zona evakuasi di seluruh Kota Pariaman yang terletak di bagian timur Kota Pariaman. Dua zona masing-masing terdapat di Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Tengah (berdasarkan batas administrasi eksisting) serta satu zona evakuasi di Kecamatan Pariaman Selatan. Sebagai kawasan melting point adalah pada Kawasan GOR di Koto Marapak dan Hutan Kota di Sikapak Timur dengan penyediaan gudang logistik. Pengamatan di lapangan bahwa zona evakuasi di Kota Pariaman belum ada. Hutan Kota yang direncanakan masih dalam proses pembebasan lahan. Jadi kawasan ruang evakuasi bencana belum terealisasi di Kota Pariaman tahun 2017

c. Kawasan Pertanian

RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menjelaskan ruang untuk pengembangan budidaya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki sarana saluran irigasi teknis. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian daripada penataan landscap kota dalam upaya menjaga keseimbangan antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Pertanian perkotaan yang terletak di seluruh kecamatan. Pengamatan di lapangan menunjukkan kawasan pertanian masih tetap di pertahankan dan di kawasan jati saat ini sudah ada yang berubah fungsi, tapi sawah masih dijumpai. Luas pertanian memang menurun seiring kebutuhan orang terhadap lahan, tapi pemerintah konsisten untuk tetap mempertahankan kawasan pertanian di Kota Pariaman.

d. Pemanfaatan ruang Laut, Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pemanfaatan ruang Laut, Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan penjabaran RTRW Kota Pariaman 2010-2030 untuk pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah: 1) Wisata Bahari, 2) Kawasan Perikanan Tangkap, 3) Zona Konservasi.



e. Kawasan Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata alam dan budaya Kota Pariaman cukup banyak, tabel berikut ini menunjukkan jumlah objek wisata menurut kecamatan dan objek wisata budaya yang banyak juga terdapat di Kota Pariaman.

Berikut ini disampaikan rencana pola ruang berdasarkan pembagian kawasan lindung dan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.4**  
**Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030**

	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	%
A.	Kawasan Lindung	325	4,87 %
	- RTH Sempadan Pantai	124,7	1,87 %
	- RTH Jalur Hijau Sempadan Sungai	116,7	1,75 %
	- RTH Mangrove	36,4	0,54 %
	- RTH Jalur Hijau Rel Karet Api	30,5	0,46 %
	- RTH Jalur Hijau Jalan	16,7	0,25 %
B.	Kawasan Budidaya	3.494,5	52,37 %
	a. Kawasan Terbangun	3.381,0	50,68 %
	- Perumahan Eksisting	905,5	13,57 %
	- Perumahan Rencana *)	1.803,2	27,03 %
	- Perdagangan dan Jasa	520,1	7,80 %
	- Sarana Pelayanan Umum	121,8	1,83 %
	- Kawasan Pelayanan Kegiatan Perikanan dan Wisata	19,8	0,30 %
	- Area Industri	4,3	0,06 %
	- Sarana Pertahanan dan Keamanan	0,8	0,01 %
	- Kawasan Pelayanan Kegiatan Perikanan dan Wisata	19,8	0,30 %
	- Tempat Pembuangan Akhir Sampah	5,5	0,08 %
	b. Ruang Terbuka Hijau Budidaya	113,5	1,69 %
	- Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan	28,0	0,42 %
	- RTH Hutan Kota	11,6	0,17 %
	- RTH Jalur Sisi Sawah	25,9	0,39 %
	- RTH Kawasan Wisata Pada Area Sungai	31,7	0,47 %
	- RTH Taman Kota	4,3	0,06 %
	- RTH Pemakaman	12,0	0,18 %
	c. Kawasan Pertanian Kota	2.769,40	41,50 %
	- Pertanian Lahan Basah	1.410,6	21,14 %
	- Pertanian Lahan Kering	1.343,8	20,14 %
	- Pertanian Lahan Kering	1.343,8	20,14 %
	- Tambak/Kolam	15,0	0,22 %
	- Sungai	82,4	1,24 %
	<b>Total</b>	<b>6.671</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

Catatan : \*)

M - 353 | BAB VI - STRATEGI, ARAH KEHLIAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



- a. Kawasan terbangun untuk perumahan rencana seluas 1.803,2 Ha adalah lahan yang dicadangkan untuk dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.
- b. Sedangkan perkiraan luas lahan yang akan terbangun untuk perumahan 15.600 jiwa berdasarkan proyeksi penduduk pada jangka waktu perencanaan RTRW sekitar 138 Ha (7,7% dari lahan yang dicadangkan).
- c. Kawasan terbangun yang akan terisi berdasarkan kebutuhan proyeksi penduduk dengan demikian seluas 1.716,1 Ha (dihitung berdasarkan perkiraan lahan untuk perumahan rencana yang terealisasi diperkirakan hanya 138 Ha dari 1.803,2 Ha yang dialokasikan).
- d. Luas kawasan terbangun yang terisi sampai akhir tahun RTRW yaitu 1.716,1 Ha atau 25,7% dari luas wilayah daratan kota.

Proporsi luas RTH berfungsi lindung dan budidaya kalau dibandingkan dengan luas administratif kota hanya 6,56%. Tetapi Proporsi luas RTH dibandingkan dengan lahan terbangun perkotaan sesuai perkiraan penambahan penduduk 15.600 jiwa yaitu yaitu 2.097,8 Ha 20,9%.

**Tabel 6.5**  
**Proporsi Luas RTH Kota Pariaman Tahun 2010-2030**

1.	Luas Peruntukan Lahan Ruang Terbuka Hijau lindung (325 Ha) dan budaya (113,5 Ha)	438,5 (Ha)
2.	Proporsi luas RTH dibandingkan dengan wilayah administratif kota (6.671,1 Ha)	6,56 %
3.	Proporsi luas RTH dibandingkan dengan luas kawasan terbangun perkotaan yang terisi sampai akhir tahun RTRW Kota Pariaman (1.716,1 Ha)	20,35 %

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

Dengan asumsi luas kapling rumah rata-rata 250 m<sup>2</sup>/unit rumah dan proporsi luas kapling: luas prasarana dan sarana kawasan perumahan = 60% : 40% maka diperoleh luas kapling perumahan: 3.319 unit x 250 m<sup>2</sup>/unit = 829.750 m<sup>2</sup> atau 83 Ha dan luas sarana prasarana kawasan perumahan 55 Ha. Sehingga luas kawasan perumahan rencana yang akan terisi: 83 Ha + 55 Ha = 138 Ha.

#### A. Konsep Pengembangan Struktur Ruang Kota Pariaman

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan Kota Pariaman, maka dirumuskan konsep pengembangan struktur ruang kota yang dasar pemikirannya terutama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

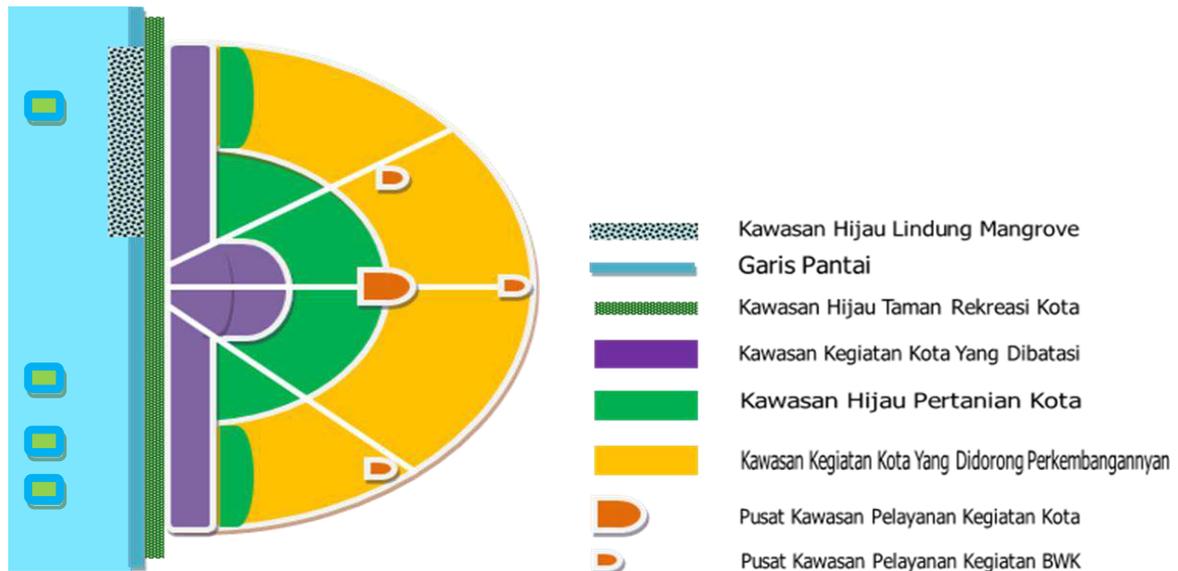
- 1) Dapat meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.
- 2) Mengoptimalkan sistem jaringan jalan dan pola ruang yang sudah ada dan sudah terbentuk.
- 3) Mengoptimalkan sumberdaya yang ada berupa sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah daratan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.



- 4) Menyiapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PALAPA).

Konsep pengembangan struktur ruang Kota Pariaman adalah seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar 6.1**  
**Konsep Struktur Ruang**



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

- Kawasan Hijau Lindung Mangrove yang difungsikan sebagai kawasan konservasi dan pencegah abrasi pantai.
- Kawasan wisata pesisir merupakan kawasan pengembangan wisata pantai dan perikanan. Pada kawasan ini dikembangkan berbagai objek dan daya tarik wisata pantai dan fasilitas kegiatan perikanan.
- Kawasan permukiman pusat kota dan pinggir pantai merupakan kawasan padat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan kota dan kawasan perumahan. Kawasan ini rawan terhadap bencana tsunami dan rawan terhadap likuifaksi tanah akibat gempa pada sebagian kawasan. Untuk itu diperlukan penanganan atau antisipasi bencana.
- Kawasan pertanian lahan basah Merupakan bagian dari kawasan rawan bencana sedang; termasuk dalam golongan kawasan kegiatan kota yang dibatasi perkembangannya dengan peruntukan khusus untuk kegiatan pertanian (khususnya lahan sawah). Juga berfungsi sebagai area pelepasan luapan tsunami yang mulai surut.



- e) Kawasan pengembangan permukiman Merupakan kawasan pengembangan permukiman yang didorong perkembangannya untuk menampung berbagai aktifitas yang dialihkan dari kawasan rawan bencana serta peningkatan dan pengembangan kegiatan di Kota Pariaman.

#### B. Rencana Sistem Pusat- Pusat Pelayanan

Sistem pelayanan perkotaan ini disusun berdasarkan kemudahan penduduk Kota Pariaman dalam mengakses fasilitas umum, sosial, dan perdagangan dengan juga mempertimbangkan pola pemanfaatan ruang serta struktur jaringan jalan. Dalam perencanaan sistem pelayanan lokal ditetapkan Kecamatan Pariaman Tengah sebagai Pusat Pelayanan Skala Kota. Kegiatan yang ada di pusat pelayanan kota ini adalah kegiatan perdagangan dan kegiatan wisata pantai. Untuk jangka waktu sampai tahun 2030, rencana sistem pelayanan harus mengikuti pola pertumbuhan dan perkembangan penduduk terutama dalam mengembangkan perumahan, kegiatan bekerja, dan pola pergerakannya, sehingga nantinya sub pusat pelayanan tersebut dapat sesuai dengan karakteristik penduduk kota yang ada. Pengembangan sistem pusat pelayanan di Kota Pariaman mempertimbangkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2017 yang menetapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari wilayah Painan-Solok-Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PASOPALAPA) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini berdampak kepada penyediaan fasilitas pelayanan dalam skala regional.

Pemantapan fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan yang telah terbentuk, melalui penyesuaian fungsi jaringan jalan dengan aktivitas yang dikembangkan. Dimana pusat-pusat pelayanan ini selain memperhatikan sistem prasarana utama dan prasarana lainnya juga sangat memperhatikan aspek bencana alam. Pembentukan pusat pelayanan baru pada setiap bagian wilayah kota. Rencana sistem pusat-pusat pelayanan di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Pusat Pelayanan Kota di kawasan pusat perdagangan kota. Kawasan perdagangan pusat kota perlu ditingkatkan fungsi dan pelayanannya dengan menata kawasan dengan mewujudkan pedestrianisasi dan mewujudkan sistem terminal terpadu antara angkutan umum, rel, dan angkutan wisata.
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota, merupakan pusat pelayanan dalam lingkup kecamatan atau antar kecamatan. Terdapat empat sub pusat pelayanan lingkungan yang akan dikembangkan. Pusat tersebut dikembangkan pada empat pasar di Kota Pariaman yaitu Pasar rakyat Kurai Taji di Kec. Pariaman Selatan, Pasar Balai Nareh di Kec. Pariaman Utara, Pasar Nagari Cubadak Air di Kec. Pariaman Utara, dan Pasar Cubadak Mentawai di Kec. Pariaman Timur.
- 3) Pusat Lingkungan untuk pelayanan skala lingkungan di Kota Pariaman berada pada setiap pusat pelayanan kelurahan dan desa. Pusat lingkungan berfungsi untuk penempatan fasilitas pelayanan



masyarakat tingkat lingkungan kelurahan dan desa. Fasilitas tersebut seperti pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan non formal masyarakat, fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau serta pelayanan administrasi masyarakat. Idealnya fasilitas tersebut menyatu dalam satu kawasan. Akan tetapi dengan banyaknya hambatan pengadaan lahan maka pengadaan fasilitas kenyataannya tidak selalu semuanya memusat di suatu tempat. Meskipun demikian konsep pemusatan ini perlu diupayakan sebisa mungkin untuk diwujudkan.

- 4) Kawasan Pasar Khusus Jati difungsikan sebagai tempat fasilitas pendukung fungsi utama Kota Pariaman sebagai kota pariwisata dan perdagangan dan jasa. Berbagai kemungkinan fungsi kepariwisataan seperti pasar khusus wisata atau sarana perdagangan untuk komoditi khusus yang menarik pembeli dari luar kota bisa dikembangkan disini.
- 5) Kawasan Pusat kegiatan olahraga dan kemasyarakatan yang terdapat di pinggir jalan arteri primer direncanakan bukan hanya sebagai pusat kegiatan olah raga bagi penduduk kota dan wilayah sekitarnya tetapi juga potensial sebagai pusat berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti sarana balai pertemuan, gelanggang pemuda, perpustakaan daerah dan lain-lainnya.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) direncanakan di Muara Sunur. Pada PPI terdapat juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

#### **6.4 Strategi Dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial**

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023. Fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJPD yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Pariaman. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
5. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.



Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan provinsi harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kota Pariaman yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing. Tujuan penataan ruang Kota Pariaman dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi:

1. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah, antar kawasan dan antar sektor pembangunan.
3. Menciptakan keterpaduan program-program pembangunan wilayah.
4. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kota Pariaman.

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. .

Selanjutnya dalam perumusan rencana pembangunan, penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2019-2023 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan penatan ruang Kota Pariaman.

## 6.5 Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Pariaman meliputi:



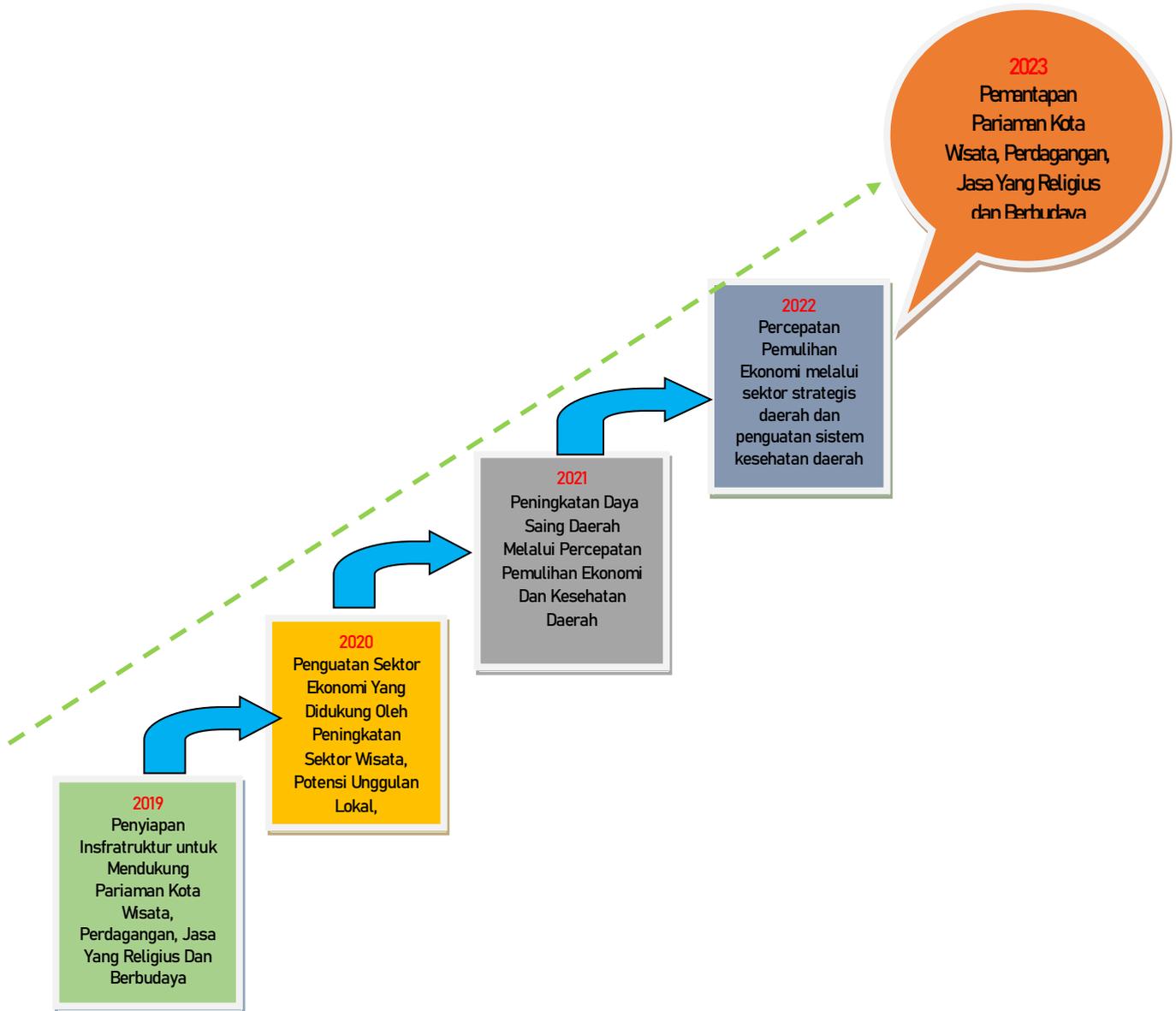
Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan. Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 7 (Tujuh) prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan serta daya saing SDM
2. Penguatan sistem kesehatan daerah dalam meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City
4. Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata yang terpadu dengan pengembangan Ekonomi Yang Berbasis lokal
5. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Dukung Pariwisata yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana
6. Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
7. Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, yaitu **“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pariaman, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2018-2023) disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini



Gambar 6.2  
Agenda/Tema Pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023



### Penyelarasan RPJMN Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, maka dokumen RPJMN Tahun 2019-2024 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 10 (sepuluh) prioritas, telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan.



#### Agenda Pembangunan RPJMN 2019-2024 :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat secara nasional, selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, mental dan karakter. Sedangkan untuk perumahan dan pemukiman selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada prioritas pembangunan infrastruktur.

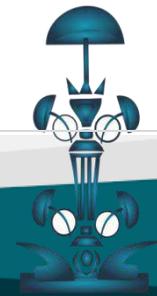
Prioritas pada dimensi pembangunan sektor unggulan nasional, juga selaras dan menjadi prioritas pembangunan daerah karena merupakan potensi unggulan daerah yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang terkait dengan kedaulatan pangan, pengembangan energi, pengembangan kemaritiman dan kelautan, serta pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.

Prioritas pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang terkait dengan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah secara nasional, selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengentaskan daerah tertinggal, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Selanjutnya keselarasan antara prioritas berdasarkan dimensi pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel 6.3 dibawah ini :



**Tabel 6.6**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Pariaman**

NO	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	NO	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	NO	Prioritas Pembangunan Kota Pariaman
1	Dimensi Pembangunan Manusia terdiri dari : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental /Karakter	1	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat, Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan serta daya saing SDM, Penguatan sistem kesehatan daerah dalam meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City
2	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari : a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan d. Pariwisata dan Industri.	2	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis, Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur, Pengembangan kemaritiman dan kelautan, Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi, Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	2	Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata yang terpadu dengan pengembangan Ekonomi Yang Berbasis local, Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Dukung Pariwisata yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana, dan Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19
3	Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari : a. Antar Kelompok Pendapatan b. Antar Wilayah, Desa, pembangunan luar jawa dan kawasan timur.	3	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal	3	Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



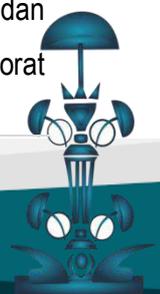
Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 1) 24 urusan wajib (6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), 2) 5 urusan pilihan, dari total 8 urusan pilihan, 3) 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 4) 5 unsur penunjang urusan pemerintahan dari total 7 unsur penunjang urusan pemerintahan, 5) 1 unsur pengawasan, 6) 1 unsur kewilayahan, dan 7) 1 urusan pemerintahan umum (Kesatuan bangsa dan politik).

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip.

Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Dua unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi : unsur Sekretariat Daerah dan unsur Sekretariat DPRD. Sedangkan lima unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi : unsur perencanaan, unsur keuangan, unsur kepegawaian, unsur pendidikan dan pelatihan, unsur penelitian dan pengembangan. Sementara itu untuk satu unsur pengawasan urusan pemerintahan adalah Inspektorat



daerah. Dan satu unsur kewilayahan adalah kecamatan. Serta satu urusan pemerintahan umum adalah kesatuan bangsa dan politik.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama dengan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan outcome selain output pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggung jawab.

## **6.6 Program Unggulan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023**

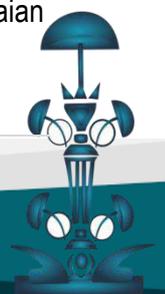
Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kota Pariaman juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Berikut ini diuraikan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pariaman Tahun 2018-2023.



## PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH

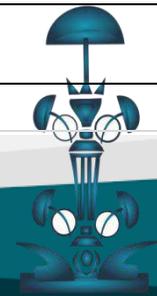
1.	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
2.	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
3.	Kartu Pariaman Pintar
4.	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
5.	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
6.	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
7.	Lanjutkan Pembangunan Mesjid Terapung Pariaman
8.	Lanjutkan Pembangunan GOR
9.	Pembangunan Youth Centre
10.	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
11.	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)
12.	Program Pariaman Sejahtera
13.	Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM
14.	Pengembangan jalan sisi timur pariaman.
15.	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
16.	Pengembangan <i>water front city</i>
17.	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
18.	Revitalisasi PKK
19.	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 terkait pencapaian program unggulan dapat disampaikan sebagai berikut :

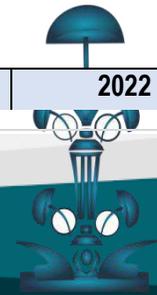


**Tabel 6.7**  
**Hasil evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023**  
**Fokus terhadap Program Unggulan**

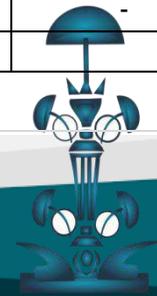
Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"								
<b>NO</b>	Misi 1	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatera;						
	Misi 2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;						
	Misi 3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;						
	Misi 4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;						
	Misi 5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal						
<b>19 (Sembilan Belas) Program Unggulan</b>								
<b>1</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Lanjutkan Program Kesehatan Gratis</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Persentase Masyarakat Miskin Kota Pariaman yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	85 %					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 %					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Realisasi	:	90 %	100 %	100 %	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
<b>2</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Lanjutkan Program Pendidikan Gratis</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Persentase Siswa SD dan SMP yang memperoleh pendidikan gratis					
	Kondisi Kinerja Awal	:	100 %					



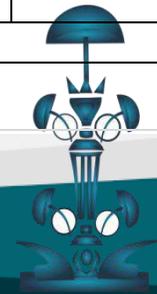
	(2018)							
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 %					
	<b>Uraian</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Realisasi	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
<b>3</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Lanjutkan Program Bis Sekolah Gratis</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Jumlah Bus Sekolah Gratis Yang Melayani antar jemput Siswa					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	9 Unit Bus					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	12 Unit Bus					
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	9 unit	10 unit	11 unit	12 unit	12 unit	
	Realisasi	:	9 unit	10 unit	11 unit	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
<b>4</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Program Magrib Mengaji dan Manunggal Subuh Indah Penuh Berkah (MASIH PUBER)</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Magrib Mengaji dan Manunggal Subuh Indah Penuh Berkah (MASIH PUBER)					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	100 %					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 %					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>



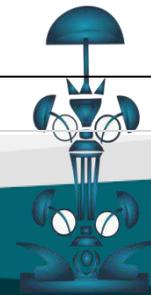
	Target	:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Realisasi	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
<b>5</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Pembangunan Mesjid Terapung dan GOR</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	1 ) Terbangunnya Mesjid Terapung					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	14,5 %					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 % atau 1 Unit					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	25 %	40 %	60 %	70 %	80 %	
	Realisasi	:	8 %	0 %	0 %	-	-	
	Capaian	:	32 %	0 %	0 %	-	-	
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	2) Jumlah GOR Kota Pariaman Yang di Tingkatkan atau di Rehab					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	3 Unit					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	3 Unit					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
	Realisasi	:	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
<b>6</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Kartu Pariaman Printar (KPP)</b>					



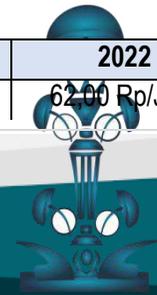
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Persentase Siswa SD dan SMP Miskin dan berprestasi yang menerima beasiswa dari program Kartu Pariaman Pintar (KPP) diluar Kartu Indonesia Pintar (KIP)					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	0 %					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 %					
	<b>Uraian</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	-	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Realisasi	:	-	100 %	100 %	-	-	
	Capaian	:	-	100 %	100 %	-	-	
<b>7</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Program Satu Keluarga Satu Sarjana</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Beasiswa Saga-Saja					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	10					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	400 orang					
	<b>Uraian</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	34 orang	60 orang	100 orang	100 orang	106 orang	
	Realisasi	:	36 orang	66 orang	100 Orang	-	-	
	Capaian	:	105 %	110 %	100 %	-	-	
<b>8</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Pembangunan Youth Centre</b>					
	Indikator Kinerja Program	:	Terbangunnya Youth Centre					



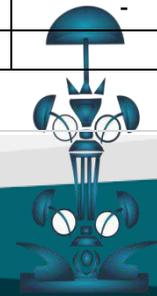
	Unggulan							
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	0 %					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 %					
	<b>Uraian</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	30 %	50 %	70 %	80 %	100 %	
	Realisasi	:	20 %	35 %	50 %	-	-	
	Capaian	:	66,66 %	70 %	71,42 %	-	-	
9	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Terbentuknya Sekretariat Pusat Pendidikan Alquran (Islamic Centre)					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	Terbentuknya 1 (satu) Posko Sekretariat Pusat Pendidikan Al-Quran					
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Target	:	-	1 Posko	1 Posko	1 Posko	1 Posko	
	Realisasi	:	-	-	1 Posko	-	-	
	Capaian	:	-	0 %	100 %	-	-	
10	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Pengembangan Pendidikan Agama Non Formal MDA, MDW dan MDU</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Terlaksananya program Pengembangan Pendidikan Agama Non Formal MDA, MDW dan MDU di seluruh Desa/Kelurahan					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					
	Target Akhir Periode	:	55 Desa dan 22 Kelurahan					



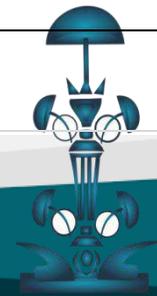
RPJMD (Tahun 2023)		2019	2020	2021	2022	2023	Ket
<b>Uraian</b>							
Target	:	55 Desa dan 22 Kelurahan	55 Desa dan 22 Kelurahan	55 Desa dan 22 Kelurahan	55 Desa dan 22 Kelurahan	55 Desa dan 22 Kelurahan	
Realisasi	:	-	30 Desa dan 15 Kelurahan	55 Desa dan 22 Kelurahan	-	-	
Capaian	:	0 %	61 %	100 %	-	-	
<b>11 Program Unggulan</b>	:	<b>Program Pariaman Sejahtera</b>					
Indikator Kinerja Program Unggulan	:	1. Tingkat Kemiskinan					
Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	5,3 %					
Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	3,50 %					
<b>Uraian</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
Target	:	4,80 %	4,50 %	3,80 %	3,40 %	3,50 %	
Realisasi	:	4,76 %	4,10	4,38 %	-	-	
Capaian	:	100,84 %	109,75 %	86,75 %	-	-	
Indikator Kinerja Program Unggulan	:	2. Pendapatan Perkapita					
Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	50,40 Rp/Juta					
Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	65,80 Rp/Juta					
<b>Uraian</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
Target	:	53,05 Rp/Juta	56,15 Rp/Juta	59,10 Rp/Juta	62,00 Rp/Juta	65,80 Rp/Juta	



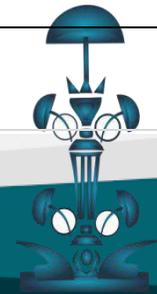
	Realisasi	:	53,69 Rp/Juta	55,86 Rp/Juta	55,18 Rp/Juta	-	-	
	Capaian	:	100 %	99,48 %	93,37 %	-	-	
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	3. Indeks Gini					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	0,316					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	0,280					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	0,285	0,265	0,300	0,290	0,280	
	Realisasi	:	0,300	0,310	0,301	-	-	
	Capaian	:	95 %	85,48 %	99,66 %	-	-	
<b>12</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Dengan Usaha Mikro</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Jumlah Kawasan Wisata Terpadu dengan Usaha Mikro					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	7 Kawasan (1). Pantai Gandorih, (2). Pantai Cermin, (3). Pantai Kata, (4). Pantai Sunur, (5) Talao Pauh, (6). Pantai Binasi, (7). Pantai Karan dan (8) Pantai Apar					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	7 Kawasan	8 Kawasan	
	Realisasi	:	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
<b>13</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Pengembangan Jalan Sisi Timur Pariaman</b>					



	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Panjang Jalan Sisi Timur Pariaman yang dibangun					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	15 km					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	5 km	9 km	12 km	14 km	15 km	
	Realisasi	:	5 km	8 km	10 km	-	-	
	Capaian	:	100 %	88,88 %	83,33 %	-	-	
		:						
14	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Kesejahteraan Guru Honor PAUD, TK, SD, SMP</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Persentase PTK Honorer PAUD dan PTK SD/SMP yang menerima Insentif					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 %					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Realisasi	:	50 %	100 %	100 %	-	-	
	Capaian	:	50 %	100 %	100 %	-	-	
		:						
15	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Pengembangan Water Front City</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Jumlah Kawasan Water Front City yang dibangun					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					



	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	5 Kawasan (Kawasan Batang Piaman, Kawasan Air Pampan, Kawasan Talao Pauh, Kawasan Batang Mangor dan Kawasan Padang Birik-birik)					
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Target	:	1 Kawasan (Batang Piaman)	1 Kawasan (Talao Pauh)	1 Kawasan (Batang Mangor)	1 Kawasan (Batang Air Pampan)	1 Kawasan (Talao Padang Birik-Birik)	
	Realisasi	:	50 %	100 %	100 %	-	-	
	Capaian	:	50 %	100 %	100 %	-	-	
<b>16</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Kesempatan Kerja Untuk Keluarga Miskin</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Jumlah Keluarga Miskin yang Bekerja					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	5,72 %					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	4,80 %					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	5,47 %	5,10 %	5,43 %	5,10 %	4,80 %	
	Realisasi	:	5,42 %	5,76 %	6,09 %	-	-	
	Capaian	:	100,9 %	88,54 %	89,16 %	-	-	
<b>17</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Revitalisasi PKK</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Persentase PKK Desa/Kelurahan Yang Aktif					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	85 %					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	100 %					



	Uraian	:	2019	2020	2021	2022	2023	Ket
	Target	:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Realisasi	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	100 %	-	-	
<b>18</b>	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Reformasi birokrasi</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	1. Indeks RB					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	65 (B)					
	Uraian	:	2019	2020	2021	2022	2023	Ket
	Target	:	53,55 (CC)	55,60 (CC)	58,80 (CC)	60,01 (B)	65,50 (B)	
	Realisasi	:	51,52 (CC)	53,25 (CC)	58,19 (CC)	-	-	
	Capaian	:	96,20 %	95,77 %	98,96 %	-	-	
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	2. Nilai Sakip					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	53,22 (CC)					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	70,05 (BB)					
	Uraian	:	2019	2020	2021	2022	2023	Ket
	Target	:	56,70 (CC)	58,50 (CC)	60,15 (B)	65,20 (B)	70,05 (BB)	
	Realisasi	:	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,06 (B)	-	-	
	Capaian	:	99,03 %	96,58 %	99,85 %	-	-	



19	<b>Program Unggulan</b>	:	<b>Revitalisasi Pasar</b>					
	Indikator Kinerja Program Unggulan	:	Jumlah pasar yang direvitalisasi					
	Kondisi Kinerja Awal (2018)	:	-					
	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	:	2 Pasar (Pasar Pariaman dan Los Lambung Pasar Kurai Taji)					
	<b>Uraian</b>	:	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ket</b>
	Target	:	1 Unit (Los Lambung Kurai Taji)	1 unit (Pasar Pariaman)	-	-	-	
	Realisasi	:	100 %	100 %	-	-	-	
	Capaian	:	100 %	100 %	-	-	-	





## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**



**BAB VII****KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada tabel berikut ini.





**Tabel 7.1**  
**Perubahan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2023**  
**Pemerintah Kota Pariaman**





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>A URUSAN WAJIB</b>																		
<b>I URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>1 Urusan Pendidikan</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	78,45	82,5	2.237.656.500	84,15	1.943.924.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	125.820.000	87	353.461.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	6	6	20.000.000	6	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	17.000.000	BB	19.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai						100,00	121.592.181.224	100,00	143.091.659.955	100,00	115.494.201.259	100,00	380.178.042.438		Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100,00		100		100		100			
6	Program pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi PAUD	%	69,50	70,0	1.209.512.500	71,1	3.502.619.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD Berakreditasi A	%	20	25	15.916.527.500	30	20.503.904.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Persentase SMP Berakreditasi A	%	25	30		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nilai rata-rata ujian nasional SD	Nilai	7,2	7,25		7,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nilai rata-rata ujian nasional SMP	Angka	5,60	5,70		5,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka kelulusan	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90,10	92,30		95,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100,79	100,86		100,95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	88,90	90,50		100,05		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	132,41	132,50		132,60		-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga PAUD yang siap Terakreditasi	Sekolah	1	2	886.427.000	4	1.912.196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Jumlah MDA yang Dikelola dan dibentuk oleh Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	5	15		25		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Anak SMP yang bisa Baca Alquran dan menanamkan nilai keagamaan	%	40	50		55		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Yang melaksanakan Ekstrakurkuler Ke Agamaan (Minggu, Bulan, Triwulan)	Sekolah	1	4		8		-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan	%	85,20	86,10	347.660.000	86,25	1.955.956.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Ujian akhir	Sekolah	105	105	548.332.000	105	2.963.137.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		<i>Persentase Siswa Miskin Yang Menerima Kartu Pariaman Pintar</i>	%	NA	5		15		-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Persentase KK Miskin Yang Mendapatkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana</i>	%	NA	5		15		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP	%		-	-	-	-	87,00	31.123.000.228	90,00	26.627.886.746	90,00	31.852.710.832	90,00	89.603.597.806	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Rata-rata Nilai Mid Semester	%		-	-	-	-	8,80		7,75		7,75		7,75		
		Rata-rata persentase pencapaian KKM SD pada Satuan Pendidikan	%		-	-	-	-	6,10		94,00		94,00		94,00		
		Rata-rata persentase pencapaian KKM SMP pada Satuan Pendidikan	%		-	-	-	-	6,01		6,10		6,10		6,10		
		Rata-Rata Nilai Semester	%		-	-	-	-	8,80		8,80		8,80		8,80		
		Persentase satuan PAUD yang memiliki sapras sesuai SNP	%		-	-	-	-	67,00		70,00		70,00		70,00		
		Persentase satuan Pendidikan yang pengelolannya berkategori baik	%		-	-	-	-	77,00		80,00		80,00		80,00		







NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat	%	85	87	1.066.272.000	88	336.507.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Klinik dan Rumah Praktek Yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	60	65	72.513.000	70	9.248.632.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Fasyankes yang melaksanakan program UKM dan UKP sesuai standar	KH	248/100.000 KH	-	175/100.000 KH	-	175/100.000 KH	20.370.554.990	116/100.000 KH	35.197.450.598	102/100.000 KH	68.155.160.997	102/100.000 KH	123.723.166.585	Dinkes	
		<b>Persentase Masyarakat Miskin Kota Pariaman yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis</b>	%	85	90		99	99,25		100		100		100			
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Kantin Sekolah, dan Restoran yang terjamin steril makanannya	%	65	70	21.972.100	72	64.553.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
3	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase peningkatan pengelolaan obat sesuai standar	%	-	-	-	-	100	137.687.000	100	330.142.000	100	330.142.000	100	797.971.000	Dinkes	
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan	%	-	-	-	-	100		100		100		100			
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	%	60	62	154.185.500	64	160.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
		Jumlah kader posyandu yang dibina dan difasilitasi	orang	218	218	336.600.000	218	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase PHBS rumah tangga	%	39,85	-	40,45	-	47,6	155.630.000	48,4	799.314.750	50	696.922.000	50	1.651.866.750	Dinkes	
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Presentase Penanganan Gizi Masyarakat	%	100	100	276.602.000	100	1.238.708.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Masyarakat Yang Memiliki Jamban Sehat	%	60	62	279.357.850	64	228.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Presentase Penyakit Menular Yang Ditangani	%	100	100	418.516.700	100	380.955.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Akreditasi Puskesmas	Puskesmas	4	5	730.550.000	6	5.547.533.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
14	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar	%	70	72	6.030.856.000	75	6.091.164.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	<i>Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan</i>	%	75	80	4.676.972.800	95	6.615.354.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
		<i>Persentase penduduk yang mempunyai JKN</i>	%	65	70		75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	%	100	100	116.824.000	100	67.242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	134.590.000	100	67.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	%	100	100	440.409.000	100	453.621.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penyakit Tidak Menular Yang Ditangani	%	100	100	736.796.900	100	758.900.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
						<b>17.421.971.000</b>		<b>33.701.552.100</b>		<b>66.160.396.540</b>		<b>82.363.599.547</b>		<b>124.500.716.920</b>				
<b>3 Urusan Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.782.185.000	84,15	1.716.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	3.325.290.500	87	5.748.075.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase Kondisi Gedung Kantor Pemko Dalam Kondisi Baik	%	80,10	80,25		80,40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	16.800.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	20.200.000	BB	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	%	-	-	-	-	85	11.372.557.960	85	14.879.198.840	87	10.756.594.601	87	37.008.351.401		Dinas PUPR & Pertanahan
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	%	-	-	-	-	BB		BB		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%	-	-	-	-	85		90		90		90			
6	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	41,30	55,60	25.032.739.500	60,40	37.549.109.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase Perluasan Jalan Sisi Timur Kota Pariaman	%	10,20	20,20		30,15		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Pengembangan Permukiman	Penurunan luas pemukiman kumuh	%	-	-	-	-	42	2.973.761.000	45	525.225.000	45	150.000.000	45	3.648.986.000		Dinas PUPR & Pertanahan
7	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	64	66	9.793.697.500	69	13.201.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
3	Program Penyelenggaraan Jalan	% Panjang jalan kota dalam kondisi mantap	%	-	-	-	-	69	16.622.626.216	73	37.948.060.040	77	7.351.660.500	81	61.922.346.756		Dinas PUPR & Pertanahan
		Panjang Jalan Sisi Timur Pariaman yang dibangun	Km	-	5		8	10		14		15					
8	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan Kota yang memiliki drainase	%	40,10	42,18	1.253.907.250	44,50	2.929.287.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	% panjang drainase kota dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	46,95	4.655.006.275	48,4	194.094.000	50,1	950.000.000	50,1	5.799.100.275		Dinas PUPR & Pertanahan
9	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase irigasi dengan kondisi baik	%	70,10	72,45	12.800.028.000	74,66	11.120.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	% panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	74,66	5.591.400.000	76,6	5.113.182.389	78,2	6.300.000.000	80,1	17.004.582.389		Dinas PUPR & Pertanahan
		Jumlah Kawasan Water Front City yang dibangun	Kawasan	-	1		2	3		4		5		5			
10	Program Pengendalian Banjir	Persentase Sungai Yang Dipelihara	%	55,60	58,45	395.000.000	60,10	412.023.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perda RTRW	ada/tidak	ada	ada	507.560.000	ada	488.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Jumlah Perda RDTR	ada/tidak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan	
12	Program Pemanfaatan Ruang	Presentase Tertatanya Kawasan Pusat Kota	%	50,15	52,25	1.170.160.000	56,44	1.181.861.600	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan	
		Prosentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	%	92,10	93,40		94,15		-	-	-	-	-	-	-		
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah destinasi pariwisata yang dibangun	Destinasi	4	3	-	3	-	2	299.859.000	1	1.295.173.560	2	1.214.544.000	11	2.809.576.560	Dinas PUPR & Pertanahan
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase RTH Publik (City In The Garden)	%	5	7	101.000.000	8	199.600.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	% Jumlah Dokumen Rencana dan Regulasi Tata Ruang yang valid dan akurat	ada/tidak	ada	-	-	ada	-	-	553.720.000	-	208.372.000	-	1.442.483.000	-	2.204.575.000	Dinas PUPR & Pertanahan
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah sarana gedung olah raga yang direhab/ditingkatkan	Unit	-	-	-	-	-	3	21.756.235.762	3	14.847.150.000	2	44.743.920.000	2	81.347.305.762	Dinas PUPR & Pertanahan
		Terbangunnya Mesjid Terapung	Unit	14,5 %			24,5 %		24,5 %			60 %		70 %		80 %	
		Terbangunnya Youth Centre	Unit	-	30 %		50 %		70 %			80 %		100 %		100 %	
14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah SDM OPD terkait Yang Memiliki Keahlian Kontruksi	OPD	5	-	-	15	337.962.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
9	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Jumlah SDM Penyelenggara Jasa Konstruksi yang Kompeten	Orang	-	-	-	-	-	1	500.000.000	3	75.567.750	3	500.000.000	3	1.075.567.750	Dinas PUPR & Pertanahan
15	Program Pengembangan Water Front City Kota Pariaman	Jumlah Pengembangan Sungai menjadi Water Front City Di Kota Pariaman	Kawasan	0	1	15.600.500.000	2	20.280.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	%	-	-	-	-	-	98,18	2.823.541.000	98,18	4.431.332.500	98,18	4.431.332.500	98,18	11.686.206.000	Dinas PUPR & Pertanahan, Dinas Perkim, Perum & LH
11	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	%	-	-	-	-	-	99,25	1.346.706.500	100	2.686.977.900	100	1.090.000.000	100	5.123.684.400	Dinas PUPR & Pertanahan, Dinas Perkim, Perum & LH
<b>Jumlah</b>																	
						71.799.067.750		95.199.989.800		68.495.413.713		82.204.333.979		78.930.534.601		229.630.282.293	
<b>4 Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	2.036.894.300	84,15	1.868.066.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun													
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode							
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp					
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	268.817.275	87	467.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH					
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	25.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH					
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	24.504.000	BB	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	-	87	8.484.033.932	87	7.837.137.365	87	7.424.797.064	87	23.745.968.361	Dinas Perkim, Perum & LH					
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		A		A							
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100							
6	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	NA	78	387.387.600	79	388.378.100	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH					
2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	unit	750	220	-	227	-	200	157.796.000	200	54.387.500	150	45.000.000	1377	257.183.500	Dinas Perkim, Perum & LH					
3	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di perkotaan dan pedesaan	%	-	-	-	-	-	96,97	236.257.000	96,97	5.898.487.000	96,97	1.465.564.000	96,97	7.600.308.000	Dinas Perkim, Perum & LH					
7	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Persentase rumah bersanitasi layak	%	78,9	80,25	22.566.285.000	82,45	20.870.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH					
		Persentase permukiman yang tertata	%	20	25		30		-	-	-	-	-	-	-	-						
		Persentase Penurunan luas permukiman kumuh	%	2,3	25		2,1		-	-	-	-	-	-	-	-						
		Indeks Infrastuktur Pedesaan	Nilai	NA	35,4		37,25		-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>Jumlah</b>							<b>25.308.888.175</b>			<b>23.629.409.800</b>			<b>8.878.086.932</b>			<b>13.790.011.865</b>			<b>8.935.361.064</b>			<b>31.603.459.861</b>
<b>5</b>	<b>Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>																					
<b>a</b>	<b>Satpol PP</b>																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP					





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	87	8.930.694.969	90	3.352.305.773	90	10.047.705.765	90	22.330.706.507		Sat Pol PP
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	70	75	2.475.934.500	78	2.550.212.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda 1	%	-	-	-	-	100	6.188.412.000	100	3.468.132.560	100	4.636.107.700	100	14.292.652.260		Sat Pol PP
		Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan	%	-	-	-	-	100		100		100		100			
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	%	-	-	-	-	100		100		100		100			
7	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan perlindungan masyarakat	%	56,60	58,25	1.039.967.250	60,10	1.071.166.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP
8	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Monitoring kantrantibmas Yang Dilaksanakan	Kali	24	24	413.226.000	24	551.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
9	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Dokumen Data Pekat Masyarakat Yang Disediakan	Dok	1	1	157.760.000	1	185.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
10	Program Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Sat Pol PP	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	65	70	450.000.000	75	463.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	100	100	649.200.000	100	668.676.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sat Pol PP
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	-	-	-	-	100	2.010.500.000	100	1.568.050.056	100	1.760.500.000	100	5.339.050.056	Sat Pol PP	
<b>Jumlah</b>						<b>6.784.038.250</b>		<b>7.135.601.500</b>		<b>17.129.606.969</b>		<b>8.388.488.389</b>		<b>16.444.313.465</b>		<b>41.962.408.823</b>	
<b>b Penanggulangan Bencana Daerah</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	715.596.000	84,15	732.447.500	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	176.587.000	87	1.048.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	15.250.300	B	15.707.700	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	87,00	4.176.624.309	89,00	3.352.305.773	89,00	4.176.624.309	89,00	11.705.554.391	BPBD	
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai					B		BB		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	122,20	122,45	2.144.241.700	122,60	2.552.252.800	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	30	34		38		-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program Penyediaan Sarana Evakuasi Kebencanaan	Jumlah Shelter Yang dibangun	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU PR
2	Program penanggulangan bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	-	-	-	-	74,47	3.000.898.000	100,00	1.504.060.000	100,00	3.000.898.000	100,00	7.505.856.000	BPBD	
		Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	-	-	-	-	100		100		100		100			





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase warga Kota Pariaman yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	%		-	-	-	-	100		100		100		100			
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	%		-	-	-	-	100		100		100		100			
<b>Jumlah</b>						<b>3.071.675.000</b>		<b>4.368.678.000</b>										
<b>6 Urusan Sosial</b>																		
<b>Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	90	3.610.593.329	91	4.556.669.882	91	3.476.900.602	91	11.644.163.813			Dinas Sosial
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat						BB		BB		A		A				
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan						100		100		100		100				
6	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	70	72	639.640.000	74	658.829.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
2	Program Rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang tertangani oleh PSKS	%	-	-	-	-	99,9	295.500.000	100	84.350.000	100	135.000.000	100	514.850.000			Dinas Sosial
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani oleh PSKS	%	100	100	315.680.000	100	325.150.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	%	-	-	-	-	100	207.000.000	100	674.466.800	100	803.730.388	100	1.685.197.188			Dinas Sosial





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
8	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT, dan PPKS Lainnya Yang di Berdayakan	%	0,00	15	409.507.000	25	421.792.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
4	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan keses 1 )	%		-	-	-	-	65	608.900.000	70	393.930.044	70	430.280.000	70	1.433.110.044	Dinas Sosial
9	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	%	0	1	525.450.000	1	541.213.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
10	Program Penanganan PPKS	Persentasi Penurunan Angka PPKS	%	45	50	-	55	1.325.779.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
11	Program Penguatan PSKS	Persentase Persentase KK sangat miskin mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial melalui PKH dan bentuk lainnya	%	39	40	-	42	895.205.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	%		-	-	-	-	0	100	32.141.446	100	31.140.000	100	63.281.446	Dinas Sosial	
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tetangani	%		-	-	-	-	0	100	85.198.000	100	153.000.000	100	238.198.000	Dinas Sosial	
<b>Jumlah</b>						<b>3.488.227.500</b>	<b>5.813.258.800</b>	<b>4.721.993.329</b>	<b>5.826.756.172</b>	<b>5.030.050.990</b>	<b>15.578.800.491</b>						
<b>II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>1. Urusan Tenaga Kerja</b>																	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	%	25,20	35,20	275.702.000	43,70	530.207.500	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP & Naker
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang bersertifikasi Keahlian	Orang		-	-	-	-	25	276.167.460	50	79.409.500	50	73.450.000	50	429.026.960	DPMPTSP & Naker
		Jumlah Tenaga Kerja Yang Mandiri	Orang		-	-	-	-	45		75		75		75		
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	%	0	10	6.721.000	11	13.837.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP & Naker
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mengakses/Memanfaatkan Informasi pasar kerja yang di publikasikan	Orang		-	-	-	-	239	11.475.500	261	35.000.000	261	65.250.000	261	111.725.500	DPMPTSP & Naker
		Jumlah lembaga penerima kerja yang bekerja sama															
		<b>Angka Kemiskinan</b>	%	5,72	5,42		5,76		6,09		5,10		4,8		4,8		





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
3	Program Perlindungan, Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Industrial Yang Di Fasilitas	%	100	100	19.820.000	100	10.351.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPPTSP & Naker
<b>Jumlah</b>						<b>302.243.000</b>		<b>554.396.000</b>		<b>287.642.960</b>		<b>114.409.500</b>		<b>138.700.000</b>		<b>540.752.460</b>		
<b>2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	%	-	-	-	-	90	3.831.346.486	90,5	3.816.028.348	90,5	3.211.858.687	90,5	10.859.233.521			DP3AKB
		Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	-	-	-	-	80		80		80		80				
		Persentase ASN berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	%	-	-	-	-	100		100		100		100				
		Persentase kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian	%	-	-	-	-	89		89		89		89				
		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	-	-	-	-	BB		BB		A		A				
		Persentase sasaran program kegiatan renja perangkat daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	90		90		90		90				
		Persentase pelaksanaan program dan kegiatan APBD bebas temuan	%	-	-	-	-	90		90		90		90				
6	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	%	80	86	579.333.600	88	596.713.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	0	20		30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%		-	-	-	-	0,055	150.000.000	0,04	36.193.750	0,04	125.000.000	0,04	311.193.750	DP3AKB
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%		-	-	-	-	100		100		100		100		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	buah		-	-	-	-	10	130.000.000	11	490.730.000	12	80.000.000	13	700.730.000	DP3AKB
4	Program Penuh Hak Anak	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	Buah		-	-	-	-	720	80.000.000	850	46.165.000	850	40.000.000	850	166.165.000	DP3AKB
		Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat	Lembaga		-	-	-	-	11		12		13		13	-	
7	Program peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	%	51,34	52	275.400.000	53	283.662.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif	%		-	-	-	-	5	217.550.000	5	121.491.000	5	135.000.000	5	474.041.000	DP3AKB
		Jumlah kelembagaan PUG	Lembaga		-	-	-	-	12		12		12		12		
		Persentase program dan kegiatan yang diPPRG-kan	%		-	-	-	-	15		17		17		17		
		Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan	%		-	-	-	-	60		65		70		70		
<b>Jumlah</b>						<b>2.452.684.100</b>		<b>2.525.664.400</b>		<b>4.408.896.486</b>		<b>4.510.608.098</b>		<b>3.591.858.687</b>		<b>12.511.363.271</b>	
<b>3 Urusan Pangan</b>																	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Skor PPH	%	88,8	89,4	1.285.247.200	90,0	1.199.763.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	% AKE (Angka Kecukupan Energi)	%		-	-	-	-	40	100.000.000	50	645.405.090	50	100.000.000	50	845.405.090	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
2	Program penanganan Kerawanan Pangan	Persentase bahan pangan yang telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)	%		-	-	-	-	88	112.900.000	88	36.823.900	88	65.000.000	88	214.723.900	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
3	Program Pengawasan Kerawanan pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	%		-	-	-	-	91	26.371.000	92	7.188.240	93	25.500.000	93	59.059.240	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
4	Program Pengawasan Keamanan pangan	% keamanan pangan	%		-	-	-	-	40		45		50		60		
<b>Jumlah</b>						<b>1.285.247.200</b>		<b>1.199.763.500</b>		<b>239.271.000</b>		<b>689.417.230</b>		<b>190.500.000</b>		<b>1.119.188.230</b>	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
<b>4 Urusan Pertanahan</b>																	
1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	58,80	60,20	4.496.300.000	63,45	8.979.822.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
		Jumlah Luas Ha Tanah Yang Dibebaskan	Ha	20	25		30		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	%	30,4	31,4		32,6		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program pengelolaan izin lokasi	Persentase luas tanah yang pemanfaatannya sesuai izin lokasi	%	-	-	-	-	-	80	271.750.000	85	301.829.500	85	414.362.000	85	957.941.500	Dinas PUPR & Pertanahan
2	Program Penatagunaan tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	-	-	-	10	68.300.000	15	57.054.000	15	69.900.000	15	195.254.000	Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%						16,4		17,46		17,46		17,46		
2	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase 'Kasus-kasus tanah yang terselesaikan	%	100	100	19.400.000	100	56.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
3	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	% penyelesaian penanganan masalah tanah pemko	%	-	-	-	-	-	2	69.372.000	2	52.998.760	2	65.798.760	2	188.169.520	Dinas PUPR & Pertanahan
4	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	% Jumlah pensertifikatan tanah pemko	%	-	-	-	-	-	2	15.000.000	2	14.999.945	2	14.999.945	2	44.999.890	Dinas PUPR & Pertanahan
<b>Jumlah</b>						<b>4.515.700.000</b>		<b>9.036.322.600</b>		<b>681.172.000</b>		<b>713.711.705</b>		<b>964.422.705</b>		<b>2.329.306.410</b>	
<b>5 Urusan Lingkungan Hidup</b>																	
<b>Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006</b>																	
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pe-layanan persampahan	%	45,40	50,80	3.612.944.350	55,60	3.584.679.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	-	-	-	-	-	93,3	6.201.257.951	95,34	2.919.410.070	95,34	2.209.660.957	95,34	11.330.328.978	Dinas Perkim, Perum & LH
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Penurunan luas permukiman kumuh	%	4	2,5	585.455.500	1,5	525.969.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH
2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	%	-	-	-	-	-	75	1.405.000.000	75	3.731.370.984	75	685.990.000	75	5.822.360.984	Dinas Perkim, Perum & LH
		Indeks kualitas udara	%						80		80		80		80		
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	dok	1	1	264.061.500	1	335.338.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang disusun	Dokumen		-	-	-	-	5	-	5	116.000.000	5	116.000.000	5		Dinas Perkim, Perum & LH
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	40	42	126.099.000	44	85.471.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH
4	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	%	-	-	-	-	-	80	286.420.000	80	17.861.500	80	110.120.000	80	414.401.500	Dinas Perkim, Perum & LH
5	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diterima	Penghargaan	-	-	-	-	-	1	115.400.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	415.400.000	Dinas Perkim, Perum & LH
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Presentase RTH Publik (City In The Garden)	%	5	7	5.739.249.500	8	5.717.449.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH
6	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Presentase RTH Publik (City In The Garden)	%	-	-	-	-	-	9	1.723.258.750	10	1.366.687.600	11	1.428.192.080	11	4.518.138.430	Dinas Perkim, Perum & LH
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Ranperda Air Limbah Yang Disusun	dok	NA	-	543.525.000	1	48.007.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH
		Jumlah Titik IPAL Yang Dibangun	titik	10	12		14		-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	%	-	-	-	-	-	50,03	47.620.000	60,01	32.032.500	60,01	52.063.000	60,01	131.715.500	Dinas Perkim, Perum & LH
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Kualitas Air	%	70	70	465.700.800	70	479.671.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim, Perum & LH
		Indeks Kualitas Udara	%	80	80		80		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Indeks Tutupan Lahan	%	24	26		28		-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan	Jumlah titik cemara sungai dan jumlah titik cemara udara ambient Yang dikendalikan	%	-	-	-	-	-	0	378.905.000	0	3.731.370.984	0	352.374.984	0	4.462.650.968	Dinas Perkim, Perum & LH
<b>Jumlah</b>						<b>11.337.035.650</b>	<b>10.776.585.750</b>										
<b>6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	657.737.800	84,15	416.293.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Capil
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	418.295.000	87	269.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Capil
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94	95	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Capil
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Capil
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	15.000.000	B	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Capil
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	89	3.575.103.718	90	3.132.386.582	90	3.695.805.289	90	10.403.295.589	Dinas Capil	
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai					BB			BB		A	A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100			100		100		100		
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan KK	%	91,25	92,45	1.298.849.800	93,10	1.334.433.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Capil
		Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	%	90,10	91,20		92,60		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	%	45,40	54,45		58,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	%	85	90		95		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,10	79,10		84,20		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program pendaftaran penduduk	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	-	-	-	-	98	746.813.000	99	257.630.500	99	328.312.250	99	1.332.755.750	Dinas Capil	
		Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	%	-	-	-	-	98		99		99,5		99,5			
		Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	-	-	-	-	40		48		55		55			
3	Program Pencatatan sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	%	-	-	-	-	93	49.250.000	95	7.707.000	96	25.000.000	96	81.957.000	Dinas Capil	
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	-	-	-	-	78		80		85		85			
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase sarana dan prasarana SIAK dan KTP El dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	90	424.564.000	92	13.630.000	92	205.014.500	92	643.208.500	Dinas Capil	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Jumlah nota kesepahaman kerjasam inovasi pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nota Kesepakat an		-	-	-	-	10		11		12		12		
		Persentase pemberian hak akses data kependudukan	%		-	-	-	-	35		50		50		50		
		Persentase pengolahan data kependudukan	%		-	-	-	-	80		85		85		85		
		Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi	%		-	-	-	-	85		90		90		90		
5	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan	%		-	-	-	-	100	19.436.000	100	27.228.250	100	20.000.000	100	66.664.250	Dinas Capil
<b>Jumlah</b>						2.399.882.600		2.045.026.800		4.815.166.718		3.438.582.332		4.274.132.039		12.527.881.089	
<b>7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.308.860.000	84,15	1.107.833.600	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	201.317.000	87	134.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	15.000.000	B	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	-	80	3.307.518.850	82	3.476.634.852	83	3.215.800.000	84	9.999.953.702	DPM Des
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						B		BB		A		A		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100		
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat swadaya masyarakat	%	NA	10,5	1.254.111.800	10,8	2.341.622.300	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
2	Program administrasi pemerintahan desa	% Desa Yang Melakukan Administrasi Dengan Baik	%		-	-	-	-	80	1.963.734.800	85	547.241.919	90	747.710.298	90	3.258.687.017	DPM Des





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Posyantekdes Yang Terbentuk dan Berfungsi Dengan Baik	Kelompok	2	6	15.860.000	10	81.795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des	
		Jumlah BUMDes Yang berfungsi dengan Baik	Unit	30	36		41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	80,25	81,50	114.740.350	82,45	104.264.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
		Revitalisasi PKK Yang Dilakukan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan)	Desa/Kelurahan	75	75		75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
3	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	% Desa dengan Kelembagaan yang berperan aktif	%	-	-	-	-	75	4.016.635.200	80	2.833.141.000	85	3.432.224.702	85	10.282.000.902		DPM Des	
		Persentase PKK Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	85	100		100		100		100		100		100			DPM Des
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Desa Yang Berprestasi	Orang	4	4	73.765.000	4	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des	
10	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	68	1.145.566.000	70	1.814.189.500	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des	
4	Program Penataan Desa	% Desa Yang Melakukan Penataan Dengan Baik	%	-	-	-	-	75	61.069.000	80	49.240.000	85	79.000.000	85	189.309.000		DPM Des	
<b>Jumlah</b>						<b>4.139.220.150</b>	<b>5.689.204.400</b>	<b>9.348.957.850</b>	<b>6.906.257.771</b>	<b>7.474.735.000</b>	<b>23.729.950.621</b>							
<b>8 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>																		
1	Program Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	67,50	67,85	315.054.000	67,95	324.505.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	4	4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	21,14	19,57		18,19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM Des
1	Program Pengendalian penduduk	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko	%	-	-	-	-	100	95.000.000	100	957.950.000	100	2.677.955.000	100	3.730.905.000		DP3AKB	
2	Program Pembinaan keluarga berencana (KB)	Unmeet need	%	-	-	-	-	10,92	241.000.000	10,87	346.021.800	10,87	110.000.000	10,87	697.021.800		DP3AKB	
		Cakupan peserta KB aktif	%					61,84		62,94		62,94		62,94			DPM Des	
		Jumlah Peserta KB Baru (PB)	%					2284		2170		2170		2170			DPM Des	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rata-rata Usia Perkawinan	Tahun		-	-	-	-	22,4	225.000.000	22,4	861.389.500	22,5	65.000.000	22,5	1.151.389.500	DP3AKB
		Jumlah Kelompok PIK- Remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif	Kelompok		-	-	-	-	29		30		30		30		
		Persentase BKB aktif	%		-	-	-	-	65		65		65		65		
		Persentase UPPKS Aktif	%		-	-	-	-	53		54		54		54		
		Persentase BKL aktif	%		-	-	-	-	81		83		83		83		
		<b>Jumlah</b>				<b>315.054.000</b>		<b>324.505.600</b>		<b>561.000.000</b>		<b>2.165.361.300</b>		<b>2.852.955.000</b>		<b>5.579.316.300</b>	
<b>9 Urusan Perhubungan</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.144.362.400	84,15	895.045.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	448.109.750	87	295.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	11.500.000	5	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	10.998.500	B	11.546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	%	-	-	-	-	-	94%	5.287.960.100	94%	6.721.757.488	94%	1.282.941.000	94%	13.292.658.588	Dinas Perhubungan
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		BB		BB		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100		
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	68	70	3.529.700	72	308.918.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
7	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	72	75	239.250.000	78	238.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	-	-	-	-	-	78,15	3.946.271.570	80,21	2.222.816.771	80,21	2.591.674.000	80,21	8.760.762.341	Dinas Perhubungan





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%		-	-	-	-	50,65		50,80		50,80		50,80		
		Persentase peningkatan pelayanan parkir	%		-	-	-	-	74		74		74		74		
		Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan	%		-	-	-	-	88		88		88		88		
		Persentase ketersediaan fasilitas umum	%		-	-	-	-	71,45		71,55		71,55		71,55		
		<b>Jumlah Bus Sekolah Gratis Yang Melayani antar jemput Siswa</b>	Unit	9	11	-	11	-	11		12		12		12		
8	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	<b>Jumlah Bus Sekolah Gratis yang beroperasi</b>	unit	9	11	1.502.897.400	12	2.488.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
		Persentase kendaraan umum yang berizin	%	NA	70,10		75,60		-		-		-		-		
9	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	%	0,00193	0,00175	914.920.100	0,00158	963.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
10	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang layak beroperasi	%	40	42	106.343.000	45	253.311.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
11	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase kapal laut pariwisata dan kapal nelayan yang layak beroperasi	%	38	43	983.580.000	46	253.311.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
<b>Jumlah</b>						<b>5.365.490.850</b>	<b>5.807.838.900</b>	<b>9.234.231.670</b>	<b>8.944.574.259</b>	<b>3.874.615.000</b>	<b>22.053.420.929</b>						
<b>10 Urusan Komunikasi Dan Informatika</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.144.909.250	84,15	1.054.545.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-		-		-		-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	505.000.000	87	125.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	6.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	11.455.000	B	11.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai		-	-	-	-	85	3.694.913.763	87	2.876.779.589	91	3.460.294.937	91	10.031.988.289	Dinas Kominfo
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		A		A		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100		
6	Program E-Government	% pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Nilai	80	90	2.415.490.400	90	6.636.292.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
7	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Infomasi Publik	Indeks Keterbukaan Infomasi Publik	Nilai	55	65	3.126.570.500	70	2.586.062.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
2	Program Informasi dan komunikasi publik	Indek Keterbukaan Informasi Publik	%		-	-	-	-	70	1.683.222.000	85	1.153.370.000	85	1.839.200.000	85	4.675.792.000	Dinas Kominfo
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Jenis Media Informasi Publikasi	Media	5	5	450.000.000	5	469.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
3	Program aplikasi informatika	% pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	%		-	-	-	-	92,1	4.748.138.500	92,2	1.829.865.320	92,2	2.903.076.100	92,2	9.481.079.920	Dinas Kominfo
<b>Jumlah</b>						<b>7.659.425.150</b>	<b>10.903.440.150</b>		<b>10.126.274.263</b>		<b>5.860.014.909</b>		<b>8.202.571.037</b>		<b>24.188.860.209</b>		
<b>11 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.362.649.500	84,15	1.203.617.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	188.332.000	87	210.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	11.033.000	B	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai		-	-	-	-	86	4.702.224.555	89	3.085.164.608	89	3.856.760.475	89	11.644.149.638	Dinas Koperindagkop & KUKM





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Mikro terhadap Usaha Kecil	%	20,4	21,2	173.711.250	22,4	258.496.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	% Koperasi Yang Telah Menerapkan Tata Kelola Koperasi Yang Baik		-	-	-	-	65	75.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	75	175.000.000	Dinas Koperindagkop & KUKM	
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan ekonomi kerakyatan masyarakat	%	15,18	16,00	646.539.000	17,10	467.358.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat	%	NA	8,5	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	persentase pertumbuhan Usaha Mikro	%	-	-	-	-	1,8	265.000.000	2	37.742.250	2	175.000.000	2	477.742.250	Dinas Koperindagkop & KUKM	
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Modal Usaha Mikro	%	1,5	1,6	646.539.000	1,7	467.358.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		Persentase Pertumbuhan Volume Penjualan Usaha Mikro	%	1,6	1,7	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan modal Usaha Mikro	%	-	-	-	-	3	150.000.000	3,5	73.832.500	3,5	100.000.000	3,5	323.832.500	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan Usaha Mikro	%	-	-	-	-	2	-	2,2	-	2,2	-	2,2	-		
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	45,25	48,50	91.069.000	53,25	202.440.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		Persentase Koperasi Aktif	%	75,61	78,50	-	81,25	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat	%	-	-	-	-	11,8	175.000.000	11,9	36.195.250	11,9	126.000.000	11,9	337.195.250	Dinas Koperindagkop & KUKM	
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase penambahan anggota baru koperasi	%	-	-	-	-	0,75	454.591.810	0,75	404.200.000	0,75	454.591.810	0,75	1.313.383.620	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		Persentase peningkatan koperasi aktif	%	-	-	-	-	48,25	-	49	-	49	-	49	-		
<b>Jumlah</b>						<b>3.129.872.750</b>		<b>2.864.859.400</b>		<b>5.821.816.365</b>		<b>3.687.134.608</b>		<b>4.762.352.285</b>		<b>14.271.303.258</b>	
<b>12 Urusan Penanaman Modal</b>																	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	854.634.500	84,15	898.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	563.040.000	87	270.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	10.000.000	B	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	-	94,65	3.028.459.081	95,03	3.726.559.032	94,5	3.264.516.345	94,5	10.019.534.458	Dinas PM, PTSP & Naker
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		A		A		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100		
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran Investasi Yang Diikuti	1	1	1	6.908.000	1	9.724.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1	1,1	71.457.000	1,2	32.421.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
		Nilai Realisasi Investasi	Milyar	80,4	95,4		115,4		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program promosi penanaman modal	Jumlah investor yang berminat	Kali	-	-	-	-	-	1	46.533.500	1	10.000.000	1	10.000.000	1	66.533.500	Dinas PM, PTSP & Naker
3	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase iklim PM yang Kondusif	Investor	-	-	-	-	-	1839	65.603.000	2000	15.000.000	2000	10.000.000	2000	90.603.000	Dinas PM, PTSP & Naker
		Jumlah kerjasama investasi	Kerja sama						1		1		2		2		
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	%	-	-	-	-	-	28	12.235.500	29	345.997.000	29	326.122.000	29	684.354.500	Dinas PM, PTSP & Naker
8	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Persentase kesesuaian antara pelaksanaan izin terhadap izin yang diawasi	%	NA	60	167.231.000	65	373.718.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PM, PTSP & Naker
		Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap proses perizinan	%	76,25	77,45		78,20		-	-	-	-	-	-	-	-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan modal	%		-	-	-	-	80	245.092.440	80	18.000.000	80	18.000.000	80	281.092.440	Dinas PM, PTSP & Naker
6	Program Pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Layanan Perizinan	%		-	-	-	-	100	99.558.500	100	37.158.500	100	98.514.000	100	235.231.000	Dinas PM, PTSP & Naker
<b>Jumlah</b>						<b>1.683.270.500</b>		<b>1.604.639.200</b>		<b>3.497.482.021</b>		<b>4.152.714.532</b>		<b>3.727.152.345</b>		<b>11.377.348.898</b>	
<b>13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>																	
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yg aktif	Organisasi	36	37	1.719.321.000	38	1.770.900.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional	Orang	-	-	-	-	-	2	1.743.378.500	2	1.026.500.000	8	1.350.000.000	8	4.119.878.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase pemuda yang berwirausaha	%	-	-	-	-	-	65	-	65	-	65	-	65	-	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	-	-	-	-	-	10	-	10	-	100	-	10	-	
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Cabang olahraga yang aktif	Cabor	29	32	3.262.257.500	34	3.729.961.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Hari Senam Kesegaran Jasmani Yang Dilaksanakan	Hari	48	48	39.200.000	48	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud
2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah	Medali	-	-	-	-	-	15	5.676.812.472	16	2.152.600.000	16	4.496.668.000	17	12.326.080.472	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	87	-	90	-	90	-	90	-	
		Jumlah sapras olah raga yang direhab	Buah	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	
		Jumlah Penyelenggaraan event olah raga rekreasi	Event	-	-	-	-	-	8	-	9	-	9	-	9	-	
3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Organisasi Kepramukaan Yang di fasilitasi	Organisasi	-	-	-	-	-	1	400.000.000	1	443.700.000	1	443.700.000	1	1.287.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	unit	4	5	12.144.226.100	6	12.508.552.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
		<i>Jumlah Youth Center yang dibangun</i>	unit	0	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( APBN dan APBD )
		<i>Jumlah Stadion Gedung Olahraga</i>	unit	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( APBN dan APBD )
<b>Jumlah</b>						<b>17.165.004.600</b>		<b>18.059.414.900</b>		<b>7.820.190.972</b>		<b>3.622.800.000</b>		<b>6.290.368.000</b>		<b>17.733.358.972</b>	
<b>14 Urusan Statistik</b>																	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral/Daerah	Persentase ketersediaan Data Sektoral	%	70	70	70.887.500	70	151.059.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
		Jumlah Buku Statistik Pertanian, Pangan dan Perikanan Yang Disusun	Dok	1	1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Yang Disusun	Dok	1	1	50.000.000	1	58.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
1	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	-	-	-	-	-	92,1	143.590.000	92,1	31.250.000	92,1	100.000.000	92,1	274.840.000	-	Dinas Kominfo
<b>Jumlah</b>						<b>120.887.500</b>	<b>209.409.900</b>	<b>143.590.000</b>	<b>31.250.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>274.840.000</b>							
<b>15 Urusan Persandian</b>																		
1	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	Level	2	2	1.830.000	2	164.785.000	2	169.728.500	2	174.820.300	2	180.064.800	2	691.228.600	-	Dinas Kominfo
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indek KAMI	Indeks	-	-	-	-	-	2	24.600.000	2	85.158.350	2	29.000.000	2	138.758.350	-	Dinas Kominfo
<b>Jumlah</b>						<b>1.830.000</b>	<b>164.785.000</b>	<b>194.328.500</b>	<b>259.978.650</b>	<b>209.064.800</b>	<b>829.986.950</b>							
<b>16 Urusan Kebudayaan</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	Kelompok	10	11	280.546.200	12	283.351.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	Program pengembangan kebudayaan	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	Kelompok		-	-	-	-	24	850.000.000	26	992.735.000	28	980.000.000	28	2.822.735.000	Dinas Parbud
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah	Kelompok						26		27		27		27		
		Jumlah penyelenggaraan festival budaya	event						45		50		55		55		
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	15	20	1.241.449.000	25	1.253.863.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
		Persentase Keaktifan Lembaga Adat	%	90	91	97.598.000	92	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
2	Program pengembangan kesenian tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional Yang Didampingi			-	-	-	-	30	50.000.000	30	420.000.000	30	205.000.000	30	675.000.000	Dinas Parbud
8	Program Peningkatan Pelestarian Kebudayaan	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Jenis	5	7	-	9	3.693.011.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
9	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat Seni dan Budaya	Jumlah Nagari Adat Percontohan Yang Dibina	Buah	5	5	50.997.000	5	51.506.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
<b>Jumlah</b>							<b>3.268.540.700</b>	<b>7.177.022.200</b>		<b>900.000.000</b>		<b>1.412.735.000</b>		<b>1.185.000.000</b>		<b>3.497.735.000</b>	
<b>17 Urusan Perpustakaan</b>																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai		-	-	-	-	89	0	90	2.365.269.479	90	2.687.380.000		5.052.649.479	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						B		BB		A		A		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina (Desa/Kelurahan/Sekolah)	unit	160	160	324.752.000	160	334.494.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program pembinaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina (Desa/Kelurahan/Sekolah)	Orang		-	-	-	-	160	160.000.000	160	162.169.000	160	497.620.000	160	819.789.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Daerah	%	NA	70,5 (Kurang Baik)	98.727.000	76,65 (Baik)	201.965.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Jumlah</b>							<b>423.479.000</b>	<b>536.459.500</b>		<b>160.000.000</b>		<b>2.527.438.479</b>		<b>3.185.000.000</b>		<b>5.872.438.479</b>	
<b>18 Urusan kearsipan</b>																	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	OPD	10	15	67.070.000	20	318.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Program pengelolaan arsip	Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	-	-	-	-	30	90.000.000	35	5.381.500	40	557.000.000	45	652.381.500	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	%	-	-	-	-	40		45		50		50			
2	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	NA	10	60.000.000	20	61.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi	Dok	-	-	-	-	500	15.000.000	520	2.630.000	550	73.000.000	575	90.630.000	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
<b>Jumlah</b>						<b>127.070.000</b>	<b>379.385.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>8.011.500</b>	<b>630.000.000</b>	<b>743.011.500</b>						
<b>B. URUSAN PILIHAN</b>																	
<b>1. Urusan kelautan dan perikanan</b>																	
1	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	316	318	1.065.899.100	320	2.292.562.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
1	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	-	-	-	-	323	1.163.678.829	325	414.442.000	328	120.000.000	328	1.698.120.829	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
2	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.011	6.270	2.872.065.700	6.295	1.060.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	-	-	-	-	6.315 Ton	775.000.000	6.335 ton	1.080.972.000	6.400 ton	1.425.136.000	6.400 ton	3.281.108.000	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Persentase Kualitas SDM Penyuluh Perikanan yang Handal	%	56	61	52.390.000	66	85.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
4	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi Ikan Pengolahan	Kg/Tahun	235,50	246,60	211.197.800	251,23	865.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
3	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah fasilitas pemasaran hasil perikanan	%	-	-	-	-	1	207.627.000	2	50.570.000	3	68.000.000	3	275.627.000	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
<b>Jumlah</b>						<b>4.201.552.600</b>	<b>4.304.827.000</b>	<b>2.146.305.829</b>	<b>1.495.414.000</b>	<b>1.613.136.000</b>	<b>5.254.855.829</b>						
<b>2 Urusan Pariwisata</b>																	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai		-	-	-	-	86	4.380.658.026	89	3.917.236.093	89	3.800.509.474	89	12.098.403.593	Dinas Parbud
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat							BB					A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan							100					100			
1	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase Objek Wisata Unggulan Dalam Kondisi Baik	%	65	70	132.651.000		3.525.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
		Jumlah Destinasi Wisata Baru	unit	6	7				-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Pembangunan Mesjid Terapung	%	10	25	30.413.053.850	50	44.098.928.083	70	85.992.909.761	80	154.387.237.570	100	270.177.665.657	100	585.069.794.920	Dinas PUPR & Pertanahan
		<i>Jumlah Mesjid Yang Dibangun</i>	unit	0	1				-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Jumlah Pusat Pendidikan Alquran Yang Dibangun</i>	unit	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran	%	0	0		25		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik	%	-	-	-	-	-	45	1.985.000.000	50	1.872.094.060	50	1.606.000.000	50	5.463.094.060	Dinas Parbud
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata	Buah						1		1		1		1	-	
		<i>Jumlah Kawasan Wisata Terpadu dengan Usaha Mikro</i>	Kawasan	-	4		5		6		7		8		8		
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal	hari	1	1,1	3.467.034.250	1,2	285.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
3	Program pemasaran pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	-	75	1.064.000.000	80	404.511.760	80	1.457.578.000	80	2.521.578.000	Dinas Parbud
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	%						1,4		1,5		1,5		1,5	-	
		Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata	%						6		7		7		7	-	
3	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Wisata	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	85	87	716.864.000	89	724.032.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
4	Program Pengembangan Kemitraan Promosi	Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata	Kerjasama	2	2	471.400.000	3	1.646.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud
5	Program Pembangunan SDM Pariwisata	Persentase Pelaku Wisata Yang Sudah Sadar Wisata	%	55	60	696.804.000	65	31.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun																
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode										
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp								
6	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Objek DTW Unggulan	Objek	5	5	-	5	2.613.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud								
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Karya Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi	Fasilitasi	-	-	-	1	325.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud								
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	%	-	-	-	-	-	1	60.000.000	3	491.044.165	3	550.000.000	3	610.000.000	Dinas Parbud								
8	Program Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pariwisata	%	80	82	-	84	696.804.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud								
9	Program Pengembangan Citra Pariwisata	Terbentuknya Brand Image Kota Pariaman	Jenis	NA	-	-	1	64.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Parbud								
<b>Jumlah</b>								<b>35.897.807.100</b>				<b>54.012.064.683</b>				<b>93.482.567.787</b>			<b>160.176.567.723</b>			<b>277.591.753.131</b>			<b>605.762.870.573</b>
<b>3 Urusan Pertanian</b>																									
1	Program Internal/Rutin Perangkat Daerah (Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan)	Nilai IKM Internal Kantor	Point	74,45	81,8	1.467.201.950	84,15	1.211.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	325.390.600	87	642.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dan Non ASN	%	94 %	95 %	-	96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	13.400.000	B	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	-	86	11.125.102.962	89	13.258.595.872	89	10.883.102.233	89	35.266.801.067		Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		A		A										
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100										
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Lembaga Petani Yang Dibina	Lembaga	8	10	135.045.000	12	331.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	%	15	20	108.825.000	25	176.793.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan							





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
8	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi padi	Ton	41.834	38.850	1.990.198.000	39.000	795.345.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah produksi padi	%		-	-	-	-	21.205 ton	1.322.521.500	21.527 ton	855.943.742	21.957 ton	864.018.929	21.957 ton	3.042.484.171	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
		Jumlah produksi Perkebunan	%						2699 ton		2799 ton		2899 ton		2899 ton	-	
		Jumlah produksi Hortikultura	%						544 kwintal		554 kwintal		564 kwintal		564 kwintal	-	
9	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	Persentase Kualitas SDM Penyuluh Pertanian yang Handal	%	55	60	143.145.000	65	31.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase angka kematian ternak	%	0.5	0,47	99.112.000	0.44	276.995.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	% Penurunan Luasan Serangan Hama/penyakit	%		-	-	-	-	85	303.762.000	86	131.085.000	86	204.756.421	86	639.603.421	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
11	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.250	2.358	37.236.000	2.393	320.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
		Jumlah Produksi Peternakan	Ton	652.250	661.236		671.154		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
12	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	16	21	23.719.000	26	85.081.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kasus zoonosis	%		-	-	-	-	25	705.463.609	25	170.759.500	25	221.200.000	25	1.097.423.109	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
13	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian/ Peternakan	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian/Peternakan	%	55	60	1.987.780.000	65	406.895.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
5	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pesentase Parsarana Pertanian dalam kondisi baik	%		-	-	-	-	85	2.414.487.250	86	4.473.260.000	87	150.000.000	87	7.037.747.250	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
14	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Ketersediaan Jalan Usaha Tani	%	60	62		65	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
		Persentase Ketersediaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	%	64	67		70		-	-	-	-	-	-	-	-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	Program penyuluhan pertanian	sumberdaya aparaturnya Penyuluh Pertanian yang berkualitas	%		-	-	-	-	85	677.809.750	86	331.572.000	87	1.005.670.000	87	2.015.051.750	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan	
<b>Jumlah</b>						6.341.052.550		6.308.879.300		16.549.147.071		19.221.216.114		13.328.747.583		49.099.110.768		
<b>4 Urusan kehutanan</b>																		
Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006																		
<b>Jumlah</b>																		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020																		
<b>Jumlah</b>																		
<b>5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</b>																		
Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006																		
<b>Jumlah</b>																		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020																		
<b>Jumlah</b>																		
<b>6 Urusan Perdagangan</b>																		
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	%	1,5	2,0	232.895.750	2,5	234.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM
1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	%	-	-	-	-	-	5	531.852.000	5,5	49.856.000	5,5	65.662.000	5,5	647.370.000	Dinas Koperindagkop & KUKM	
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	1,8	2	5.083.126.550	2	2.275.916.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Jumlah Pasar Yang Dibangun yang direvitalisasi	unit	3	3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR & Pertanahan
2	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	%	-	-	-	-	-	11	1.380.314.400	4	176.488.500	4	457.950.000	4	2.014.752.900	Dinas Koperindagkop & KUKM	
3	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Dibangun (Pasar Pariaman)	unit	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(APBN, 90 Milyar)
3	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP	%	-	-	-	-	-	85	1.596.052.000	90	1.500.007.900	90	882.131.500	90	3.978.191.400	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		Persentase sarana prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik	%						80		80		80		80		-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Jumlah pasar yang direvitalisasi	Unit	-	1		1		-		-		-		2		
4	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	%	-	-	-	-	20	272.580.000	20	103.110.000	20	103.110.000	20	478.800.000	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		<b>Jumlah</b>			5.316.022.300		2.510.816.400		3.780.798.400		1.829.462.400		1.508.853.500		7.119.114.300		
<b>7 Urusan Perindustrian</b>																	
Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006																	
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan Industri	%	1,1	1,15	1.622.184.250	1,2	1.079.370.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindagkop & KUKM	
2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Inovasi TTG Tiap Tahunnya	Jenis	1	2	121.968.500	3	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	%	-	-	-	-	1,2	727.030.000	1,5	780.550.500	1,6	957.340.000	1,6	2.464.920.500	Dinas Koperindagkop & KUKM	
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	%	-	-	-	-	40		60		60		60			
		<b>Jumlah</b>				1.744.152.750		1.329.370.000		727.030.000		780.550.500		957.340.000		2.464.920.500	
<b>8 Urusan Transmigrasi</b>																	
Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006																	
		<b>Jumlah</b>															
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020																	
		<b>Jumlah</b>															
<b>C UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH</b>																	
<b>1. Unsur Sekretariat Daerah</b>																	
Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	9.076.447.500	84,15	7.005.797.500	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)	
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	4.837.462.500	87	9.893.057.500	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	209.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
		Persentase terpenuhinya Baju Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (4 stel / orang)	%	100	100	209.600.000	100	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	20	20	75.000.000	20	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	59.554.500	B	59.554.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	%	-	-	-	-	-	100,00	25.982.241.862	100,00	31.557.838.361	100,00	34.669.122.556	100,00	92.209.202.779	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	%	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		IKM Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	86,00	-	87,00	-	87,00	-	87,00	-	
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	-	-	-	-	-	BB	-	BB	-	A	-	A	-	
		Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh KemenPan RB	Nilai	-	-	-	-	-	10,01	-	11,50	-	12,50	-	12,50	-	
		Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	39,09	-	39,09	-	39,09	-	39,09	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n	%	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Baik	%	-	-	-	-	-	66,67	-	66,67	-	66,67	-	66,67	-	
		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	%	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	%	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	%	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan	%		-	-	-	-	100,00			100,00			100,00		
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	%	80	82,50	1.086.994.000	84,40	734.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	%	100	100	405.953.600	100	418.132.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah
8	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Prosentasi penyelenggaraan bantuan hukum dan HAM	%	90	92,40	369.275.000	94,50	380.353.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRD
9	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	%	90	100	400.883.750	100	412.910.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi & Aparatur Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah Yang dibentuk sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	C	B	400.883.750		412.910.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi & Aparatur dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Nilai LPPD	Nilai	2,890	2,900		2,950		-	-	-	-	-	-	-	-	
		IKM	Nilai	78,20	80,50		82,50		-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	%	70,10	72,45	207.868.200	74,50	214.104.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Ekbang Sekretariat Daerah
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	%	70,10	72,45		74,50		-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	%	90,10	90,2	508.500.700	90,3	523.755.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Ekbang Sekretariat Daerah
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	%		-	-	-	-	100,00	890.519.950	100,00	1.055.975.000	100,00	1.656.630.000	100,00	3.603.124.950	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
		Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	%		-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	%		-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi	%		-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	%		-	-	-	-	100,00			100,00			100,00		
		Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	%		-	-	-	-	100,00			100,00			100,00		
13	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	%	70	74	327.154.000	76	336.968.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
14	Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpulkan melalui lembaga / Badan Zakat/ Wakaf	%	2,5	3,00	2.994.746.700	3,5	3.084.589.100	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	%	40	50		'55		-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Magrib Mengaji dan Shubah Mubarakah Yang Dilaksanakan</b>	hari/bulan	4 kali/bulan dan 1 kali/bulan	4 kali/bulan dan 1 kali/bulan		4 kali/bulan dan 1 kali/bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Program peningkatan peran & fungsi lembaga sosial keagamaan	Persentase organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif	%	55	61	1.050.600.000	67	1.082.118.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD Kota Pariaman 1 )	Nilai		-	-	-	-	3,15	7.444.842.100	3,1600	37.950.000	3,16	4.733.315.000	3,1600	12.216.107.100	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	%		-	-	-	-	100,00			100,00		100		100,00	
		Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	%		-	-	-	-	90,00			100,00		100		100,00	
		Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	%		-	-	-	-	80,00			85,00		85,00		85,00	
		Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	%		-	-	-	-	77,00			80,00		80,00		80,00	
		Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	%		-	-	-	-	80,00			100,00		100,00		100,00	
		Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun	Jumlah Sekolah		-	-	-	-	4 Sekolah			4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah	
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%		-	-	-	-	100,00			100,00		100,00		100,00	
		Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	%		-	-	-	-	75,00			80,00		80,00		80,00	
		Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	%		-	-	-	-	80,00			85,00		85,00		85,00	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00			
		% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Magrib Mengaji dan Manunggal Subuh Indah Penuh Berkah (MASIH PUBER)	%	100	100	-	100	-	100		100		100		100		
		Terbentuknya Sekretariat Pusat Pendidikan Alquran (Islamic Centre)	Unit/Posko	-	-	-	-	1		1		1		1			
		Terlaksananya program Pengembangan Pendidikan Agama Non Formal MDA, MDW dan MDU di seluruh Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	-	30 Desa dan 15 Kelurahan		55 Desa dan 22 Kelurahan		55 Desa dan 22 Kelurahan		55 Desa dan 22 Kelurahan		55 Desa dan 22 Kelurahan		55 Desa dan 22 Kelurahan		
		<b>Jumlah</b>				<b>22.220.524.200</b>	<b>24.748.500.949</b>	<b>34.317.603.912</b>		<b>32.651.763.361</b>		<b>41.059.067.556</b>		<b>108.028.434.829</b>			
<b>2</b>	<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.560.967.000	84,15	1.791.420.000	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	1.576.750.000	87	2.475.700.000	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	423.150.000	-	300.650.000	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
		Persentase terpenuhinya Baju Dinas Anggota DPRD (2 stel / orang)	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	40.000.000	10	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	6.000.000	B	6.299.900	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	81,35	16.444.646.542	81,85	16.964.845.000	81,85	15.032.218.720	81,85	48.441.710.262	Sekretariat DPRD	
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pimpinan & anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	NA	75	12.572.071.000	80	13.792.385.000	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi rapat dan persidangan DPRD tepat waktu	%		-	-	-	-	100	11.860.471.000	100	9.829.090.000	100	12.000.680.574	100	33.690.241.574	Sekretariat DPRD	
	<b>Jumlah</b>					<b>16.178.938.000</b>		<b>18.406.454.900</b>		<b>28.305.117.542</b>		<b>26.793.935.000</b>		<b>27.032.899.294</b>		<b>82.131.951.836</b>		
<b>D UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>																		
<b>1. Unsur Perencanaan</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.899.680.000	84,15	1.916.461.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	831.810.000	87	698.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	25.000.000	5	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	36.000.000	B	29.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	86,00	5.662.540.000	89,00	3.652.183.772	89,00	5.645.867.226	89,00	14.960.590.998		Bappeda	
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		A		A				
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100				
6	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	%	100	100	316.913.000	100	317.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
7	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas SDM aparatur perencana Bappeda	%	65	68	135.000.000	70	144.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
8	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	%	79,80	80,10	3.750.530.700	81,40	3.355.586.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Tingkat Partisipasi Unsur Terkait Hadir Musrenbang	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD sektor ekonom	%	80,10	81,20	130.612.500	82,30	181.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Persentase PD lingkup bidang ekonomi yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%		-	-	-	-	17,50	1.210.190.000	18,00	836.905.500	18,00	1.028.045.600	18,00	3.075.141.100	Bappeda
		Persentase indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%		-	-	-	-	93,39		97,22		97,22		97,22		
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	%		-	-	-	-	28		29		29		29		
		Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	%		-	-	-	-	18		20		20		20		
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	%		-	-	-	-	86,36		90,91		90,91		90,91		
		Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	%		-	-	-	-	97,38		98,50		98,50		98,50		
		Tingkat aksesibilitas data	%		-	-	-	-	100		100		100		100		
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	%		-	-	-	-	90,32		93,55		93,55		93,55		
		Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	%		-	-	-	-	96,20		96,84		96,84		96,84		
10	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD sektor Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	81,20	82,30	205.303.000	83,10	293.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Persentase PD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD sektor fisik	%	80,20	81,40	342.855.000	82,50	198.832.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Persentase PD lingkup bidang SPW yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%		-	-	-	-	98,20	3.651.444.000	98,20	1.431.377.655	98,20	1.585.000.000	98,20	6.667.821.655	Bappeda
		Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	%		-	-	-	-	100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota.	%		-	-	-	-	100		100		100		100		





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	%		-	-	-	-	100		100		100		100			
		Tingkat Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%		-	-	-	-	100		100		100		100			
<b>Jumlah</b>						7.673.704.200		7.163.070.000		10.524.174.000		5.920.466.927		8.258.912.826		24.703.553.753		
<b>2 Unsur Keuangan</b>																		
<b>Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.981.877.000	84,15	1.973.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	836.120.000	87	703.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	65.000.000	5	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	477.390.000	B	556.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	-	83,00	23.313.242.223	85,00	23.895.302.030	85,00	23.263.098.708	85,00	70.471.642.961		BPKPD
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		BB		BB			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100			
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Dokumen Inventasi Keuangan Yang Disusun	dok	1	-	26.000.000	1	122.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	%	100	100	6.077.965.200	100	7.576.408.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
		Persentase penyerapan belanja daerah	%	70	72		74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
		Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD
		Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	%	88	90		92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPD





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun										
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Presentase peningkatan penerimaan PAD	%	4,5	4,7		4,8		-		-		-		-		-	BPKPD	
		Jumlah APBDes Desa Yang Dievaluasi	Desa	55	55	14.848.000	55	14.848.000		-		-		-		-		-	BPKPD
2	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran	%		-	-	-	-	95,00	112.675.802.317	95,00	92.394.287.892	95,00	108.100.401.650	95,00	313.170.491.859		BPKPD	
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD	%		-	-	-	-	<10.		<10.		<10.		<10.			BPKPD	
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	ada/tidak		-	-	-	-	ada		ada		ada		ada			BPKPD	
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang di Fasilitasi dan Dibina	Desa	55	55	157.234.000	55	158.806.300		-		-		-		-		-	BPKPD
3	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	%		-	-	-	-	90,31	1.164.698.000	93,54	1.188.225.940	93,54	1.086.000.000	93,54	3.438.923.940		BPKPD	
4	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase realisasi PAD	%		-	-	-	-	100	1.805.915.000	100	1.135.123.758	100	1.689.729.858	100	4.630.768.616		BPKPD	
		<b>Jumlah</b>				<b>9.636.434.200</b>		<b>11.181.543.200</b>		<b>138.959.657.540</b>		<b>118.612.939.620</b>		<b>134.139.230.216</b>		<b>391.711.827.376</b>			
<b>3 Unsur Kepegawaian</b>																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.470.744.800	84,15	1.273.969.000		-		-		-		-		-	BKPSDM
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-		-		-		-		-		-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	296.780.000	87	253.800.000		-		-		-		-		-	BKPSDM
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-		-		-		-		-		BKPSDM
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	15.000.000	5	20.000.000		-		-		-		-		-	BKPSDM
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	7.000.000	B	10.750.000		-		-		-		-		-	BKPSDM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	-	83,00	5.726.334.910	84,00	6.032.470.941	85,00	5.060.529.070	85,00	16.819.334.921		BKPSDM	
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		BB		BB				
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100				
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	30,50	35,8	1.889.296.900	40,25	5.439.018.600		-		-		-		-		-	BKPSDM
		Indeks Profesional ASN	Nilai	NA	73		75		-		-		-		-		-		-





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase Pegawai yg memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%	30	35		40		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah guru yang dinilai Angka Kreditnya	orang	500	500	56.997.750	70	55.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Jumlah ASN Fungsional Yang Dinilai Angka Kreditnya	Profesi	250	260	8.162.500	270	66.881.700	-	-	-	-	-	-	-	-	, Dinkes
2	Program kepegawaian daerah	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap	%		-	-	-	-	100	4.427.215.000	100	2.739.355.260	100	4.402.460.000	100	11.569.030.260	BKPSDM
		Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti	%		-	-	-	-	100		100		100		100		BKPSDM
		Persentase penyelesaian produk layanan	%		-	-	-	-	100		100		100		100		BKPSDM
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	%		-	-	-	-	100		100		100		100		BKPSDM
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	%		-	-	-	-	100		100		100		100		BKPSDM
		Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik	%		-	-	-	-	99,40		99,50		99,50		99,50		BKPSDM
		<b>Jumlah</b>				<b>3.743.981.950</b>		<b>7.119.999.300</b>		<b>10.153.549.910</b>		<b>8.771.826.201</b>		<b>9.462.989.070</b>		<b>28.388.365.181</b>	
<b>4</b>	<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>																
1	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	%	40	50	529.987.000	60	738.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Persentase hasil penelitian yg ditindak lanjuti stakeholder (jumlah penelitian yg ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian dikali 100%)	%	50	60		65		-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan 1 )	%		-	-	-	-	100	71.060.000	100	492.621.750	100	693.762.250	100	1.257.444.000	Bappeda
		Indeks inovasi daerah 1 )	Kategori		-	-	-	-	Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Bappeda
		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%		-	-	-	-	100		100		100		100		Bappeda
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Nilai		-	-	-	-	2		2		2		2		Bappeda
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%		-	-	-	-	100		100		100		100		Bappeda
		<b>Jumlah</b>				<b>529.987.000</b>		<b>738.725.000</b>		<b>71.060.000</b>		<b>492.621.750</b>		<b>693.762.250</b>		<b>1.257.444.000</b>	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
<b>E UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>																	
<b>1 Inspektorat Daerah</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	871.677.200	84,15	1.444.328.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	192.750.000	87	1.508.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	3.499.000	B	8.264.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	81,85	8.500.491.448	81,85	6.046.610.449	81,85	7.622.423.587	81,85	22.169.525.484		Inspektorat
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		BB		BB			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Perangkat Daerah yg akuntabilitas kerjanya meningkat per tahun	%	40,20	50,10	1.392.940.000	56,25	3.312.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Keuangan	%	15	30		40		-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
		Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah	%	100	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
2	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	-	-	-	-	78	1.625.064.000	85	391.852.769	85	2.112.734.000	85	4.129.650.769		Inspektorat
		Persentase tindak lanjut temuan APIP	%					78		78		78		78			Inspektorat
		Tingkat/level kapabilitas APIP	Level					2		3		3		3			Inspektorat
7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,01	3,30	153.483.000	3,50	371.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
3	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Nilai Maturitas SPIP	%	-	-	-	-	3,01	1.432.860.000	3,01	1.028.407.729	3,01	1.628.152.850	3,01	4.089.420.579		Inspektorat





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
<b>Jumlah</b>						2.634.349.200		6.665.081.400		11.558.415.448		7.466.870.947		11.363.310.437		30.388.596.832	
<b>2 Penanggulangan Bencana Daerah</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	715.596.000	84,15	732.447.500	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	176.587.000	87	1.048.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	15.250.300	B	15.707.700	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	-	87,00	4.176.624.309	89,00	4.176.624.309	89,00	4.176.624.309	89,00	12.529.872.927	BPBD
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		BB		BB		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100		
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	122,20	122,45	2.144.241.700	122,60	2.552.252.800	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	30	34		38		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program penanggulangan bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	-	-	-	-	-	74,47	3.000.898.000	100,00	3.000.898.000	100,00	3.000.898.000	100,00	9.002.694.000	BPBD
		Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas	%	-	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
		Persentase warga Kota Pariaman yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	%	-	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	%	-	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD
7	Program Penyediaan Sarana Evakuasi Kebencanaan	Jumlah Shelter Yang dibangun	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU PR
<b>Jumlah</b>						3.071.675.000		4.368.678.000		7.177.522.309		7.177.522.309		7.177.522.309		21.532.566.927	
<b>F PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>1 Kecamatan Pariaman Utara</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	358.720.000	84,15	311.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	348.895.000	87	225.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	7.000.000	B	7.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	89,00	2.326.387.334	90,00	2.147.738.560	90,00	5.400.325.435	90,00	9.874.451.329		Kecamatan Pariaman Utara
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		BB		BB			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	66.390.000	0	45.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	112.350.000	100	95.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan	%	-	-	-	-	70,00	68.890.000	75,00	47.912.500	75,00	68.890.000	75,00	137.780.000		Kecamatan Pariaman Utara
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 1 )	%	-	-	-	-	70,00		75,00		75,00		75,00			Kecamatan Pariaman Utara
		IKM Desa	Nilai	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00			Kecamatan Pariaman Utara
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah UKS Desa Yang Dibina	Desa	17	17	5.147.000	17	9.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	59.680.000	100	77.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan	%	-	-	-	-	-	70,00	85.875.000	75,00	15.175.000	75,00	85.875.000	75,00	186.925.000	Kecamatan Pariaman Utara
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 1 )	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Pariaman Utara	
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Jenis Produk Usaha Mikro Wilayah Kecamatan Yang Dipromosikan	Jenis	4	5	17.100.000	7	10.621.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
11	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Hari Kebesaran Nasional Yang Diperingati	Kali	3	3	143.295.000	3	100.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
12	Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	63	67	49.213.000	70	30.666.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah APDes Desa Yang Diawasi pelaksanaannya	Desa	55	55	7.750.000	55	5.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa/Kelurahan Yang Dibina	Desa/Kelurahan	17	17	23.000.000	17	22.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
15	Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	18.846.000	100	32.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	70	72		74		-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	-	100	50.421.000	100	13.600.000	100	50.421.000	100	114.442.000	Kecamatan Pariaman Utara
16	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaa yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	271.797.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Utara
		<b>Jumlah</b>				<b>1.237.386.000</b>		<b>1.265.505.000</b>		<b>2.531.573.334</b>		<b>2.176.513.560</b>		<b>5.605.511.435</b>		<b>10.313.598.329</b>	
<b>2 Kecamatan Pariaman Tengah</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.500.772.500	84,15	444.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	916.220.000	87	211.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	7.500.000	B	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	90,00	18.742.006.500	91,00	18.742.006.500	91,00	18.742.006.500	91,00	56.226.019.500	-	Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		A		A			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	97.714.000	0	90.009.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	345.097.000	100	133.134.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan	%	-	-	-	-	65,00	1.821.037.000	70,00	1.521.362.958	70,00	1.639.724.808	70,00	4.982.124.766	-	Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	-	-	-	-	100		100		100		100			Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
		IKM Kelurahan	Nilai	-	-	-	-	90,00		95,00		98,00		98,00			Kelurahan Kecamatan
		IKM Desa	Nilai	-	-	-	-	95,00		97,00		98,00		99,00			
8	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaan yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	352.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	343.095.000	100	53.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan	%	-	-	-	-	65,00	305.768.000	70,00	374.252.412	70,00	305.768.000	70,00	985.788.412	-	Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100		100		100		100			Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	64	68	48.100.000	70	50.816.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa/Kelurahan Yang Dibina	Desa/Kelurahan	22	22	35.550.000	16	31.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	%	75	79	336.610.000	82	4.752.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	%	-	-	-	-	-	100,00	29.775.000	100,00	146.000.000	100,00	146.000.000	100,00	321.775.000	Kecamatan Pariaman Tengah
		Persentase santri yang berkualitas	%	-	-	-	-	-	75,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	Kecamatan Pariaman Tengah	
13	Program mengintensifikan penanganan pengaduan	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	19.846.000	100	29.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Tengah
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	70	72	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Program Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan	Jumlah Besar Alokasi Dana Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah	Kelurahan	16	16	6.667.808.000	16	17.637.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
5	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan	%	100	-	-	-	-	100	107.367.000	100	63.060.000	100	-	100	170.427.000	Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
		Persentas Kelurahan yang dilakukan pembinaan	%	100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
<b>Jumlah</b>						<b>10.338.312.500</b>		<b>19.061.076.900</b>		<b>21.005.953.500</b>		<b>20.846.681.870</b>		<b>20.833.499.308</b>		<b>62.686.134.678</b>	
<b>3 Kecamatan Pariaman Selatan</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	344.950.000	84,15	309.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	258.590.500	87	190.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	9.350.000	B	6.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	90,00	3.063.868.000	91,00	2.455.201.444	91,00	3.063.868.000	91,00	8.582.937.444	Kecamatan Pariaman Selatan	
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		BB		BB			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	73.650.000	0	36.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	78.934.000	100	106.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan	%	-	-	-	-	65,00	140.092.000	70,00	41.412.000	70,00	140.092.000	70,00	321.596.000	Kecamatan Pariaman Selatan	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	-	-	-	-	100		100		100		100			Kecamatan Pariaman Selatan
		IKM Desa	Nilai	-	-	-	-	90,00		91,00		91,00		91,00			Kecamatan Pariaman
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	96.850.000	100	79.915.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	%	-	-	-	-	65,00	50.500.000	70,00	9.634.000	70,00	68.790.000	70,00	128.924.000	Kecamatan Pariaman Selatan	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100		100		100		100			Kecamatan Pariaman Selatan
9	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Jenis Produk Usaha Mikro Wilayah Kecamatan Yang Dipromosikan	Jenis	4	5	10.400.000	7	11.526.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Event Seni Budaya Yang diperlombakan	Event	1	1	62.500.000	1	74.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
11	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Hari Kebersaran Nasional Yang Diperingati	Kali	3	3	102.240.000	3	92.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	67	70	48.100.000	74	50.816.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa Yang Dibina	Desa	16	16	49.373.000	16	39.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	%	74	78	3.953.000	83	4.150.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	%	-	-	-	-	100	5.113.500	100	4.000.000	100	5.113.500	100	14.227.000	Kecamatan Pariaman Selatan	
		Persentase santri yang berkualitas	%	-	-	-	-	75,00		80,00		80,00		80,00		Kecamatan Pariaman Selatan	
15	Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	18.500.000	100	8.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	70	72		74		-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
5	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100	25.700.000	100	11.176.500	100	25.700.000	100	62.576.500	Kecamatan Pariaman Selatan	
16	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaan yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	275.673.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Selatan
6	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Desa	-	-	-	-	55	86.706.500	55	10.064.000	55	86.706.500	55	183.477.000	Kecamatan Pariaman Selatan	
		<b>Jumlah</b>				<b>1.167.390.500</b>		<b>1.296.781.500</b>		<b>3.371.980.000</b>		<b>2.531.487.944</b>		<b>3.390.270.000</b>		<b>9.293.737.944</b>	
<b>4</b>	<b>Kecamatan Pariaman Timur</b>																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	385.144.050	84,15	329.118.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	436.361.642	87	449.452.426	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	6.125.000	B	6.308.650	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai		-	-	-	-	90,00	3.157.185.035	91,00	1.845.437.319	91,00	1.845.437.319	91,00	6.848.059.673	Kecamatan Pariaman Timur
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai						BB		BB		A		A		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%						100		100		100		100		
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	55.515.200	0	43.094.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	108.030.000	100	90.575.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang Desa/kelurahan	%	-	-	-	-	-	70,00	70.552.000	75,00	60.991.455	75,00	2.321.866.999	75,00	2.453.410.454	Kecamatan Pariaman Timur
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	-	-	-	-	-	100		100		100		100		Kecamatan Pariaman Timur
		IKM Desa	Nilai	-	-	-	-	-	90,00		91,00		91,00		91,00		Kecamatan Pariaman Timur
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS Yang ditangani	%	55	57	23.915.600	60	22.231.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	51.360.800	100	58.468.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan	%	-	-	-	-	-	70,00	56.688.300	75,00	60.500.000	75,00	87.865.243	75,00	205.053.543	Kecamatan Pariaman Timur
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	-	100		100		100		100		Kecamatan Pariaman Timur
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Jenis Produk Usaha Mikro Wilayah Kecamatan Yang Dipromosikan	Jenis	4	6	7.399.000	8	16.124.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Event Seni Budaya Yang diperlombakan	Event	1	1	104.000.000	1	107.349.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
12	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Hari Kebesaran Nasional Yang Diperingati	Kali	3	3	114.090.050	3	97.019.100	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	69	72	30.843.600	74	37.034.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
14	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah APDes Desa Yang Diawasi pelaksanaannya	Desa	55	55	5.002.100	55	5.502.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun								
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa Yang Dibina di Wilayah kecamatan	Desa	16	16	49.373.000	16	39.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
16	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	21.351.600	100	7.499.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	71	73		75		-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman
17	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100	19.537.200	100	19.537.200	100	19.537.200	100	58.611.600		Kecamatan Pariaman Timur
17	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaan yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	282.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pariaman Timur
18	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	%	-	-	-	-	100	14.548.000	100	14.548.000	100	14.548.000	100	43.644.000		Kecamatan Pariaman Timur
	<b>Jumlah</b>					<b>1.408.511.642</b>		<b>1.602.445.076</b>		<b>3.318.510.535</b>		<b>2.001.013.974</b>		<b>4.289.254.761</b>		<b>9.608.779.270</b>	
<b>G URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																	
<b>1</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	611.388.000	84,15	623.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	87.700.000	87	91.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Nilai	-	-	-	-	100,00	1.509.730.000	100,00	1.808.856.549	100,00	1.808.856.549	100,00	5.127.443.098		Kesbang pol
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai					BB		BB		BB		BB			
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	%					100		100		100		100			





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi Kinerja Per Tahun				Target Kinerja Per Tahun									
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Indeks Demokrasi	%	62,50	64,50	806.710.000	66,45	979.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol, Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
7	Program Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	124.350.000	100	341.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
		Persentase Ormas yang aktif	%	88,15	89,10		90,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase penanganan konflik antar agama	%		-	-	-	-	100	187.050.000	100	17.500.000	100	205.607.802	100	410.157.802		Kesbang pol
3	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%		-	-	-	-	100	509.720.000	100	314.295.000	100	-	100	824.015.000		Kesbang pol
4	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Partai Politik dan Ormas Yang aktif	%		-	-	-	-	-	-	90,64	125.000.000	90,64	125.000.000	90,64	250.000.000		Kesbang pol
<b>Jumlah</b>						<b>1.662.248.000</b>		<b>2.068.732.900</b>		<b>2.206.500.000</b>		<b>2.265.651.549</b>		<b>2.139.464.351</b>		<b>6.611.615.900</b>		





## **BAB VIII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**



## BAB VIII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Sementara Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

### 8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.



**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023**  
**Pemerintah Kota Pariaman**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Realisasi		Target			Kinerja Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9
<b>I</b>	<b>Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatera;</b>								
1	% Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	7,5	8,5	9,5	10,5	12,5	15	15
2	% Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	10,5	11,0	4,5	8,5	10,5	12,5	12,5
3	Persentase Pertumbuhan Spending Of Money	%	NA	3,5	3	3,5	3,8	4,1	4,1
<b>II</b>	<b>Misi II : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;</b>								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	76,26	76,70	76,90	77,22	77,54	77,86	77,86
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,52	14,53	14,54	14,55	14,56	14,58	14,58
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,36	10,37	10,59	10,84	11,09	11,34	11,34
4	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,87	70,15	70,28	70,58	70,88	71,18	71,18
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	-	-	-	10,02	9,52	8,9	8,9





NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Realisasi		Target			Kinerja Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9
5	Pendapatan/PDRB Perkapita	(Juta/Rp)	12,61	12,96	12,80	13,15	13,55	14,00	14,00
<b>III Misi III : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City</b>									
1	Indeks RB	Angka	49,25 (C)	51,52 (CC)	53,25 (CC)	55,50 (CC)	57,65 (CC)	60,5 (B)	60,5 (B)
2	Nilai Sakip	Nilai	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,15 (B)	66,20 (B)	70,05 (BB)	70,05 (BB)
3	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks SPBE	Skor	2,61	2,87	2,87	3,1	3,2	3,25	3,25
5	Indeks Profesional ASN	Nilai	-	33,12	41,86	47,10	50,15	55,20	61,50
6	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	78,80 (Baik)	80,25 (Baik)	82,40 (Baik)	84,50 (Baik)	86,65 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,35 (Sangat Baik)
<b>IV Misi IV : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana</b>									
1	Indeks Kota Layak huni	Angka	-	-	-	60	61	62	62





NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Realisasi		Target			Kinerja Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9
2	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	61,51	61,95	62,19	64,50	66,27	70,00	70,00
3	Indeks Kualitas Lingkungan	%	45,52	47,24	60,29	63,13	63,60	64,06	64,06
4	% Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	76,25	78,50	79,45	80,24	81,78	83,33	83,33
5	% Pengurangan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	%	184,36 Ha	16,49	10,35	8,46	7,69	4,64	4,64
6	Indeks Resiko Bencana	Kategori	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)
7	Indeks Ketentraman dan ketertiban	Indeks	60,2	62,4	64,6	66,7	68,5	70,4	70,4
<b>V</b>	<b>Misi V : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal</b>								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,47	5,30	-1,32	5	5,5	5,7	5,7
2	Gini Ratio	Nilai	0,316	0,300	0,310	0,300	0,295	0,294	0,294
3	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	15,12	15,36	15,11	15,27	15,43	15,59	15,59
4	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	18,66	18,27	18,37	18,47	18,57	18,67	18,67
5	% Pertumbuhan Invetasi	%	1,2	1,5	1,6	1,7	1,85	2,0	2,0
6	Angka Kemiskinan (%)	%	5,3	4,76	4,10	3,90	3,70	3,60	3,60
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,72	5,42	5,73	5,43	5,10	4,80	4,80



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Realisasi		Target			Kinerja Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6952	0,7206	0,7253	0,7485	0,7710	0,7920	0,7920



## 8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2018-2023 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kota Pariaman secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Pariaman

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertumbuhan PDRB	%	<p>Dimana</p> $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	5,47	5,3	-1,32	5	5,5	5,7	5,7	BPS/Bappeda
2	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Rp juta	<p>Dimana:</p> $\frac{PDRB}{Penduduk \text{ Pertengahan Tahun}}$ <p>Pi = tahun pengamatan PDRB Qi = tahun pengamatan PDRB sebelumnya n= tahun ...</p>	12,61	12,96	12,80	13,15	13,55	14,00	14,00	BPS/Bappeda
3	Indeks Gini	nilai	<p>Dimana :</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i+1})$ <p>Pi: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G &lt; 0,3 = Ketimpangan Rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang G &gt; 0,5 = Ketimpangan tinggi</p>	0,316	0,300	0,310	0,300	0,295	0,294	0,294	BPS/Bappeda





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	100 - angka kemiskinan	94,7	95,24	95,9	96,1	96,3	96,4	96,4	BPS/Bappeda
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	Dimana $\frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ $X_{(1)} = \text{Indeks Harapan Hidup}$ $X_{(2)} = \text{Indeks Pendidikan}$ = 2/3 (indeks melek huruf)+ 1/3 (indeks rata rata lama sekolah) $X_{(2)} = \text{Indeks Standar Hidup Layak}$ $\text{Indeks } X_{(3)} = \frac{X_{(3)} - X_{(3)\min}}{X_{(3)\max} - X_{(3)\min}}$ dimana: $X_{(i)} = \text{Indikator ke } - i (i = 1,2,3)$	76,26	76,70	76,90	77,22	77,54	77,86	77,86	BPS/Bappeda
6	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	10,36	10,37	10,59	10,84	11,09	11,34	11,34	BPS/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
7	Angka usia harapan hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69,87	70,15	70,28	70,58	70,88	71,18	71,18	BPS/Dinas Kesehatan
8	Persentase balita gizi buruk	%	$\frac{\text{jumlah balita gizi buruk}}{\text{jumlah balita}} \times 100\%$	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	$\frac{\text{banyaknya balita gizi kurang}}{\text{jumlah balita}} \times 100\%$	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Desa Siaga Aktif		$\frac{\text{jumlah desa siaga aktif}}{\text{jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	BPBD





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{\sum \text{penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	5,72	5,42	5,73	5,43	5,10	4,80	4,80	BPS/Dinas PMPTSP & Naker
12	Rasio penduduk yang bekerja	%	$\frac{\sum \text{penduduk yang bekerja}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$	90	90	88	86	86	88	88	Dinas PMPTSP & Naker
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	nilai	$\frac{\sum \text{Nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total unsur yg terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	78,80 (Baik)	80,25 (Baik)	82,40 (Baik)	84,50 (Baik)	86,65 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,35 (Sangat Baik)	Bag. Organisasi
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	$\frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	11,16	11,80	12,50	13,40	14,30	15,00	15,00	BPKPD
15	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuanga daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD/Inspektorat
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	84	86	87	88	89	90	90	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Pertanian/Perkebunan}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	18,66	18,27	18,37	16,00	15,50	15,00	15,00	BPS/Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Pariwisata}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	10,5	11,0	4,5	8,5	10,5	12,5	12,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Kelautan Perikanan}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	7,3	7,3	7,4	7,6	7,8	7,9	7,9	BPS/Bappeda/Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
20	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	15,22	15,36	15,11	15,27	15,43	15,59	15,59	BPS/Bappeda/Disko perindagkop & KUKM





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Industri}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	7,44	6,86	6,89	8,90	9,20	9,50	9,50	BPS/Bappeda/Disko perindagkop & KUKM

## ASPEK DAYA SAING DAERAH

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Angka kriminalitas yang tertangani	angka		375	156	340	340	320	315	315	Kepolisian/Kesbang pol/Bappeda
2	Rasio ketergantungan	rasio	$\frac{\sum \text{Penduduk usia} < 15 \text{ th} + \text{usia} > 64 \text{ th}}{\sum \text{Penduduk usia} 15 - 64} \times 100\%$	56,15	56,2	56,3	56,41	56,48	56,52	56,52	BPS/Bappeda

## ASPEK PELAYANAN UMUM

## I. Layanan Urusan Wajib Dasar

## 1. Pendidikan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Angka Partisipasi Kasar</b>											
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa PAUD (TK/RA/KB/SPS/TPA)}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 6 tahun}}$	60,55	60,55	61,32	61,44	62,05	62,43	62,43	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	$\frac{\text{Jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$	101,65	101,65	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	$\frac{\text{Jumlah siswa di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	89,75	89,75	90,05	90,7	90,75	91,15	91,15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>Angka Partisipasi Murni</b>											
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 - 12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$	90,84	90,84	91,25	91,44	91,57	92,2	92,2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 - 15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	68,9	68,9	69,35	70,85	71,87	72,56	72,56	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>Angka Putus Sekolah</b>											
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun yang pernah/sedang bersekolah lagi}} \times 100\%$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 Tahun yang pernah/sedang bersekolah lagi}} \times 100\%$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>Angka Kelulusan</b>											
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI Pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	99,83	99,83	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs Pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	99,04	99,04	99,85	99,65	99,7	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>Angka Melanjutkan (AM)</b>											





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	94,14	94,14	94,28	94,5	94,72	95,12	95,12	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	100	99,52	99,52	99,81	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>Fasilitas Pendidikan</b>											
12	Ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh ruang kelas SD/MI}} \times 100\%$	67,24	67,24	68,1	68,65	68,93	69,15	69,15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
13	Ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh ruang kelas SMP/MTs}} \times 100\%$	82,76	83,76	83,51	83,62	83,88	83,97	83,97	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	rasio	$\frac{\text{Jumlah sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk usia (7 s.d 12) thn}}$	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
15	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	rasio	$\frac{\text{Jumlah sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk usia (13 s.d 15) thn}}$	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
16	Rasio siswa/guru sekolah SD	rasio	$\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI}}{\text{Jumlah guru SD/MI}}$	16,82	16,82	16,8	16,97	17,11	17,57	17,57	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
17	Rasio siswa/guru sekolah SMP/MI	rasio	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah guru SMP/MTs}}$	14,04	14,04	14,1	14,55	14,61	15,81	15,81	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
18	Rasio siswa per kelas jenjang SD/MI	rasio	$\frac{\text{Jumlah siswa Sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah kelas jenjang pendidikan SD/MI}}$	24,32	24,32	24,85	25,96	26,71	27,89	27,89	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
19	Rasio siswa per kelas jenjang SMP/MTs	rasio	$\frac{\text{Jumlah siswa Sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah kelas jenjang pendidikan SMP/MTs}}$	29,66	29,66	29,95	30,21	30,43	30,52	30,63	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Persentase Sekolah SD/MI Akreditasi A & B	%	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI Akreditasi A + B}}{\text{Jumlah Sekolah SD/MI}} \times 100\%$	73,24	73,24	75,48	76,82	76,99	77,86	77,86	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
21	Persentase Sekolah SMP/MTs Akreditasi A & B	%	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs Akreditasi A + B}}{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$	62,46	62,46	63,76	63,81	64,25	64,59	64,79	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
22	Persentase Guru Layak SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah guru SD/MI layak}}{\text{Jumlah seluruh guru SD/MI}} \times 100\%$	88,12	88,12	88,79	89,62	89,76	90,27	90,27	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
23	Persentase Guru Layak SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah guru SMP/MTs layak}}{\text{Jumlah seluruh guru Smp/MTs}} \times 100\%$	93,73	93,73	94,24	94,48	94,17	94,58	94,58	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

## 2. Kesehatan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka	Dimana : $AKB = \frac{D_{0-1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$  $D_{0-1th}$ =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.  $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	21	21	14	12	11	10	10	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka	Dimana: $AKB = \frac{D_{0-5th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$	21	21	14	12	11	10	10	Dinas Kesehatan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p><b>D<sub>0-5</sub></b></p> <p>= Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu.</p> <p><math>\Sigma</math>Lahir Hidup = Jumlah</p>								
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	18	18	13	13	12	12	12	Dinas Kesehatan
4	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	$\frac{\text{Jumlah Posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1000$	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	Dinas Kesehatan
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah rumah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Dinas Kesehatan
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Dinas Kesehatan
7	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	1,86	1,86	1,82	1,97	2,03	2,37	2,37	Dinas Kesehatan
8	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah tenaga paramedis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	3,02	3,02	3,36	3,47	3,51	3,67	3,67	Dinas Kesehatan
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanaan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	92,58	92,58	95,84	100	100	100	100	Dinas Kesehatan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	$\frac{\text{Jumlah komplikasi ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	93,23	91,72	92,49	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	$\frac{\text{Jumlah Desa/ kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	80,28	80,28	81,83	82,48	83,55	84,66	84,66	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di fi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	99	99	99	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama}} \times 100\%$	89,28	89,28	89,41	89,87	89,92	90,23	90,23	Dinas Kesehatan
14	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Penduduk < 15 tahun}} \times 100\%$	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
15	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerja pada keurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	85,82	85,82	86,44	86,74	87,92	88,19	88,19	Dinas Kesehatan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang di temukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	48,53	48,53	47,81	47,25	46,2	46,1	46,1	Dinas Kesehatan
17	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	nilai	$\frac{\text{Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	192,11	192,11	190	188	187	186	185	Dinas Kesehatan
18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	nilai	$\frac{\text{Jumlah pasien TB yang meninggal}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$	5,07	6,89	4,5	5,3	5	4	4	Dinas Kesehatan
19	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	$\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS}}{\text{Jumlah Pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut}} \times 100\%$	14,8	14,8	14	14	13	13	13	Dinas Kesehatan
20	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	$\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Pasien baru TB paru BTA yang diobati wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	75,04	75,04	75,98	76,26	76,59	77,29	77,29	Dinas Kesehatan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	$\frac{\text{Jumlah pasien HIV dan AIDS disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Dinas Kesehatan
23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh pasien miskin di Kota/Kabupaten}} \times 100$	15,38	15,38	16,2	16,8	17	17,5	17,5	Dinas Kesehatan
24	Cakupan kunjungan bayi	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	91,23	91,23	93,26	94,52	100	100	100	Dinas Kesehatan
25	Cakupan puskesmas	%	$\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$	175	175	175	175	175	175	175	Dinas Kesehatan
26	Cakupan pembantu puskesmas	%	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 disatu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah psasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama}} \times 100\%$	59	59	60	60	60	61	61	Dinas Kesehatan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	$\frac{\text{Jumlah pembantu puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	91,31	91,31	92,67	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
28	Cakupan pelayanan nifas	%	$\frac{\text{Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	88,28	88,28	89,45	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
29	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100\%$	57,29	57,29	59,52	62,09	63,71	65,26	65,26	Dinas Kesehatan
30	Cakupan pelayanan anak balita	%	$\frac{\text{Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	82,1	82,1	84,76	86,3	87,5	90	90	Dinas Kesehatan
31	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP - ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
32	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	92,48	92,48	95,26	96,37	96,81	97,35	97,35	Dinas Kesehatan



No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100\%$	99,21	99,21	99,59	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
34	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	$\frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24jam dalam}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
35	Persentase balita gizi buruk	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	Dinas Kesehatan
36	Prevalensi balita gizi kurang	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	0,82	0,82	0,74	0,71	0,69	0,65	0,65	Dinas Kesehatan
37	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

## 3. Penataan Ruang

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$	1.372,60	1375,2	1374,63	1354,99	1374,63	1354,99	1.374,63	Dinas PUPR & Pertanahan
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	465,9	465,8	465,6	465,6	465,4	465,4	465,2	Dinas PUPR & Pertanahan
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	69,26	51,76	64,3	66,6	68,1	70	70	Dinas PUPR & Pertanahan
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	$\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}} \times 100\%$	10,2	10,2	10,4	10,5	10,8	11	11	Dinas PUPR & Pertanahan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	70,25	70,25	75,38	75,93	76,88	76,91	76,91	Dinas Perkim LH
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	$\frac{\text{Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten (Km)}} \times 100\%$	1,36	1,36	1,2	1,1	1	1	1	Dinas PUPR & Pertanahan
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$	40,59	41,15	42,5	43,85	44,6	45,25	45,25	Dinas PUPR & Pertanahan
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	$\frac{\text{Luas daerah yang tergenang}}{\text{Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang}} \times 100\%$	0,21	0,21	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	Dinas PUPR & Pertanahan
9	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	74,2	74,2	76,3	77,35	78,6	80,1	80,1	Dinas PUPR & Pertanahan
10	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	$\frac{\text{panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	85	85	85	85	85	85	85	Dinas PUPR & Pertanahan
11	Persentase penduduk berakses air minum	%	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	65	65	65	76	80	82	82	Dinas PUPR & Pertanahan
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	61,35	61,35	61,77	61,82	62	62,3	62,3	Dinas PUPR & Pertanahan
13	Persentase areal kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	0,23	0,23	0,22	0,21	0,2	0,2	0,2	Dinas PUPR & Pertanahan
14	Persentase areal kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	0,23	0,23	0,22	0,21	0,2	0,2	0,2	Dinas PerkimLH





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	$\frac{\text{Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA}}{\text{Total volume sampah}} \times 100\%$	0,72	0,72	0,74	0,76	0,78	0,8	0,8	Dinas PerkimLH
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Sosial
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	137,00	137	137	135	137	135	137,00	Bagian Perekonomian & Kesra
<b>Penataan Ruang:</b>											
18	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	Dinas PUPR
19	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	rasio	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber- IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$	1,62	1,62	1,84	1,84	1,92	2	2	Dinas PUPR
20	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$	0,24	0,24	0,21	0,2	0,19	0,18	0,18	Dinas PUPR
21	Ketaatan terhadap RTRW	%	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	95	96	97	98	98	98	99	Dinas PUPR

## 4. Perumahan dan Permukiman

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rasio rumah layak huni	rasio	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,32	0,32	0,35	0,37	0,38	0,39	0,39	Dinas PerkimLH
2	Rasio permukiman layak huni	rasio	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$	1	1	1	1	1	0	0	Dinas PerkimLH
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	92,52	92,9	92,32	91,2	91,63	89,63	91,53	Dinas PerkimLH
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	1,72	1,72	1,89	1,93	2,04	2,32	3,13	Dinas PerkimLH
5	Persentase permukiman yang tertata	%	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100$	70,47	70,64	70,63	70,63	70,71	70,71	70,79	Dinas PerkimLH
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	1,18	1,18	1,05	0,8	0,7	0,6	0,6	Dinas PerkimLH
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,2	0,2	Dinas PerkimLH

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{1 \text{ Wilayah kerja Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	25	25	25	25	25	25	25	Satpol PP & Damkar
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Tibum & Tranmas	%	$\frac{\text{Pelanggaran Tibum Tranmas yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Tibum Tranmas yang terjadi}} \times 100\%$	85	85	88	90	90	90	90	Satpol PP & Damkar
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	$\frac{\text{Luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kota}} \times 100\%$	45,56	50,88	55,09	58,88	60,98	65,09	65,09	Satpol PP & Damkar
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	80,89	80,89	83,75	83,54	84,33	85,75	86,71	Satpol PP & Damkar
5	Persentase Penegakan PERDA	%	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar

## 6. Sosial

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	72,74	75,65	76	77	78	79	79	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	85,34	85,34	86,73	86,89	87,45	88,23	88,23	Dinas Sosial
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$	74,74	74,74	75,77	76,27	76,52	77,13	77,13	Dinas Sosial





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase KUBE PMKS yang dapat berkembang secara mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah KUBE yang mandiri}}{\text{Jumlah KUBE PMKS yang diberdayakan}} \times 100\%$	65,54	65,54	67,33	68,16	69,12	67,35	67,35	Dinas Sosial
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$	5,2	5,2	5,55	5,85	5,85	6	6	Dinas Sosial
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	24,44	26,43	28	28	30	30	30	Dinas Sosial





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## II. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

## 7. Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha peekrja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$	35,63	35,63	32,12	31,3	30,25	29,5	29,5	Dinas PMPTSP & Naker
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	$\frac{\sum \text{Kasus yang diselesaikan melaiu i perjanjian Bersama (PB)}}{\sum \text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	55,27	55,27	53,87	53,25	53,01	52,37	52,37	Dinas PMPTSP & Naker
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	9,12	9,12	9,5	10	10	11	11	Dinas PMPTSP & Naker
4	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	angka	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	9.195	9195	9453	9629	9655	9702	9.702	Dinas PMPTSP & Naker
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftaran berbasis kompetensi}} \times 100\%$	78,13	78,13	78,4	79,4	80	80,2	80,2	Dinas PMPTSP & Naker
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftaran pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$	93,15	93,15	94,1	94,21	94,43	94,5	94,5	Dinas PMPTSP & Naker
7	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1,S2,S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	15,93	15,93	16,02	16,26	16,35	17,01	17,01	Dinas PMPTSP & Naker
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 - 64 Tahun)}} \times 100\%$	60,32	60,32	60,45	60,55	61,03	61,5	61,5	Dinas PMPTSP & Naker
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	5,72	5,42	5,73	5,43	5,1	4,8	4,8	Dinas PMPTSP & Naker
10	Rasio penduduk yang bekerja	rasio		88,64	88,64	89,23	90,14	90,37	90,65	90,65	Dinas PMPTSP & Naker





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100\%$	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	DP3AKB
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	$\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$	5	5	5	5	5	5	5	DP3AKB
3	Persentase partisipasi perempuan di lingkup pemerintah Kota Pariaman	%	$\frac{\text{Jumlah kasASN perempuan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	75,46	75,46	77,57	77,89	78,42	79	79	DP3AKB
4	Rasio KDRT	rasio	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	DP3AKB
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$	50,55	50,55	51,2	51,5	52,4	53,5	53,5	DP3AKB
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan atau pengaduan yang masuk keunit pelayanan terpadu}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	$\frac{\text{Jumlah korban KtP atau A memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kerja kesehatan terlatih ndipuskesmas mampu tata laksana KtP atau A atau PPT atau PKT di Rs disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP atau A yang terdata datang ke puskesmas mampu terlaksana kasus KtP atau A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang - undangan yang berkaitan dengannkekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	jumlah	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hokum (pendampingan)	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali kekeluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB

## 3. Pangan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ketersediaan pangan utama	%	$\frac{\text{Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	153,5	153,5	155,46	156,87	157,82	158	158	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			2.427,00	2427	2712	2836	2867	2890	2.890,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	92,35	92,35	93,23	94,36	94,45	95	95	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
4	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	84	86	87	88	89	90	90	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penguatan cadangan pangan	%	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Kabupaten atau Kota}}{10 \text{ Ton}} \times 100\%$	92,78	92,78	93,53	94,5	95	2292.00.00	95,5	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
6	Penanganan daerah rawan pangan			95,3	25.61 atau 101.71	1,176388889 atau 111.71	1,176388889 atau 111.71	1,302777778 atau 123.71	1,302777778 atau 123.71	34.94 atau 138.71	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

## 4. Pertanian

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase luas lahan bersertifikat dalam satu tahun	%	$\frac{\text{Jumlah persil tanah pemko yang disertifikatkan dalam satu tahun}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$	65,4	65,4	70,04	75	77	80	80	Dinas PUPR & Pertanian
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	$\frac{\text{Jumlah kasus yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR & Pertanian

## 5. Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Ada/ tidak ada	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Perkim LH
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	Rumus metode IP: $\text{Nilai Relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$	41	41	46	47	50	53	53	Dinas Perkim LH





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	$IP = \sqrt{\frac{(C_i \text{ atau } L_{ij}) \text{ Rata - rata} + (C_i \text{ atau } L_{ij})^2 \text{ maksimum}}{2}}$ <p> <math>0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow</math> Cemar ringan  <math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow</math> Cemar sedang  <math>PI_j &gt; 10,0 \rightarrow</math> Cemar berat  <math>IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]</math> </p>	87	89	90	91	92	93	93	Dinas Perkim LH
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks		24	26	28	31	33	36	36	Dinas Perkim LH
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PPU LH dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$	75	75	80	80	85	85	85	Dinas Perkim LH
6	Monitoring Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	jumlah	Jumlah Kecamatan di monitoring kerusakan tanah	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Perkim LH
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkim LH
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Perkim LH
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkim LH
10	Timbulan sampah yang ditangani	%		78	78	79	80	82	85	85	Dinas Perkim LH





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	5,48	5,48	5,2	5,5	5,8	6	6	Dinas Perkim LH
12	Persentase cakupan area pelayanan	%	$\frac{\text{Jumlah area pelayanan sampah (km2 atau ha)}}{\text{Luas area Kabupaten/ kota (km2 atau ha)}} \times 100\%$	81	83	85	85	87	87	88	Dinas Perkim LH
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah sampel yang tertangani (ton)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di Kabupaten atau kota (ton)}} \times 100\%$	68	68	73	75	77	80	80	Dinas Perkim LH
14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten / kota	nilai	Nilai TPA (Program Adipura) $\geq 71$	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Perkim LH

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	97,59	97,59	98,5	98,78	98,8	99	99	Dinas Dukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$	15,92	15,85	15,85	16,76	17,45	18	18	Dinas Dukcapil
3	Rasio pasangan berakte menikah	rasio	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte menikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	10,23	10,23	11,08	11,56	12	12,5	12,5	Dinas Dukcapil
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah/belum	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	$\frac{\text{Jumlah KTP ber - NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	96,5	96,5	97	97,5	98	98	98	Dinas Dukcapil





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan}}$	22,38	22,38	23,24	23,76	24	24,5	24,5	Dinas Dukcapil

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	angka	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	angka	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	8	8	8	8	8	8	8	DPMD
3	Persentase LPM aktif	%	$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
4	Persentase PKK aktif	%	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah Jumlah PKK}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
5	Persentase Posyandu aktif	%	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah Jumlah PKK}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DPMD

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			1,45	1,45	1,3	1,44	1,55	1,7	1,7	DP3AKB
1	Total Fertility Rate (TFR)		Dimana: $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	2,2	2,2	2,3	2,45	2,55	2,65	2,65	DP3AKB





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$ASFR_i = \frac{bi}{P_{ij}} \times K$ <i>TFR = Angka Kelahiran Total</i> <i>ASFR = Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur</i>								
2	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek	dokumen	Jumlah dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	$\frac{\text{jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dikampung KB}}{\text{jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$	10	10	10	10	10	10	10	DP3AKB
4	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	angka	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5	5	5	5	5	5	5	DP3AKB
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	angka	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan	2	2	2	2	2	2	2	DP3AKB
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	angka	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{jumlah seluruh keluarga}}$	3,1	3,1	2,8	2,8	2,6	2,6	2,5	DP3AKB
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	angka	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	63,38	63,38	64	65	66	67	67	DP3AKB
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	$\frac{\text{jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	DP3AKB
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	$\frac{\text{jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	16,8	16,8	15	14,5	14	13,5	13,5	DP3AKB
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	$\frac{\text{jumlah aseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{jumlah akseptor Kb}} \times 100\%$	11,5	11,5	11,7	11,8	11,9	12	12	DP3AKB





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah asektor KB}} \times 100\%$	25	25	26	26,5	27,3	27,5	27,5	DP3AKB
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber - KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%$	75,8	75,8	76,7	77	78	79	79	DP3AKB
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber - KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%$	66,56	66,56	67	67	67	68	68	DP3AKB
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber - KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100\%$	54,87	54,87	55,98	56,14	56,2	56,5	56,5	DP3AKB
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	angka	Jumlah PPKS	7	7	7	7	7	7	7	DP3AKB
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	angka	Jumlah kelompok PIK Remaja	65	65	65	70	70	70	70	DP3AKB
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB atau PLKB}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber - KB mandiri}}{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS}} \times 100\%$	59,87	59,87	60,26	60,56	60,79	61	61	DP3AKB
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	$\frac{\text{Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 100\%$	25,16	25,16	25,57	25,86	26,17	26,5	26,5	DP3AKB
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Persediaan alat dan obat Kontrasepsi Rata - Rata pemakaian alat dan obat K ontrasepsi per bulan}}{\text{Rata - Rata pemakaian alat dan obat K ontrasepsi per bulan}} \times 100\%$	1,46	1,88	2	2	2,5	2,5	2,77	DP3AKB





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	%	$\frac{\text{Persediaan alat dan obat Kontrasepsi Rata - Rata pemakaian alat dan Kontrasepsi per bulan}}{\text{Rata - Rata pemakaian alat dan Kontrasepsi per bulan}} \times 100\%$	1,46	1,88	2	2	2,5	2,5	2,77	DP3AKB
22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	$\frac{\text{Jumlah Faksen dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah Faksen dan jejaring}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	angka	Jumlah jenis data mikro keluarga yang tersedia	35	40	45	45	50	50	50	DP3AKB
24	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	$\frac{\text{Jumlah (umur kawin pertama wanita} \times \text{jumlah wanita menurut usia kawin pertama)}}{\text{Jumlah wanita menurut usia kawin pertama}}$	21,5	21,5	22,5	23	23	23	23	DP3AKB
25	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	$\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{\text{Jumlah APBD dan APBDes}} \times 100\%$	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	DP3AKB

## 9. Perhubungan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	angka	Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	1387	906	1498	972	1702	1000	1.000,00	Dinas Perhubungan
2	Jumlah dermaga	angka	Jumlah dermaga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum	angka	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar	1387	906	1498	972	1702	1000	1.000,00	Dinas Perhubungan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	angka	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat (load factor)	%	$\frac{\text{Jumlah penumpang rata - rata atau RIT}}{\text{Kapasitas kendaraan}} \times 100\%$	35	35	37,5	40	43	45	45	Dinas Perhubungan
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR pada Tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum pada tahun } n} \times 100\%$	91	91	92	93	93	94	94	Dinas Perhubungan
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu - rambu pada Tahun } n}{\text{Jumlah rambu - rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	$\frac{\text{Jumlah jalan}}{\text{Jumlah kendaraan}}$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Perhubungan

## 10. Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan layanan jaringan komunikasi	%	$\frac{\text{Jumlah jaringan yang terpasang}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$	75	75	80	80	85	90	90	Dinas Kominfo
2	Persentase penanganan permasalahan jaringan	%	$\frac{\text{Jumlah gangguan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan jaringan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
3	Cakupan integrasi aplikasi/sistem informasi	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah aplikasi yang ada}} \times 100\%$	45	45	50	55	60	65	65	Dinas Kominfo
4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah KIMi aktif}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100\%$	45	45	48	55	60	65	65	Dinas Kominfo
5	Persentase penanganan serangan siber	%	$\frac{\text{Jumlah serangan siber yang terselesaikan}}{\text{Jumlah siber yang terjadi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Jumlah akses masyarakat terhadap informasi publik secara digital	angka	Jumlah masyarakat / publik yang mengakses informasi publik pada media website padang.go.id selama 1 tahun	14870 view	14938 view	19500 view	19500 view	19500 view	19700 view	19800 view	Dinas Kominfo

## 11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase koperasi aktif	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	85	85	85	88	88	88	88	Disperindagkop & KUKM
2	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan	angka	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan	1.321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	Disperindagkop & KUKM

## 12. Penanaman Modal

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	angka	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0	0	0	0	0	DPMPPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	1.237.325.000	79.027.000.000	2.556.368.000	3.601.800	2.815.889.500	12.609.000	3.475.411.000	DPMPPTSP
		Rp	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	151.243.394.000	317.802.600.000	362.129.182.000	317.802,60	552.572.076.000	125.150,20	543.014.970.000	DPMPPTSP





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rasio daya serap tenaga kerja	rasio	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA}}{\text{jumlah seluruh PMA}} \times 100\%$	23,29	23,29	20	22,5	23	24	24	DPMPSTP

## 13. Kepemudaan dan Olah Raga

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	$\frac{\text{jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{jumlah seluruh anggota pemuda}} \times 100\%$	78,56	78,56	80,52	82,16	84,76	88	88	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase Wirausaha Muda	%		360	364	370	61,54	381	68,53	392	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%		14,71	14,71	17,65	17,65	17,65	17,65	21	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%		59,64	59,64	60,23	61,54	62,33	63	63	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Cakupan Pembinaan atlet muda	%		8,32	8,32	8,5	8,8	9	9,5	9,5	Dinas Pemuda dan Olahraga
		%	a. Pelajar	2,91	2,91	3,22	3,26	3,89	3,95	3,95	Dinas Pemuda dan Olahraga
		%	b. Lainnya	6,8	6,8	6,5	6,5	7,78	7,78	7,78	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Jumlah Prestasi Olahraga	angka	Jumlah Prestasi cabang Olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun tingkat Nasinal	2	3	4	5	5	5	6	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%		78,42	78,42	79,7	80,25	81,5	82	82	Dinas Pemuda dan Olahraga

## 14. Statistik

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi	Target Capaian	Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggung
----	----------------------------------	--------	-------	------------------------------	-----------	----------------	---------------	-----------------------------





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah produk statistik sektoral	dokumen	Jumlah analisis/tinjauan statistik sektoral yang diterbitkan selama 1 tahun	2 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Dinas Kominfo
2	Buku "Kota Pariaman Dalam Angka"		Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo

## 15. Persandian

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kominfo

## 16. Kebudayaan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	angka	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	8	0	3	8	8	8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	angka	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	angka	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

## 17. Perpustakaan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	angka	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	angka	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}{\text{jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}$	1.500	1.500	1.500	1600	1600	1600	1600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah perpustakaan yang dikelola dengan baik	angka	Jumlah Perpustakaan yang dikelola dengan baik pada tahun n	1	1	1	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	angka	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	18.769	19245	23000	18000	25500	18000	28.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	angka	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	8.059	10059	9090	10059	9350	10392	11.595	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	angka	Jumlah Pustakawan yang bersertifikat	1	1	1	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

## 18. Kearsipan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	Jumlah OPD yang telah mengelola arsip secara baku	2	3	4	5	6	7	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah OPD yang memiliki SDM pengelola kearsipan	OPD	Jumlah OPD yang sudah menetapkan SDM pengelola kearsipan	27	27	27	28	28	28	28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

## III. Layanan Urusan Pilihan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 1. Pariwisata

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kunjungan wisata Mancanegara	%	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Mancanegara}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara yang direncanakan}} \times 100\%$	80	80	15	85	85	85	85	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		angka	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung dalam 1 Tahun	6.105	7.835	6.210	4.007	6.426	4.508	6.649	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Kunjungan wisata Nusantara	%	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Nusantara}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara yang direncanakan}} \times 100\%$		134	1	100	1	100		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		angka	Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung dalam 1 Tahun	2,4 juta	3,1 juta	600 Ribu	1,2 Juta	1,4 Juta	1'5 Juta	1'5 Juta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Lama kunjungan Wisata	angka	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun (hari)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Manca-negara :								
			Domestik :								
4	PAD sektor pariwisata	Rp	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rupiah)	5.132.462.479	5.989.824.498	5.132.462.481	5.247.456.124	5.132.462.482	6.872.201.736	6.872.201.736	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$	10,5	10,5	11	4,5	10,5	12,5	12,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

## 2. Pertanian





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian atau perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	85,56	85,56	86,67	87,36	87,45	87,94	87,94	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian atau perkebunan}} \times 100\%$	56	56	54	55	55	55	55	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian atau perkebunan}} \times 100\%$	4,5	4,5	5	5	5	5	5	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah Produksi Padi atau bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n}}{\text{Jumlah produksi padi atau bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
5	Cakupan bina kelompok petani	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok petani}} \times 100\%$	16,5	16,51	16,63	16,68	16,67	16,67	16,68	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

## 3. Perdagangan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	348.805,00	252.272,64	200.822,99	250.822,99	240.822,99	270.822,99	270.822,99	Disperindagkop & KUKM
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang atau usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang atau usaha informal}} \times 100\%$	4	4	2	2	3	3	3	Disperindagkop & KUKM

## 4. Perindustrian

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggung
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%		7,5	8,5	8,7	8,9	9,2	9,5	9,5	Disperindagkop & KUKM
2	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun berjalan (n) - Jumlah Industri pada tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Industri pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	1,1	1,15	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	Disperindagkop & KUKM

## 5. Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Produksi perikanan	%	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	92,56	92,56	90,26	80,41	87,53	90,17	90,17	DPPP
2	Konsumsi ikan	%	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	100,54	100,54	100,55	92,15	101,5	102,17	102,17	DPPP
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$	90	91,11	91,5	89,28	92	100,81	92,7	DPPP
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$	80,13	80	84,55	81,04	84,65	90,04	84,8	DPPP
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	$\frac{\text{Jumlah tangkapan ikan}}{80\% \text{ dari tangkapan maksimum lestari}} \times 100\%$	123	125	124	116,07	125	125	126	DPPP
6	Nilai tukar nelayan		$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$	105,88	99,08	106	94,94	107	101,83	107,55	DPPP
7	Persentase Peningkatan Industri Hulu Sektor Kelautan Perikanan	%	$\frac{\text{Industri Hulu yang bertumbuh}}{\text{Total Industri Hulu Target Renstra}} \times 100\%$	63,67	66,67	64,15	57,73	64,45	66,67	65,15	DPPP
8	Persentase Peningkatan Industri Hilir Sektor Kelautan Perikanan	%	$\frac{\text{Industri Hilir yang bertumbuh}}{\text{Total Industri Hilir Target Renstra}} \times 100\%$	1.336,86	167	1338	174	1338	200	1.338,45	DPPP
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	%	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Nelayan Tahun N}}{\text{Target Pendapatan Nelayan}} \times 100\%$	1,27	1,11	1,29	2	1,3	3,3	1,31	DPPP
10	Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	%	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Pembudidayaan Tahun N}}{\text{Target Pendapatan Pembudidaya}} \times 100\%$	1,75	2,01	1,8	4,5	1,88	4,76	1,9	DPPP
11	Persentase Peningkatan Pendapatan Pengolah dan Pemasar Perikanan	%	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Pengolah Pemasar}}{\text{Target Pendapatan Pengolah Pemasar}} \times 100\%$	2,98	4,54	6,52	5,87	2,04	2,04	3,5	DPPP

## IV. Penunjang Urusan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 1. Perencanaan Pembangunan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	$\frac{\text{Jumlah program RKPd tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	$\frac{\text{Jumlah program RKPd tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	$\frac{\text{Kesesuaian program atau kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dokumen RTRW}}{\text{}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda

## 2. Keuangan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
2	Persentase SILPA	%	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	5	5	5	5	5	5	5	BPKPD
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	5	5	5	5	5	5	5	BPKPD
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	$\frac{\text{Jumlah Program Dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Program dalam APBD}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0	0	BPKPD
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	20	20	20	20	20	20	20	BPKPD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	$\frac{\text{Jumlah Belanja bidang urusan kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	10	10	10	10	10	10	10	BPKPD
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	$\frac{\text{Jumlah Belanja Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	53,88	53,88	55,37	55,46	55,98	55,27	55,27	BPKPD
		%	$\frac{\text{Jumlah Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	43,25	43,25	44,16	44,39	44,67	44,85	44,85	BPKPD
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab atau Kota atau Desa}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	4,5	4,5	4	4,5	4,6	4,7	4,7	BPKPD
9	Penetapan APBD		Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKPD

## 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	tahun		20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$	2,54	2,54	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	BKPSDM
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$	82,4	82,4	84,21	84,88	89,45	89,76	89,76	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	angka		28	28	28	28	28	28	28	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	angka		150	150	150	150	150	150	150	BKPSDM
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	angka		3.253	3.253	3427	3591	3698	3785	3.785	BKPSDM

## 4. Penelitian dan Pengembangan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$	40	40	40	45	50	50	50	Bappeda
Penerapan SIDA:											
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$	-	60	80	100	100	100	100	Bappeda

## 5. Pengawasan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100\%$	90	90	90	90	90	90	90	Inspektorat
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	Inspektorat
3	Jumlah temuan BPK	angka		10	10	8	7	6	5	5	Inspektorat

## 6. Sekretariat Dewan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 7. Unsur Kewilyahan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggung
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	80,25	82,45	84,75	86,6	88,35	89,5	89,5	Kecamatan
2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	-	-	-	-	2	9	14	19	Kecamatan

## 7. Urusan pemerintahan umum

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Realisasi		Target Capaian			Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggung
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase penanganan konflik yg terjadi di tengah masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Konflik Yang Terjadi}}{\text{Jumlah Konflik Yang ditangani}} \times$	95	96	98	100	100	100	100	Kesbangpol
2	Indeks Demokrasi	%	-	62,5	64,5	66,45	68,2	69,1	70	79	Kesbangpol
4	Persentase ormas yang aktif	%	-	88,15	89,1	90,25	92,55	93,4	94,15	94,15	Kesbangpol





**BAB IX**

**PENUTUP**



## BAB IX

## PENUTUP

### 9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/ program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Pariaman periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pariaman. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pariaman harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Pariaman yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.



4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Pariaman, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/ Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
8. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Pariaman tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

## 9.2 Pedoman Transisi

Masa jabatan Wali Kota/Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023 akan berakhir pada Oktober 2023, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJMD yang baru belum dibuat. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pariaman, penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025; penyelesaian target kinerja RPJMD 2018-2023 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Pariaman dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Pariaman.





Selanjutnya RKPd Kota Pariaman Tahun 2025 menjadi bagian dari RPJMD Periode berikutnya.

Pariaman, Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN

**GENIUS UMAR**





## **BAPPEDA KOTA PARIAMAN**

Jl. Imam Bonjol No. 44

Kota Pariaman - Sumatera Barat

Indonesia

Telp. +62-751-93552 Fax. +62-751-96757

E-mail: [bappedakotapariaman@gmail.com](mailto:bappedakotapariaman@gmail.com)

www : [bappeda.pariamankota.go.id](http://bappeda.pariamankota.go.id)

www : [pariaman.go.id](http://pariaman.go.id)